

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MIMIKA

LAPORAN AKHIR

ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) KABUPATEN MIMIKA

BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MIMIKA
TAHUN ANGGARAN 2024

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia-Nya sehingga Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kabupaten Mimika tahun 2025-2029 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bappeda Kabupaten Mimika yang telah menerbitkan buku ini. Buku ini menawarkan konsep pembangunan antar daerah secara terintegrasi, sinergis, dan berkelanjutan. Ini merupakan model pembangunan yang dibutuhkan pada era industri 4.0 yang mementingkan sinergi. Kondisi Sistem Inovasi Daerah (SIDA) saat ini di Kabupaten Mimika secara dinamis terus mengalami perubahan perbaikan, menyesuaikan terhadap isu dan permasalahan yang berkembang di masyarakat. Sejalan dengan dinamika perkembangan ekonomi global akhir-akhir ini yang memberikan sinyal akan pentingnya peningkatan daya saing.

Diharapkan dengan adanya buku ini secara bertahap melalui kerangka Sistem Inovasi Daerah, program pembangunan menjadi terkonsep, sinergis, berkelanjutan, serta mampu menciptakan daya saing.

Terimakasih dan selamat kepada tim penyusun buku SIDA Kabupaten Mimika ini. Semoga dokumen *Roadmap* ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Bupati Kabupaten Mimika

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Semesta Alam, atas segala berkat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat menyelesaikan penyusunan Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kabupaten Mimika Tahun 2025-2029.

Penyusunan Roadmap ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Mimika dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, yaitu "Membangun Kabupaten Mimika yang Inovatif, Maju, dan Sejahtera".

Di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat ini, inovasi menjadi kunci utama untuk meningkatkan daya saing daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya strategis untuk membangun sistem inovasi daerah yang kuat dan berkelanjutan.

Roadmap Penguatan SIDA ini disusun berdasarkan analisis mendalam terhadap berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi sistem inovasi di Kabupaten Mimika. Roadmap ini memuat strategi, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun (2025-2029) untuk mencapai tujuan penguatan SIDA.

Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Roadmap Penguatan SIDA ini. Saya berharap Roadmap ini dapat menjadi panduan bagi semua pihak dalam mewujudkan Kabupaten Mimika yang inovatif, maju, dan sejahtera.

Akhir kata, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mimika untuk mendukung dan terlibat aktif dalam pelaksanaan Roadmap Penguatan SIDA ini. Mari kita bersama-sama membangun Kabupaten Mimika yang lebih baik dan gemilang di masa depan.

Salam Sejahtera,

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Sambutan ii
Kata Pengantar iii
Daftar Isi iv
Daftar Gambar viii

BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 2
1.2. Dasar Legal 5
1.3. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Mimika dengan *Roadmap* PSIDA 9
1.4. Sistematika Roadmap 9
1.5. Keterkaitan Dokumen Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah dalam Sistem Perencanaan Pembangunan 10

BAB 2 KONDISI SAAT INI 12
2.1. Aspek Geografi dan Demografi 13
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Batas Wilayah Administrasi 13
2.1.2. Topografi 15
2.1.3. Hidrologi 19
2.1.4. Klimatologi 21
2.1.5. Demografi 23
2.1.6. Penggunaan Lahan 25
2.1.7. Kawasan Bencana 25
2.1.8. Potensi Pengembangan Wilayah 28
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 39
2.2.1. Fokus Kesejahtertaan dan Pemerataan Ekonomi 39
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat 44
2.3. Aspek Pelayanan Umum 47
2.3.1. Fokus Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar 47
2.3.2. Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Non Dasar 57
2.3.3. Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan 67
2.3.4. Fokus Aspek Penunjang 72

BAB 3 TANTANGAN DAN PELUANG PENGUATAN SIDA 124

3.1. Tantangan 127

3.1.1. Tantangan Isu Strategis 127

3.1.2. Tantangan Internasional 130

3.2. Peluang 132

3.2.1. Letak Strategis; 132

3.2.2. Sumberdaya Alam; 132

3.2.3. Investasi berskala Internasional; 133

3.2.4. Pertumbuhan Penduduk yang Tinggi; 133

BAB 4 KONDISI SIDA YANG AKAN DICAPAI 134

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGUATAN SIDA 149

5.1. Strategi Penguatan Sistem Inovasi di Kabupaten Mimika 150

5.2. Arah Kebijakan Penguatan Sistem Inovasi di Kabupaten Mimika 151

5.2.1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 151

5.2.2. Mewujudkan Kualitas Sistem Pelayanan Prima 154

5.2.3. Mewujudkan Tata Kepemerintahan yang Baik 156

5.2.4. Mewujudkan Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam Secara Selektif, Kompetitif dan Berkesinambungan 158

5.2.5. Mewujudkan Penegakan Hukum, Peradilan dan HAM 160

BAB 6 INDIKATOR DAN PROGRAM 162

BAB 7 PROGRAM DAN RENCANA AKSI 180

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Luas Wilayah Kabupaten Mimika Menurut Distrik Tahun 2022 14

Tabel 2. 2. Tinggi Wilayah Kabupaten Mimika Menurut Kecamatan 15

Tabel 2. 3. Kondisi Geologi di Kabupaten Mimika 17

Tabel 2. 4. Jenis Tanah di Kabupaten Mimika 18

Tabel 2. 5. Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Pemanfaatannya di Kabupaten Mimika 20

Tabel 2. 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 23

Tabel 2. 7. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Mimika Tahun 2022 24

Tabel 2. 8. Laju Produk Domestik Bruto Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018-2022 (dalam persen) 39

Tabel 2. 9. Produk Domestik Bruto Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2022 (dalam juta rupiah) 41

Tabel 2. 10. Jumlah Penduduk Usia Kerja berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Mimika, 2020 44

Tabel 2. 11. Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Mimika 47

Tabel 2. 12. Realisasi Kinerja Daerah Bidang Pendidikan 48

Tabel 2. 13. Indikator Realisasi Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Mimika Kabupaten Mimika 54

Tabel 2. 14. Indikator Realisasi Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Mimika 55

Tabel 2. 15. Indikator Realisasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 57

Tabel 2. 16. Indikator Realisasi Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Mimika 58

Tabel 2. 17. Indikator Realisasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika 59

Tabel 2. 18. Indikator Realiasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mimika 60

Tabel 2. 19. Indikator Realisasi Kinerja Dinas Perpuastakaan dan Kearsipan Kabupaten Mimika 66

Tabel 2. 20. Indikator Realisasi Kinerja Dinas tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan Kabupaten Mimika 67

Tabel 2. 21. Indikator Realisasi Kinerja Dinas Pertenakan Dan Kesehatan Kabupaten Mimika 69

Tabel 2. 22. Indikator Realisasi Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika 70
Tabel 2. 23. Indikator Realisasi Kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Mimika 71
Tabel 2. 24. Indikator Realiasi Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mimika 74
Tabel 4. 1. Martrik Inovasi Utama Kabupaten Mimika 137
Tabel 4. 2. Inovasi Pendukung Kabupaten Mimika 147
Tabel 6. 1. Sasaran Dan Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Mimika 164
Tabel 7. 1. Rencana Aksi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Mimika 2024-2029 182

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Keterkaitan Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah 11
Gambar 2. 1. Peta Wilayah Kabupaten Mimika 13
Gambar 2. 2. Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Mimika 16
Gambar 2. 3. Peta Geologi Kabupaten Mimika 18
Gambar 2. 4. Jenis Tanah Kabupaten Mimika 19
Gambar 2. 5. Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Mimika 21
Gambar 2. 6. Rata-rata Suhu Udara Kabupaten Mimika Tahun 2022 21
Gambar 2. 7. Rata-Rata Kelembaban Udara Kabupaten Mimika Tahun 2022 22
Gambar 2. 8. Jumlah Hari Hujan Kabupaten Mimika Tahun 2022 22
Gambar 2. 9. Peta Curah Hujan Kabupaten Mimika 23
Gambar 2. 10. Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Mimika 24
Gambar 2. 11. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Mimika 25
Gambar 2. 12. Peta Rawan Tanah Longsor Kabupaten Mimika 26
Gambar 2. 13. Peta Rawan Banjir Kabupaten Mimika 27
Gambar 2. 14. Peta Rawan Gelombang Pasang Kabupaten Mimika 28
Gambar 2. 15. Peta Rencana Kawasan Pertanian 29
Gambar 2. 16. Peta Rencana Kawasan Perkebunan 34
Gambar 2. 17. Peta Rencana Kawasan Perikanan Tangkap 35
Gambar 2. 18. Peta Rencana Kawasan Pertambangan 37
Gambar 2. 19. Peta Rencana Kawasan Pariwisata 38
Gambar 2. 20. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mimika 2018-2022 42
Gambar 2. 21. Laju Inflasi Kabupaten Mimika 2019-2021 43
Gambar 2. 22. Pengangguran Terbuka Kabupaten Mimika Tahun 2018-2022 44
Gambar 2. 23. Indeks pembangunan manusia Kabupaten Mimika 2018-2022 45
Gambar 2. 24. Indeks Pembangun Manusia per Kabupaten/Kota Provinsi Papua 2022. 46

BAB 1
PENDAHULUAN



Bab.1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Inovasi teknologi merupakan komponen integral dalam transformasi ekonomi yang terjadi selama pembangunan. Ini menandai pergeseran kinerja ekonomi dari sektor primer seperti pertanian dan pertambangan ke sektor sekunder, yaitu industri pengolahan, yang menghasilkan nilai tambah lebih tinggi. Pergeseran ini juga diikuti oleh peningkatan pendapatan dan struktur ekonomi di suatu daerah.

Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dengan mengembangkan basis ekonomi daerah yang berkelanjutan. Ini didukung oleh kemampuan daerah dalam menciptakan daya saing produktif. Oleh karena itu, pengembangan inovasi menjadi sangat penting. Pengembangan inovasi yang berkelanjutan diperlukan untuk membangun keunggulan ekonomi melalui produk dan komoditas yang kompetitif.

Namun, dalam praktiknya, pengembangan inovasi di daerah seringkali kurang terstruktur dan bahkan terabaikan. Hal ini mengakibatkan perkembangan ekonomi daerah yang tidak optimal, dengan banyak potensi yang tidak dikembangkan dan alokasi sumber daya yang tidak tepat sasaran, sehingga pertumbuhan, stabilitas, dan pemerataan ekonomi tidak tercapai. Era keterbukaan ekonomi global dan otonomi daerah saat ini menuntut percepatan daya saing daerah. Tanpa daya saing, daerah akan tertinggal dan menjadi korban kemajuan.

Oleh karena itu, diperlukan desain pengembangan sistem inovasi daerah yang dapat mengarahkan dan mendorong perkembangan inovasi secara cepat dan efektif. Sistem Inovasi Daerah (SIDA) dapat mendukung pengembangan wilayah berdasarkan keunggulan dan kompetensi daerah. SIDA adalah salah satu cara untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

World Economic Forum melakukan penilaian daya saing dari 141 negara berdasarkan tingkat kesejahteraan dan produktivitas. Laporan The Global Competitiveness menunjukkan bahwa daya saing Indonesia pada tahun 2019 berada di peringkat 50 dari 141 negara, turun dari peringkat 45 pada tahun 2018. Ini disebabkan

oleh beberapa faktor, termasuk sumber daya manusia dan pendidikan di Indonesia, yang membutuhkan waktu untuk ditingkatkan.

Dalam Buku Pedoman Penyusunan SIDA disebutkan bahwa sistem inovasi daerah adalah proses yang dilakukan dalam satu sistem untuk mengembangkan inovasi antara institusi pemerintah pusat dan daerah, lembaga penelitian dan pengembangan, dunia usaha, dan masyarakat. Unsur penting dalam pelaksanaan SIDA adalah jaringan kerjasama dari para agen pembangunan untuk mengembangkan daya saing dan kapasitas inovatif melalui kerjasama unsur-unsur SIDA, seperti pengembangan iptek oleh inovator, difusi dan proteksi inovasi, kebijakan pendukung pemerintah, serta penerapan inovasi oleh dunia usaha. Proses pelaksanaan SIDA membutuhkan perumusan dan penyusunan rencana strategis dengan cara penyusunan Roadmap Penguatan SIDA Kabupaten Mimika.

Kabupaten Mimika, sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Papua Tengah, memerlukan percepatan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan tidak tertinggal dari daerah lain. Menyadari hal ini, Kabupaten Mimika menerapkan pendekatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (PSIDA) dalam pembangunan daerah tahun 2021-2026.

SIDA merupakan pendekatan pembangunan daerah yang sistematis, inovatif, holistik, dan berkelanjutan, dengan menekankan kerja kolaboratif antar pemangku kepentingan. SIDA Kabupaten Mimika adalah kesatuan pelaku pembangunan, kelembagaan, interaksi, dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusi inovasi, termasuk teknologi dan praktik terbaik serta proses pembelajaran di Kabupaten Mimika. SIDA di Kabupaten Mimika sangat dipengaruhi oleh dinamika interaksi dengan dunia luar, baik di dalam maupun luar negeri.

Pelaksanaan Penguatan SIDA di Kabupaten Mimika sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah memerlukan penyusunan dokumen Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (RPSIDA) sebagai acuan perencanaan pembangunan daerah yang lebih inovatif dan progresif.

Roadmap atau Peta Rencana adalah alat perencanaan masa depan atau foresight yang dinamis, mampu mengantisipasi dan mengelola perubahan. Foresight melibatkan proses identifikasi masa depan yang diinginkan secara rasional dan menjadikannya dasar perencanaan masa kini untuk mencapainya (BPPT, 2013). Roadmap menjadi alat efektif untuk mengintegrasikan elemen-elemen organisasi secara kolaboratif dalam merencanakan penguatan sistem inovasi secara sistematis.

Kabupaten Mimika, dengan potensi alam yang melimpah dan keberagaman budaya yang kaya, memiliki peluang besar untuk mengembangkan ekonomi lokal melalui inovasi dan pemanfaatan sumber daya secara optimal. Salah satu pendekatan strategis yang diambil untuk mencapai tujuan ini adalah dengan mengembangkan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) yang kuat dan terintegrasi. Roadmap Penguatan SIDA Kabupaten Mimika Tahun 2025-2029 disusun sebagai panduan komprehensif untuk mengarahkan berbagai upaya dalam memperkuat kapasitas inovasi daerah selama lima tahun ke depan.

Penyusunan Roadmap ini didorong oleh kebutuhan untuk menjawab tantangan dan menangkap peluang yang dihadapi oleh Kabupaten Mimika. Dengan perubahan global yang cepat, seperti digitalisasi, perubahan iklim, dan dinamika pasar global, daerah ini harus mampu beradaptasi dan memanfaatkan teknologi serta inovasi untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, SIDA menjadi instrumen penting dalam mendorong kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.

Selama beberapa tahun terakhir, Kabupaten Mimika telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan, serta implementasi inovasi di berbagai sektor. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diatasi, seperti keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan, serta koordinasi antar-pemangku kepentingan yang perlu diperkuat. Roadmap ini diharapkan dapat memberikan arahan yang jelas dan terukur dalam mengatasi tantangan tersebut.

Penguatan SIDA tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas inovasi teknis, tetapi juga untuk membangun ekosistem inovasi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, roadmap ini mencakup strategi untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan, memperkuat jejaring dan kolaborasi, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses inovasi. Fokus utama adalah pada pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dan praktik bisnis berkelanjutan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian alam dan budaya lokal.

Melalui pelaksanaan Roadmap Penguatan SIDA Kabupaten Mimika Tahun 2025-2029, diharapkan tercipta peningkatan kesejahteraan masyarakat, terciptanya lapangan kerja baru, dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, roadmap ini menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih cerah dan berdaya saing tinggi bagi Kabupaten Mimika.

1.2. Dasar Legal

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional (lembaran negara republik indonesia nomor 6042);
16) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
17) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
18) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
19) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

22) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
23) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
24) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
25) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26) Peraturan presiden Republik Indonesia nomor 109 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional (Lembaran Negara tahun 2020 nomor 259);
27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
35) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36) Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
37) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249).
38) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

1.3. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Mimika dengan *Roadmap* PSIDA

Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Mimika bertujuan untuk dapat mempercepat proses pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 melalui terobosan inovatif. Seperti tercantum di dalam dokumen RPJMD 2025-2029, untuk terwujudnya Visi pembangunan **"Terwujudnya Mimika Cerdas, Aman, Damai dan Sejahtera",** maka Pemerintah Kabupaten Mimika telah menetapkan 5 (lima) misi pembangunan**,** yaitu :

1) Membangun Regulasi dan Sumber Daya Manusia yang Cerdas dan Memahami Teknologi Informasi,
2) Menciptakan Mimika yang Aman, Tertib dan Damai,
3) Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Pelayanan Dasar, Ekonomi dan Infrastruktur di Wilayah Pedalaman dan Pesisir,
4) Mewujudkan Pemerintahan yang Dinamis, Bersih, Berwibawa, Akuntabel, Profesional dan Inovatif,
5) Membangun Sentra-Sentra Ekonomi Baru di Wilayah Mimika.

Penguatan sistem inovasi untuk percepatan pencapaian pembangunan Kabupaten Mimika melalui terobosan kreativitas keinovasian dalam meningkatkan daya saing daerah. Upaya-upaya peningkatan daya saing yang dilakukan melalui penguatan sistem inovasi lebih mengedepankan pembangunan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (iptekin) yang dilaksanakan secara bersinergi, berkolaborasi dan berkelanjutan melalui peran aktif seluruh aktor pembangunan di daerah.

Misi keempat dari RPJMD Kabupaten Mimika 2021-2026 menjadi dasar di implementasikannya penguatan SIDA.

1.4. Sistematika Roadmap

Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012, maka sistematika terdiri dari muatan-muatan :

BAB 1 : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang pentingnya roadmap, dasar legal, keterkaitan RPJMD dan roadmap dan sistematika

BAB 2 : Kondisi Sistem Inovasi Saat ini

Bab ini menyajikan profil daerah dan daya saing daerah serta mendeskripsikan kondisi SIDA saat ini

BAB 3 : Tantangan dan Peluang

Bab ini menguraikan isu-isu strategis yang penting dan sangat menentukan dalam Penguatan SIDA di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar; atau sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang

BAB 4 : Kondisi Sistem Inovasi yang diharapkan

Bab ini berisi kondisi SIDA yang akan dicapai dalam beberapa tahun ke depan (misalkan 5 tahun yang akan datang) berdasarkan hasil analisis kondisi SID saat ini serta hasil analisis tantangan dan peluang Penguatan SID

BAB 5 : Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menjelaskan keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta strategi penguatan SIDA digambarkan melalui pilar-pilar atau lima prakarsa strategis. Arah kebijakan Penguatan SIDA adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran penguatan SIDA.

BAB 6 : Indikasi Program Prioritas

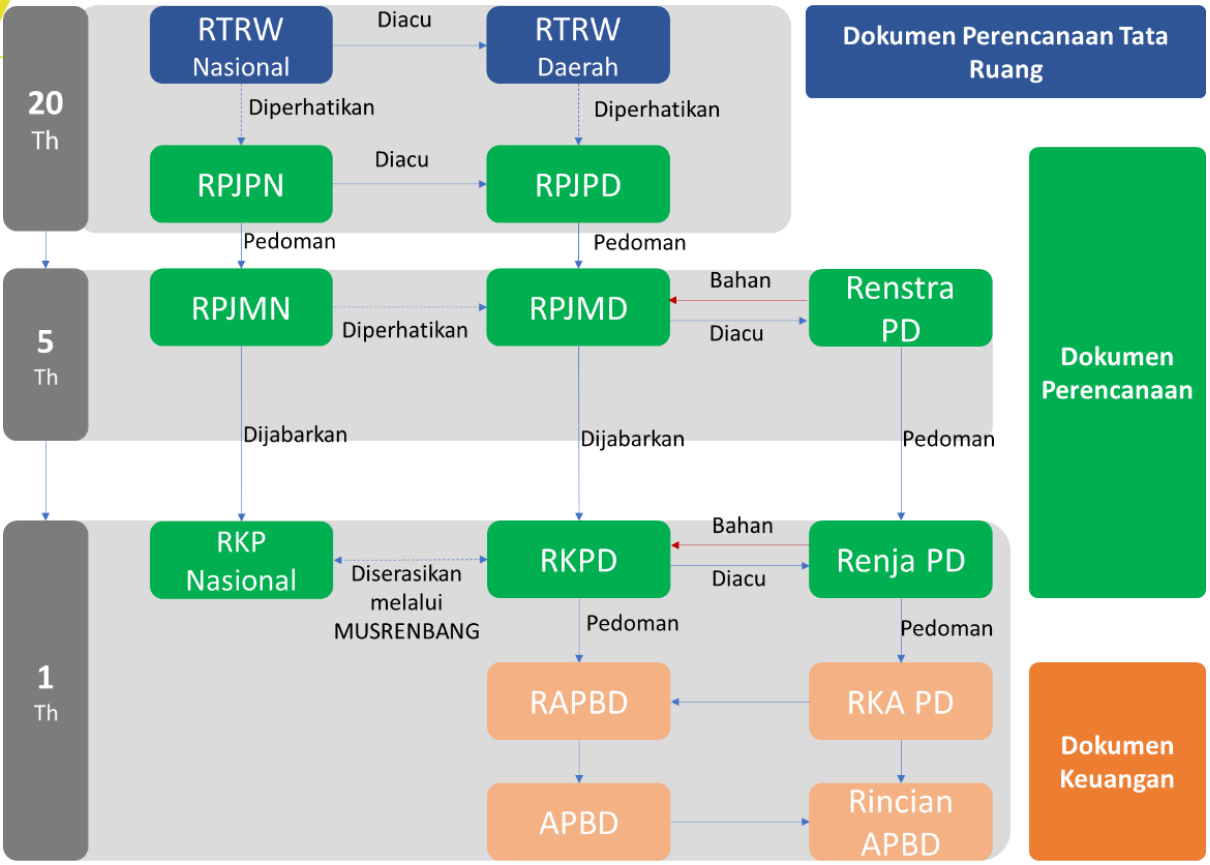
Fokus program prioritas merupakan uraian rinci dari setiap elemen KKI yang menggambarkan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan serta program yang harus dijalankan.

BAB 7 : Rencana Aksi

Rencana aksi Penguatan SID merupakan wujud implementasi strategi Penguatan SID dalam jangka waktu tertentu yang mencakup berbagai arah kebijakan, fokus, program prioritas, dan kegiatan serta dilengkapi dengan indikator kinerja penguatan SID, pendanaan, dan penanggung jawab.

1.5. Keterkaitan Dokumen Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah dalam Sistem Perencanaan Pembangunan

Keterkaitan Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1. 1. Keterkaitan Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah

BAB 2
KONDISI SAAT INI



Bab.2

KONDISI SAAT INI

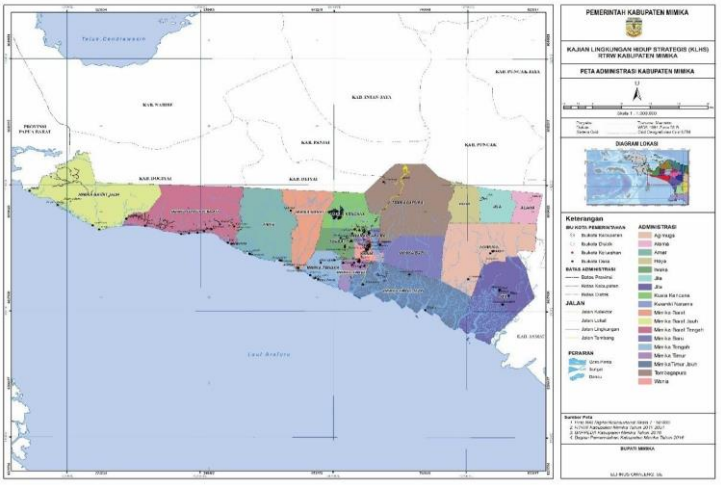
Gambaran umum kondisi daerah ini merupakan penjelasan mengenai gambaran sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang telah dilakukan dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan daerah. Dimana ini menunjukan basis atau pijakan dalam proses perumusan perencanaan pembangunan daerah, baik dari aspek geografi, demografi, serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta interpretasinya.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Mimika merupakan salah satu kabupaten yang berada pada Provinsi Papua Tengah. Secara geografis Kabupaten Mimika yang beribukota di Timika, terletak antara 134°31’ - 138°31’ Bujur Timur dan 4°60’ - 5°18’ Lintang Selatan, dan secara administrasi wilayah Kabupaten Mimika memiliki batasan dengan beberapa kabupaten sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kabupaten Dogiyai, Deiyai, Paniai dan Puncak
- Sebelah selatan : Laut Arafura
- Sebelah timur : Kabupaten Nduga dan Asmat
- Sebelah barat : Provinsi Papua Barat



Gambar 2. 1. Peta Wilayah Kabupaten Mimika

Sumber : RTRW Kabupaten Mimika 2019-2039

Kabupaten Mimika yang beribukota di Timika, terletak antara 134º31'138º31' Bujur Timur dan 4º60'-5º18' Lintang Selatan. Memiliki luas wilayah 21.693,51 km^2 atau 4,75% dari luas wilayah Provinsi Papua Tengah. Kabupaten ini memiliki 18 Distrik. Distrik-distrik tersebut yaitu Mimika Baru, Kwamki Narama, Wania, Iwaka, Kuala Kencana, Mimika Timur, Mimika Timur Jauh, Mimika Tengah, Mimika Barat, Amar, Mimika Barat Tengah, Mimika Barat Jauh, Jita, Agimuga, Jila, Alama, Hoya dan Tembagapura.

Tabel 2. 1. Luas Wilayah Kabupaten Mimika Menurut Distrik Tahun 2022

Distrik	Luas (Km2)	Persentase
1. Agimuga	2.198,56	10,00
2. Amar	1.801,50	8,19
3. Alama	365,92	1,66
4. Hoya	563,78	2,56
5. Iwaka	492,73	2,24
6. Jila	622,83	2,83
7. Jita	1.962,33	8,92
8. Kuala Kencana	860,74	3,91
9. Kwamki Narama	12,86	0,06
10. Mimika Barat	1.187,85	5,40
11. Mimika Barat Jauh	2.485,89	11,30
12. Mimika Barat Tengah	2.292,46	10,42
13. Mimika Baru	1.509,48	6,86
14. Mimika Tengah	526,67	2,39
15. Mimika Timur	290,48	1,32
16. Mimika Timur Jauh	2.035,36	9,25
17. Tembagapura	2.586,86	11,76
18. Wania	197,32	0,90
Mimika	21.693,51	100,00

Sumber: Kabupaten Mimika dalam Angka 2023

Beradasarkan tabel diatas bisa, maka luas wilayah Distrik Kwamki Narama merupakan Distrik dengan luas wilayah terkecil, yaitu 12,89 Km^2 atau 0,06% dari total wilayah Kabupaten Mimika. Sedangkan Distrik dengan luas wilayah terbesar adalah distrik Tembagapura dengan luas wilayah 2.586,86 Km^2 atau 11,76% dari total wilayah Kabupaten Mimika, jauh lebih luas dari Distrik Kwamki Narama.

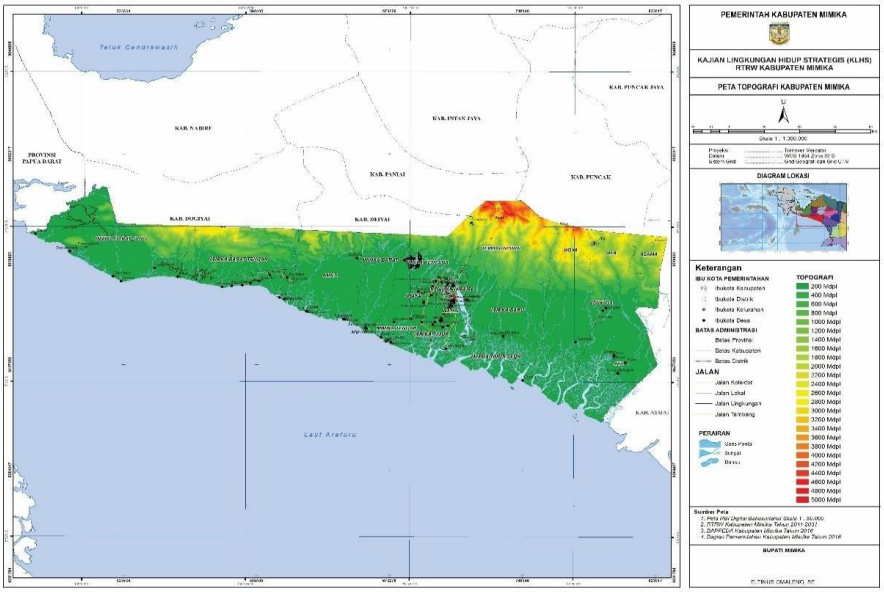
2.1.2. Topografi

Wilayah Kabupaten Mimika memiliki topografi dataran tinggi dan dataran rendah distrik yang bertopografi dataran tinggi adalah Tembagapura, Agimuga, Hoya, Alama dan Jila. Distrik-distrik selain ketiga Distrik tersebut merupakan Distrik-distrik yang memiliki topografi dataran rendah yaitu: Distrik Mimika Baru dan Kuala Kencana, Distrik Tembagapura dan Jila adalah distrik yang tidak memiliki pantai sedangkan Distrik Mimika Barat, Mimika Barat Tengah, Mimika Barat Jauh, Mimika Tengah, Mimika Timur, Mimika Timur Jauh, dan Jita merupakan sebagian wilayah- wilayahnya berbatasan dengan laut, sehingga distrik-distrik ini memiliki pantai.

Tabel 2. 2. Tinggi Wilayah Kabupaten Mimika Menurut Kecamatan

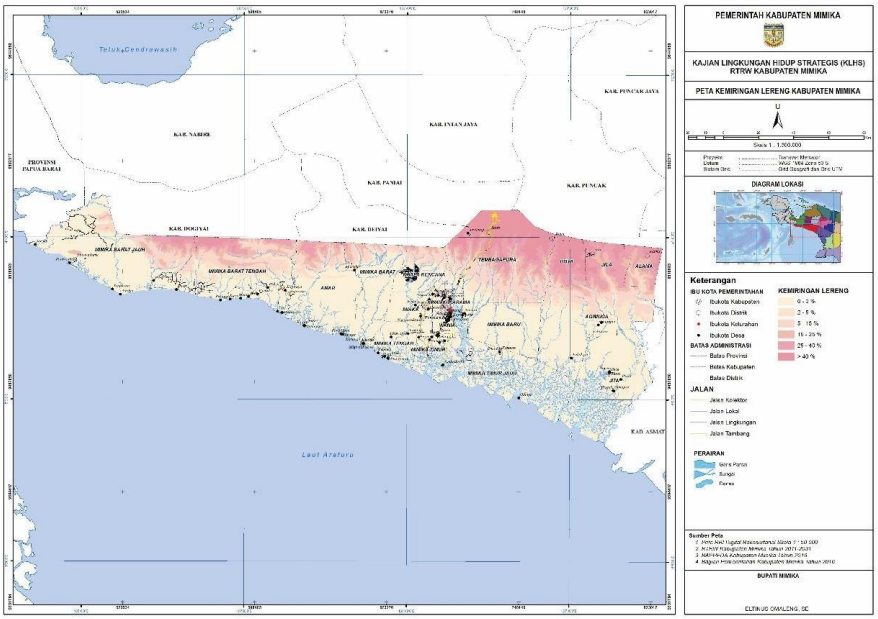
No	Distrik	Ibu Kota Distrik	Tinggi (mdpl)
1	Agimuga	Kiliarma	500
2	Amar	Amar	4
3	Alama	Alama	2800
4	Hoya	Hoya	2800
5	Iwaka	Iwaka	40
6	Jila	Jila	2800
7	Jita	Sempan Timur	400
8	Kuala Kencana	Kuala Kencana	13
9	Kwamki Narama	Kwamki Narama	40
10	Mimika Barat	Kokonao	4
11	Mimika Barat	Jauh Potowayburu	2
12	Mimika Barat	Tengah Kapiraya	2
13	Mimika Baru	Timika	40
14	Mimika Tengah	Arua	5
15	Mimika Timur	Mapuru Jaya	10
16	Mimika Timur	Jauh Ayuka	5
17	Tembagapura	Tembagapura	1900
18	Wania	Kamoro Jaya	30

Sumber: Kabupaten Mimika Dalam Angka 2023



Sumber: RTRW Kabupaten Mimika 2019-2039

Secara topografis Kabupaten Mimika mempunyai wilayah yang cukup bervariasi, terdiri dari daerah laut, dataran rendah, dan daerah pegunungan dengan ketinggian antara 0 sampai 5.000 m di atas permukaan laut (mdpl). Bahkan dari segi morfologi wilayah di Kabupaten Mimika terdapat wilayah dengan kategori bukit terjal. Topografi dataran rendah dan pantai terdapat di beberapa distrik di Kabupaten Mimika dan pada umumnya merupakan endapan sedimen sungai dan pantai berpotensi pengembangan pertanian dan perikanan (tambak). Kemiringan lereng Kabupaten Mimika dominan adalah 0 - 2 % dengan luas 13.799,410 km^2 atau 63,61 % dari luas wilayah dan selebihnya dengan kemiringan 2 % hingga diatas 40 % merupakan topografi bergunung.



Gambar 2. 2. Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Mimika

Sumber: RTRW Kabupaten Mimika 2019-2039

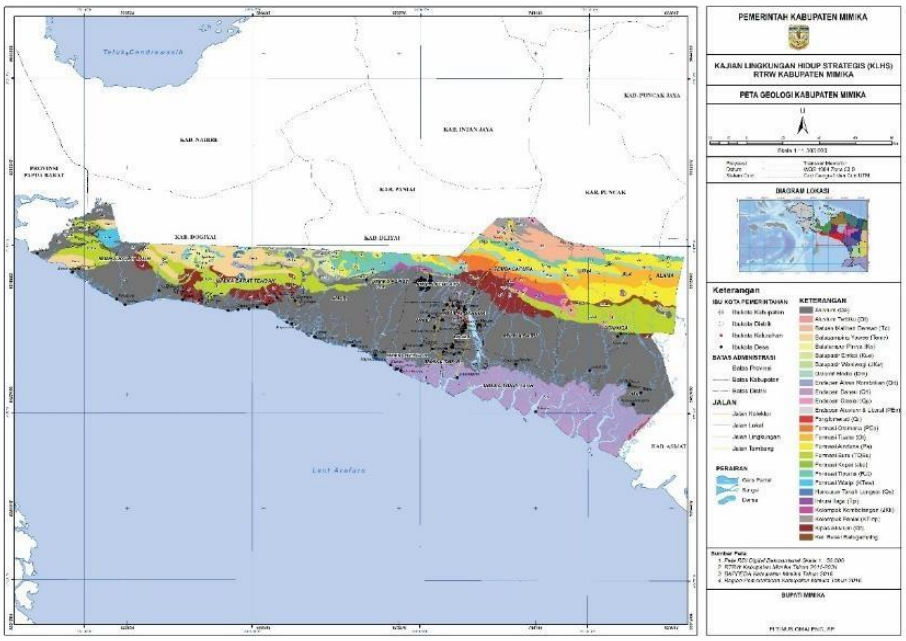
2.1.1 Geologi

Kondisi geologi di Kabupaten Mimika terdapat beberapa jenis batuan. Setidaknya ada 25 jenis batuan yang tersebar di Kabupaten Mimika, namun yang dominan adalah jenis batuan alluvium. Batuan ini tersebar banyak karena melihat keadaan geografis Kabupaten Mimika yang memiliki banyak aliran sungai. Batuan aluvium ini merupakan batuan sedimen yang dibentuk atau diendapkan oleh sungai-sungai. Batuan ini dapat kita lihat di tepi-tepi sungai di muara sungai, misalnya pasir dan tanah di tepi sungai.

Tabel 2. 3. Kondisi Geologi di Kabupaten Mimika

No	Jenis Geologi	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Alluvium Terbiku	10,680.75	0.49%
2	Aluvium	969,920.85	44.71%
3	Batuan Malihan Derewo	57,475.11	2.65%
4	Batugamping Yawee	90,205.23	4.16%
5	Batulumpur Piniya	7,926.44	0.37%
6	Batupasir Emkai	23,398.27	1.08%
7	Batupasir Woniwogi	1,442.20	0.07%
8	Dolomit Modio	35,306.11	1.63%
9	Endapan Aliran Rombakan	2,912.05	0.13%
10	Endapan Aluvium Dan Litoral	635.35	0.03%
11	Endapan Danau	268,358.19	12.37%
12	Endapan Glasial	2,390.05	0.11%
13	Fanglomerad	2,563.04	0.12%
14	Formasi Otomona	33,712.56	1.55%
15	Formasi Tuaba	62,450.02	2.88%
16	Formasi Aiduna	125,605.36	5.79%
17	Formasi Buru	211,499.75	9.75%
18	Formasi Kopai	4,929.48	0.23%
19	Formasi Tipuma	68,819.30	3.17%
20	Formasi Waripi	14,521.20	0.67%
21	Hancuran Tanah Longsor	5,714.64	0.26%
22	Intrusi Ilaga	2,341.86	0.11%
23	Kelompok Besar Batugamping New Guinea, Tidak Terpisahkan	12,113.10	0.56%
24	Kelompok Kembelangan	19,739.28	0.91%
25	Kelompok Paniai	34,140.58	1.57%
26	Kipas Aluvium	99,391.14	4.58%
	Jumlah	**2.169.350,92**	**100%**

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika, 2019-2039



Gambar 2. 3. Peta Geologi Kabupaten Mimika

Jenis tanah di Kabupaten Mimika umumnya merupakan hasil lapukan batuan dasar sebagai *residual soil* dan *transported soil.* Tanah di wilayah ini juga dapat dikelompokkan menjadi tanah Alluvial, dengan tekstur halus hingga kasar dan tanah gambut. Jenis tanah Alluvial tersusun dari Podsolik merah kuning dengan sebaran yang hampir merata di seluruh wilayah kabupaten. Jenis tanah yang mendominasi adalah jenis tanah Litosol dan Tanah Glei dengan luasan masing-masing sekitar 41,7% dan 43,2% dari luas total wilayah. Luasan masing-masing jenis tanah yang ada di wilayah Kabupaten Mimika disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2. 4. Jenis Tanah di Kabupaten Mimika

No.	Jenis Tanah	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Litosol	904.731	41,7
2	Mediteran	77.059	3,6
3	Podsolik	55.081	2,5
4	Renzina	194.979	9,0
5	Tanah Glei	935.602	43,2
Total		**2.167.451**	**100,0**

Sumber: RTRW Kabupaten Mimika 2011 – 2031



Gambar 2. 4. Jenis Tanah Kabupaten Mimika
Sumber: RTRW Kabupaten Mimika 2019-2039

2.1.3. Hidrologi

Secara hidrologi Kabupaten Mimika terdapat ribuan sungai membentang dari potowaiburu - Jita. Terdapat sungai-sungai besar dan kecil, seperti: Sungai Omba, Sungai Aykwa, Sungai Minajerwi, Sungai Otakwa, Sungai Sipu-Sipu, Sungai Pika/Wania, Sungai Mioko, Sungai Iwaka, Sungai Kamora, Sungai Kapiraya, Sungai Umar, Sungai Omba dan ribuan anak sungai yang tersebar yang bermuara ke laut Arafura. Lebar sungai di bagian hilir berkisar antara 100 - 150 m dengan kedalaman pada musim kemarau anatar 3 - 6 m atau 5 - 8 m pada musim hujan. Di wilayah Kabupaten Mimika terdapat 13 (tiga belas) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu: DAS Omba, Aindua, Taparomae - Awaruka, Tuuga, Ukemupuke, Mimika, Kamoro, Wania, Ajkwa, Minajerwi, Mawati, Otakwa, Akimuga dan Cemara dengan total luas keseluruhan 2.167.563 Ha. Potensi sumberdaya air di Kabupaten Mimika selain dipengaruhi oleh kondisi klimatologi wilayah, juga dipengaruhi oleh beberapa aliran sungai yang melintas pada beberapa kawasan. Potensi sumberdaya air tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian dan sumber air baku untuk kebutuhan lainnya. Potensi air tanah dapat dimanfaatkan sebagai air baku untuk berbagai kepentingan kegiatan masyarakat, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun untuk menunjang kegiatan ekonomi mayarakat. Potensi air tanah yang terdapat di Kabupaten Mimika ditunjang oleh keberadaan aliran sungai. Selain itu potensi air di Kabupaten Mimika juga dipengaruhi oleh beberapa aliran sungai yang sebagian besar

dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan sumber air bersih.

Tabel 2. 5. Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Pemanfaatannya di Kabupaten Mimika

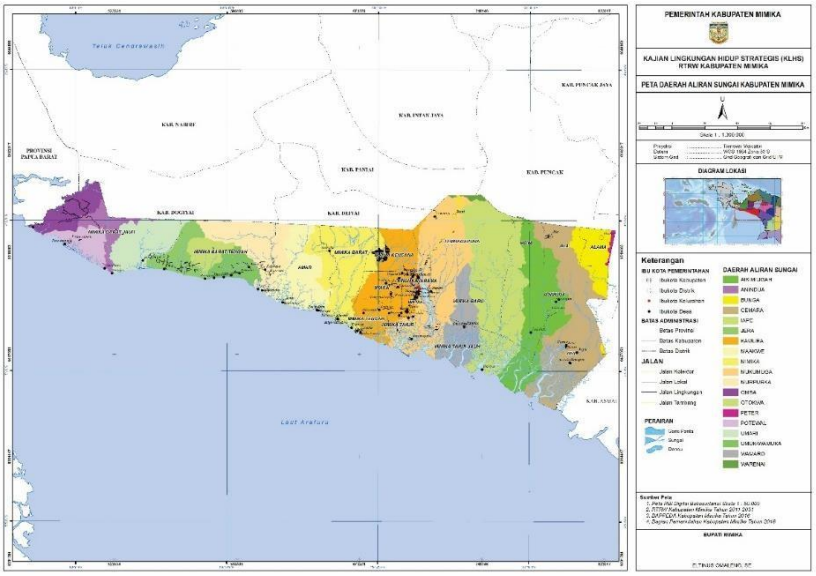
No	Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas (Ha)	Fungsi/ Manfaat	Daerah yg Dilalui
1	Aikimiugah	193.604	Perikanan	Distrik Agimuga, Hoya, Jila, Jita dan Mimika Timur Jauh
2	Anindua	41.793	Perikanan	Distrik Mimika Barat Jauh
3	Bunga	69.057	Perikanan	Distrik Agimuga, Alama, Jila dan Jita
4	Cemara	257.432	Perikanan	Distrik Agimuga, Hoya, Jila dan Jita
5	Iape	38.839	Perikanan	Distrik Mimika Barat Tengah
6	Jera	53.048	Perikanan	Distrik Mimika Barat Jauh dan Mimika Barat Tengah
7	Kamura	189.911	Perikanan	Distrik Iwaka, Kuala Kencana, Kwamki Narama, Mimika Barat, Mimika Baru, Mimika Tengah, Mimika Timur, Wania dan Tembagapura
8	Maakwe	115.735	Perikanan	Distrik Amar dan Mimika Barat
9	Mimika	176.594	Perikanan	Distrik Amar, Iwaka, Kuala Kencana, Mimika Barat dan Mimika Tengah
10	Mukumuga	252.814	Perikanan	Distrik Kuala Kencana, Kwamki Narama, Mimika Baru, Mimika Tengah, Mimika Timur, Mimika Timur Jauh, Tembagapura dan Wania
11	Murpurka	119.769	Perikanan	Distrik Amar dan Mimika Barat Tengah
12	Omba	64.299	Perikanan	Distrik Mimika Barat Jauh
13	Otokwa	306.756	Perikanan	Distrik Agimuga, Hoya, Mimika Baru, Mimika Timur Jauh, dan Tembagapura
14	Peter	3.504	Perikanan	Distrik Alama
15	Potewal	47.640	Perikanan	Distrik Mimika Barat Jauh
16	Umari	98.929	Perikanan	Distri Mimika Barat Jauh dan Mimika Barat Tengah
17	Umuk/Wamuka	43.316	Perikanan	Distrik Mimika Barat Tengah
18	Wamaro	90.244	Perikanan	Distrik Mimika Baru, Mimika Timur Jauh dan Tembagapura
19	Warenai	4.278	Perikanan	Distrik Tembagapura

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup RPJMD Kabupaten Mimika

Interaksi antara air tawar dan air laut, sedimen dan nutrien yang terbawa oleh air ini adalah salah satu faktor yang menentukan distribusi dan komposisi hutan mangrove dan hutan rawa. Spesies hutan mangrove dan hutan rawa pada umumnya memiliki toleransi terhadap salinitas yang terbatas dan tidak tahan lama terhadap genangan air. Beberapa spesies mangrove dapat tahan pada salinitas yang tinggi dan tahan genangan air selama 40% dari waktunya.

Faktor yang paling penting dalam mengelola hutan mangrove dan hutan rawa Mimika adalah menjaga pola hidrologi yang sudah ada. Infrastruktur, pertanian yang intensif dan bentuk pembangunan lainnya seringkali mengubah hidrologi, baik dengan menghambat drainase seperti membangun jalan, tembok pantai dan infrastruktur lainnya

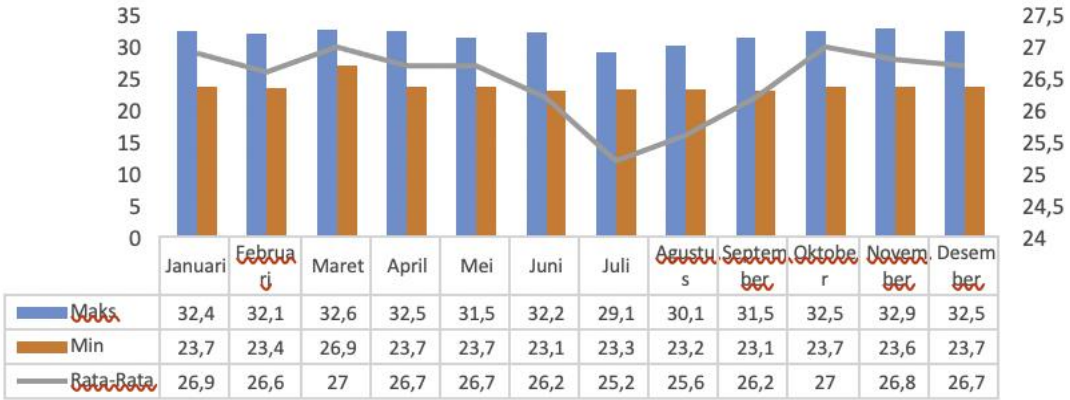
yang mengurangi porositas maupun meningkatkan arus aliran air sehingga menyebabkan banjir dan terbawa sedimen endapan dan partikel kecil.



Gambar 2. 5. Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Mimika
Sumber: RTRW Kabupaten Mimika 2019-2039

2.1.4. Klimatologi

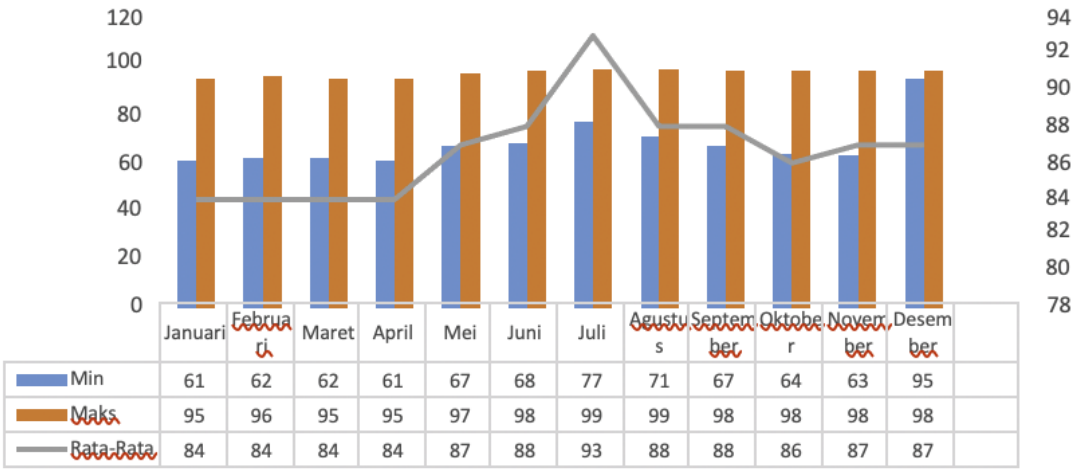
Rata-rata suhu udara minimum di wilayah Mimika selama tahun 2022 sebesar 23,75 ^{0}C dan maksimum 31,82^{0}C. Sedangkan rata-rata tekanan udara di wilayah Mimika selama tahun 2022 sebesar 1.009,96 Mbs.



	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Maks	32,4	32,1	32,6	32,5	31,5	32,2	29,1	30,1	31,5	32,5	32,9	32,5
Min	23,7	23,4	26,9	23,7	23,7	23,1	23,3	23,2	23,1	23,7	23,6	23,7
Rata-Rata	26,9	26,6	27	26,7	26,7	26,2	25,2	25,6	26,2	27	26,8	26,7

Gambar 2. 6. Rata-rata Suhu Udara Kabupaten Mimika Tahun 2022
Sumber: Kabupaten Mimika Dalam Angka 2023

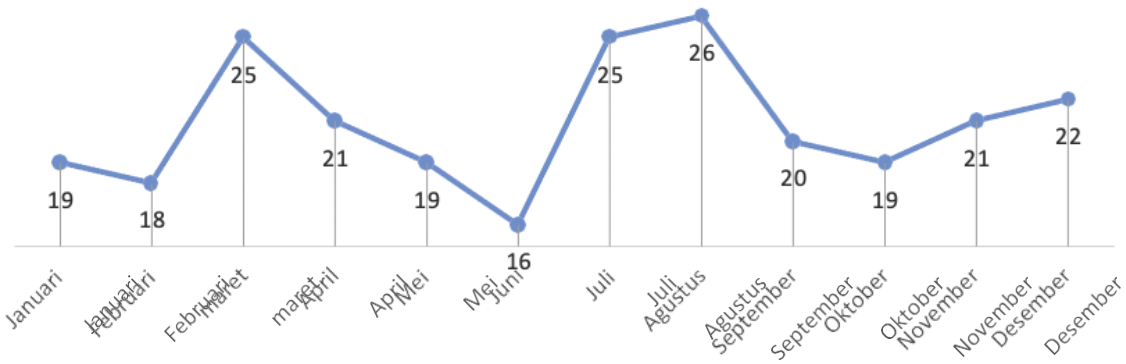
Kelembaban udara di Kabupaten Mimika rata-rata sebesar 86,66% dengan kelembaban udara tertinggi pada bulan Juli. Selanjutnya curah hujan tertinggi di Kabupaten Mimika tahun 2022 terjadi pada bulan Agustus yaitu sebesar 887,8 mm dan terendah pada bulan Oktober sebesar 194,8 mm.



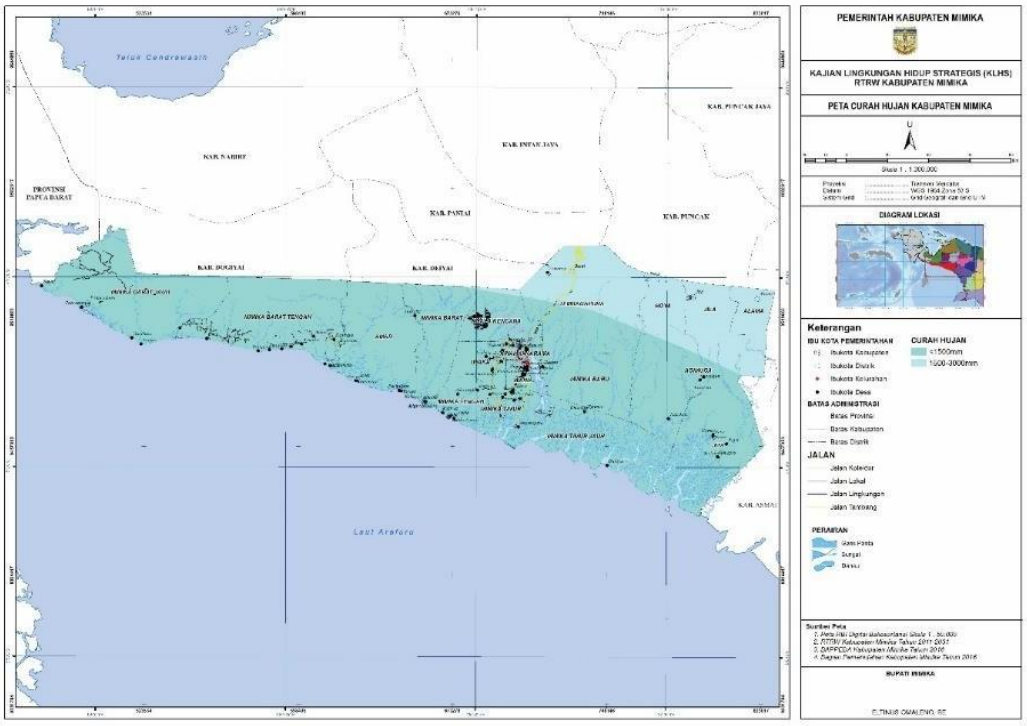
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Min	61	62	62	61	67	68	77	71	67	64	63	95
Maks	95	96	95	95	97	98	99	99	98	98	98	98
Rata-Rata	84	84	84	84	87	88	93	88	88	86	87	87

Gambar 2. 7. Rata-Rata Kelembaban Udara Kabupaten Mimika Tahun 2022
Sumber: Kabupaten Mimika Dalam Angka 2023

Jumlah hari hujan di Kabupaten Mimika menurut pantauan Stasiun BMG Timika mempunyai jarak (rentang) antara 19 – 26 hari pada 2022. Jumlah hari hujan sebesar 19 hari terjadi pada bulan Januari , sedangkan jumlah hari hujan 26 hari terjadi pada bulan Agustus 2022. Hampir setiap hari di Timika turun hujan, hal ini dapat terlihat dari rentang waktu hari hujan yang berada pada kisaran 19 – 26 hari hujan.



Gambar 2. 8. Jumlah Hari Hujan Kabupaten Mimika Tahun 2022
Sumber: Kabupaten Mimika Dalam Angka 2023



Gambar 2. 9. Peta Curah Hujan Kabupaten Mimika

Sumber: RTRW Kabupaten Mimika 2019-2039

2.1.5. Demografi

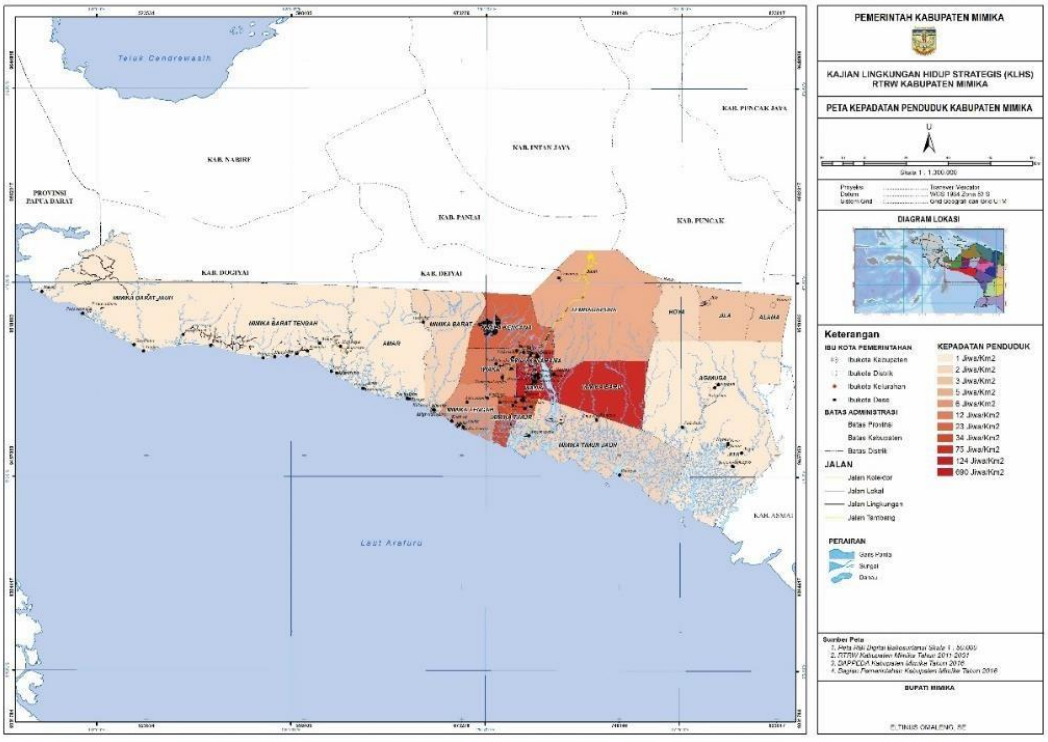
Tabel 2. 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Total
0-4	21.115	20.365	41.480
5-9	19.168	18.887	38.055
10-14	13.390	12.004	25.394
15-19	11.064	8.829	19.893
20-24	13.232	10.859	24.091
25-29	15.927	12.553	28.480
30-34	17.057	14.008	31.065
35-39	15.770	12.343	28.113
40-44	13.624	10.663	24.287
45-49	11.959	8.206	20.165
50-54	7.769	5.537	13.306
55-59	5.323	3.700	9.023
60-64	2.967	2.335	5.302
65-69	2.044	1.500	3.544
70-74	1.131	966	2.097
75+	1.105	895	2.000

Dengan Luas Wilayah 21.695 Km2, kepadatan penduduk di kabupaten Mimika hanya 9-10 jiwa per km2. Kepadatan tertinggi terjadi di Distrik Kwamki Narama, yakni 1084,06 jiwa per km2. Sedangkan kepadatan terendah terjadi di Distrik Agimuga, yakni hanya 0,40 jiwa per km2.

Tabel 2. 7. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Mimika Tahun 2022

Kecamatan	Penduduk		Luas (KM2)	Kepadatan Penduduk
	Jiwa	%		
Mimika Baru	144.893	45,81	1.509,48	95,99
Agimura	888	0,28	2.198,56	0,40
Mimika Timur	10.320	3,26	290,48	35,53
Mimika Barat	3.007	0,96	1.187,85	2,53
Jita	1.547	0,49	1.962,33	0,79
Jila	1.779	0,56	622,83	2,86
Mimika Timur Jauh	3.569	1,13	1.035,36	1,75
Mimika Tengah	4.319	1,37	526,67	8,20
Kuala Kencana	28.159	8,90	860,74	32,71
Tembagapura	23.341	7,38	2.586,86	9,02
Mimika Barat Jauh	2.058	0,65	2.485,87	0,83
Mimika Barat Tengah	2.352	0,74	2.292,46	1,03
Kwamki Narama	13.491	4,41	12,86	1084,06
Hoya	1.112	0,35	563,78	1,97
Iwaka	11.133	3,52	492,73	22,59
Wania	59.721	18,88	197,32	302,66
Amar	2.083	0,66	1.801,50	5,69
Alama	2.073	0,66	365,92	1,15
Kabupaten Mimika	**316.295**	**100,00**	**21.694,00**	**14.58**

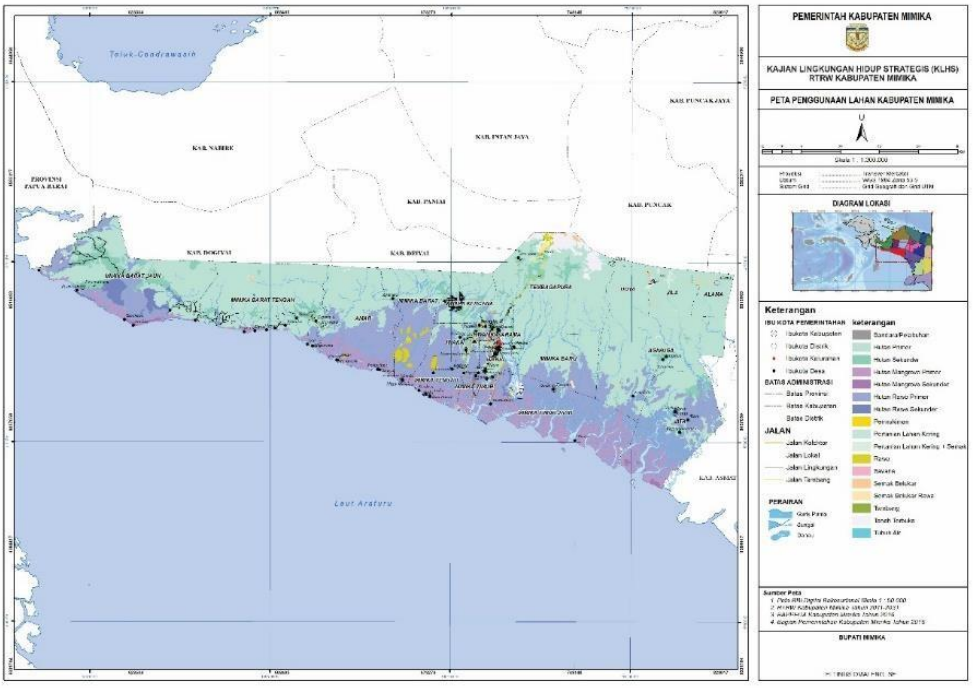


Gambar 2. 10. Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Mimika

Sumber: RTRW Kabupaten Mimika 2019-2039

2.1.6. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan juga merupakan pemanfaatan lahan dan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam penyelenggaraan kehidupannya. Pengertian penggunaan lahan biasanya digunakan untuk mengacu pemanfaatan masa kini (present or current land use). Tutupan lahan yang menggambarkan konstrukasi vegetasi dan buatan yang menutup permukaan lahan. Konstruksi tersebut seluruhnya tampak secara langsung dari citra penginderaan jauh. Tiga kelas data secara umum yang tercakup dalam penutup lahan; struktur fisik yang dibangun oleh manusia, fenomena biotik seperti vegetasi alami, tanah pertanian dan kehidupan binatang, dan tipe pembangunan. Secara umum penggunaan lahan di Kabupaten Mimika didominasi oleh hutan primer dengan luas 12.076,76 Km2 dan hutan sekunder 1.114,47 Km2. Pengembangan kawasan perkotaan di Kabupaten Mimika dengan adanya usulan reklamasi yang memanfaatkan lahan hutan mangrove dengan luas 8.377,64 Ha. Adapun penggunaan lahan di Kabupaten Mimika sesuai dengan peruntukannya yakni terdiri dari perumahan dan kawasan permukiman, bangunan umum, rawa, kebun, tambang, hutan, pertanian dan lain-lain.



Gambar 2. 11. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Mimika

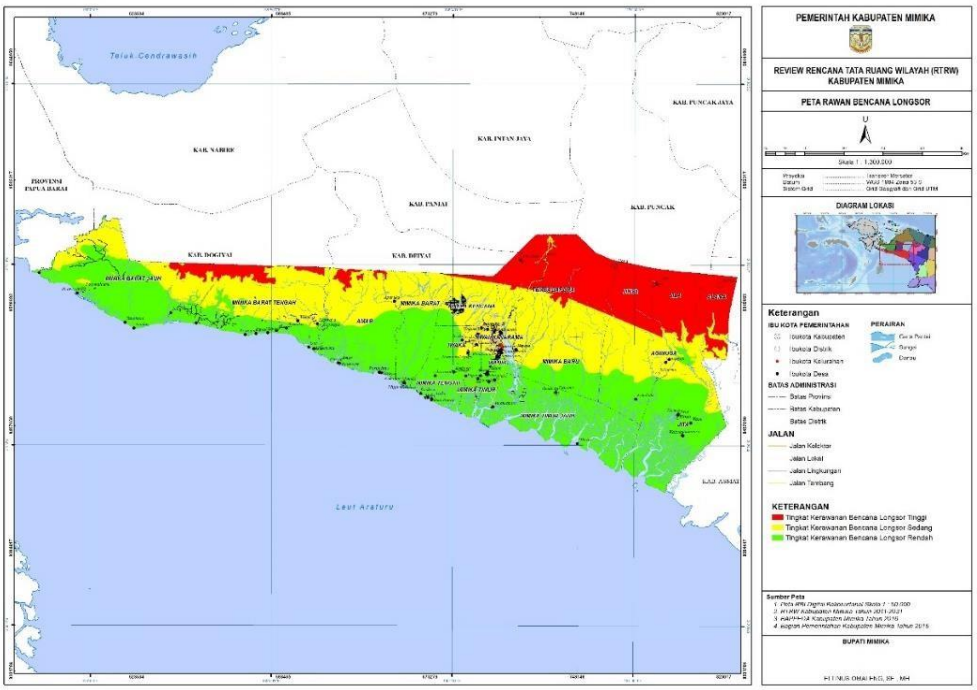
Sumber: RTRW Kabupaten Mimika 2019-2039

2.1.7. Kawasan Bencana

A. Bencana Alam Tanah Longsor

Potensi bencana longsor di Kabupaten Mimika yang diakibatkan oleh kondisi alam yaitu intensitas curah hujan, kemiringan lereng dan jenis tanah dengan

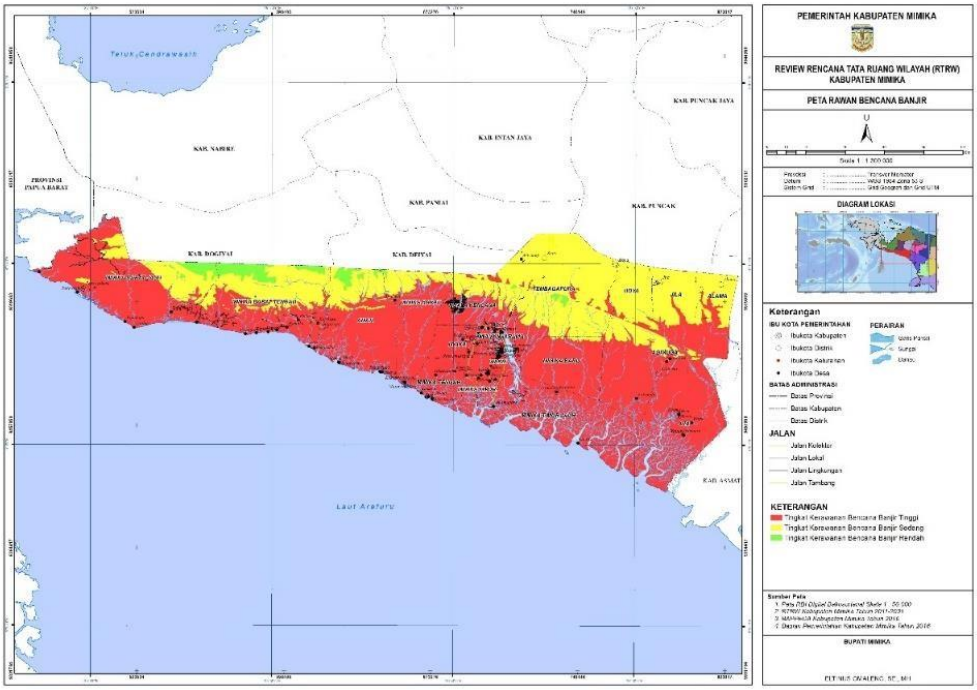
klasifikasi tingkat kerawanan bencana longsor, yaitu kawasan dengan potensi tinggi untuk mengalami gerakan tanah dan cukup padat permukimannya, atau terpadat konstruksi bangunan sangat penting, pada lokasi seperti ini sering mengalami gerakan tanah (longsoran), terutama pada musim hujan atau saat gempa bumi terjadi. Kawasan tingkat kerwanan sedang adalah kawasan yang tinggi untuk mengalami gerakan tanah, namun tidak ada permukiman. Kawsan dengan tingkat kerawanan rendah adalah potensi gerakan tanah yang tinggi, namun tidak ada resiko terjidanya korban jiwa terhadap manusia dan bangunan.



Gambar 2. 12. Peta Rawan Tanah Longsor Kabupaten Mimika
Sumber: RTRW Kabupaten Mimika 2019-2039

B. Bencana Alam Banjir

Beberapa wilayah di Kabupaten Mimika merupakan daerah rawan bencana banjir. Banjir sebagai fenomena alam terkait dengan manusia terjadi sebagai akibat aktualisasi beberapa faktor yaitu : hujan, kondisi sungai, kondisi daerah huIu, kondisi daerah budidaya dem pasang surut air laut. Potensi terjadinya ancaman bencana banjir dan tanah longsor saat ini disebabkan keadaan badan sungai rusak, kerusakan daerah tangkapan air, pelanggaran tata-ruang wilayah, perencanaan pembangunan kurang terpadu, dan disiplin masyarakat yang rendah. Selain faktor-faktor tersebut di atas, banjir juga kerap terjadi karena sifat alami wilayahnya, seperti bentuk dan luas daerah aliran sungai yang terpadu dengan curah hujan yang tinggi.

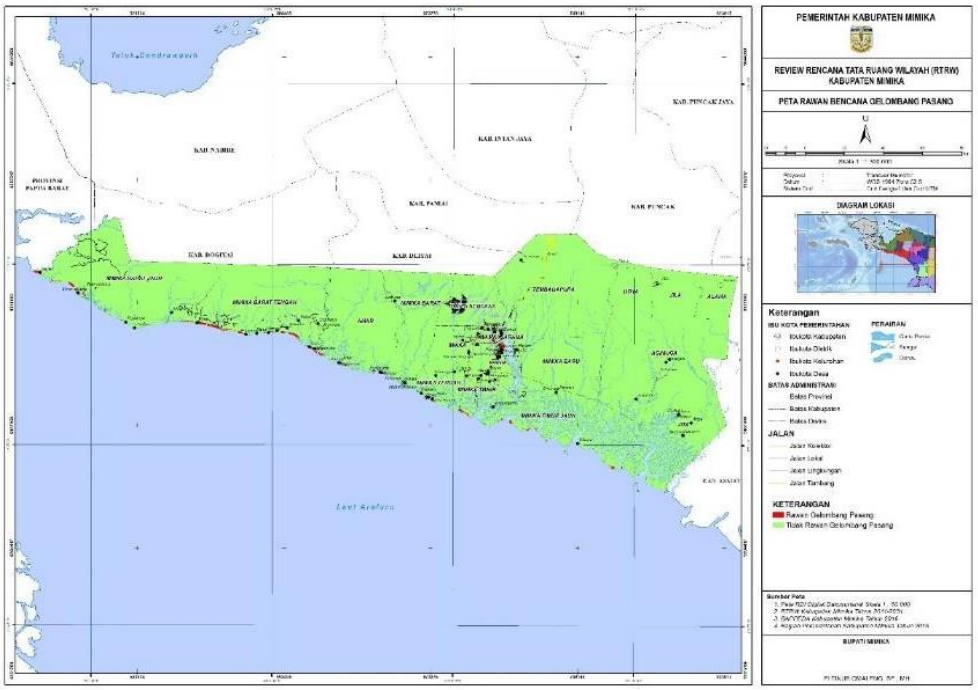


Gambar 2. 13. Peta Rawan Banjir Kabupaten Mimika

Sumber: RTRW Kabupaten Mimika 2019-2039

C. Bencana Rawan Gelombang Pasang

Berdasarkan hasil analisis gelombang pasang deliniasi daerah gelombang pasang menggunakan jarak terjauh yakni daerah terpengaruh gelombang, dengan jarak yang digunakan adalah 1 km dari garis pantai. Keberadaan mangrove mempengaruhi besarnya potensi resiko terhadap bahaya gelombang pasang. Dengan adanya keberadaan hutan mangrove primer maupun sekunder dapat meminimalisir gelombang pasang yang terjadi. Kabupaten Mimika mempunyai gelombang pasang tertinggi yaitu 3 – 4 meter dari garis pantai dan masuk dalam tingkat rawan bagi masyarakat yang bermukim pada wilayah pesisir. Namun hutan mangrove primer dan sekunder menjadi salah satu bagian yang mampu mengurangi tinggi gelombang pasang, sehingga kawasan hutan mangrove memiliki potensi untuk dilindungi karena mampu mengurangi tingginya gelombang pasang.



Gambar 2. 14. Peta Rawan Gelombang Pasang Kabupaten Mimika

Sumber: RTRW Kabupaten Mimika 2019-2039

2.1.8. Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Mimika memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya. Berdasarkan fungsinya, kawasan budidaya dikelompokkan ke dalam kawasan hutan produksi, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, dan peruntukan pertahanan dan keamanan**.**

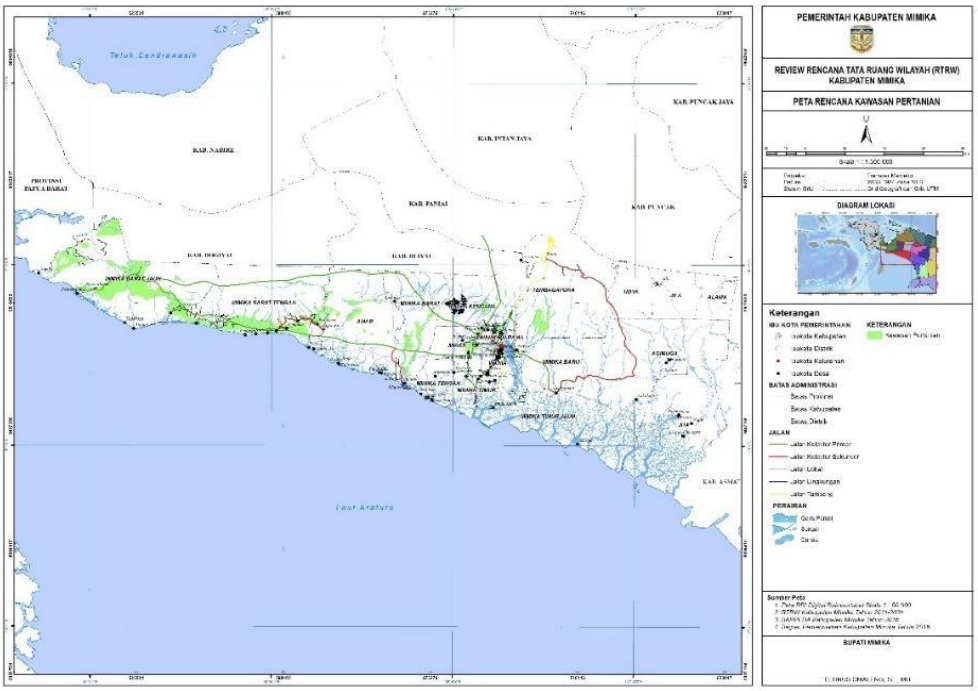
A. Kawasan Pertanian

Metoda analisis kesesuaian lahan pertanian menggunakan kerangka sistim Food and Agriculture Organization (FAO, 1976) yang dikembangkan oleh Lembaga Penelitian Tanah (LPT, 1982). Parameter yang dinilai meliputi kedalaman efektif tanah, tekstur tanah, permeabilitas, kesuburan, reaksi tanah, kemiringan lahan (slope), relief mikro, drainase, ketersediaan air, erosi dan banjir. Pengumpulan data parameter tersebut diperoleh dari data sekunder yang sudah dikompilasi pada saat penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang. Dari data yang terhimpun dikelompokkan sesuai dengan klasifikasi dalam Kriteria Kesesuaian Lahan Pertanian, kemudian ditumpangtindihkan (*superimpose*) antara klasifikasi parameter tersebut. Hasil akhir diperoleh Unit Kesesuaian Lahan dan dinilai secara kualitatif. Untuk memudahkan digunakan notasi huruf dan angka sebagai berikut:

a. S1 (sangat sesuai) : lahan tidak mempunyai pembatas yang serius untuk menerapkan pengelolaan yang diberikan, atau hanya mempunyai pembatas yang

tidak berarti.

b. S2 (cukup sesuai): lahan mempunyai pembatas-pembatas agak serius untuk mempertahankan tingkat pengelolaan yang harus diterapkan. Pembatas ini akan mengurangi produksi dan keuntungan dan meningkatkan masukan yang diperlukan.
c. S3 (sesuai marginal): lahan mempunyai pembatas-pembatas serius untuk mempertahankan tingkat pengelolaan yang harus diterapkan. Pembatas ini akan mengurangi produksi dan keuntungan atau lebih meningkatkan masukan yang diperlukan.
d. N1 (tidak sesuai pada saat ini) : lahan mempunyai pembatas yang lebih serius, tetapi masih mempunyai kemungkinan untuk diatasi hanya tidak dapat diperbaiki dengan tingkat pengelolaan dengan modal normal.
e. N2 (tidak sesuai permanen) : lahan mempunyai pembatas permanen sehingga mencegah segala kemungkinan penggunaan berkelangsungan pada lahan tersebut.



Gambar 2. 15. Peta Rencana Kawasan Pertanian
Sumber: RTRW Kabupaten Mimika 2019 – 2039

B. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan

Kawasan pertanian tanaman pangan dibedakan atas pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Kawasan tanaman pangan lahan basah merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi pertanian tanaman pangan lahan basah dimana

pengairannya diperoleh secara alamiah maupun secara teknis. Kriteria penentuan kawasan yang sesuai untuk tanaman pangan lahan basah adalah yang mempunyai sistem dan atau potensi pengembangan pengairan yang meliputi:

1) Ketinggian < 1.000 meter;
2) Kelerengan < 40%;
3) Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm; dan
4) Curah hujan antara 1500 – 4000 mm pertahun.

Kriteria kawasan peruntukan pertanian lahan basah meliputi:

1) Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk pertanian lahan basah;
2) Secara ruang apabila digunakan untuk kegiatan pertanian lahan basah mampu memberikan manfaat:
    a. Meningkatkan produksi pangan dan pendayagunaan investasi;
    b. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
        - Meningkatkan fungsi lindung;
        - Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam untuk pertanian pangan;
            - Meningkatkan pendapatan masyarakat;
            - Meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
            - Menciptakan kesempatan kerja;
            - Meningkatkan ekspor; dan
            - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3) Sesuai untuk pengembangan pertanian. Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan kering untuk tanaman padi ladang dan palawija. Kriteria kawasan tanaman pangan lahan kering adalah kawasan yang tidak mempunyai sistem atau potensi pengembangan pengairan dan memiliki :
    a. Ketinggian < 1000 m dan Kelerengan < 40%;
    b. Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm; dan
    c. Curah hujan antara 1500 – 4000 mm pertahun.

Adapun kriteria kawasan peruntukan pertanian lahan kering meliputi:

1) Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk pertanian lahan kering.
2) Secara ruang apabila digunakan untuk kegiatan pertanian lahan kering mampu

memberikan manfaat :

a. Meningkatkan produksi pangan dan pendayagunaan investasi;
b. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
c. Meningkatkan fungsi lindung;
d. Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam untuk pertanian pangan;
e. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
f. Meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
g. Menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan ekspor; dan
h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kriteria di atas, maka rencana pengembangan pertanian tanaman pangan terdapat di Kabupaten Mimika terdapat di Distrik Mimika Baru, Distrik Kuala Kencana, Distrik Mimika Barat Jauh, Distrik Mimika Barat, Distrik Amar, Distrik Iwaka, Distrik Wania, Distrik Tembagapura, Distrik Mimika Barat Tengah, Distrik Mimika Tengah dan Distrik Mimika Timur Jauh dengan luas 20.375,62 Ha.

C. Kawasan Pertanian Hortikultura

Pengembangan kawasan pertanian hortikultura memiliki kriteria yang sama dengan pengembangan kawasan tanaman pangan lahan kering. Adapun rencana kawasan pengembangan pertanian holtikultura di Kabupaten Mimika yang terdapat di Distrik Mimika Baru, Distrik Kuala Kencana, Distrik Mimika Barat Jauh, Distrik Mimika Barat, Distrik Amar, Distrik Iwaka, Distrik Wania, Distrik Tembagapura, Distrik Mimika Barat Tengah, Distrik Mimika Tengah dan Distrik Mimika Timur Jauh.

D. Kawasan Perkebunan

Berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 638/KPTS/Um/8/1981 kriteria fisik wilayah untuk penentuan lokasi tanaman tahunan adalah lokasi yang mempunyai skor/nilai untuk faktor kelerengan, jenis tanah, dan curah hujan adalah 125 sampai 175.

Kriteria kesesuaian lahan adalah, bahwa suatu wilayah pada kawasan penyangga dinyatakan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai areal tanaman tahunan jika memenuhi syarat kesesuaian lahan untuk tanaman tahun yang bersangkutan. Syarat kesesuaian yang dimaksud adalah yang mempunyai nilai

kesesuaian lahan dari sangat sesuai sampai marginal untuk tanaman tahunan. Dalam penetapan pilihan komoditi tanaman tahunan selain pertimbangan kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air, juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi.

Kriteria kesesuaian lahan bagi pengembangan tanaman keras/tahunan/perkebunan sangat beragam sesuai dengan jenis komoditinya. Pada dasarnya berbagai jenis tanaman keras dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian 0 –2.500 m di atas permukaan laut.

Kriteria kawasan peruntukan perkebunan meliputi:

a. Kawasan perkebunan (skor <125) / yang berada di luar kawasan lindung
b. Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan perkebunan
c. Secara ruang apabila digunakan untuk kegiatan perkebunan mampu memberikan manfaat:
    1) Meningkatkan produksi pangan dan pendayagunaan investasi;
    2) Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
    3) Meningkatkan fungsi lindung;
    4) Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam untuk pertanian pangan;
    5) Meningkatkan pendapatan masyarakat;
    6) Meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
    7) Menciptakan kesempatan kerja;
    8) Meningkatkan ekspor;
    9) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kawasan perkebunan ini dipergunakan untuk jangka panjang dan jangka pendek. Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan pada:

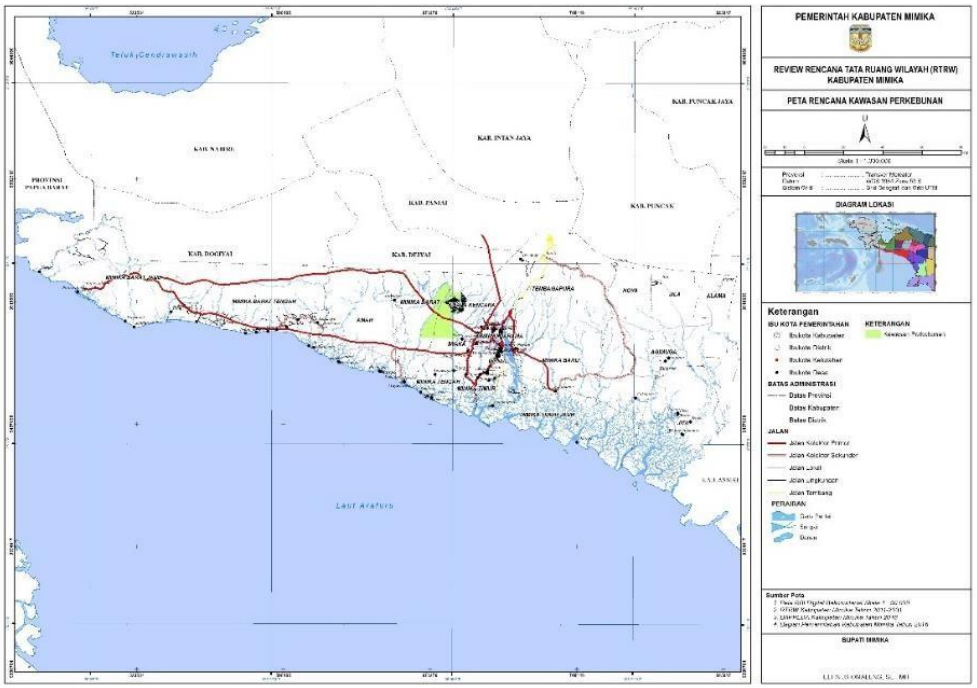
a. Area lahan tegalan, semak/belukar atau alang-alang dengan kemiringan lahan 15 - 40% sehingga dapat berfungsi sebagai penyangga kawasan lindung;
b. eningkatkan perekonomian penduduk disekitar kawasan penyangga hutan lindung melalui pengembangan agroforestry yang sudah ada dengan jenis komoditas yang komersial dan memiliki keterkaitan dengan industri serta dapat memantapkan fungsi kawasan lindung;
c. Meningkatkan kualitas dan produktivitas perkebunan dalam mendukung pertumbuhan agroindustri.

d. Pembukaan lahan baru untuk perkebunan pada kawasan yang mempunyai kelerengan lebih dari 25% perlu dilakukan dengan land covering untuk mencegah erosi. Sedangkan pembukaan lahan perkebunan pada daerah rawa perlu dibuat drainase untuk mengeringkannya dan tetap menyisakan sebagian wilayahnya tetap berupa rawa untuk mencegah terjadinya penurunan permukaan tanah;
e. Pengawasan dan pengendalian pembukaan lahan perkebunan baru sehingga tidak terjadi overlap dengan kegiatan lainnya;
f. Perbaikan sistem pemasaran hasil produksi perkebunan.
g. Pembinaan dan penyuluhan terpadu terutama untuk perkebunan rakyat dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang untuk memudahkan pengelolaan dan penanganan pasca panen.

Arahan kawasan pengembangan perkebunan di Kabupaten Mimika terdiri atas:

a. Kawasan peruntukan perkebunan kelapa sawit, terdapat di Distrik Mimika Barat Jauh, Distrik Iwaka, Distrik Kuala Kencana dan Distrik Mimika Barat;
b. Kawasan peruntukan perkebunan Kakao, terdapat di Distrik Mimika Barat Jauh, Distrik Iwaka dan Distrik Kuala Kencana;
c. Kawasan peruntukan perkebunan kelapa terdapat di Distrik Mimika Barat Jauh dan Distrik Mimika Barat; dan
d. Kawasan peruntukan perkebunan buah-buahan terdapat di Distrik Kuala Kencana, Distrik Mimika Baru, Distrik Iwaka, Distrik Mimika Barat jauh dan Distrik Mimika Barat.

Adapun luasan keseluruhan kawasan peruntukan perkebunan di Kabupaten Mimika adalah 83.043,34 ha:



Gambar 2. 16. Peta Rencana Kawasan Perkebunan
Sumber: RTRW Kabupaten Mimika 2019 – 2039

E. Kawasan Peternakan

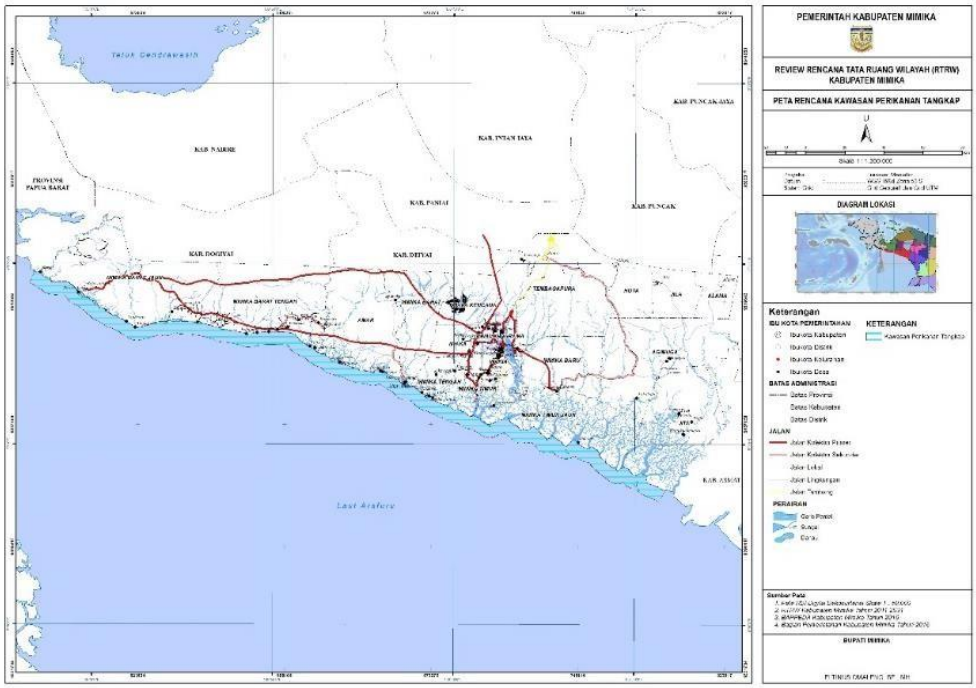
Kabupaten Mimika memiliki potensi pengembangbiakan ternak besar, ternak kecil, dan juga ternak unggas. Ternak besar adalah peternakan yang diusahakan dengan memelihara hewan yang berukuran besar. Hewan yang digolongkan ternak besar, yaitu kuda, kerbau, dan sapi. Ternak kecil adalah peternakan yang diusahakan dengan memelihara hewan yang berukuran kecil. Hewan yang digolongkan ternak kecil, yaitu babi, kambing, domba, dan kelinci. Ternak unggas adalah peternakan yang diusahakan dengan memelihara hewan yang bersayap atau sebangsa burung. Hewan yang digolongkan ke dalam ternak unggas, yaitu ayam, itik (bebek), angsa, dan burung puyuh.

Kawasan peruntukan peternakan terdapat di Distrik Kuala Kencana, Distrik Mimika Barat Jauh, Distrik Agimuga, Distrik Jita, Distrik Iwaka, Distrik Wania, Distrik Mimika Timur, Distrik Mimika Baru, Distrik Kwamki Narama, Distrik Hoya, Distrik Alama, Distrik Jila Distrik Mimika Barat Tengah, Distrik Mimika Barat dan Distrik Amar.

F. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Mimika pada umumnya terpencar di beberapa wilayah distrik. Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Mimika, terdiri atas:

1) Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdapat di Distrik Mimika Timur Jauh, Distrik Mimika Timur, Distrik Mimika Tengah, Distrik Mimika Barat, Distrik Mimika Barat Tengah dan Distrik Mimika Barat Jauh;



Gambar 2. 17. Peta Rencana Kawasan Perikanan Tangkap
Sumber: RTRW Kabupaten Mimika 2019-2039

2) Kawasan peruntukan budidaya perikanan, terdiri atas:
   a. Budidaya perikanan air payau (bukan tambak) dikembangkan di Distrik Mimika Timur, Distrik Mimika Tengah, Distrik Mimika Barat, Distrik Amar, Distrik Mimika Barat Tengah, Distrik Mimika Barat Jauh, Distrik Mimika Timur Jauh, dan Distrik Jita.
   b. Budidaya perikanan air tawar di Distrik Kuala Kencana, Distrik Mimika Baru, Distrik Iwaka, Distrik Wania dan Distrik Mimika Timur; dan
   c. Budidaya perikanan air laut di Distrik Mimika Barat Jauh.
3) Kawasan pengolahan hasil perikanan, untuk pengolahan ikan terdapat di Potowaiburu di Distrik Mimika Barat Jauh, Distrik Mimika Barat Tengah, Distrik Mimika Barat, Distrik Amar, Distrik Mimika Tengah, Distrik Mimika Baru, Distrik Mimika Timur dan Distrik Mimika Timur Jauh.

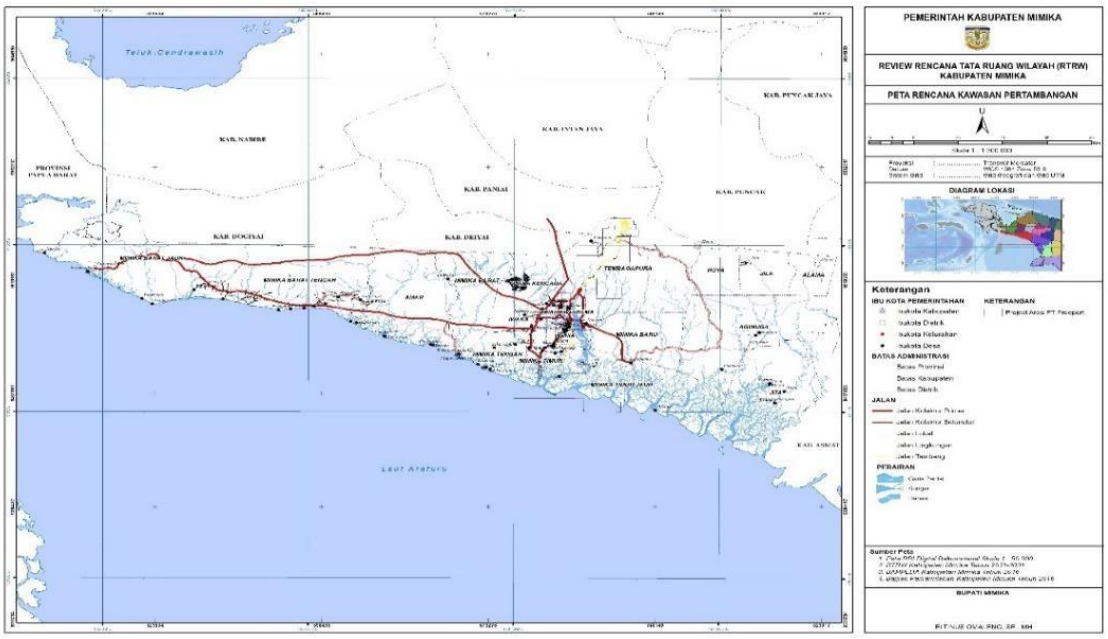
G. Kawasan Pertambangan

Arahan lokasi pengembangan kawasan pertambangan/bahan galian pada lokasilokasi yang terdapat potensi bahan tambang/galian dan mempunyai potensi cadangan yang menguntungkan untuk dieksploitasi. Pengembangan Kawasan pertambangan di Kabupaten Mimika, adalah sebagai berikut :

1) Perlunya ada pendelinasian kawasan pertambangan dengan jelas;
2) Kegiatan eksploitasi pertambangan harus dilakukan studi AMDAL;
3) Kawasan pertambangan yang sudah ada tetap dipertahankan dan dioptimalkan produksinya serta memperhatikan aspek-aspek lingkungan.
4) Pengeluaran izin lokasi kegiatan pertambangan baru harus di lengkapi dengan persyaratan teknis yang berlaku.

Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas:

1) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batu bara di Kabupaten Mimika, terdiri atas:
    a. Kawasan pertambangan emas, terdapat di Distrik Mimika Barat Jauh, Distrik Mimika Barat Tengah, Distrik Jila, Distrik Hoya, Distrik Alama, Distrik Amar dan Distrik Tembagapura.
    b. Kawasan pertambangan tembaga terdapat di Distrik Mimika Timur Jauh, Distrik Mimika Barat Tengah, Distrik Jila, Distrik Amar, dan Distrik Tembagapura.
    c. Kawasan pertambangan bebatuan (galian c) terdapat di Sungai Iwaka Distrik Kuala Kencana dan Distrik Iwaka serta kali merah di Distrik Iwaka.
    d. Kawasan pertambangan pemanfaatan pasir sisa tambang (Tailling) disalurkan melalui hulu sungai Aghawagon dan Otomona kemudian diendapkan di daerah ModADA yang melewati Distrik Kuala Kencana, Distrik Mimika Baru, Distrik Mimika Timur Jauh, Distrik Tembagapura dan Distrik Wania dengan luas 23.607,82 Ha
    e. Kawasan pertambangan batubara terdapat di Distrik Mimika Barat Jauh, Distrik Mimika Barat Tengah, Distrik Amar, Distrik Kuala Kencana, Distrik Tembagapura dan Distrik Jila.
2) Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi terdapat di Kawasan pantai selatan Kabupaten Mimika.



Gambar 2. 18. Peta Rencana Kawasan Pertambangan

Sumber: RTRW Kabupaten Mimika 2019 – 2039

H. Kawasan Pariwisata

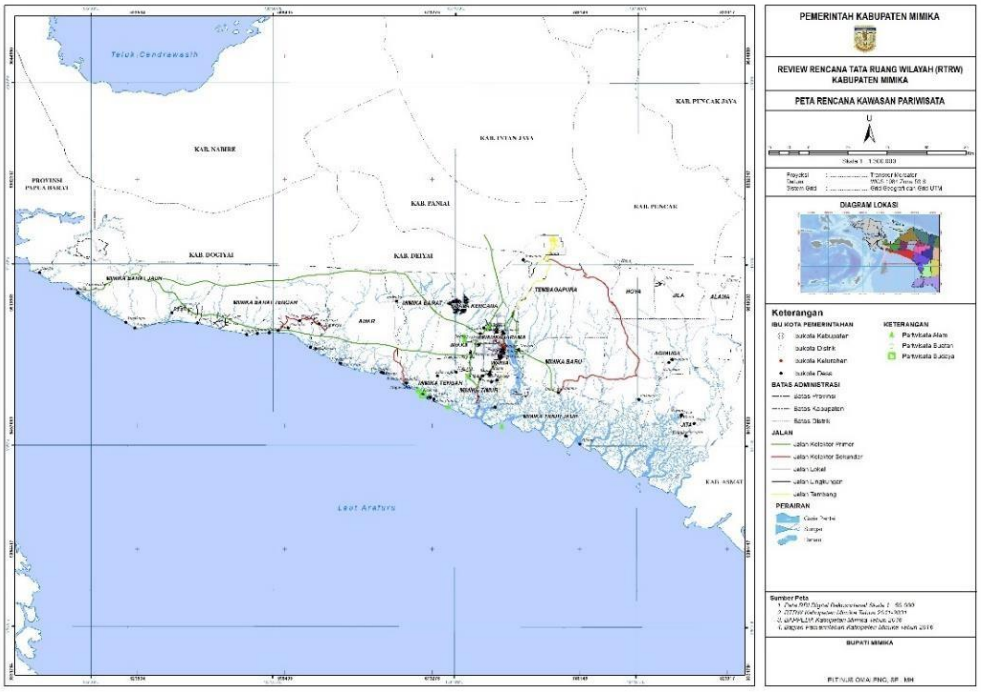
Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang memberikan manfaat ekonomi yang cukup besar baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Objek wisata di Kabupaten Mimika meliputi objek wisata alam, wisata budaya, maupun objek wisata buatan. Untuk pengembangan kegiatan wisata di Kabupaten Mimika, maka beberapa obyek wisata yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut**:**

1) Kawasan peruntukan pariwisata alam meliputi:
   a. Wisata alam pulau Bidadari dan pulau Puriri di Distrik Mimika Timur Jauh,
   b. Wisata alam pantai Keakwa dan pantai Kampus Biru di Distrik Mimika Tengah,
   c. Wisata Alam Pantai Kawar di Distrik Amar,
   d. Wisata Alam Pantai Mikapi di Distrik Mimika Barat Tengah,
   e. Wisata Alam Pantai Ipaya di Distrik Amar,
   f. Wisata alam kali Mayon di Distrik Kuala Kencana,
   g. Wisata Alam kali Iwaka di Distrik Iwaka,
   h. Wisata Alam kali Kiura di Distrik Mimika Barat,
   i. Wisata alam gunung Taman Nasional Lorentz di Distrik Jila, Distrik Agimuga dan Distrik Tembagapura,
   j. Wisata alam ekowisata hutan manggrove (bakau) Keakwa di Distrik Mimika Tengah,

k. Wisata Alam Ekowisata Mangrove Perikanan di Distrik Mimika Timur,
l. Wisata alam gunung puncak Cartentz di Distrik Tembagapura, dan
m. Wisata alam berburu di kampung Pigapu Distrik Mimika Timur.

2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya meliputi:
   a. Wisata Budaya peninggalan perang dunia II di pantai Kekwa Distrik Mimika Tengah,
   b. Wisata Budaya Taman Mapurupuwau kampung Mware di Distrik Mimika Timur,
   c. Wisata Budaya Tugu Eme Neme di pusat Kota Timika Distrik Mimika Baru,
   d. Wisata Budaya Festival Kamoro Kakuru di Pusat Kota Timika Distrik Mimika Baru, dan
   e. Wisata Budaya Kota Tua Kokonao Distrik Mimika Barat.

3) Kawasan peruntukan pariwisata buatan meliputi:
   a. Taman alun-alun dan Padang Golf Rimba Irian di Distrik Kuala Kencana;
   b. Kolam Renang Kuala Kencana di Distrik Kuala Kencana
   c. Waterboom Karang Senang di Distrik Kuala Kencana;
   d. Wisata Air Pelangi di Distrik Wania;
   e. Taman Rekreasi kolam pemancingan di Distrik Mimika Baru; dan Taman Wisata Religi Kota Timika Distrik Mimika Baru



Gambar 2. 19. Peta Rencana Kawasan Pariwisata

Sumber: RTRW Kabupaten Mimika 2019 – 2039

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahtertaan dan Pemerataan Ekonomi

A. Product Domestic Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk melihat hasil- hasil pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB mencerminkan kinerja perekonomian suatu daerah. Menurut definisi, PDRB adalah nilai produk barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Dari data PDRB dapat dilihat tingkat pertumbuhan dan struktur ekonomi suatu wilayah. Struktur ekonomi suatu wilayah biasanya disajikan dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku. Sedangkan pertumbuhan ekonominya biasanya dihitung dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

Tabel 2. 8. Laju Produk Domestik Bruto Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018-2022 (dalam persen)

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,70	0,10	-2,22	0,39	0,73
B	Pertambangan dan Penggalian	11,07	-44,64	15,77	44,23	17,10
C	Industri Pengolahan	6,48	-5,62	-0,75	0,98	0,38
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,22	5,52	0,29	5,93	7,81
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,57	-2,15	-0,79	1,85	1,88
F	Konstruksi	6,88	13,3	-4,53	2,04	5,86
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,23	4,97	-1,81	4,43	2,72
H	Transportasi dan Pergudangan	5,18	5,41	-39,21	18,73	13,21
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,73	4,33	-17,78	1,69	2,05
J	Informasi dan Komunikasi	4,06	1,67	3,20	5,02	4,82
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	-2,46	0,81	1,19	1,25	6,67
L	Real Estate	2,92	6,96	0,04	0,22	6,88
M,N	Jasa Perusahaan	7,01	1,25	-6,21	3,70	0,73
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,05	3,40	0,52	0,37	-0,22
P	Jasa Pendidikan	4,13	4,58	0,53	0,13	1,23
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,72	5,20	12,44	1,32	0,68
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,38	6,48	-0,36	0,90	3,01
PDRB TOTAL		10,27	-38,52	11,44	36,85	15,31

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Mimika pada tahun 2022 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Mimika

2022 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 80,28 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 69,62 triliun rupiah pada tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2022 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 15,31 persen, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 36,85 persen. Pertumbuhan ekonomi selama 2022 melaju dipengaruhi oleh pertumbuhan yang signifikan dari PT Freeport Indonesia. Terjadinya kenaikan produksi hasil pertambabangan berpengaruh besar terhadap kelajuan pertumbuhan ekonomi dibandingkan tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yaitu sebesar 17,10 persen. Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya produksi pertambangan dan penjualan PT Freeport Indonesia terkhususnya pada triwulan IV. Dari 17 lapangan usaha pertumbuhan negatif hanya dialami oleh satu lapangan usaha. Kenaikan pada lapangan-lapangan usaha ini diakibatkan oleh mulai pulihnya ekonomi setelah pandemi COVID-19. Kegiatan-kegiatan ekonomi mulai normal sehingga kenaikan terjadi pada lapangan-lapangan usaha di Indonesia.

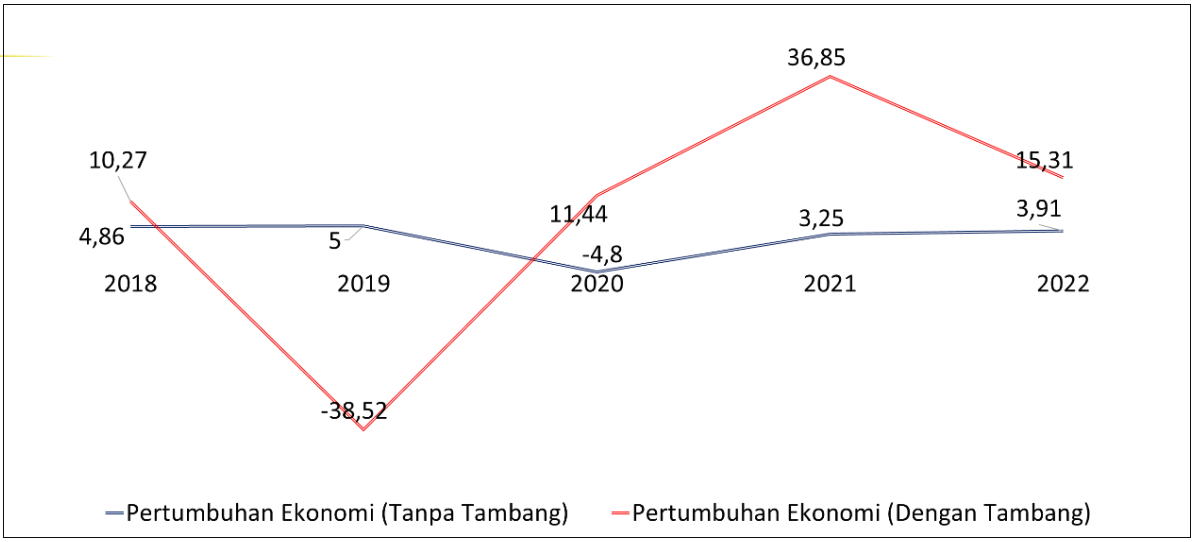
B. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fiskal yang terjadi di suatu daerah, seperti pertambahan jumlah industri, pertambahan produksi sektor-sektor ekonomi, pertambahan jumlah fasilitas infrastruktur (sekolah, jalan, rumah sakit dan fasilitas umum), pertambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada dan perkembangan- perkembangan lainnya. Pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat sektoralnya, artinya apabila sebuah sektor mempunyai peranan paling penting dan pertumbuhannya lambat, maka hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, apabila sebuah sektor mempunyai peranan penting dan pertumbuhannya tinggi, maka sektor tersebut dapat menjadi lokomotif yang menarik pertumbuhan ekonomi suatu daerah sehingga total pertumbuhan ekonomi menjadi besar. Dengan kata lain, gejolak sekecil apapun pada sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 2. 9. Produk Domestik Bruto Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2022 (dalam juta rupiah)

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.202.076,8	1.203.253,0	1.176.576,5	1.181.167,5	1.189.783,7
B	Pertambangan dan Penggalian	65.086.334,1	36.029.230,2	41.711.162,7	60.161.230,0	70.450.482,5
C	Industri Pengolahan	107.530,2	101.482,1	100.718,1	101.701,2	102.092,2
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8.522,9	8.992,9	9.019,5	9.554,0	10.300,5
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.494,8	6.355,3	6.305,1	6.421,7	6.542,3
F	Konstruksi	1.677.841,1	1.900.994,4	1.814.964,5	1.851.989,8	1.960.516,4
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.514.183,6	1.589.502,9	1.560.655,2	1.629.741,9	1.674.024,0
H	Transportasi dan Pergudangan	793.976,2	836.907,4	508.727,1	604.037,0	683.819,9
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	189.292,3	197.496,7	162.386,6	165.137,0	168.516,3
J	Informasi dan Komunikasi	1.210.813,7	1.231.090,6	1.270.485,5	1.334.263,9	1.398.562,9
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	289.093,1	291.444,9	294.907,1	298.583,1	318.499,9
L	Real Estate	430.528,9	460.513,1	460.690,7	461.704,3	493.469,5
M,N	Jasa Perusahaan	310.478,1	314.349,2	294.837,9	305.736,5	307.955,0
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.020.802,7	1.055.512,5	1.061.001,2	1.064.966,8	1.062.602,5
P	Jasa Pendidikan	124.007,7	129.681,3	130.372,2	130.541,7	132.143,9
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	116.011,7	122.045,5	137.222,4	139.036,8	139.982,3
R,S,T,U	Jasa lainnya	161.692,4	172.173,3	171.555,6	173.099,6	178.309,9
	PDRB TOTAL	74.249.680,2	45.651.025,3	50.871.587,7	69.618.912,8	80.277.603,6

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika dihitung dari pertumbuhan PDRB Kabupaten Mimika yang didasarkan atas dasar harga konstan tahun 2010. Laju pertumbuhan ekonomi Non Tambang Kabupaten Mimika tahun 2022 sebesar 3,91%.



Gambar 2. 20. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mimika 2018-2022

Sumber: BPS Kabupaten Mimika

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah gambaran makro mengenai hasil dari proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh stakeholders, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Dengan di ketahuinya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi maka dapat ditentukan sektor prioritas pembangunan. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan suatu gambaran dari peningkatan pendapatan yang berdampak pada peningkatan kemakmuran dan taraf hidup.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan serta lebih cepat daripada laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

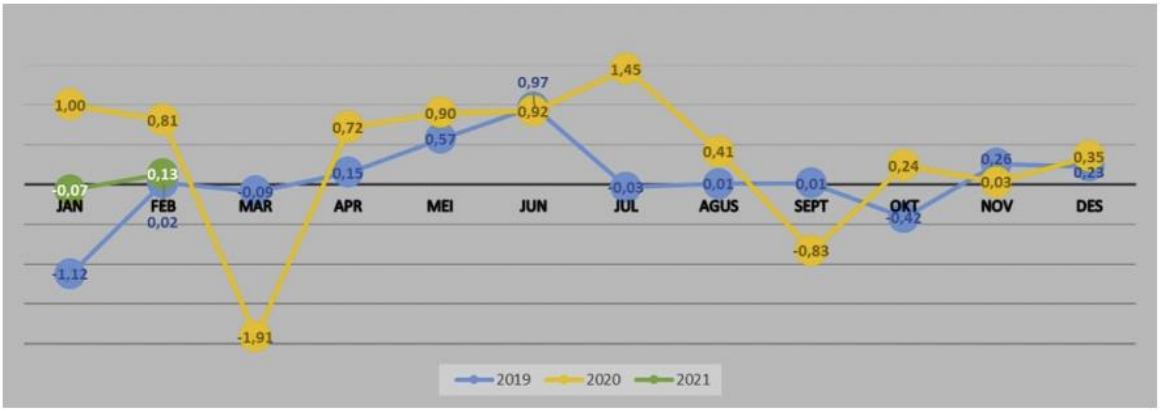
C. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan pemerintah untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan terutama yang berkaitan dengan kemampuan pemerintah mengendalikan harga komoditi-komoditi beredar di masyarakat. Dengan melihat data inflasi dapat diketahui apakah perencanaan program pembangunan di bidang ekonomi yang telah dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Inflasi yang tinggi menunjukkan terjadinya

kenaikan barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehari-hari yang cukup tinggi atau dapat juga dikatakan menurunnya kemampuan daya beli masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa tersebut (nilai riil uang menurun). Laju inflasi dalam arti sempit adalah meningkatnya harga barang/jasa kebutuhan masyarakat secara rata-rata.

Hal ini berarti terjadi penurunan kemampuan/daya beli uang untuk memperoleh barang/jasa (nilai riil yang menurun), tidak hanya merugikan golongan masyarakat akan tetapi juga berdampak negatif bagi produsen dan pengusaha lainnya, prospek penanaman modal/investasi diberbagai sektor juga terhambat. Berbagai cara, daya dan upaya tetap dan terus dilakukan oleh pengambil keputusan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah dalam menekan dan mengendalikan laju inflasi. Oleh karena itu data inflasi merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu daerah maupun nasional. Laju Inflasi di Mimika pada Februari 2021 terjadi Inflasi sebesar -0,07 persen atau terjadi penambahan angka Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,16 pada Januari 2021, menjadi 107,08 pada Februari 2021. Dengan angka inflasi tersebut, maka laju inflasi Mimika tahun kalender (Februari 2021 terhadap Desember 2020) mencapai -0,07 persen dan laju inflasi year on year (Februari 2021 terhadap Februari 2021) mencapai 3,01 persen.

Inflasi Mimika Februari 2021 sebesar 0,13 persen terjadi karena adanya penambahan harga yang ditunjukkan dengan perubahan indeks pada Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau yang mengalami inflasi sebesar 0,30 persen dengan andil sebesar 0,14 persen; Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga mengalami inflasi sebesar 0,08 persen dengan andil 0,00 persen. Berikut gambar laju inflasinya:



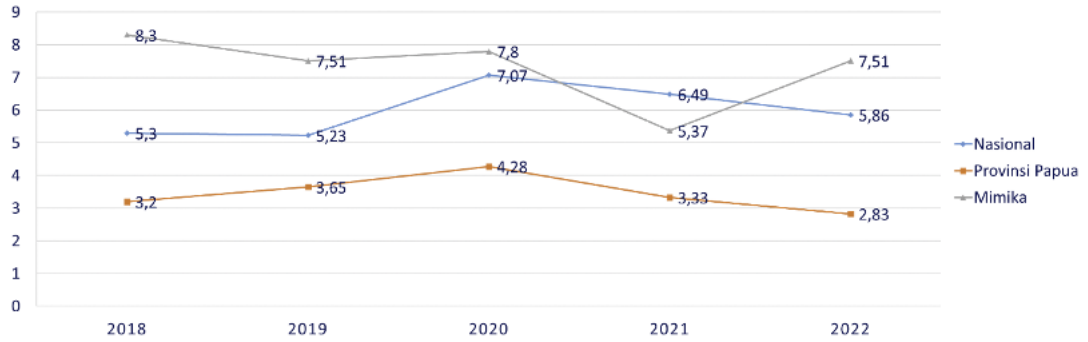
Gambar 2. 21. Laju Inflasi Kabupaten Mimika 2019-2021

D. Ketenagakerjaan

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2, telah diamanatkan bahwa ”tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”. Pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjamin penyediaan lapangan kerja bagi warga negaranya. Salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Oleh karena itu, upaya pembangunan banyak diarahkan pada perluasan kesempatan kerja sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan.

Tabel 2. 10. Jumlah Penduduk Usia Kerja berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Mimika, 2020

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Angkatan Kerja	75.457	26.024	101.481
Berkerja	69.854	23.713	93.567
Pengangguran terbuka	5.603	2.311	7.914
Bukan Angkatan Kerja	17.446	40.986	58.432
Sekolah	6.133	4.694	10.827
Mengurus Rumah Tangga	5.628	34.184	39.182
Lainnya	5.685	2.108	7.793



Gambar 2. 22. Pengangguran Terbuka Kabupaten Mimika Tahun 2018-2022

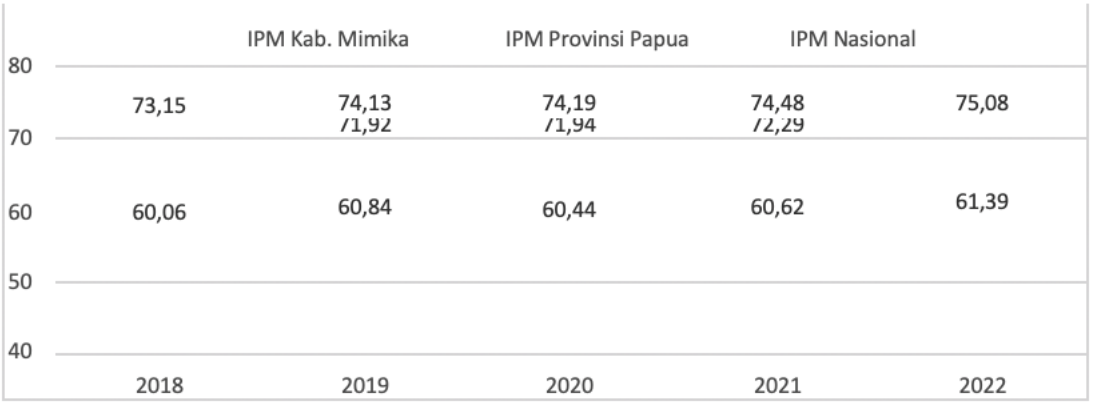
Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan, Kabupaten Mimika Memiliki jumlah pengangguran terbuka yang cenderung meningkat pada setiap tahunnya. Pada tahun 2022 pengangguran terbuka di Kabupaten Mimika berjumlah 7,51%.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

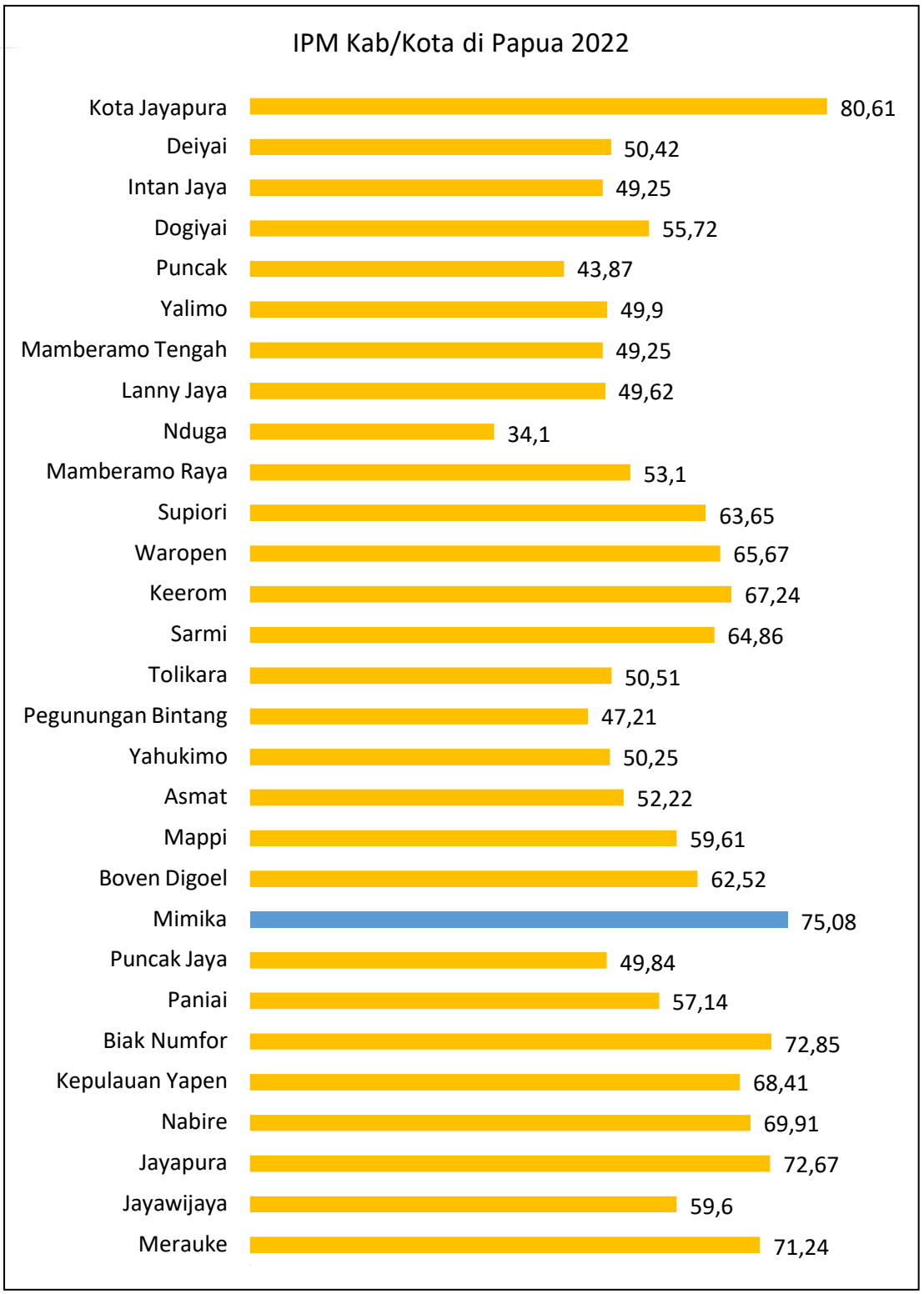
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang dibuat lebih dari satu indeks yang digabung menjadi indeks tunggal. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan,

kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR) Indeks ini penting untuk melihat sampai seberapa jauh pertumbuhan dan pemerataan hasil pembangunan mampu secara nyata memberikan output berupa peningkatan kebutuhan fisik dasar manusia dan perluasan kemampuan manusia untuk melakukan pilihan-pilihan. Agak berbeda dengan Indek Mutu Hidup (IMH) yang berfungsi sebagai indikator fisik (mengukur tingkat kemajuan), maka IPM cenderung berfungsi sebagai indikator posisi (membandingkan keberhasilan pembangunan antar waktu atau wilayah). IPM dapat dihitung berdasarkan tiga dimensi dasar yaitu: (1) umur Panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak.



Gambar 2. 23. Indeks pembangunan manusia Kabupaten Mimika 2018-2022
Sumber: BPS Nasional 2023

Posisi dari Indeks Pembangunan Manusia DI Kabupaten Mimika berada diatas IPM Provinsi Papua dan IPM Nasional. Selain itu IPM Kabupaten Mimika termasuk nilai IPM yang bagus di Provinsi Papua karana menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Papua IPM Kabupaten Mimika menempati peringkat 2 (dua) dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua. Pada tahun 2018 indeks pembangunan manusia Kabupaten Mimika sebesar 73,15, selanjutnya meningkat menjadi 74,13 di tahun 2019. Pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan menjadi 74,19, lalu pada tahun 2021 menjadi 74,48, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 75.08.



Gambar 2. 24. Indeks Pembangun Manusia per Kabupaten/Kota Provinsi Papua 2022

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2023

Indeks pembangunan manusia Kabupaten Mimika tergolong sebagai tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Papua. Indeks pembangunan manusia Kabupaten Mimika Menduduki peringkat ke 2 dari seluruh kabupaten di Provinsi Papua.

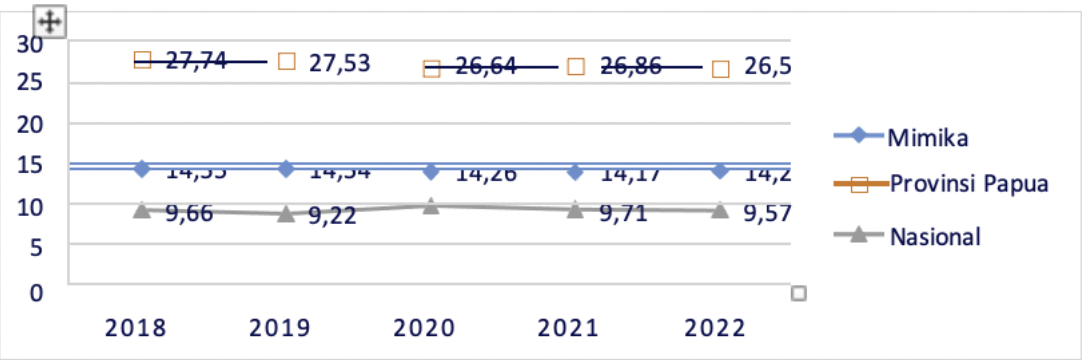
Pembangunan Manusia diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dihitung secara komposit berdasarkan tiga indeks yang terdiri dari Indeks Pendidikan (Harapan lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah), Indeks Kesehatan (Usia Harapan Hidup) dan Indeks Daya beli (Daya Beli). Bardasarkan ketiga indikator pembentuk indeks pembangunan manusia ketiganya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun Indeks Pendidikan (Harapan lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah) dan Indeks Daya beli (Daya Beli) yang masih tergolong rendah.

Tabel 2. 11. Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Mimika

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Harapan Hidup	72,06	72,27	72,32	72,36	72,57
Rata-Rata Lama Sekolah	9,76	9,91	10,17	10,18	10,20
Harapan Lama Sekolah	11,77	12,17	12,40	12,69	12,95
Pengeluaran perkapita / daya beli (Juta)	11.700	12.035	11.431	11 400,00	11 647,00

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2023

Kemiskinan



Persentase penduduk miskin Kabupaten Mimika di tahun 2022 mengalami peningkatan 0,11 (Negatif) menjadi 14,28%, dimana di tahun yang sama Provinsi Papua dan Nasional mengalmai penurunan.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikatorindikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban. Pada urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

A. Pendidikan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 12. Realisasi Kinerja Daerah Bidang Pendidikan

No	Indikator	Realiasi Tahun Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12.17 Tahun	12.40 tahun	12.69 Tahun	12.69 Tahun
2	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9.91 tahun	10.17 tahun	10.18 tahun	10.18 Tahun
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	0.981	98,65%	95.56%	0.9935
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs	0.8628	86.04%	96.89%	0.9165
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	0.7865	77.09%	76.70%	0.9548
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	0.5313	57.37%	61.86%	0.8502
7	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,71%	1,06%	0.6%	0.0096
8	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,94%	0,72%	0,01%	0.0053
9	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	95,51%	98,83%	98,15%	0.9846
10	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	97,53%	99,46%	97,85%	0.9818
11	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	1.0298	104,80%	92,84%	0.9894
12	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK	78,51%	1.23	93,60%	1.0373
13	APK PAUD (laki-laki dan perempuan) (%)	0.6317	58.80%	52.92%	0.4847
14	Angka Kelulusan Paket A (%)	Na	Na	Na	100
15	Angka Kelulusan Paket B (%)	34.10%	Na	Na	100
16	Angka Kelulusan Paket C (%)	23.72%	Na	Na	100
17	Angka Melek Huruf Usia 15 s.d. 59 Tahun Laki-laki dan Perempuan (%)	60%	57.70%	57.01%	0.674
18	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	1:23	na	99,24%	0.7
19	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	1:17	na	98,30%	0.93
20	Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah SD	1,1:1	1: 22	1:24	1 : 17.49
21	Rasio Guru Terhadap MuridSekolah SMP	0.6317	1: 17	1:17	1 : 23.31
22	Rasio Rombongan Belajar (Rombel) Terhadap Ruang Kelas SD	0.6	0.9 : 1	0,8:1	1 :1
23	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	100 / 75.3%	58.80%	52.92%	0.4847
24	Angka Melek Huruf (Usia 15 - 59 Tahun) (%)	na	57.70%	57.01%	0.674
25	Persentase Lembaga PAUD Berizin Operasional dan Terakreditasi (Lembaga)	na	100 / 21.3%	100/ 71.71%	100 / 75.24%
26	Indeks Paritas Gender Jenjang SD/MI (indeks)	na	na	na	100
27	Indeks Paritas Gender Jenjang SMP/MTs (indeks)	na	na	na	100

No	Indikator	Realiasi Tahun Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
28	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (Usia Produktif 15 - 44 Tahun) Memiliki Kemampuan Life Skill (Orang)	na	na	na	0
29	Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)	71.2%	77.1%	61.3%	0.9422
30	Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)	77%	49.1%	84.9%	0.8862
31	Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)	95.5%	93.5%	97.1%	1
32	Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik (%)	10%	5.5%	4.7%	0.0804
33	Persentase Guru SD bersertifikat pendidik (%)	16.7%	14.2%	16.4%	0.1011
34	Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik (%)	29.6%	29.6%	25.6%	0.2328

Sumber: Dinas Pendidikan Mimik, 2023

Berdasarkan Tabel diatas bisa disimpulkan bahwa indikator pendidikan mengalami peningkatan pada tiap tahunya seperti Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs, Harapan Lama Sekolah (tahun), Rata- rata Lama Sekolah (tahun). Sedangkan pada Indikator lainnya cenderung mengalami fluktuasi pada tiap tahunnya.

Angka Partisipasi Kasar (APK), adalah rasio jumlah siswa di semua usia yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Pada Tahun 2022 realisasi APK TK/RA/PAUD/ Penitipan Anak hampir memenuhi target yang telah ditentukan dimana target yang ditetapkan adalah 100% namun realisasinya adalah sebesar 99,35%.

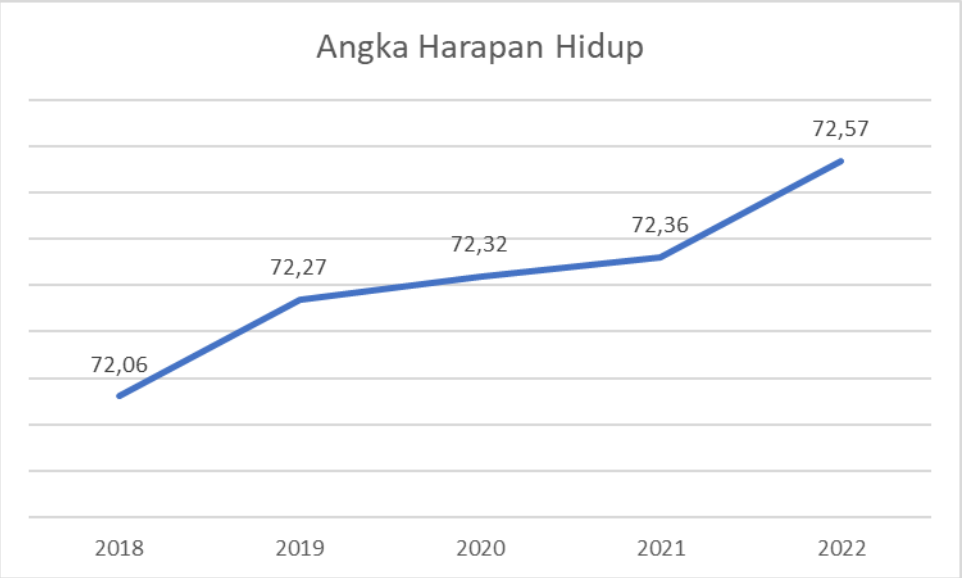
Angka Partisipasi Murni (APM), adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Dimana pada tahun 2022 nilainya telah mencapai target yang ditentukan yaitu 91.53% dengan nilai realisasi adalah sebesar 95.48%.

Angka Putus Sekolah (APTS), didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP dan sebagainya) dengan jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APtS ini digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa putus sekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APtS berarti semakin banyak siswa yang putus sekolah di suatu

jenjang pendidikan pada suatu wilayah, dengan demikian maka semakin kecil APtS menunjukkan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mengurangi siswa yang putus sekolah/Drop Out. Pada tahun 2022 nilai target pada APS masih belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 1,05, namun realisasinya masih 0,95%.

B. Kesehatan

AHH adalah salah satu indikator untuk menilai derajat kesehatan masyarakat. Melalui AHH ini evaluasi kinerja pemerintah, dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya, bisa diukur. AHH sangat berkaitan erat dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi suatu wilayah. Keberhasilan program kesehatan umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup. Bila pembangunan sosial ekonomi semakin baik, maka kecenderungannya AHH akan semakin tinggi, atau sebaliknya. Di bawah ini adalah data series AHH tahun 2018 – 2022.



Dari grafik tersebut, dapat dilihat bahwa target usia harapan hidup Kabupaten Mimika terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, target usia harapan hidup Kabupaten Mimika adalah 72,32 tahun. Pada tahun 2021, target tersebut meningkat menjadi 72,57 tahun. Dan pada tahun 2022, target tersebut meningkat lagi menjadi 72,72 tahun. Capaian usia harapan hidup Kabupaten Mimika

juga terus meningkat, namun dengan laju pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan dengan target. Pada tahun 2020, capaian usia harapan hidup Kabupaten Mimika adalah 71,93 tahun. Pada tahun 2021, capaian tersebut meningkat

menjadi 72,32 tahun. Dan pada tahun 2022, capaian tersebut meningkat lagi menjadi 72,57 tahun. Pada tahun 2023, target usia harapan hidup Kabupaten Mimika adalah 72,72 tahun. Capaian usia harapan hidup Kabupaten Mimika pada tahun 2023 diperkirakan akan mencapai 72,57 tahun. Artinya, capaian usia harapan hidup Kabupaten Mimika pada tahun 2023 masih berada di bawah target. Pada tahun 2024, target usia harapan hidup Kabupaten Mimika adalah 72,36 tahun. Capaian usia harapan hidup Kabupaten Mimika pada tahun 2024 diperkirakan akan mencapai 72,32 tahun.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penataan ruang merupakan salah satu aspek yang penting untuk keseimbangan dalam daerah. Dengan adanya penatan yang baik dan seimbang daerah dapat memiliki potensi-potensi yang baik pula. Pemahaman dalam setiap proses perencanaan tata ruang bahwa seluruh wilayah yang termasuk dalam lingkup perencanaan mempunyai potensi yang memungkinkan untuk dikembangkan. Di wilayah Kabupaten Mimika, potensi yang memungkinkan untuk dikembangkan antara lain kegiatan perdagangan dan jasa, pertanian, peternakan, perikanan darat, kegiatan industri, serta pariwisata.Saat ini jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang berguna untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Meningktanya pembangunan menuntut adanya peningkatan pembangunan prasarana jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik mempunyai andil besar terhadap tercapainya perkembangan antar daerah yang seimbang dalam pemerataan hasil-hasil pembangunan. Utamanya di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya. Arah pengembangan prasarana transportasi jalan di Mimika adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu perlu adanya upaya penambahan dan perbaikan jalan agar percepatan arah pengembangan prasarana transportasi jalan di Mimika bisa terwujud sebagaimana yang diharapkan. Di bawah ini adalah data terkait indicator kinerja yang dapat menunjukkan hasil capaian pelaksanaan urusan pekerjaan umum di Kabupaten Mimika dapat digambarkan pada table berikut:

Indikator	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Persentase Kesesuaian Penyelenggaan Penataan Ruang dengan Dokumen RTRW (%)	0	0	0	0

Indikator	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Jalan				
Meningkatnya Kondisi infrastruktur perkotaan (gedung)	0	100	100	100
Meningkatnya Kondisi infrastruktur perdesaan	100	100	100	100
Drainase				
Peningkatan Panjang Saluran irigasi dalam kondisi baik	100	100	100	0
Prosentase jumlah sungai yang berfungsi optimal (%)	100	100	100	100
Meningkatnya Kondisi infrastruktur perkotaan (air)	100	100	100	100
Meningkatnya Kondisi jalan dan jembatan baik dan mantap	100	100	100	100
Meningkatnya Aksessibilitas perekonomian dan pariwisata	100	100	100	100

Indikator kesesuaian penyelenggaraan penataan ruang dengan dokumen RTRW masih belum menunjukkan capaian yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara berbagai pihak terkait dalam penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Mimika. Indikator infrastruktur menunjukkan capaian yang cukup baik. Hal ini terlihat dari meningkatnya kondisi infrastruktur perkotaan dan perdesaan, serta meningkatnya panjang saluran irigasi dalam kondisi baik. Namun, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kondisi infrastruktur perdesaan di beberapa wilayah yang masih belum memadai. Indikator sumber daya alam menunjukkan capaian yang cukup baik. Hal ini terlihat dari meningkatnya kondisi infrastruktur perkotaan dan perdesaan, serta meningkatnya persentase jumlah sungai yang berfungsi optimal. Namun, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kondisi infrastruktur perkotaan dan perdesaan di beberapa wilayah yang masih belum memadai. Indikator ekonomi menunjukkan capaian yang cukup baik. Hal ini terlihat dari meningkatnya kondisi infrastruktur perkotaan dan perdesaan, serta meningkatnya kondisi jalan dan jembatan baik dan mantap. Namun, perlu dilakukan upaya- upaya untuk meningkatkan kondisi infrastruktur perkotaan dan perdesaan di beberapa wilayah yang masih belum memadai. Indikator pariwisata menunjukkan capaian yang cukup baik. Hal ini terlihat dari meningkatnya aksesibilitas perekonomian dan pariwisata. Namun, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan aksesibilitas perekonomian dan pariwisata di beberapa wilayah yang masih belum memadai. Secara keseluruhan, capaian indikator RPJMD Kabupaten

Mimika tahun 2019-2022 menunjukkan hasil yang cukup baik. Namun, masih perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan capaian indikator yang belum menunjukkan hasil yang signifikan, serta untuk meningkatkan meratanya capaian indikator di seluruh wilayah Kabupaten Mimika.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kebutuhan tempat tinggal (papan) merupakan salah satu kebutuhan primer dalam kehidupan selain pangan dan sandang. Kualitas tempat tinggal menggambarkan pembangunan yang berkaitan dengan perekonomian, tingkat pendidikan dan urusan tata ruang serta mempengaruhi kualitas kesehatan. Kebutuhan tempat tinggal yang sehat dan layak huni telah menjadi permasalahan klasik dibidang perumahan. Laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, tidak seimbang dengan ketersediaan lahan yang semakin lama semakin sempit, menjadi salah satu penyebab munculnya permasalahan dibidang perumahan. Selain itu kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya rumah sehat dan rendahnya tingkat perekonomian masyarakat yang belum bisa mewujudkan rumah yang sesuai dengan standart kesehatan, juga menjadi akar permasalahan dibidang perumahan. Berikut adalah capaian kinerja bidang urusan perumahan rakyat dan Kawasan pemukiman Kabupaten Mimika:

Indikator	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (unit)	301	185	47	-
Menurunnya luasan kawasan permukiman kumuh (Persentase)	-	10	13	16
Persentase tanah yang bersertifikat (%)	28	24	10	5

Indikator perumahan menunjukkan capaian yang cukup baik. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani. Namun, masih perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani, terutama di wilayah perdesaan. Indikator permukiman menunjukkan capaian yang cukup baik. Hal ini terlihat dari menurunnya luasan kawasan permukiman kumuh. Namun, masih perlu dilakukan upaya- upaya untuk meningkatkan capaian indikator ini, terutama di wilayah perkotaan. Indikator pertanahan menunjukkan capaian yang kurang baik. Hal ini terlihat dari menurunnya persentase tanah yang bersertifikat. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki sertifikat tanah,

serta kurangnya anggaran untuk program sertifikasi tanah. Secara keseluruhan, capaian indikator RPJMD Kabupaten Mimika tahun 2019-2022 menunjukkan hasil yang cukup baik. Namun, masih perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan capaian indikator yang belum menunjukkan hasil yang signifikan, serta untuk meningkatkan meratanya capaian indikator di seluruh wilayah Kabupaten Mimika. Berikut adalah beberapa rekomendasi untuk meningkatkan capaian indikator RPJMD Kabupaten Mimika: Peningkatan upaya-upaya untuk meningkatkan jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan anggaran pembangunan rumah tidak layak huni, serta meningkatkan kerja sama dengan pemerintah pusat dan swasta. Peningkatan upaya-upaya untuk meningkatkan luasan kawasan permukiman kumuh. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan anggaran pembangunan infrastruktur permukiman, serta meningkatkan kerja sama dengan pemerintah pusat dan swasta. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki sertifikat tanah. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya sertifikat tanah, serta memberikan kemudahan dalam proses sertifikasi tanah.

E. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 13. Indikator Realisasi Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Mimika Kabupaten Mimika

No	Indikator	Realisasi Tahun Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1	Penurunan Persentase Pelanggaran Perda (%)				
2	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten	15,29%	15,29%	15,29%	15,29%
3	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah			100%	100%
4	Persentase Kehadiran Masyarakat dalam Pemilu (%)				
5	Cakupan Desa Tangguh Bencana (%)			0	0
6	Pengurangan Persentase korban terdampak bencana (%)				60%
7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial	100%	100%	100%	100%
8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap				0
9	Persentase Jumlah Sarana dan Prasaran yang				0

No	Indikator	Realisasi Tahun Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
	Tertangani Pasca Bencana (%)				
10	Persentase Penanganan Konflik Sosial dan Unjuk Rasa				0

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mimika, 2023

Berdasarkan tabel diatas beberapa indikator sudah mencapai sudah mencapai target pada tahun 2022, diantarannya yaitu Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah dengan nilai realisasi 100% dan mencapai target sebesar 100%, Pengurangan Persentase korban terdampak bencana dengan nilai realisasi 60% dan melebihi target sebesar 50%, dan Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial dengan nilai realiasi sebesar 100% dan mencapai target sebesar 100%. Namun ada beberapa indiakator lainya yang pada tahun 2022 belum ada datanya dan juga ada indikator yang belum mencapai target diantaranya yaitu Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten dimana nilai realiasinya sebesar 15% namun target nya sebesar 100%, ini menunjukan bahwa masih jauh untuk mencapai target yang dimana ini dikarenakan Tidak adanya akses ke beberapa wilayah, Cakupan Desa Tangguh Bencana dimana nilai realisasi sebesar 0 dan targetnya sebesar 35%, hal ini dikarenekan masih terbatasnya anggaran. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap, Persentase Jumlah Sarana dan Prasaran yang Tertangani Pasca Bencana, Persentase Penanganan Konflik Sosial dan Unjuk Rasa.

F. Sosial

Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah berusaha melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian bantuan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pelayanan ini merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial maka Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertanggung jawab terhadap penanganan dan pelayanan terhadap PMKS yang ada di Kabupaten Mimika.

Tabel 2. 14. Indikator Realisasi Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Mimika

No	Indikator	Realisasi Tahun Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang			41	25

No	Indikator	Realisasi Tahun Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1	disabilitas terlantar di luar panti				
2	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			15.24%	9%
3	Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar di luar panti			-	100
4	Persentase (%) annak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			-	47%
5	Terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia terlantar di luar panti			-	100
6	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			-	16%
7	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial daerah Kabupaten			-	376
8	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten			-	100.0%

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Mimika, 2023

Berdasarkan data indikator tabel diatas pada tahun 2022 beberada indiakator nilai realisasinya tidak mencapai target. Indikator yang tidak mencapai target tersebut yaitu Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti dimana nilai realisasinya sebesar 25% dengan nilai target sebesar 268%, Indikator yang kedua yaitu adalah Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dimana nilai realisasinya sebesar 9% namun nilai targetnya sebesar 80%, Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar di luar panti dimana nilai realisasinya sebesar 100% dengan tergetnya sebesar 215%. Indikator selanjutnya yaitu Persentase (%) annak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dengan nilai realisasi sebesar 47% dengan nilai target 85%.

Kemudian Indikator Terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia terlantar di luar panti dengan nilai realisasi 100 namun sangat jauh untuk memenuhi nilai targetnya yaitu sebesar 626. Selanjutnya yaitu Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dengan niai realisasi 16% namun sangat jauh untuk mencapai targetnya yaitu sebesar 80%. Indikator yang belum memenuhi target nya, ini dikarenakan Kurangnya pekerja sosial pada Dinas Sosial sehingga data yang diperoleh sangat minim. Kemudian ada 2 indikator yang masih belum terdapat datanya. Untuk indikator yang sudah memenuhi nilai target yaitu Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial daerah Kabupaten dengan realisasi

sebesar 376 dengan target yang terpenuhi sebesar 376. Yang kedua yaitu Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten dimana nilainya targetnya sebesar 100% dan nilai realiasinya sebesar 100% dan sudah memenuhi.

2.3.2. Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Non Dasar

A. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak perempuan dan hak–hak anak sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang. Pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keadilan dan pengarusutamaan gender melalui pemerataan akses dan tingkat partisipasi aktif serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang anti kekerasan terhadap perempuan dan anak di kalangan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Mimika melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan beragama dengan tujuan meningkatkan pemberdayaan, kualitas hidup, serta perlindungan perempuan dan anak, yang diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender. Untuk kinerja realisasi indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 15. Indikator Realisasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

No	Indikator	Realisasi Tahun Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1	IPG		3	3,1	3,2
2	Proporsi perempuan di lembaga pemerintahan ASN (%)		53.86%	53.86%	53.86%
3	Persentase penanganan korban KDRT (%)			8.57%	8.57%
4	Persentase penanganan korban kekerasan pada anak (%)			6%	6%
5	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)		73.30%	73.45%	73.6%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, 2023

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2022 beberada Indikator masih belum ada datanya yaitu Indikator IPG, Persentase partisipasi perempuan di lembaga, ndeks komposit kesejahteraan anak, Prevalensi anak bekerja, Rasio perkawinan anak. Kemudian untuk indikator yang sudah memenuhi target kinerja yaitu adalah Proporsi perempuan di lembaga pemerintahan ASN dengan nilai relasisasi sebesar 53,86%

dengan target yang terpenuhi sebesar 53,86%, Indikator Persentase penanganan korban kekerasan pada anak dengan nilai realisasi sebesar 6% dengan target yang bisa terpenuhi sebesar 6%, Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) dengan nilai realisasi 73,6% dengan target yang terpenuhi sebesar 73,6%.

B. Pangan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok atau primer dalam kehidupan manusia selain sandang dan papan. Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Bab I pasal 1, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Tabel 2. 16. Indikator Realisasi Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Mimika

No	Indikator	Realisasi Tahun Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/Jagung sesuai Kebutuhan)				
	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (Ketersediaan Energi = 2400 kkal/kap/hari)	100%	100%	100%	100%
	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (Ketersediaan Protein = 57gram/kap/hari)	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan		100%	0	0
3	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan		27,77%	27,77%	27,77%

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2023

Berdasarkan tabel diatas bisa disimpulkan dimana indikator diatas suda memenuhi target yaitu Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/Jagung sesuai Kebutuhan dengan skor pola ketersediaan energi 2400 dan skor pola ketersediaan protein 57 gram per hari yaitu dengan nilai realisasi sebesar 100% dengan target kinerja sebesar 100%, selanjutnya pada indikator Persentase Penanganan Kerawanan Pangan dengan nilai realisasi sebesar 27,77% dengan target kinerja sebesar 27,77%. Namun meskipun demikian ada indikator dengan target kinerja yang belum tercapai yaitu adalah Persentase Penanganan Kerawanan Pangan dimana dengan nilai realisasi sebesar 0% dari target kinerja yang ditetapkan yaitu

sebesar 10%, ini dikarenakan elaksanaan Program dan Kegiatan tetap berjalan namun belum semua daerah rentan rawan pangan telah diintervensi karena dokumen FSVA baru akan disusun pada tahun 2023.

C. Lingkungan Hidup

Permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini semakin kompleks dan mengiringi semakin meningkatnya berbagai tuntutan kehidupan sosial ekonomi masyarakat baik pada arah lokal, nasional, bahkan global. Salah satunya terkait dengan terjadinya perubahan iklim (climate change) yang menyebabkan banjir, kekeringan, pencemaran udara dan air serta bencana lainnya. Kondisi tersebut mendorong munculnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebijakan-kebijakan pembangunan yang mengutamakan kelestarian lingkungan. Berdasarkan hal di atas, maka diperlukan suatu instrumen bagi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang berprinsip pada pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup bertujuan untuk mengendalikan pengelolaan dan pendayagunaan SDA serta pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pembangunan tersebut dalam rangka pembangunan daerah yang berkelanjutan dan mendukung pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat.

Tabel 2. 17. Indikator Realisasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika

No	Indikator	Realisasi Tahun Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1	Persentase Pengurangan Sampah Perdesaan (%)	98,8%	85.13%	96.33%	82.72%
2	Persentase Penurunan jumlah indikasi pelanggaran (%)	0	0	0	40%
3	Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi peraturan bidang (%)	0	0	0	56.33%
4	Persentase aduan masyarakat yang di tindaklanjuti (%)	100%	100%	100%	93.33%
5	Meningkatnya Indeks Kualitas Air	0	0	0	53.40%
6	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	0	0	96.36%	96.11%
7	Luasan tutupan lahan yang terkonservasi (Ha)	0	0	0	0

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Berdasarkan Tabel diatas maka bisa disimpulkan maka keenam indikator kinerja realisasi kinerja dinas lingkungan sudah memenuhi target kinerjannya. Yang pertama yaitu indikator Persentase Pengurangan Sampah Perdesaan dimana nilai realisasinya sebesar 82,72 % dengan nila target sebesar 40% yang sudah melampaui target kinerjanya. Indikator yang kedua yaitu Persentase Penurunan jumlah indikasi pelanggaran dengan nilai realisasi sebsar 40% dengan target kinerja sebesar 0.

Indikator yang ketiga yaitu Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi peraturan bidang dengan nilai realisasi sebesar 56,33% dengan target sebesar 0. Indikator yang keempat yaitu Persentase aduan masyarakat yang di tindaklanjuti dengan nllai realisasi sebesar 93,33% dan target kinerjanya sebesar 0. Indikator kelima yaitu Meningkatnya Indeks Kualitas Air dengan nilai realisasi sebesar 53,40% dan target kinerjannya sebesar 0. Indkator yang keenam yaitu Meningkatnya Indeks Kualitas Udara dengan nilai realisasi sebesar 96,11% dan nilai targetnya sebesar 0. Namun hanya satu indikator yang nilainya masih 0 dengan target 0 yaitu Luasan tutupan lahan yang terkonservasi (Ha) hal ini dikarenakan tidak dilaksanakannya kegiatan yang dapat memeperoleh hasil luasan tutup an lahan yang terkonservasi (Ha) karena bukan merupakan tupoksi DLH Kab.

D. Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya merupakan upaya penguatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depannya, penguatan masyarakat untuk dapat memperoleh dan mengelola faktor-faktor produksi, serta penguatan masyarakat untuk dapat menentukan pilihan masa depannya. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu alternative strategi pengelolaan pembangunan yang mewujudkan adanya keterlibatan langsung masyarakat baik secara perorangan sebagai warga masyarakat maupun secara melembaga, dalam seluruh proses pengelolaan pembangunan baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi hasil-hasil pembangunan. Dalam kaitan ini, maka peran aktif masyarakat dalam seluruh proses pengelolaan pembangunan perlu ditingkatkan agar tercipta demokratisasi pengelolaan pembangunan pada tingkat masyarakat.

Tabel 2. 18. Indikator Realiasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Mimika

No	Indikator	Realisasi Tahun Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			67%	65%
2	Persentase kelengkapan dokumen inventarisasi RTLH			30%	30%
3	Pesentase desa yang melestarikan budaya adat			80%	90%
4	Peningkatan status dari peninjau menjadi peserta			80%	80%
5	Persentase anak sekolah yang terpenuhi gizinya (%)				
6	Persentase perangkat desa yang mampu melakukan manajemen padat karya (%)			90%	65%
7	Presentase Desa yang memanfaatkan dan mengelola Dana			90%	90%
8	Persentase perangkat desa dan BPD yang memiliki			50%	50%

No	Indikator	Realisasi Tahun Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
	kemampuan pengelolaan keuangan desa yang baik (%)				
9	Persentase karang taruna aktif (%)			50%	50%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Mimika, 2023

Berdasarkan tabel diatas maka bisa disimpulkan bahwa semua indikator realisasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Mimika pada tahun 2022 masih belum mencapai nilai target. Diantaranya yaitu Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dengan nilai realisasi sebesar 65% dan belum mencapai target yang ditentukan sebesar 93%. Kemudian yang kedua adalah indikator Persentase kelengkapan dokumen inventarisasi RTLH dengan nilai realisasi sebesar 30% namun belum memenuhi target yang ditentukan sebesar 100%, hal ini dikarenakan Kurangnya Adminitrasi pada Tingkat Kampung. Indikator yang ketiga yaitu indikator Pesentase desa yang melestarikan budaya adat dengan nilai realisasi sebesar 90% dengan nilai target yang belum dicapai sebesar 100%, hal ini dikarenakan belum Terakomodir tata kelola dan Potensi sosial budaya adat masyarakat.

Kemudian indikator yang keempat yaitu Peningkatan status dari peninjau menjadi peserta yaitu dengan nilai realisasi sebesar 80% namun masih belum mencapai target yaitu 90%, hal ini dikarenakan Pengkaderan Belum Dilakukan Secara Maksimal. Indiakator yang kelima yaitu Persentase anak sekolah yang terpenuhi gizinya dengan nilai realisasi dan target yang masih belum ada, hal ini dikarenakan Belum Memiliki Data Terkait IKK. Indikator yang keenam yaitu Persentase perangkat desa yang mampu melakukan manajemen padat karya dengan nilai realisasi sebesar 65% dengan nilai capaian target yang belum tercapai sebesar 100%, ini dikarenakan Pada Tahun 2019 s/d 2021 tidak dianggarkan dalam Perencanaan Pembanguanan.

Indikator yang ketujuh yaitu Presentase Desa yang memanfaatkan dan mengelola Dana dengan realisasi sebesar 90% dengan nilai target yang belum tercapai sebesar 100%, hal ini dikarenakan Evaluasi Dan Monitoring Pengelolaan Dana Desa Belum dilakukan secara maksimal. Indikator yang kedelapan yaitu Persentase perangkat desa dan BPD yang memiliki kemampuan pengelolaan keuangan desa yang baik dengan nilai realisasi sebesar 50% dengan capaian target kinerja yang belum tercapai sebesar 100%, ini dikarenakan Kurangnya Pembinaan Dan Bimbingan Peningkatan SDM terkait Pengelolaan keuangan. Yang terakhir yaitu adalah indikator Persentase karang taruna aktif dengan nilai realiasasi sebesar 50%

dengan target yang belum tercapai sebesar 80%, hal ini dikarenakan belum dilakukanya pendataan Karang taruna aktif hanya 50% yaitu yg aktif hanya di tingkat distrik. Tingkat kampung belum dapat dipastikan sebab belum dilakukan pendataan ulang.

E. Komunikasi dan Informatika

Pembangunan di bidang komunikasi dan informatika merupakan salah satu aspek penting yang mendorong pembangunan nasional. Selain menjadi faktor produksi dan ekonomi, bidang komunikasi dan informatika juga berperan sebagai enabler dalam perubahan sosial budaya kemasyarakatan di berbagai aspek. Aspek-aspek yang dimaksud seperti pengembangan kehidupan politik yang lebih demokratis, pengembangan budaya dan pendidikan, dan peningkatan kapasitas governance di berbagai sektor pembangunan. Berikut adalah kinerja bidang urusan komunikasi dan informatika Kabupaten Mimika:

Indikator Kinerja	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
IP TIK	**40**	**45**	**49**	**64**
Sosialisasi melalui media Cetak dan Online	98%	90%	92%	106%
Persentase Aplikasi Layanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Terkoneksi/Terintegrasi	0	87%	92%	76,30%
Persentase Layanan Item data Statistik Sektoral yang disajikan secara akurat	0	30%	50%	60%
Jumlah data/Informasi dan Statistik Daerah yang Dihasilkan	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
Cakupan pola hubungan sandi antar-perangkat daerah kabupaten/kota	0	0%	0%	0%
Persentase Informasi Daerah yang wajib diamankan dengan Persandian	0	0%	0%	0%

Indikator Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP TIK) menunjukkan capaian yang terus meningkat. Hal ini terlihat dari meningkatnya nilai IP TIK dari 40 pada tahun 2019 menjadi 64 pada tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pembangunan TIK di Kabupaten Mimika telah berjalan dengan baik. Indikator sosialisasi melalui media cetak dan online menunjukkan capaian yang cukup baik. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yaitu mencapai 98% pada tahun 2019 dan 106% pada tahun 2022. Indikator persentase aplikasi layanan publik dan tata kelola pemerintahan yang terkoneksi/terintegrasi menunjukkan capaian yang cukup baik. Hal ini terlihat

dari meningkatnya persentase aplikasi yang terkoneksi/terintegrasi dari 0% pada tahun 2019 menjadi 76,30% pada tahun 2022. Indikator persentase layanan item data statistik sektoral yang disajikan secara akurat menunjukkan capaian yang masih kurang baik. Hal ini terlihat dari meningkatnya persentase layanan item data statistik sektoral yang disajikan secara akurat dari 0% pada tahun 2019 menjadi 60% pada tahun 2022. Indikator jumlah data/informasi dan statistik daerah yang dihasilkan menunjukkan capaian yang cukup baik. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah data/informasi dan statistik daerah yang dihasilkan dari 1 dokumen pada tahun 2019 menjadi 2 dokumen pada tahun 2022. Indikator cakupan pola hubungan sandi antar-perangkat daerah kabupaten/kota dan persentase informasi daerah yang wajib diamankan dengan persandian menunjukkan capaian yang masih kurang baik. Hal ini terlihat dari tidak adanya cakupan pola hubungan sandi antar-perangkat daerah kabupaten/kota dan tidak adanya persentase informasi daerah yang wajib diamankan dengan persandian pada tahun 2022. Secara keseluruhan, capaian indikator RPJMD Kabupaten Mimika bidang TIK tahun 2019-2022 menunjukkan hasil yang cukup baik. Namun, masih perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan capaian indikator yang belum menunjukkan hasil yang signifikan, serta untuk meningkatkan meratanya capaian indikator di seluruh wilayah Kabupaten Mimika.

F. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi adalah salah satu penggerak perekonomian nasional. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tulungagung memandang gerakan koperasi sangat diperlukan keberadaanya. Pembinaan dan perhatian gerakan koperasi perlu ditingkatkan agar bisa berkembang dan berfungsi dengan baik. Berikut adalah kinerja bidang urusan koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Mimika:

INDIKATOR KERJA	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
Koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset	8%	93%	100%	10%
Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%
Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%
Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah	24%	100%	100%	12%

INDIKATOR KERJA	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
kabupaten/kota				
Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti Pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	48%	100%	100%	1%
Persentase fasilitasi sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	56%	100%	100%	92%
Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0%	100%	100%	3%
Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	61%	100%	100%	10%
Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0%	100%	100%	3%
Presentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	65%	50%	50%	100%
Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	65%	50%	50%	100%
Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	70%	50%	50%	100%
Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	50%	50%	50%	100%
Persentase jumlah usaha mikro yang dberikan dukungan fasilitasi pemasaran	70%	50%	50%	100%
Persentase jumlah usaha mikro yang dberikan dukungan fasilitasi pemasaran	68%	50%	50%	100%
Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	58%	50%	50%	100%

Indikator koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset menunjukkan capaian yang cukup baik. Hal ini terlihat dari meningkatnya persentase koperasi yang meningkat kualitasnya dari 8% pada tahun 2019 menjadi 100% pada tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil meningkatkan kualitas koperasi di Kabupaten Mimika. Indikator pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota menunjukkan capaian yang cukup baik. Hal ini terlihat dari meningkatnya persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan dari 100% pada tahun 2019 menjadi 100% pada tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil meningkatkan pengawasan terhadap koperasi di Kabupaten Mimika. Indikator usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota menunjukkan capaian yang

cukup baik. Hal ini terlihat dari meningkatnya persentase usaha simpan pinjam yang dinilai kesehatannya dari 100% pada tahun 2019 menjadi 100% pada tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil meningkatkan kesehatan usaha simpan pinjam oleh koperasi di Kabupaten Mimika. Indikator koperasi yang mengikuti pelatihan menunjukkan capaian yang cukup baik. Hal ini terlihat dari meningkatnya persentase koperasi yang mengikuti pelatihan dari 24% pada tahun 2019 menjadi 100% pada tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil meningkatkan kapasitas dan kapabilitas koperasi di Kabupaten Mimika. Indikator jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian menunjukkan capaian yang cukup baik. Hal ini terlihat dari meningkatnya persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian dari 48% pada tahun 2019 menjadi 100% pada tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil meningkatkan pemahaman anggota koperasi tentang perkoperasian di Kabupaten Mimika. Indikator fasilitasi sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) menunjukkan capaian yang cukup baik. Hal ini terlihat dari meningkatnya persentase fasilitasi sertifikat NIK dari 56% pada tahun 2019 menjadi 92% pada tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil meningkatkan legalitas koperasi di Kabupaten Mimika. Indikator yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota menunjukkan capaian yang masih kurang baik. Hal ini terlihat dari meningkatnya persentase dukungan fasilitasi pemasaran dari 0% pada tahun 2019 menjadi 3% pada tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya anggaran untuk dukungan fasilitasi pemasaran, serta kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pihak swasta. Indikator koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota menunjukkan capaian yang cukup baik. Hal ini terlihat dari meningkatnya persentase dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha dari 61% pada tahun 2019 menjadi 10% pada tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil meningkatkan kapasitas dan kapabilitas koperasi di Kabupaten Mimika. Indikator koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota menunjukkan capaian yang masih kurang baik. Hal ini terlihat dari meningkatnya persentase dukungan

fasilitasi kemitraan dari 0% pada tahun 2019 menjadi 3% pada tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pihak swasta, serta kurangnya pemahaman koperasi tentang kemitraan. Secara keseluruhan, capaian indikator RPJMD Kabupaten Mimika bidang koperasi dan usaha mikro tahun 2019-2022 menunjukkan hasil yang cukup baik. Namun, masih perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan capaian indikator yang belum menunjukkan hasil yang signifikan, serta untuk meningkatkan meratanya capaian indikator di seluruh wilayah Kabupaten Mimika.

G. Perpustakaan dan Kearsipan

Perpustakaan merupakan sarana belajar yang terdapat berbagai macam koleksi buku dan majalah, saat ini perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku dan majalah saja akan tetapi juga sebagai tempat penyimpanan map, hasil seni, CD, dan lain sebagainya. Perpustakaan saat ini merupakan tempat yang disediakan pada setiap instansi pembelajaran hal ini didukung agar system pembelajaran lebih mudah terkait fokus-fokus pembelajaran.

Arsip merupakan salah satu unsur penting dalam perencanaan sebagai bentuk pengorganisasian informasi guna mencapai tujuan dalam proses pembangunan. Hal tersebut dikarenakan arsip merupakan naskah yang dibuat sebagai bukti autentik atas kinerja suatu organisasi, berbagai jenis kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan dan hasil evaluasi atas kinerja sebuah organisasi terekam dalam sebuah arsip. Arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tabel 2. 19. Indikator Realisasi Kinerja Dinas Perpuastakaan dan Kearsipan Kabupaten Mimika

No	Indaktor	Realisasi Tahun Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1	Indeks Minat Baca		0	0	0
2	Persentase Pengunjung Perpustakaan		42,45%	29,27%	66,6%
3	Peningkatan Koleksi Jumlah Buku		0	0	0
4	Persentase OPD yang tertib Kearsipan Secara baku		0	0	30%
5	Jumlah Arsip yang dirawat		0	0	0

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mimika, 2023

Berdasarkan tabel diatas bisa disimpulkan bahwa beberapa data masih belum ada datanya, diantaranya yaitu Indeks Minat Baca dengan nilai realisasi 0 dan target yang ditentukan juga 0, ini dikarenakan pada tahun 2023 baru mulai dilakukan survey kegemaran membaca. Selanjutnya yaitu Peningkatan Koleksi Jumlah Buku dengan nilai realisasi sebesar 0 dengan nilai target juga masih 0, ini dikarenakan sampai tahun 2022 belum ada pengadaan buku. Selanjutnya Jumlah Arsip yang di rawat dengan nilai realisasi sebesar 0 dan target juga 0, ini dikarenakan belum ada depo arsip. Selanjutnya yaitu indikator yang sudah memenuhi target yaitu Persentase Pengunjung Perpustakaan dengan nilai realisasi sebesar 66,6% dan sudah memenuhi target sebesar 60%. Kemudian untuk indikator yang masih belum memenuhi target capaian yaitu Persentase OPD yang tertib Kearsipan Secara baku dengan nilai realisasi sebesar 30% dan masih belum memenuhi target sebesar 60%.

2.3.3. Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan

A. Pertanian

Bagi negara agraris seperti Indonesia, peran sektor pertanian sangat penting dalam mendukung perekonomian nasional, terutama sebagai penyedia bahan pangan, sandang dan papan bagi segenap penduduk. Sejarah Indonesia sejak masa kolonial sampai sekarang tidak dapat dipisahkan dari sektor pertanian dan perkebunan, karena sektor – sektor ini memiliki arti yang sangat penting dalam menentukan pembentukan berbagai realitas ekonomi dan sosial masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Lebih dari itu, mata pencaharian sebagian besar rakyat Indonesia bergantung pada sektor pertanian. Pada wilayah Kabupaten Mimika jumlah luasan lahan pertanian masih bisa dioptimalkan untuk mendukung total produksi pangan dengan pengelolaan lahan pertanian yang baik secara seefektif dan seefisien mungkin. Berikut adalah realisasi kinerja dinas pertanian Kabupaten Mimika:

Tabel 2. 20. Indikator Realisasi Kinerja Dinas tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan Kabupaten Mimika

No	Indikator	Realiasasi Tahun Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1	Persentase benih/bibit unggul yang tersedia / persentase ketersediaan sarana pertanian	42	4.98	46	55
2	Persentase prasarana pertanian yang dibangun	45	44	49	55
3	Persentase lembaga penyuluhan pertanian yang aktif dibina	61	55	57	60
4	Tingkat Kematangan Organisasi	80	80	80	100

Sumber: Dinas tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan, 2023

Berdasarkan tabel diatas maka penjelasanya adalah sebagai berikut, pada tahun 2022 kinerja indikator Dinas tanaman pangan, holtikultura dan perkebunanpada Kabupaten Mimika sudah mencapai target kinerja yang sudah ditentukan. Beberapa indikator tersebut adalah Persentase benih/bibit unggul yang tersedia/persentase ketersediaan sarana pertanian dengan nilai realisasi 55% dengan target yang sudah dipenuhi sebesar 50%, namun meskipun demikian masih ada beberapa masalah yang masih dialami yaitu blok penghasil benih unggul di Kabupaten Mimika masih terbatas pada 2 komoditi tanaman perkebunan komoditi, sumberdaya petani dalam menggunakan teknologi pertanian masih rendah, serta sarana yang tersedia belum memenuhi kebutuhan petani, terutama yag ada dipesisir dan pegunungan karena akses jalan dan transportasi yang sangat tinggi. Indikator yang kedua yaitu adalah Persentase prasarana pertanian yang dibangun dengan nilai realisasi sebesar 55% dengan capaian target yang sudah dipenuhi sebesar 49%, walaupun sudag terpenuhi masih ada beberapa permasalahan yaitu tingginya biaya pembukaan lahan, akses transportasi yang sulit dan biaya tinggi untuk pembukaann lahan di daerah pesisir dan pegungungan, serta pembangunan prasarana masih terkendala pada status tanah yang hanya berupa garapan dan sewa lahan. Indikator yang ketiga yaitu Persentase lembaga penyuluhan pertanian yang aktif dibina dengan nilai realisasi sebesar 60% dan memenuhi target yang sudah ditetapkan yaitu 45%, tetapi masih adal permasalahan dalam indikator tersebut yaitu peningkatan sumberdaya petani berupa pelatihan teknologi budidaya dan penanganan pasca panen masih rendah, terutama kelompok tani di daerah pesisir dan pegunungan karena akses transportasi yang sulit dan biaya yang tinggi. Yang terakhir yaitu indikator Tingkat Kematangan Organisasi dengan nilai realisasi sebesar 100% dan sudah memenuhi target yang sudah ditentukan sebesar 37%.

B. Perternakan

Peternakan yang berkembang dan dibudidayakan masyarakat meliputi: ternak besar, ternak kecil, ternak unggas dan aneka ternak. Ternak besar meliputi ternak, kerbau. Ternak kecil meliputi ternak kambing, dan babi. Ternak unggas meliputi: ternak ayam buras, itik, ayam petelur, ayam pedaging, dan burung puyuh, dan jenis aneka ternak, yaitu ternak kelinci. Berikut adalah realisasi kinerja Dinas Peternakan

Dan Kesehatan Hewan:

Tabel 2. 21. Indikator Realisasi Kinerja Dinas Pertenakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Mimika

No	Indikator	Realisasi Tahun Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1	Nilai SAKIP		CC	CC	CC
2	Angka kematian ternak akibat Penyakit (Mortalitas)		4.46%	2.15%	25,81%
3	Persentase peningkatan produktifitas ternak		40%	45%	47%
4	Tingkat Kematangan Organisasi		30%	31%	30%
5	Persentase ternak yang mendapatkan Vaksinasi		15%	18%	30%
6	Persentase peningkatan Populasi Ternak		28%	23%	24%
7	Persentase peternak yang memanfaatkan teknologi dalam Beternak		15%	25%	35%
8	Persentase kelompok ternak yang mengalami peningkatan Kelas Kemampuan		20%	22%	25%

Sumber: Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, 2023

Berdasarkan tabel diatas maka bisa dijelaskan bahwa beberapa indikator pada tahun 2022 beberapa indikator sudah memenuhi target capaian, diantaranya yaitu Angka kematian ternak akibat Penyakit (Mortalitas) dengan nilai realisasi sebesar 25,81% dengan capaian target yang sudah terpenuhi sebesar 7%, namun masih ada permasalahan yaitu adanya wabah penyakit, kekurangan gizi (Mal Nutrisi),dan kekurangan pakan. Yang kedua yaitu adalah Persentase peningkatan produktifitas ternak dengan nilai realisasi sebesar 47% dengan target yang sudah terpeuhi sebesar 10%, walaupun demikian terdapat permasalahan yaitu kurangnya pemasaran dan pengolahan pasca panen. Selanjutnya yaitu adalah Persentase peningkatan Populasi Ternak dengan nilai realisasi sebesar 24% dengan capaian target terpenuhi sebesar 10%, namun demikian masih terdapat permasalahan yaitu kurangnya pelayanan kesehatan,sosialisasi penyuluhan, informasi data dari peternak swadaya yang kurang. Kemudian yaitu indikator Persentase kelompok ternak yang mengalami peningkatan Kelas Kemampuan dengan nilai realisasi sebesar 25% dengan target nilai yang telah tercapai sebesar 10%, walaupun demikian masih ada permsalahan IB (Inseminasi Buatan) sering mengalami kegagalan, kesulitan pengambilan kotoran ternak/hewan.

Selanjutnya indikator yang masih belum memenuhi target realisasi, diantaranya yaitu Nilai SAKIP dengan nilai realisasi CC dan belum mencapai target nilai BB. Yang kedua yaitu indikator Tingkat Kematangan Organisasi dengan nilai realisasi sebesar 30% dan masih belum mencapai target sebesar 41%. Selanjutnya yaitu adalah indikator Persentase ternak yang mendapatkan Vaksinasi dengan nilai realisasi

sebesar 30% dengan nilai target yang masih belum tercapai sebesar 65%, hal ini dikarenakan adanya kendala Lokasi/Tempat hewan/ternak yang akan di vaksin tdk bisa di jangkau, Data Ternak/Hewan yang kurang sehingga banyak yang belum mendapatkan vaksinasi. Kemudian indikator Persentase peternak yang memanfaatkan teknologi dalam Beternak dengan nilai yang terelalisasi sebesar 35% yang masih belum memenuhi target sebesar 45%, dimana hal ini dikarenakan permasalahan kurangnya teknologi dan fasilitas alat dan bahan.

C. Perindustrian dan Perdagangan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Perindutsrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 22. Indikator Realisasi Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika

No	Indikator	Relaisasi Tahun Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1	Kontribusi sektor perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	86	85	85	99
2	Prosentase Komoditas perdagangan yang diawasi peredarannya	77	70	70	90
3	Prosentase produk lokal yang menjadi unggulan daerah	69	66	66	80
4	Rasio ketersediaan pasar tradisional	55	60	60	82
5	Cakupan Unit Usaha Sentra Industir	5	5	5	15
6	Prosentase pertumbuhan industri	20	23	23	75

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika, 2023

Berdasarkan Indikator diatas maka bisa disimpulkan yaitu beberapa indikator sudah memenuhi capaian target. Diantaranya yaitu adalah Kontribusi sektor perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB dengan nilai realisasi sebesar 99% dengan nilai target yang sudah terpenuhi sebesar 96%. Yang kedua yaitu adalah indikator Prosentase Komoditas perdagangan yang diawasi peredarannya dengan nilai realisasi sebesar 90% dengan capaian target yang terpenuhi sebesar 80%. Kemudian indikator yang ketiga yaitu adalah indikator Prosentase produk lokal yang menjadi unggulan daerah dengan nilai realisasi sebesar 80% dengan target yang sudah dicapai sebesar 77%. Yang keempat yaitu indikator Rasio ketersediaan pasar tradisional dengan nilai realisasi sebesar 82% dengan target yang telah tercapai sebesar 70%. Dan indikator Prosentase pertumbuhan industry dengan nilai realisasi sebesar 75% dengan capaian target terpenuhi sebesar 70%. Namun meskipun demikian ada satu indikator yang masih belum memenuhi target yaitu Cakupan Unit

Usaha Sentra Industiri dengan nilai realisasi sebesar 15% namun masih belum mencapai target yang diharapkan sebesar 20%. Walaupun sudah banyak capaian target yang tercapai, masih ada kendala yaitu kurangnya data pendukung.

D. Perikanan dan Kelautan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mimika dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 23. Indikator Realisasi Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Mimika

No	Indikator	Realisasi Tahun Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	44.452	62.91	56.498	51.691
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	67,9	86,00	127,56	135,01
3	Jumlah Pengelolaan dan pemasaran Produksi Perikanan	46.263	174,9	681.7	1431.56

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Mimika, 2023

Berdasarkan tabel diatas maka bisa dijelaskan bahwa seluruh indikator realisasi kinerja sudah memenuhi target yang diharapkan. Yang pertama yaitu adalah indikator Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dengan nilai realisasi sebesar 51.691 ton dan sudah memenuhi target yang diharapkan sebesar 50.000 ton, namun meskipun demikian masih ada beberapa kendala yaitu lokasi produksi tersebar dan berjauhan dari pusat industri, dan kawasan sentra produksi belum ada. Selanjutnya yaitu indikator Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dengan nilai realisasi sebesar 135,01 ton dengan target yang sudah tercapai sebesar 91,12 ton, namun masih ada kendala yaitu topografi wilayah Mimika yang terdiri dari pegunungan dan dataran sampai ke pesisir. Budidaya perikanan berkembang pesat didaerah perkotaan dan satuan transmigrasi. Hal utama yang perlu diperhatikan adalah ketinggian air yang tetap terjaga baik pada saat musim hujan maupun musim panas. Umumnya konstruksi kolam di Mimika masih tradisional (tanah) dan sangat dipengaruhi musim. Dan yang ketiga yaitu adalah Jumlah Pengelolaan dan pemasaran Produksi Perikanan dengan nilai realisasi sebesar 1431,56 ton dengan target yang sudah terpenuhi sebesar 200 ton, dan masih ada kendala yaitu kurangnya SDM yang trampil dalam bidang pengolahan.

2.3.4. Fokus Aspek Penunjang

A. Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan dan sumber daya alam yang dikuasai daerah, baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan. Keuangan daerah dikelola oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan umum, meningkatkan daya saing daerah. Keuangan daerah menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan dapat mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Berikut ini adalah kinerja urusan penunjang bidang keungan daerah Kabupaten Mimika:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Opini BPK Atas laporan Pertanggungjawaban keuangan Daerah Provinsi Papua	wtp	wtp	wtp	wtp
2	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	3.035.206.043.210	24.778.780.898	4.439.738.793.808,66	527.059.494.091.677
3	Toleransi devisi penyerapan keuangan sasuai target	2.910.252.929.684	209.221.821.354	3.551.607.759.094,16	4.425.381.967.591
4	Ketetapan Waktu Penyusunan RAPBD Provinsi Kabupaten Mimika	23 Desember	23 Desember	23 Desember	23 Desember
5	ketetapan Waktu Penyusunan RPAPBD Provinsi Kabupaten Mimika	Oktober	Oktober	Agustus	September
6	Prosentase OPD yang menerapkan anggaran kinerja	100%	100%	100%	100%
7	Prosentase Data Aset yang akurat	90%	97%	90%	97%
8	Prosentase Aset tetap Tanah dan Bangunan yang di gunakan dan dimanfaatkan	100%	100%	100%	100%
9	hasil evaluasi SAKIP Bagian Organisasi Setda Kabupaten Mimika	c	c	c	c

Indikator opini BPK atas laporan pertanggungjawaban keuangan daerah menunjukkan capaian yang cukup baik. Hal ini terlihat dari diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk laporan pertanggungjawaban keuangan daerah Kabupaten Mimika pada tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022. Opini WTP ini menunjukkan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan daerah Kabupaten Mimika telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Indikator rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan capaian yang terus meningkat. Hal ini terlihat dari meningkatnya rasio kemandirian keuangan daerah dari 24,77% pada tahun 2019 menjadi 527,05% pada tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Mimika semakin mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya. Indikator toleransi defisit penyerapan keuangan sesuai target menunjukkan capaian yang cukup baik. Hal ini terlihat dari terpenuhinya toleransi defisit penyerapan keuangan sesuai target, yaitu sebesar 20%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Mimika telah berjalan dengan baik dan efisien. Indikator ketetapan waktu penyusunan RAPBD dan RPAPBD menunjukkan capaian yang cukup baik. Hal ini terlihat dari terpenuhinya ketetapan waktu penyusunan RAPBD dan RPAPBD, yaitu sebelum tanggal 23 Desember. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Mimika telah menjalankan proses penyusunan anggaran dengan tepat waktu. Indikator persentase OPD yang menerapkan anggaran kinerja menunjukkan capaian yang cukup baik. Hal ini terlihat dari terpenuhinya persentase OPD yang menerapkan anggaran kinerja, yaitu sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Mimika telah menerapkan anggaran kinerja secara konsisten. Indikator persentase data aset yang akurat menunjukkan capaian yang meningkat. Hal ini terlihat dari meningkatnya persentase data aset yang akurat dari 90% pada tahun 2019 menjadi 97% pada tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah Kabupaten Mimika telah berjalan dengan baik. Indikator persentase aset tetap tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan menunjukkan capaian yang cukup baik. Hal ini terlihat dari terpenuhinya persentase aset tetap tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan, yaitu sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa aset tetap tanah dan bangunan daerah Kabupaten Mimika telah dimanfaatkan secara optimal. Indikator hasil evaluasi SAKIP Bagian Organisasi Setda Kabupaten Mimika menunjukkan capaian yang cukup baik. Hal ini terlihat dari diperolehnya nilai C untuk hasil evaluasi SAKIP Bagian Organisasi Setda Kabupaten Mimika. Nilai C ini menunjukkan bahwa Bagian Organisasi Setda Kabupaten Mimika telah menerapkan SAKIP secara baik. Secara keseluruhan, capaian indikator RPJMD Kabupaten Mimika bidang keuangan daerah tahun 2019-2022 menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Mimika telah berjalan dengan baik dan efisien. Namun, masih perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan capaian

indikator yang belum menunjukkan hasil yang signifikan, serta untuk meningkatkan meratanya capaian indikator di seluruh OPD di Kabupaten Mimika.

B. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya sumber daya aparatur merupakan prioritas utama untuk dapat mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional. Dengan terbitnya Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi pendorong untuk merealisasikan terwujudnya ASN yang berkualitas, mempunyai Kompetensi di bidangnya, profesional dalam bekerja serta berdaya saing tinggi dalam mengejar kualitas kerja. Dalam mencapai pemerintahan yang bersih, dan akuntabel diperlukan sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi unggul. Berikut adalah indikator kinerja. Berikut adalah indikator Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupatan Mimika:

Tabel 2. 24. Indikator Realiasi Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mimika

No	Indikator	Realisasi Tahun Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1	Persentase ASN yang telah dibina dan dikembangkan	69.03%	89.90%	90%	1.30%
2	Persentase ASN yang memiliki serifikat diklat peningkatan kompentensi	52%	97.82%	80.54%	89.45%
3	Tingkat Kematangan Organisasi	90.05%	96.18%	90%	94.25%

Sumber : BKPSDM Kabupaten Mimika, 2023

Berdasarkan tabel diatas maka bisa dijelaskan bahwa pada tahun 2022 indikator BPKSDM Kabupaten Mimika masih belum memenuhi target yag diharapkan. Yang pertama yaitu adalah indikator Persentase ASN yang telah dibina dan dikembangkan dengan nilai realisasi sebesar 1,30% dan masih jauh memenuhi target yang diharapkan sebesar 100%, hal ini dikarenakan rendahnya jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi setiap tahunnya. Yang kedua indikator Persentase ASN yang memiliki serifikat diklat peningkatan kompentensi dengan nilai realisasi sebesar 89,45% dan masih belum memenuhi target yang diharapkan sebesar 100%, ini dikarenakan Kurangnya anggaran yang tersedia untuk penyelenggaraan diklat struktural bagi ASN yang menduduki jabatan. Dan yang ketiga yaitu adalah indikator Tingkat Kematangan Organisasi dengan nilai realisasi sebesar 94,25% dan masih belum memenuhi target yang diharapkan sebesar 100%,

dimana masih ada permasalahan belum menerapkan standar pelayanan publik SOP yang benar.

C. Inspektorat

Inspektorat atau pengawasan adalah lembaga yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Pengawasan dapat dilakukan terhadap aspek-aspek administratif, teknis, dan keuangan. Inspektorat atau pengawasan memiliki peran penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Pengawasan dapat membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, serta mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Berikut adalah kinerja urusan penunjang bidang inspektorat Kabupaten Mimika:

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Opini BPK	WTP	WTP	WTP
Persentase PD yang Mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP Minimal B	-	-	6
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Internal (APIP)	-	31,33	28,34
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Eksternal (BPK)	73	75,22	76
Persentase Pengaduan Yang Tertangani	-	-	100%
Level Kapabilitas APIP	2	2	1
Persentase Penerapan SPIP Pada Perangkat Daerah	-	-	-
Persentase Capaian MCP KPK	26	37	33
Persentase APIP Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) di Bidang Pengawasan	3	76	96
Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Mimika oleh Inspektorat Kabupaten Mimika	-	-	B

Opini BPK menunjukkan capaian yang cukup baik. Hal ini terlihat dari diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk laporan keuangan pemerintah Kabupaten Mimika pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Opini WTP ini menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah Kabupaten Mimika telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persentase PD yang Mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP Minimal B menunjukkan capaian yang masih kurang. Hal ini terlihat dari nihilnya persentase PD yang mendapatkan hasil evaluasi SAKIP minimal B pada tahun 2020 dan 2021, serta hanya sebesar 6% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak PD yang belum menerapkan SAKIP secara optimal. Persentase Tindak

Lanjut Rekomendasi Pengawasan Internal (APIP) menunjukkan capaian yang meningkat. Hal ini terlihat dari meningkatnya persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan internal dari 31,33% pada tahun 2021 menjadi 28,34% pada tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Mimika telah meningkatkan upaya dalam mendorong tindak lanjut rekomendasi pengawasan internal. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Eksternal (BPK) menunjukkan capaian yang cukup baik. Hal ini terlihat dari meningkatnya persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal dari 73% pada tahun 2021 menjadi 76% pada tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Mimika telah meningkatkan upaya dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. Persentase Pengaduan Yang Tertangani menunjukkan capaian yang cukup baik. Hal ini terlihat dari tertanganinya 100% pengaduan yang masuk ke Inspektorat Kabupaten Mimika pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Mimika telah memberikan pelayanan pengaduan yang baik. Level Kapabilitas APIP menunjukkan capaian yang menurun. Hal ini terlihat dari menurunnya level kapabilitas APIP dari level 2 pada tahun 2021 menjadi level 1 pada tahun 2022. Penurunan ini menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Mimika perlu meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam rangka mewujudkan APIP yang efektif dan efisien. Persentase Penerapan SPIP Pada Perangkat Daerah menunjukkan capaian yang masih kurang. Hal ini terlihat dari nihilnya persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak perangkat daerah yang belum menerapkan SPIP. Persentase Capaian MCP KPK menunjukkan capaian yang meningkat. Hal ini terlihat dari meningkatnya persentase capaian MCP KPK dari 26% pada tahun 2021 menjadi 33% pada tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Mimika telah meningkatkan upaya dalam pencegahan korupsi. Persentase APIP Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) di Bidang Pengawasan menunjukkan capaian yang meningkat. Hal ini terlihat dari meningkatnya persentase APIP yang mengikuti DIKLAT di bidang pengawasan dari 3% pada tahun 2021 menjadi 96% pada tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Mimika telah meningkatkan upaya dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas APIP. Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Mimika oleh Inspektorat Kabupaten Mimika menunjukkan capaian yang cukup baik. Hal ini terlihat dari diperolehnya nilai B untuk hasil evaluasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Mimika oleh

Inspektorat Kabupaten Mimika pada tahun 2022. Nilai B ini menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Mimika telah menerapkan SAKIP secara baik. Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja utama Inspektorat Kabupaten Mimika tahun 2020-2022 menunjukkan hasil yang cukup baik. Namun, masih perlu dilakukan upaya- upaya untuk meningkatkan capaian indikator yang belum menunjukkan hasil yang signifikan, serta untuk meningkatkan meratanya capaian indikator di seluruh OPD di Kabupaten Mimika.

2.4. Kapasitas Inovasi Daerah Kabupaten Mimika

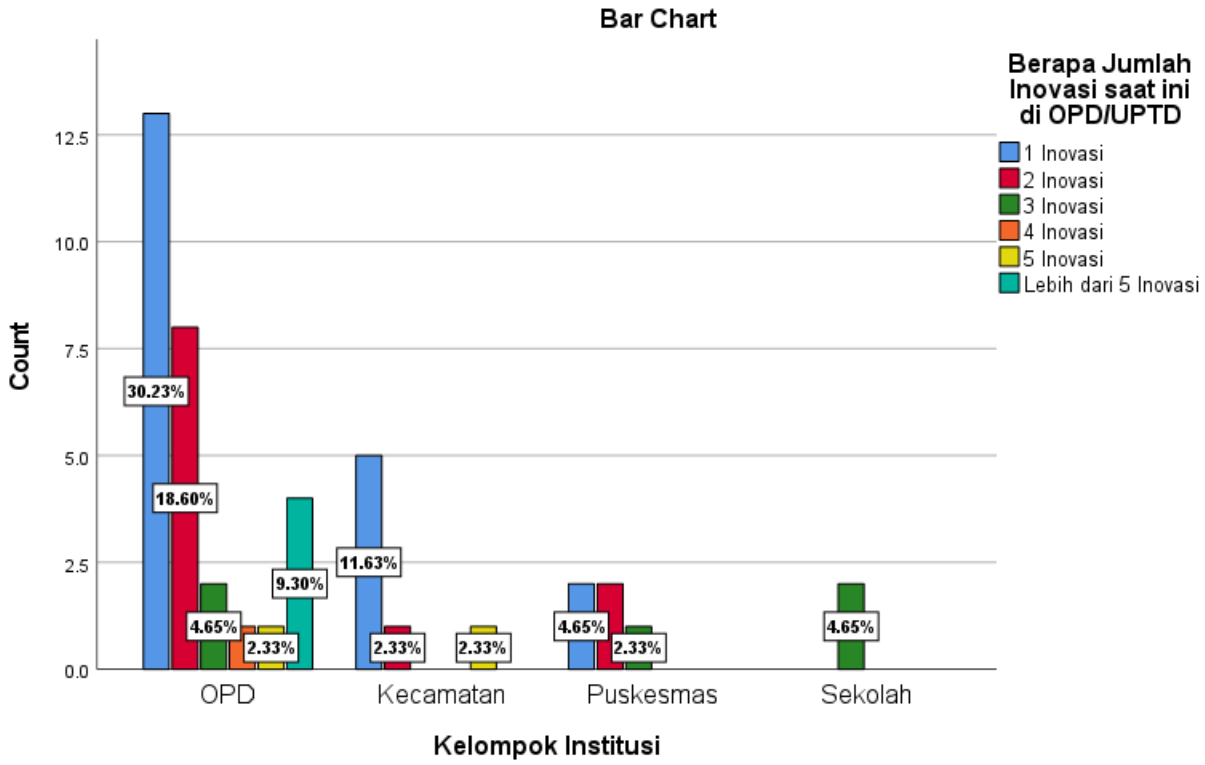
Subab berikut menyajikan hasil survei penggalian data lapangan mengenai kapasitas inovasi di Kabupaten Mimika mengungkap potensi dan tantangan dalam pengembangan inovasi di berbagai sektor, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) seperti puskesmas dan sekolah. Survey dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak 43 responden. Analisis yang dilakukan menggunakan pendekatan identifikasi terhadap OPD dan UPTD menunjukkan bahwa terdapat disparitas dalam pemahaman dan penerapan inovasi di tingkat kelembagaan. OPD cenderung memiliki kapasitas yang lebih tinggi dalam hal sumber daya manusia dan dukungan kebijakan, sementara UPTD, terutama puskesmas dan sekolah, menghadapi keterbatasan dalam hal anggaran, akses teknologi, dan pelatihan untuk mendukung inisiatif inovasi.

Survei ini memberikan pandangan holistik tentang kebutuhan peningkatan sinergi antar lembaga untuk memperkuat ekosistem inovasi di Kabupaten Mimika, yang diharapkan dapat mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Tabel 1. Kelompok Institusi * Berapa Jumlah Inovasi saat ini di OPD/UPTD Crosstabulation

Count

		Berapa Jumlah Inovasi saat ini di OPD/UPTD						
		1 Inovasi	2 Inovasi	3 Inovasi	4 Inovasi	5 Inovasi	Lebih dari 5 Inovasi	Total
Kelompok Institusi	OPD	13	8	2	1	1	4	29
	Distrik	5	1	0	0	1	0	7
	Puskesmas	2	2	1	0	0	0	5
	Sekolah	0	0	2	0	0	0	2
Total		20	11	5	1	2	4	43



Berdasarkan data dari tabel kajian Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kabupaten Mimika, terdapat total 43 inovasi yang tersebar di berbagai kelompok institusi. Dari jumlah ini, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi kontributor terbesar dengan 29 inovasi, di mana sebagian besar OPD memiliki satu atau dua inovasi (13 OPD dengan satu inovasi dan 8 OPD dengan dua inovasi). Selain itu, ada 4 OPD yang memiliki lebih dari 5 inovasi, menunjukkan kapasitas inovasi yang lebih signifikan. Kecamatan menyumbang 7 inovasi, dengan sebagian besar memiliki satu inovasi, sedangkan Puskesmas memiliki total 5 inovasi, tersebar di beberapa institusi dengan variasi jumlah. Sekolah hanya mencatat dua institusi yang masing-masing memiliki tiga inovasi. Data ini menunjukkan bahwa meskipun inovasi tersebar di berbagai institusi, mayoritas institusi masih berada dalam kategori inovasi yang rendah (satu hingga dua inovasi), dengan hanya sedikit institusi yang menunjukkan kapasitas inovasi yang lebih besar.

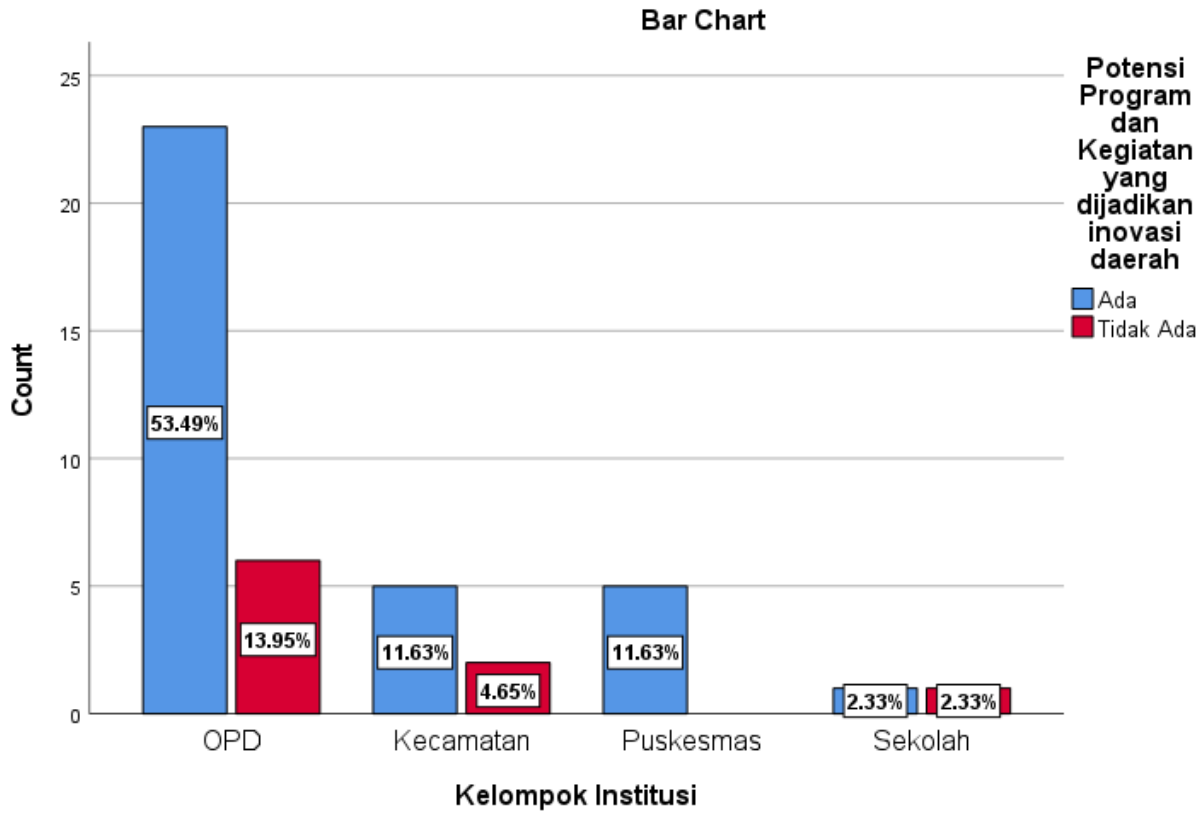
Tabel 2. Kelompok Institusi * Potensi Program dan Kegiatan yang dijadikan inovasi daerah Crosstabulation

Count

		Potensi Program dan Kegiatan yang dijadikan inovasi daerah		
		Ada	Tidak Ada	Total
Kelompok Institusi	OPD	23	6	29
	Distrik	5	2	7
	Puskesmas	5	0	5

Count

		Potensi Program dan Kegiatan yang dijadikan inovasi daerah		
		Ada	Tidak Ada	Total
	Sekolah	1	1	2
Total		34	9	43

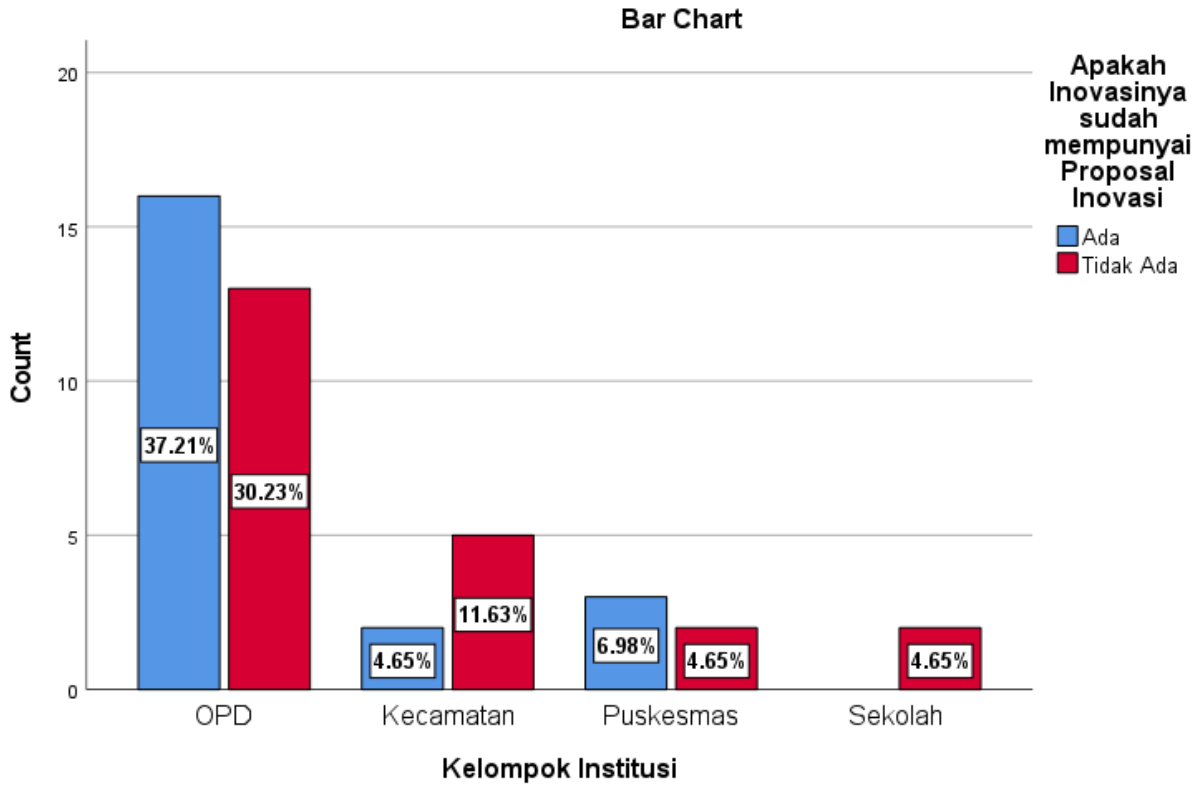


Analisis data pada tabel kajian Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kabupaten Mimika menunjukkan bahwa terdapat 43 program dan kegiatan yang diidentifikasi sebagai potensi inovasi daerah dari berbagai kelompok institusi. Dari 43 total program, 34 di antaranya memiliki potensi untuk dijadikan inovasi, sementara 9 lainnya tidak menunjukkan potensi inovasi. Berdasarkan kelompok institusi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki jumlah potensi inovasi terbesar, dengan 23 dari 29 program yang dinilai memiliki potensi inovasi. Kecamatan memiliki 5 program berpotensi inovasi dari 7 total program, sedangkan Puskesmas seluruhnya (5 dari 5) menunjukkan potensi inovasi. Sementara itu, dari dua program di sekolah, hanya satu yang berpotensi menjadi inovasi. Analisis ini menggambarkan bahwa mayoritas program di Kabupaten Mimika memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai inovasi daerah, terutama di OPD dan Puskesmas.

Tabel 3. Kelompok Institusi * Apakah Inovasinya sudah mempunyai Proposal Inovasi Crosstabulation

Count

		Apakah Inovasinya sudah mempunyai Proposal Inovasi		Total
		Ada	Tidak Ada	
Kelompok Institusi	OPD	16	13	29
	Distrik	2	5	7
	Puskesmas	3	2	5
	Sekolah	0	2	2
Total		21	22	43

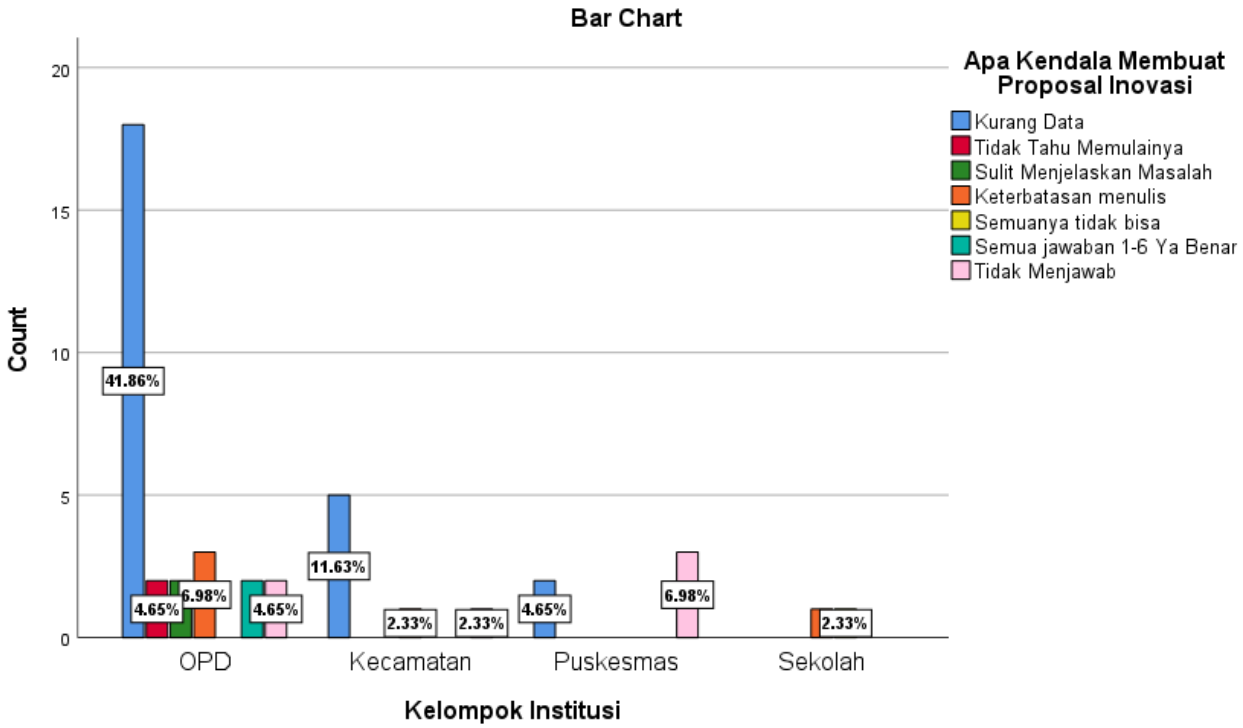


Berdasarkan data kajian Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kabupaten Mimika, dari total 43 inovasi yang diidentifikasi, 21 inovasi sudah memiliki proposal inovasi, sementara 22 inovasi lainnya belum memiliki proposal. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa di tingkat OPD, terdapat 29 inovasi, dengan 16 di antaranya sudah memiliki proposal inovasi, sedangkan 13 belum. Pada tingkat kecamatan, dari 7 inovasi, hanya 2 yang sudah memiliki proposal, sementara 5 inovasi belum. Di puskesmas, dari 5 inovasi, 3 sudah memiliki proposal, dan 2 belum. Sedangkan di sekolah, dari 2 inovasi yang diidentifikasi, tidak ada satupun yang sudah memiliki proposal. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar inovasi di tingkat OPD dan puskesmas lebih terstruktur, sementara inovasi di kecamatan dan sekolah cenderung kurang didukung oleh proposal formal.

Tabel 4. Kelompok Institusi * Apa Kendala Membuat Proposal Inovasi Crosstabulation

Count

		Apa Kendala Membuat Proposal Inovasi							
		Kurang Data	Tidak Tahu Memulainya	Sulit Menjelaskan Masalah	Keterbatasan menulis	Semuanya tidak bisa	Semua jawaban 1-6 Ya Benar	Tidak Menjawab	Total
Kelompok Institusi	OPD	18	2	2	3	0	2	2	29
	Distrik	5	0	0	1	0	0	1	7
	Puskesmas	2	0	0	0	0	0	3	5
	Sekolah	0	0	0	1	1	0	0	2
Total		25	2	2	5	1	2	6	43



Berdasarkan data hasil kajian Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kabupaten Mimika, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh berbagai kelompok institusi dalam menyusun proposal inovasi. Dari total 43 responden, sebanyak 25 responden menyatakan bahwa "kurang data" menjadi kendala utama dalam membuat proposal inovasi. Kendala ini terutama dirasakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan jumlah 18 responden, diikuti oleh Kecamatan (5 responden) dan Puskesmas (2 responden). Selain itu, hanya 2 responden yang menyatakan bahwa mereka tidak tahu bagaimana memulai pembuatan proposal, dan 2 lainnya merasa kesulitan dalam menjelaskan masalah yang dihadapi.

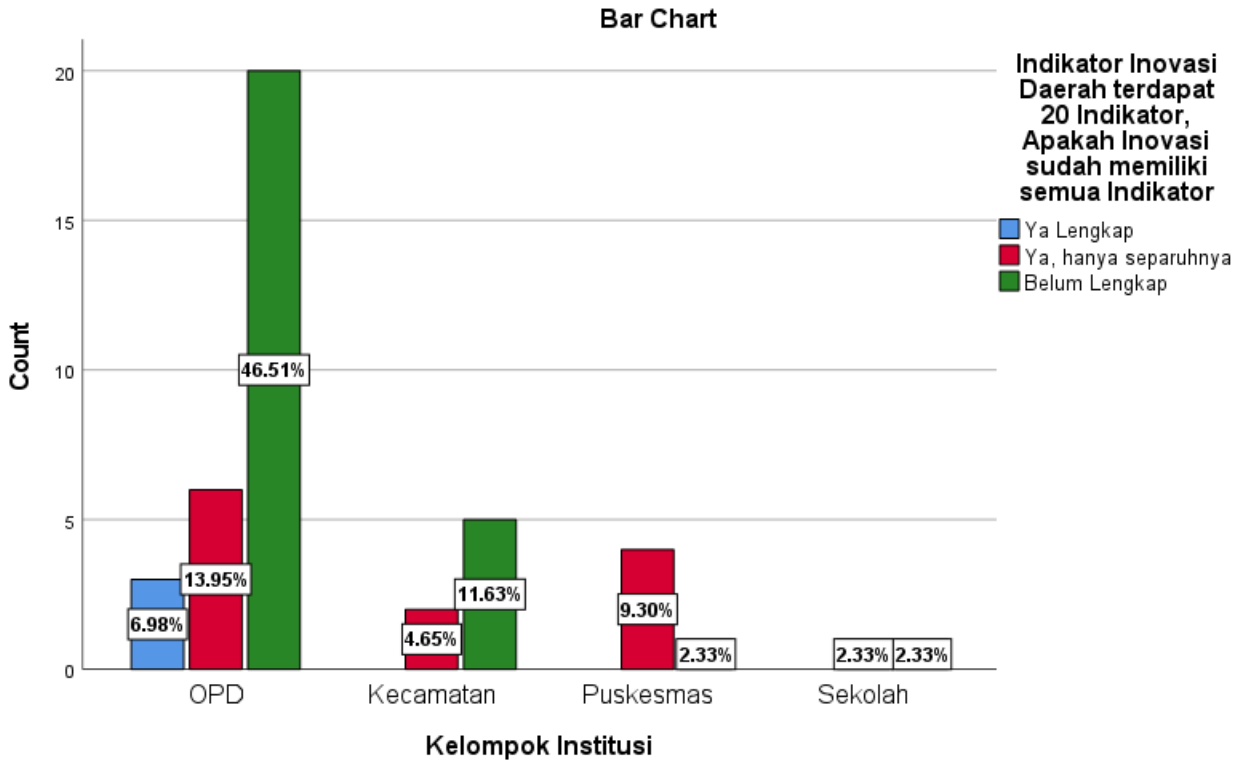
Keterbatasan dalam menulis juga menjadi kendala yang dirasakan oleh 5 responden, di mana sebagian besar dari mereka berasal dari OPD dan 1 orang dari Sekolah. Sebanyak 1 responden dari Sekolah menyatakan bahwa semua kendala, termasuk kurang data dan keterbatasan menulis, merupakan hambatan dalam penyusunan proposal. Selain itu, 2 responden menjawab bahwa semua jawaban dari kendala 1 hingga 6 benar, sementara 6 responden tidak menjawab pertanyaan terkait kendala ini.

Secara keseluruhan, OPD merupakan kelompok yang paling banyak mengalami hambatan dalam penyusunan proposal inovasi, diikuti oleh Kecamatan, Puskesmas, dan Sekolah. Analisis ini menunjukkan bahwa faktor kurangnya data dan keterbatasan dalam kemampuan menulis merupakan masalah utama yang perlu diatasi untuk meningkatkan kapasitas inovasi daerah di Kabupaten Mimika.

Tabel 5. Kelompok Institusi * Indikator Inovasi Daerah terdapat 20 Indikator, Apakah Inovasi sudah memiliki semua Indikator Crosstabulation

Count

		Indikator Inovasi Daerah terdapat 20 Indikator, Apakah Inovasi sudah memiliki semua Indikator			
		Ya Lengkap	Ya, hanya separuhnya	Belum Lengkap	Total
Kelompok Institusi	OPD	3	6	20	29
	Distrik	0	2	5	7
	Puskesmas	0	4	1	5
	Sekolah	0	1	1	2
Total		3	13	27	43

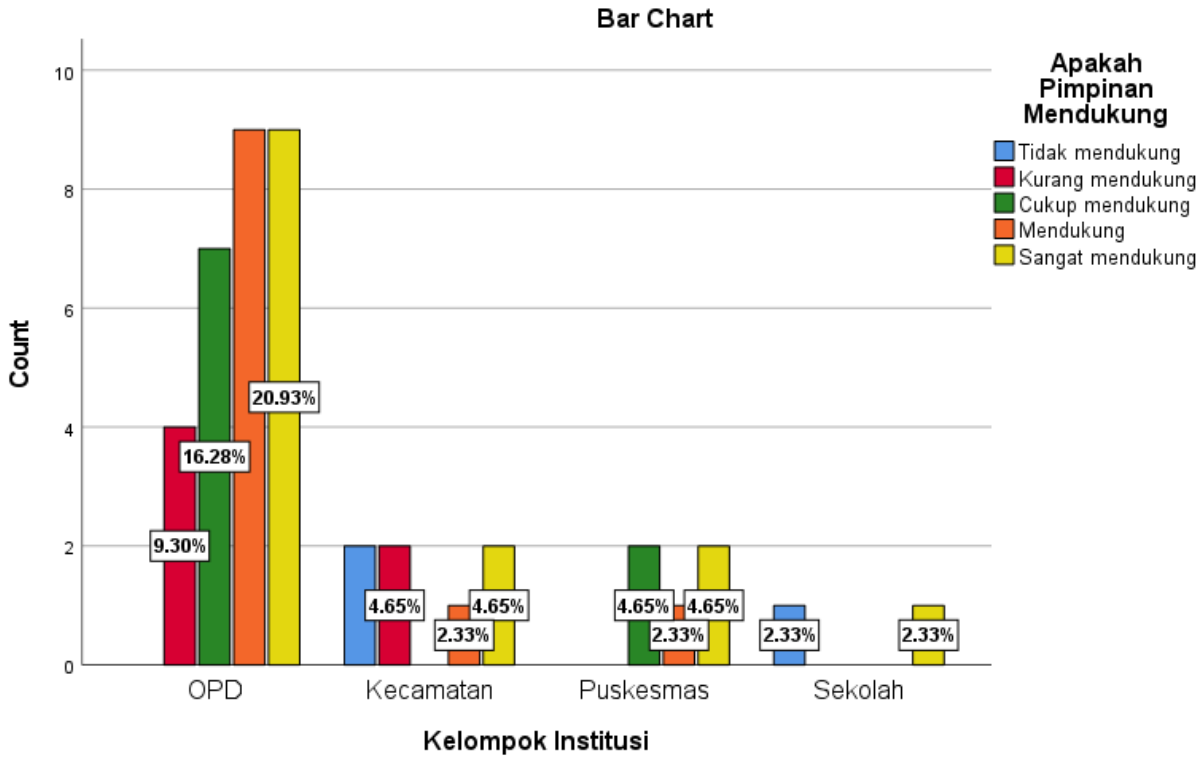


Kajian Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kabupaten Mimika menunjukkan bahwa dari 43 entitas yang dievaluasi, mayoritas inovasi belum memiliki indikator inovasi daerah yang lengkap. Terdapat 20 indikator yang harus dipenuhi oleh inovasi daerah, namun analisis menunjukkan hanya 3 inovasi yang memenuhi semua indikator secara lengkap, sementara 13 inovasi memenuhi setengah indikator, dan 27 inovasi belum lengkap. Dalam kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 3 inovasi telah memenuhi indikator secara lengkap, 6 inovasi memenuhi separuh indikator, dan 20 inovasi belum lengkap. Pada tingkat kecamatan, tidak ada inovasi yang lengkap, hanya 2 inovasi yang memenuhi separuh indikator, dan 5 inovasi belum lengkap. Di tingkat Puskesmas, tidak ada inovasi yang lengkap, 4 inovasi memenuhi separuh indikator, dan 1 inovasi belum lengkap. Sementara itu, di sektor sekolah, tidak ada inovasi yang lengkap, hanya 1 inovasi yang memenuhi separuh indikator, dan 1 inovasi belum lengkap. Hasil ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam pemenuhan indikator inovasi daerah di Kabupaten Mimika, terutama di kecamatan, puskesmas, dan sekolah.

Tabel 6. Kelompok Institusi * Apakah Pimpinan Mendukung Crosstabulation

Count

		Apakah Pimpinan Mendukung					
		Tidak mendukung	Kurang mendukung	Cukup mendukung	Mendukung	Sangat mendukung	Total
Kelompok Institusi	OPD	0	4	7	9	9	29
	Distrik	2	2	0	1	2	7
	Puskesmas	0	0	2	1	2	5
	Sekolah	1	0	0	0	1	2
Total		3	6	9	11	14	43



Berdasarkan data kajian Sistem Inovasi Daerah (SIDA) di Kabupaten Mimika, terdapat variasi dalam tingkat dukungan pimpinan terhadap implementasi inovasi. Dari total 43 responden yang terdiri dari beberapa institusi, yaitu OPD, Kecamatan, Puskesmas, dan Sekolah, mayoritas pimpinan mendukung atau sangat mendukung inovasi daerah. Sebanyak 11 pimpinan (25,6%) memberikan dukungan, dan 14 pimpinan (32,6%) sangat mendukung.

Secara rinci, dukungan tertinggi berasal dari OPD, di mana 9 pimpinan mendukung dan 9 sangat mendukung, dengan total 18 dari 29 responden yang memberikan dukungan signifikan. Di tingkat Kecamatan, dukungan relatif terbagi, dengan hanya 1 pimpinan yang mendukung dan 2 yang sangat mendukung dari 7 total responden. Di Puskesmas, terdapat 1 pimpinan yang mendukung dan 2 yang sangat mendukung dari total 5 responden. Di sisi lain, sekolah memiliki keterlibatan yang sangat terbatas, hanya ada 2 pimpinan, dengan 1

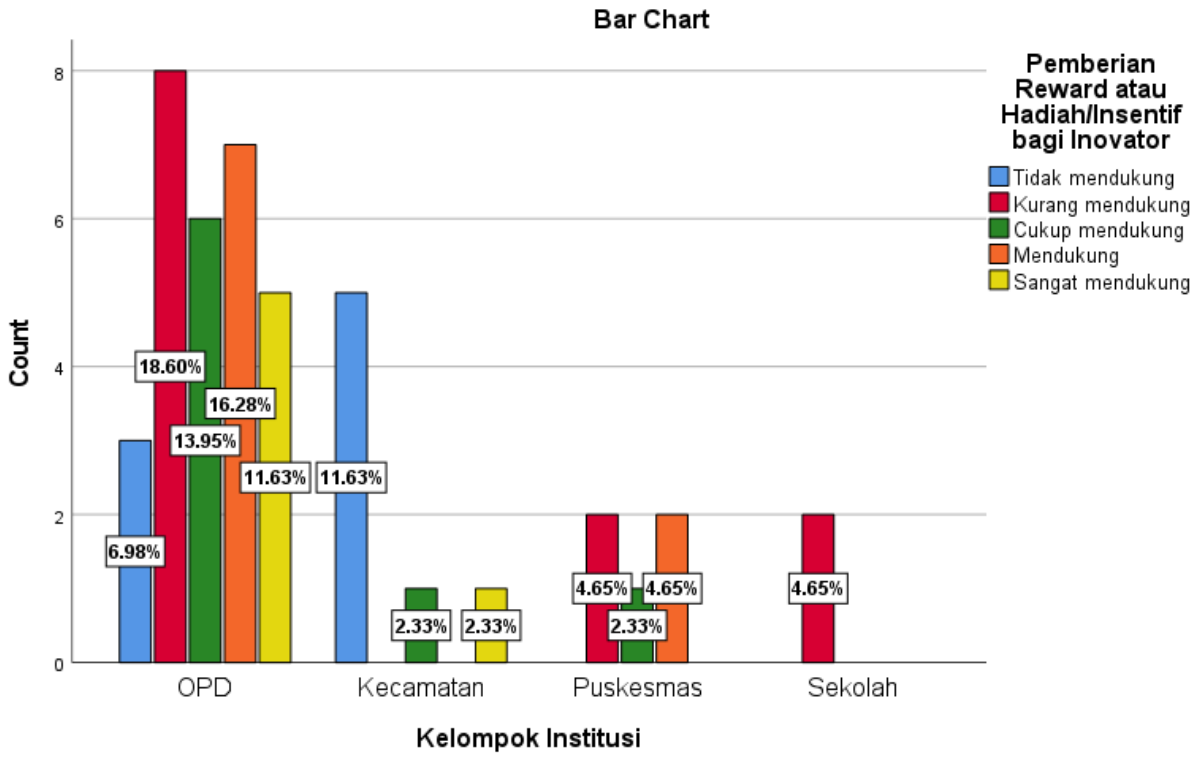
pimpinan yang sangat mendukung.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa ada dukungan yang cukup besar dari pimpinan institusi di Kabupaten Mimika terhadap inovasi daerah, terutama dari OPD, meskipun masih terdapat beberapa institusi yang memberikan dukungan yang kurang optimal.

Tabel 7. Kelompok Institusi * Pemberian Reward atau Hadiah/Insentif bagi Inovator Crosstabulation

Count

		Pemberian Reward atau Hadiah/Insentif bagi Inovator					
		Tidak mendukung	Kurang mendukung	Cukup mendukung	Mendukung	Sangat mendukung	Total
Kelompok Institusi	OPD	3	8	6	7	5	29
	Distrik	5	0	1	0	1	7
	Puskesmas	0	2	1	2	0	5
	Sekolah	0	2	0	0	0	2
Total		8	12	8	9	6	43



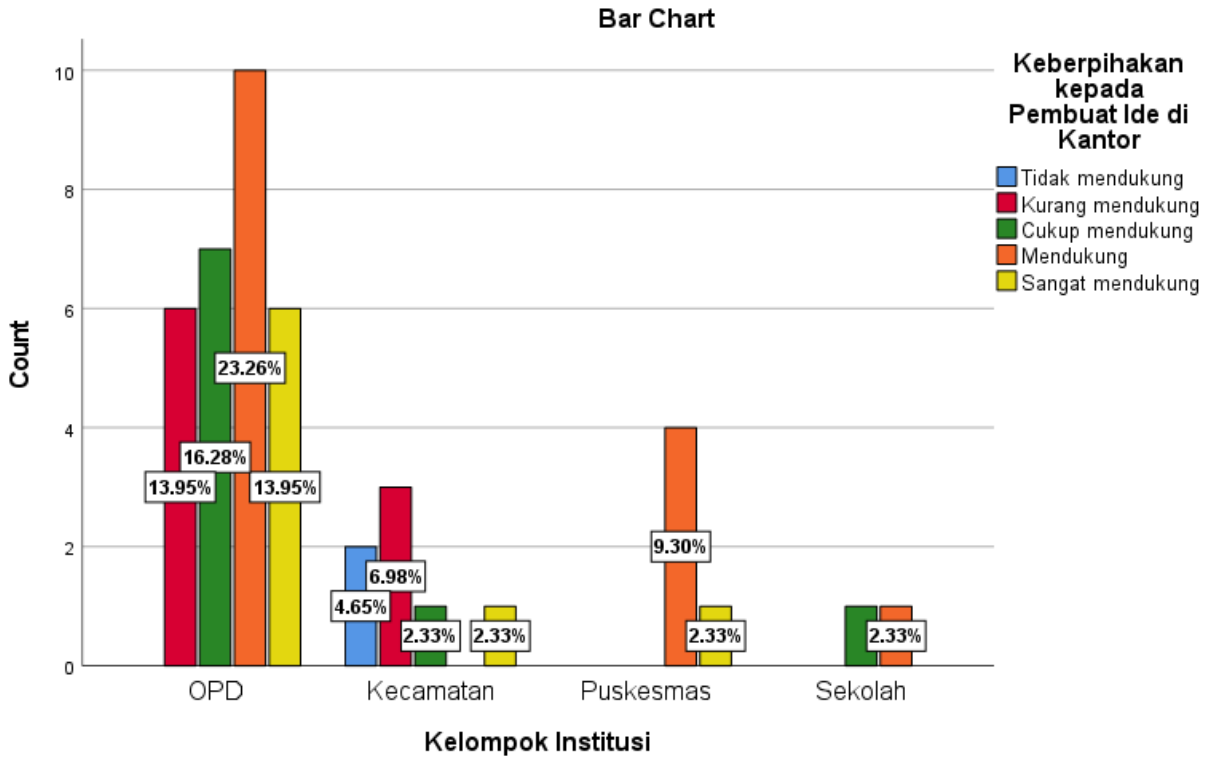
Analisis data pada tabel mengenai dukungan terhadap pemberian reward atau insentif bagi inovator di Kabupaten Mimika menunjukkan adanya variasi tingkat dukungan dari berbagai kelompok institusi. Dari total 43 respons, mayoritas datang dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah), yang berjumlah 29. Sebagian besar responden dari

OPD memberikan tanggapan "kurang mendukung" (8 orang) dan "cukup mendukung" (6 orang), sedangkan 7 orang mendukung dan 5 sangat mendukung pemberian insentif ini. Kecamatan menyumbang 7 respons, dengan 5 di antaranya tidak mendukung, namun ada 1 responden yang cukup mendukung dan 1 mendukung. Dari Puskesmas, terdapat 5 respons, dengan 2 orang "kurang mendukung" dan masing-masing 1 orang "cukup mendukung" dan "mendukung". Sekolah hanya menyumbang 2 respons, keduanya menunjukkan sikap "kurang mendukung". Secara keseluruhan, tingkat dukungan terhadap pemberian reward bagi inovator cenderung rendah hingga sedang, dengan dominasi respons yang tidak mendukung atau kurang mendukung dibandingkan respons yang mendukung atau sangat mendukung.

Tabel 8. Kelompok Institusi * Keberpihakan kepada Pembuat Ide di Kantor Crosstabulation

Count

		Keberpihakan kepada Pembuat Ide di Kantor					Total
		Tidak mendukung	Kurang mendukung	Cukup mendukung	Mendukung	Sangat mendukung	
Kelompok Institusi	OPD	0	6	7	10	6	29
	Distrik	2	3	1	0	1	7
	Puskesmas	0	0	0	4	1	5
	Sekolah	0	0	1	1	0	2
Total		2	9	9	15	8	43



Berdasarkan analisis data pada tabel Kajian Sistem Inovasi Daerah (SIDA) di Kabupaten Mimika, terdapat variasi dukungan terhadap pembuat ide di kantor oleh berbagai kelompok institusi. Dari total 43 responden, kelompok Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menunjukkan dukungan yang paling signifikan, dengan 29 responden, di mana 10 responden menyatakan mendukung dan 6 responden sangat mendukung inisiatif tersebut. Sebaliknya, dukungan dari tingkat kecamatan relatif rendah, dengan total hanya 7 responden, di mana mayoritas (2) menyatakan tidak mendukung.

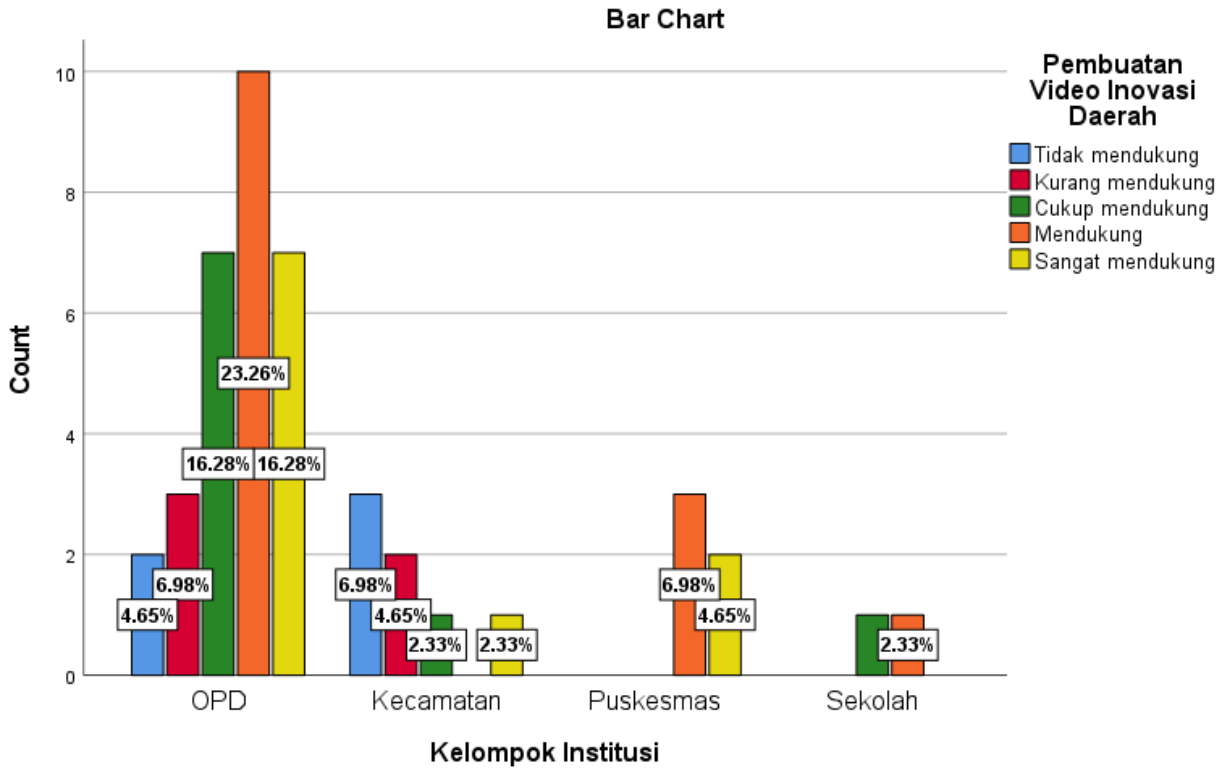
Puskesmas dan sekolah memiliki dukungan yang paling minim, masing-masing hanya 5 dan 2 responden. Puskesmas menunjukkan keberpihakan yang lebih baik dengan 4 responden yang mendukung, meskipun tidak ada dukungan dari kategori lainnya. Di sekolah, dukungan terbatas pada 1 responden yang menyatakan cukup mendukung.

Secara keseluruhan, hasil ini mencerminkan bahwa meskipun ada dukungan yang positif terhadap inovasi di kalangan OPD, institusi lain, terutama di tingkat kecamatan dan pendidikan, menunjukkan dukungan yang lebih lemah. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan keterlibatan dan dukungan dari semua institusi dalam pengembangan sistem inovasi daerah di Kabupaten Mimika.

Tabel 9. Kelompok Institusi * Pembuatan Video Inovasi Daerah Crosstabulation

Count

		Pembuatan Video Inovasi Daerah					Total
		Tidak mendukung	Kurang mendukung	Cukup mendukung	Mendukung	Sangat mendukung	
Kelompok Institusi	OPD	2	3	7	10	7	29
	Distrik	3	2	1	0	1	7
	Puskesmas	0	0	0	3	2	5
	Sekolah	0	0	1	1	0	2
Total		5	5	9	14	10	43



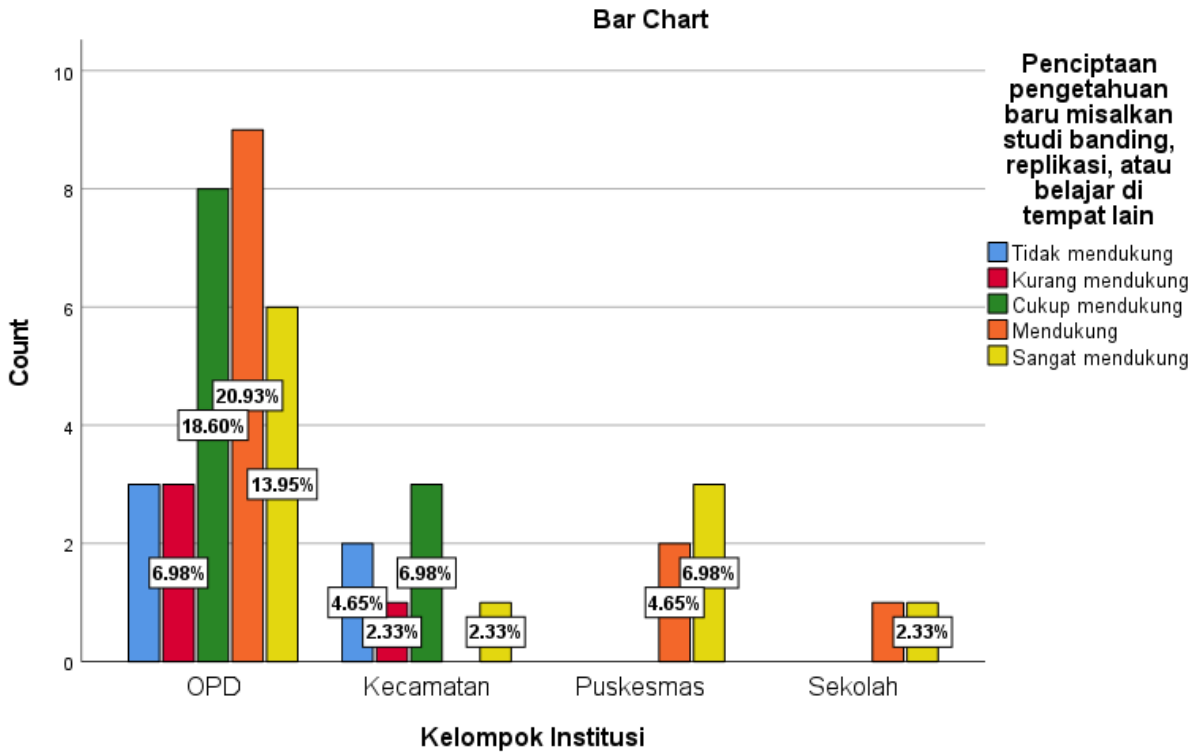
Berdasarkan analisis data tabel kajian Sistem Inovasi Daerah (SIDA) di Kabupaten Mimika, terlihat bahwa dukungan terhadap pembuatan video inovasi daerah bervariasi di antara kelompok institusi. Dari total 43 responden, kelompok Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menunjukkan dukungan yang paling tinggi, dengan 29 responden memberikan penilaian positif, yaitu 10 mendukung dan 7 sangat mendukung. Sebaliknya, kelompok Kecamatan hanya memiliki 7 responden, di mana tidak ada yang mendukung dan hanya 1 responden yang sangat mendukung. Puskesmas memiliki kontribusi dukungan yang moderat dengan 5 responden, di mana 3 mendukung dan 2 sangat mendukung. Sedangkan, kelompok Sekolah menunjukkan dukungan yang paling rendah, dengan total 2 responden, di mana 1 responden cukup mendukung dan 1 responden mendukung.

Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa dukungan terhadap pembuatan video inovasi daerah di Kabupaten Mimika didominasi oleh OPD, sementara kelompok lain, seperti Kecamatan, Puskesmas, dan Sekolah, menunjukkan dukungan yang lebih rendah, mencerminkan perlunya upaya lebih untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi institusi lain dalam inisiatif inovasi daerah.

Tabel 10. Kelompok Institusi * Penciptaan pengetahuan baru misalkan studi banding, replikasi, atau belajar di tempat lain Crosstabulation

Count

		Penciptaan pengetahuan baru misalkan studi banding, replikasi, atau belajar di tempat lain					Total
		Tidak mendukung	Kurang mendukung	Cukup mendukung	Mendukung	Sangat mendukung	
Kelompok Institusi	OPD	3	3	8	9	6	29
	Distrik	2	1	3	0	1	7
	Puskesmas	0	0	0	2	3	5
	Sekolah	0	0	0	1	1	2
Total		5	4	11	12	11	43



Berdasarkan analisis data dari tabel Kajian Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kabupaten Mimika, terlihat adanya variasi dukungan terhadap penciptaan pengetahuan baru, yang mencakup studi banding, replikasi, atau pembelajaran dari tempat lain. Dari total 43 responden, kelompok Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menunjukkan hasil yang paling signifikan dengan 29 responden, di mana 9 menyatakan mendukung dan 6 sangat mendukung. Sementara itu, kecamatan hanya memiliki 7 responden, dengan dukungan yang relatif rendah, di mana hanya 1 responden menyatakan sangat mendukung.

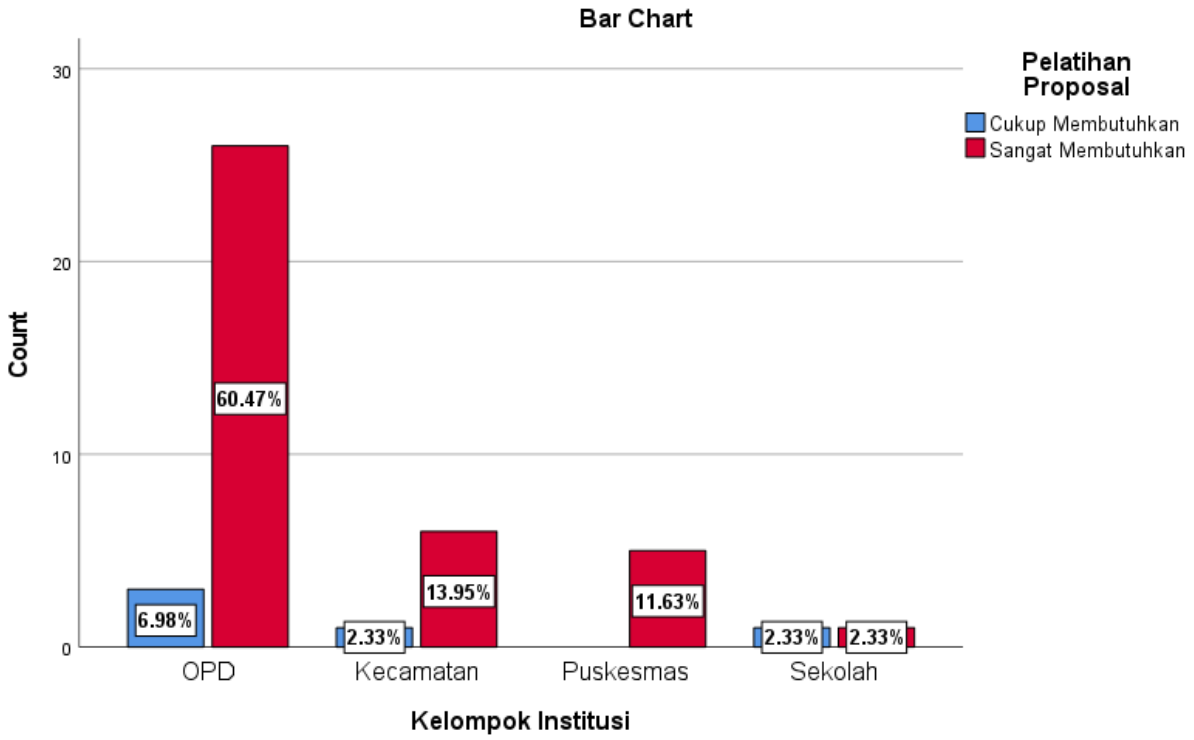
Pada level Puskesmas, terdapat 5 responden, di mana 2 di antaranya mendukung penciptaan pengetahuan baru. Di sisi lain, sekolah, dengan 2 responden, mencatatkan dukungan yang minimal, hanya 1 responden yang mendukung. Secara keseluruhan, dari 43 responden, terdapat 12 yang mendukung dan 11 yang sangat mendukung,

menunjukkan bahwa meskipun ada dukungan yang cukup baik, masih ada ruang untuk meningkatkan partisipasi dan dukungan terhadap inovasi dan penciptaan pengetahuan baru di Kabupaten Mimika. Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih efektif untuk mendorong kolaborasi dan penguatan kapasitas di semua tingkat institusi untuk meningkatkan penciptaan pengetahuan dan inovasi daerah.

Tabel 11. Kelompok Institusi * Pelatihan Proposal Crosstabulation

Count

		Pelatihan Proposal		
		Cukup Membutuhkan	Sangat Membutuhkan	Total
Kelompok Institusi	OPD	3	26	29
	Distrik	1	6	7
	Puskesmas	0	5	5
	Sekolah	1	1	2
Total		5	38	43



Analisis data tabel Kajian Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kabupaten Mimika menunjukkan adanya kebutuhan yang signifikan terhadap pelatihan proposal di berbagai kelompok institusi. Dari total 43 responden, 38 (88,4%) menyatakan sangat membutuhkan pelatihan, sedangkan 5 (11,6%) menyatakan cukup membutuhkan.

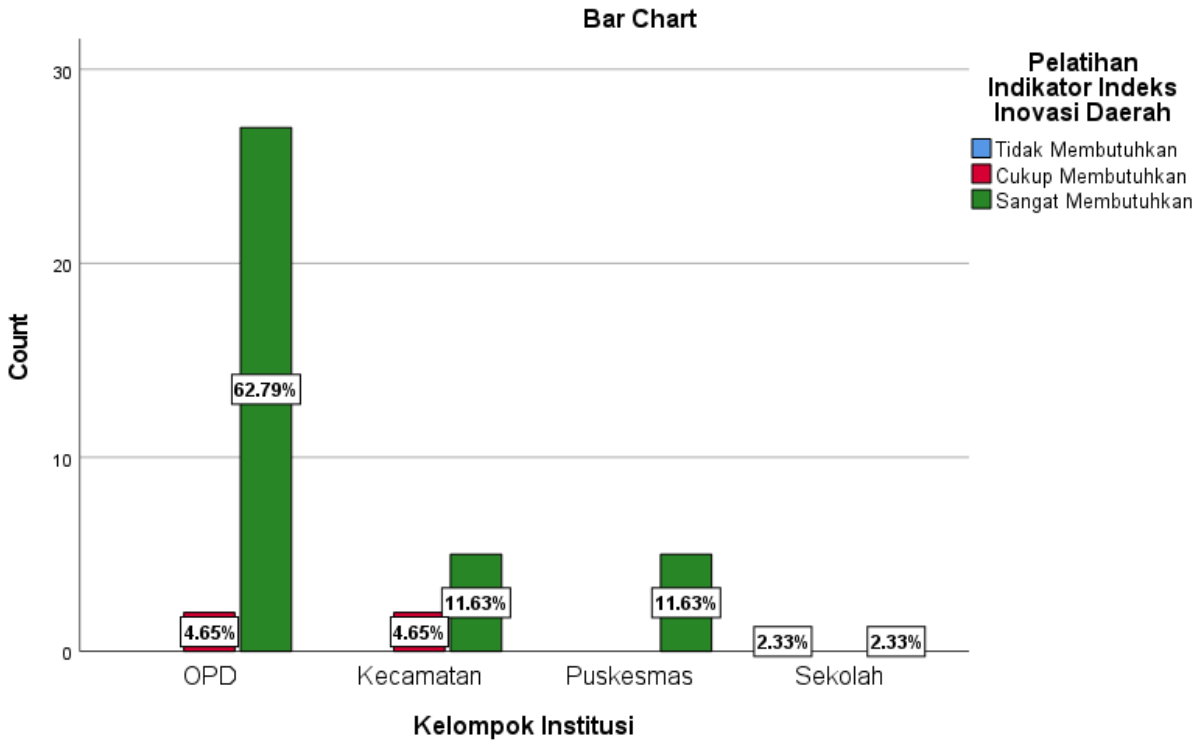
Kelompok OPD mencatat kebutuhan tertinggi dengan 26 responden (89,7% dari kelompok ini) yang sangat membutuhkan pelatihan. Kecamatan juga menunjukkan

kebutuhan, meskipun lebih rendah, dengan 6 responden (85,7%). Sementara itu, Puskesmas dan Sekolah menunjukkan angka kebutuhan yang lebih kecil, masing-masing 5 dan 2 responden. Hasil ini mengindikasikan bahwa pelatihan proposal adalah aspek penting dalam pengembangan kapasitas institusi di Kabupaten Mimika, terutama di tingkat OPD, yang dapat berkontribusi pada peningkatan inovasi dan efektivitas program daerah.

Tabel 12. Kelompok Institusi * Pelatihan Indikator Indeks Inovasi Daerah Crosstabulation

Count

		Pelatihan Indikator Indeks Inovasi Daerah			
		Tidak Membutuhkan	Cukup Membutuhkan	Sangat Membutuhkan	Total
Kelompok Institusi	OPD	0	2	27	29
	Distrik	0	2	5	7
	Puskesmas	0	0	5	5
	Sekolah	1	0	1	2
Total		1	4	38	43



Berdasarkan analisis data pada tabel Kajian Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kabupaten Mimika, dapat dilihat bahwa dari total 43 responden, sebagian besar menunjukkan kebutuhan pelatihan dalam indikator indeks inovasi daerah. Terdapat 38 responden (88,37%) yang menyatakan bahwa mereka sangat membutuhkan pelatihan, sementara hanya 4 responden (9,30%) yang merasa cukup membutuhkan dan 1

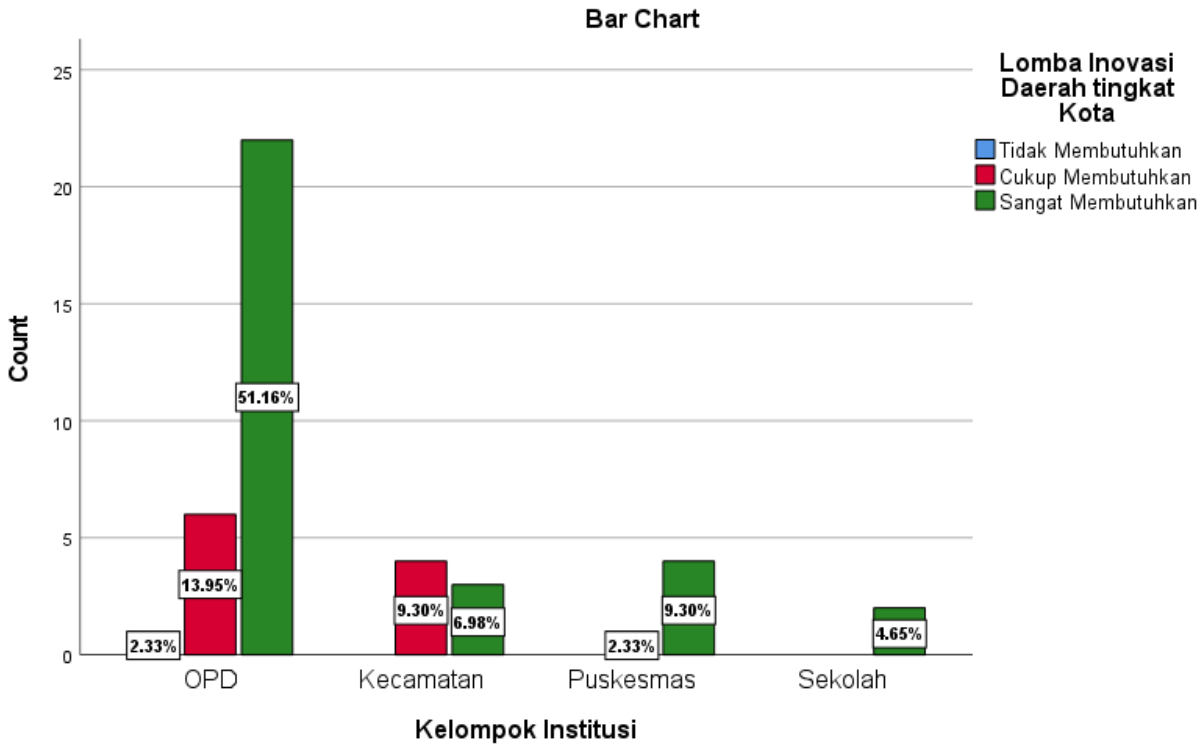
responden (2,33%) yang tidak membutuhkan pelatihan.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa kelompok institusi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mencatatkan angka tertinggi, dengan 27 dari 29 responden (93,10%) menyatakan sangat membutuhkan pelatihan. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran yang tinggi akan pentingnya pelatihan untuk meningkatkan inovasi di tingkat OPD. Sementara itu, pada kelompok kecamatan dan Puskesmas, kebutuhan pelatihan juga terlihat signifikan meskipun dengan jumlah responden yang lebih rendah. Secara keseluruhan, hasil ini menekankan perlunya perhatian terhadap pengembangan kapasitas dan pelatihan bagi institusi di Kabupaten Mimika untuk mendukung sistem inovasi daerah yang lebih efektif.

Tabel 13. Kelompok Institusi * Lomba Inovasi Daerah tingkat Kota Crosstabulation

Count

		Lomba Inovasi Daerah tingkat Kota			
		Tidak Membutuhkan	Cukup Membutuhkan	Sangat Membutuhkan	Total
Kelompok Institusi	OPD	1	6	22	29
	Distrik	0	4	3	7
	Puskesmas	0	1	4	5
	Sekolah	0	0	2	2
Total		1	11	31	43



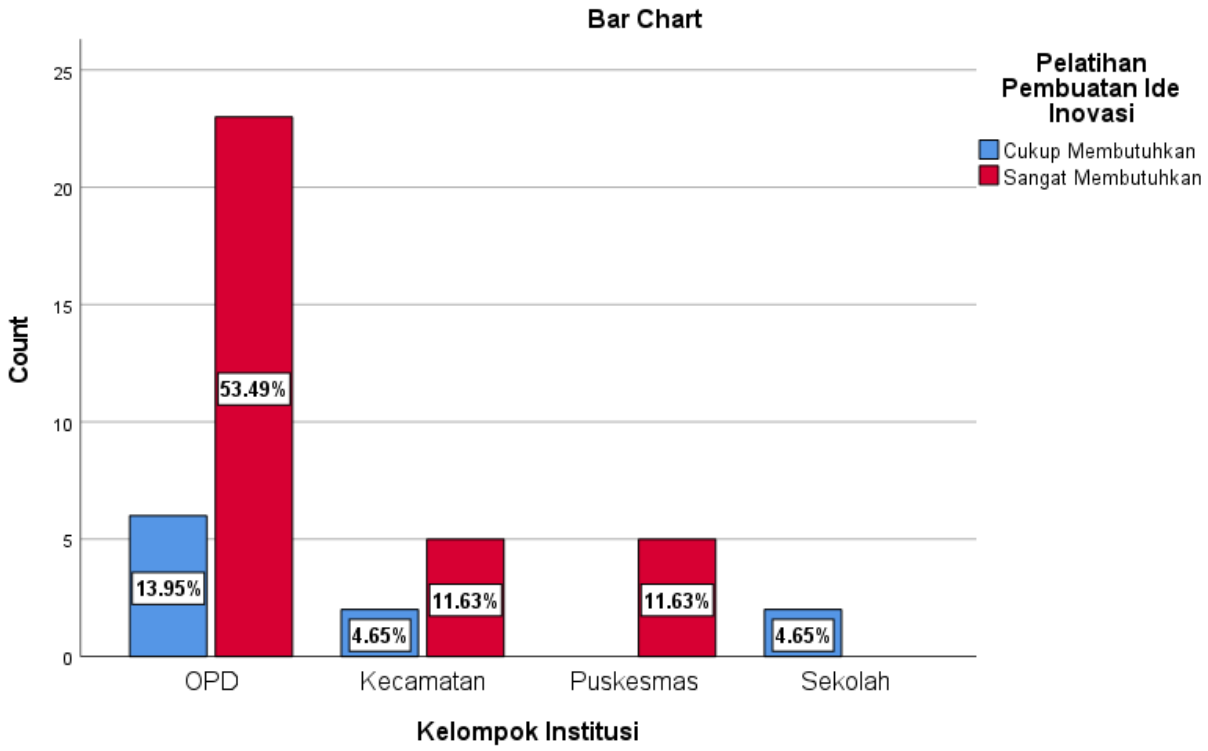
Berdasarkan tabel kajian sistem inovasi daerah (SIDA) Kabupaten Mimika, total

partisipasi dalam lomba inovasi daerah menunjukkan bahwa dari 43 responden, terdapat satu instansi (OPD) yang tidak membutuhkan inovasi, sementara 11 responden merasa cukup membutuhkan, dan 31 responden sangat membutuhkan inovasi. Di tingkat kecamatan, terdapat 4 responden yang cukup membutuhkan dan 3 responden yang sangat membutuhkan. Pada Puskesmas, satu responden cukup membutuhkan dan empat responden sangat membutuhkan inovasi, sedangkan di sekolah, terdapat dua responden yang sangat membutuhkan. Temuan ini mencerminkan adanya kesadaran dan kebutuhan yang tinggi akan inovasi di berbagai institusi di Kabupaten Mimika, terutama di tingkat OPD dan Puskesmas, yang dapat menjadi dasar untuk pengembangan program inovasi yang lebih efektif dan terintegrasi.

Tabel 14. Kelompok Institusi * Pelatihan Pembuatan Ide Inovasi Crosstabulation

Count

		Pelatihan Pembuatan Ide Inovasi		
		Cukup Membutuhkan	Sangat Membutuhkan	Total
Kelompok Institusi	OPD	6	23	29
	Distrik	2	5	7
	Puskesmas	0	5	5
	Sekolah	2	0	2
Total		10	33	43



Berdasarkan data yang terdapat dalam tabel Kajian Sistem Inovasi Daerah (SIDA)

Kabupaten Mimika, terlihat bahwa total responden yang terlibat dalam pelatihan pembuatan ide inovasi berjumlah 43 orang. Dari total tersebut, sebanyak 10 orang (23,26%) menyatakan "cukup membutuhkan" pelatihan, sedangkan 33 orang (76,74%) lainnya menyatakan "sangat membutuhkan".

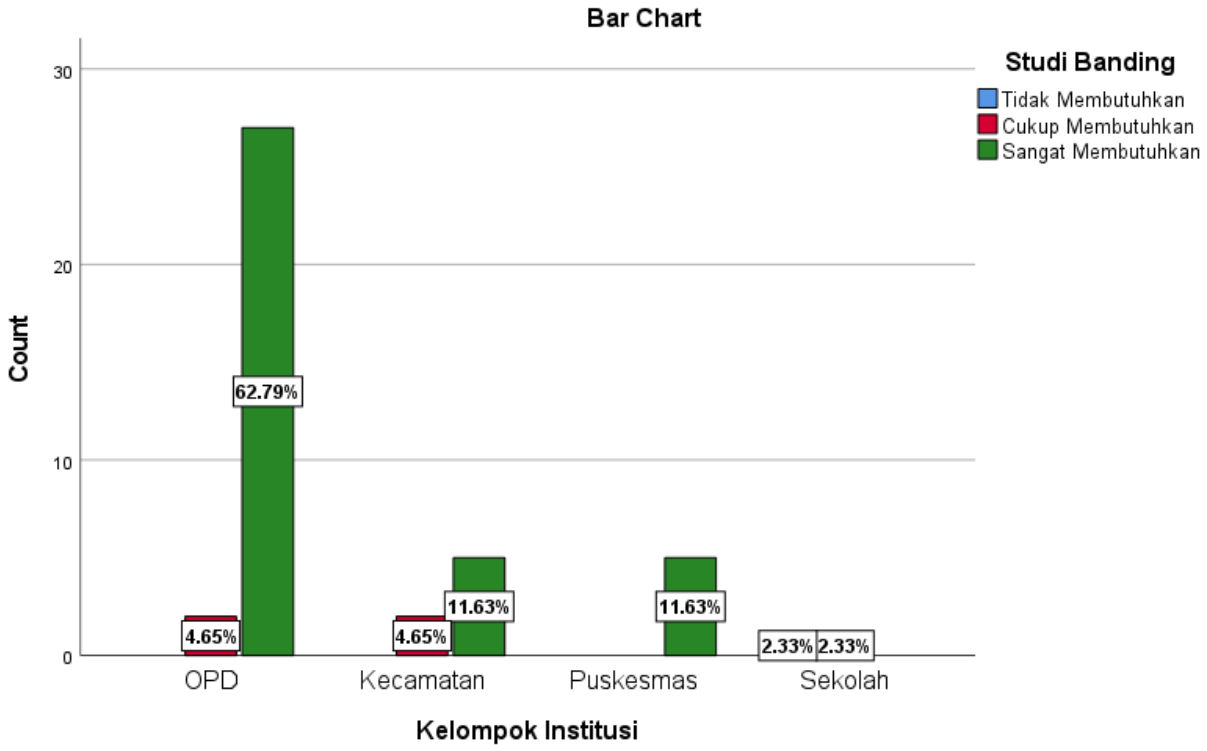
Dari analisis per kelompok institusi, terlihat bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan kelompok yang paling membutuhkan pelatihan, dengan 23 responden mengindikasikan kebutuhan yang sangat tinggi, diikuti oleh Puskesmas dengan 5 orang dan Kecamatan dengan 5 orang. Sekolah menunjukkan kebutuhan yang lebih rendah, dengan hanya 2 responden yang menganggap pelatihan ini cukup dibutuhkan, sementara tidak ada responden dari Puskesmas yang menyatakan kebutuhan tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan pembuatan ide inovasi sangat penting bagi pengembangan kapasitas institusi, terutama di OPD, yang berperan strategis dalam pelaksanaan inovasi daerah. Oleh karena itu, peningkatan dukungan dan penyelenggaraan pelatihan bagi institusi di Kabupaten Mimika sangat diperlukan untuk mendorong terciptanya inovasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Tabel 15. Kelompok Institusi * Studi Banding Crosstabulation

Count

		Studi Banding			
		Tidak Membutuhkan	Cukup Membutuhkan	Sangat Membutuhkan	Total
Kelompok Institusi	OPD	0	2	27	29
	Distrik	0	2	5	7
	Puskesmas	0	0	5	5
	Sekolah	1	1	0	2
Total		1	5	37	43

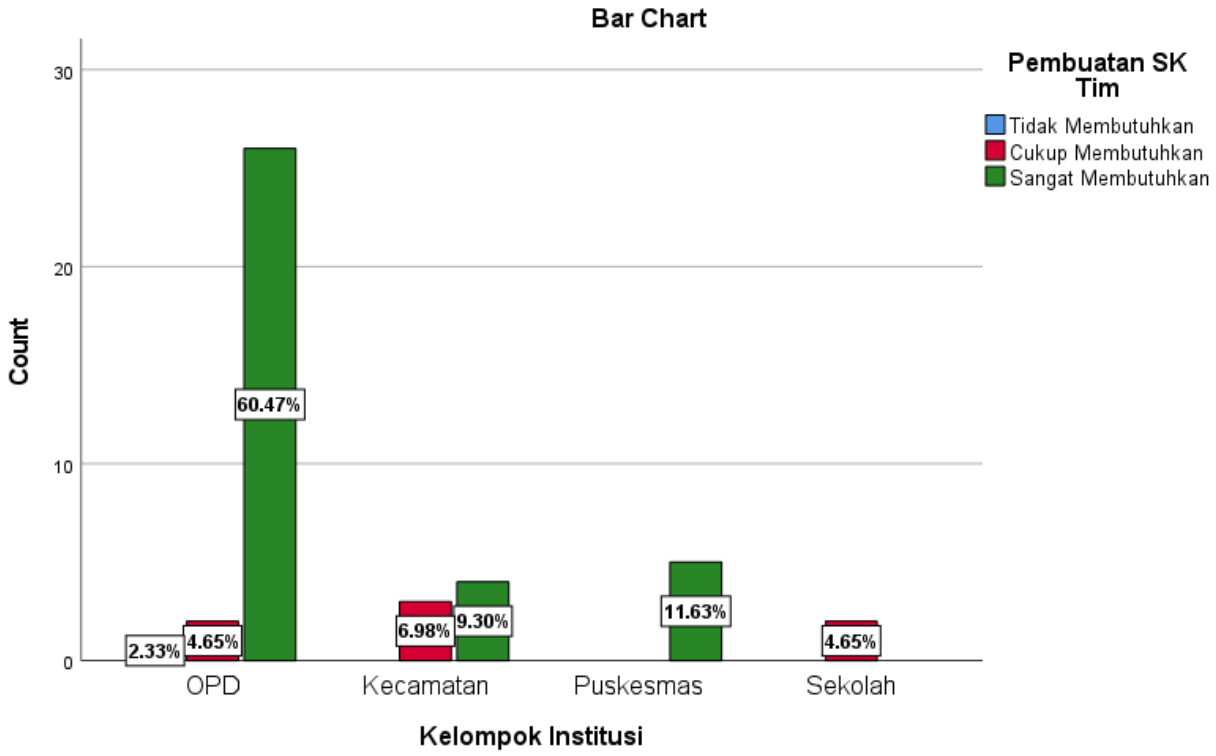


Analisis data dari tabel Kajian Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kabupaten Mimika menunjukkan kebutuhan institusi terkait studi banding. Dari total 43 responden, 37 (86%) menyatakan membutuhkan studi banding, dengan 27 (63%) dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengategorikannya sebagai "sangat membutuhkan." Kebutuhan studi banding juga muncul dari kelompok Kecamatan dan Puskesmas, dengan masing-masing mencatat 5 dan 5 kebutuhan, tetapi dalam kategori yang lebih rendah. Hanya dua responden dari Sekolah yang menyatakan kebutuhan, satu di antaranya di kategori "cukup membutuhkan." Temuan ini mengindikasikan bahwa OPD menjadi kelompok yang paling memerlukan studi banding untuk meningkatkan kinerja inovasi daerah, sedangkan institusi lain menunjukkan kebutuhan yang relatif lebih rendah.

Tabel 16. Kelompok Institusi * Pembuatan SK Tim Crosstabulation

Count

		Pembuatan SK Tim			
		Tidak Membutuhkan	Cukup Membutuhkan	Sangat Membutuhkan	Total
Kelompok Institusi	OPD	1	2	26	29
	Distrik	0	3	4	7
	Puskesmas	0	0	5	5
	Sekolah	0	2	0	2
Total		1	7	35	43



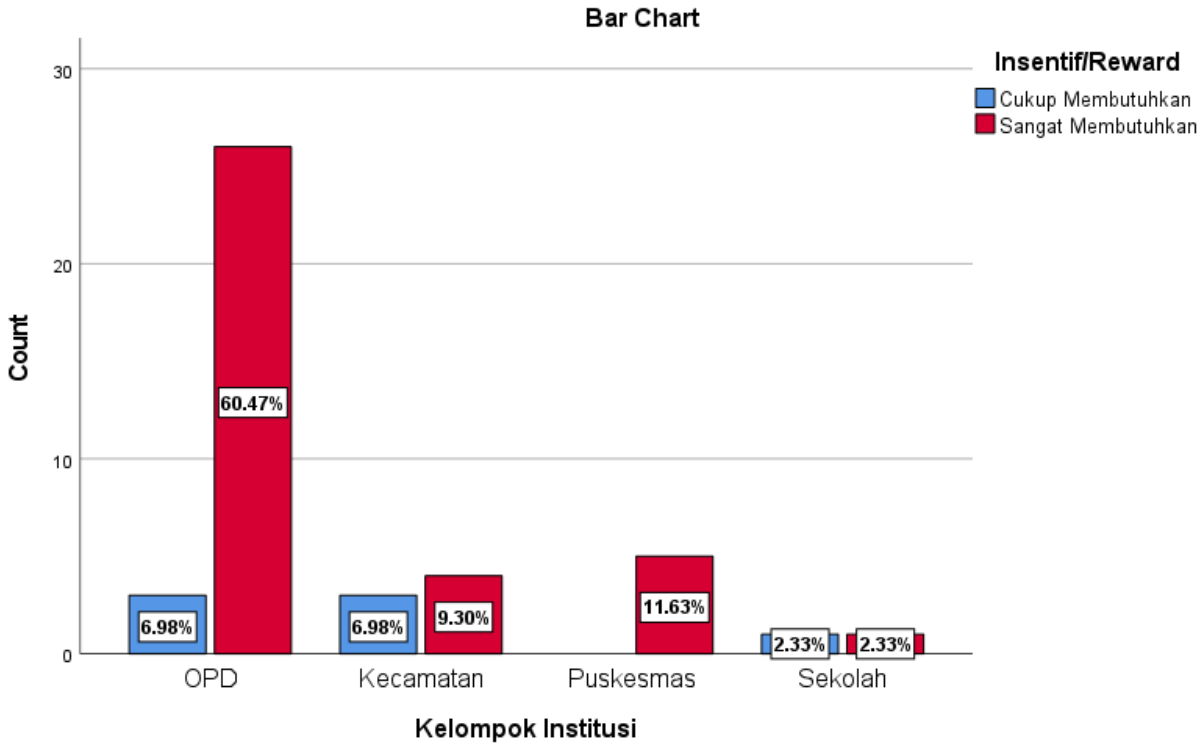
Berdasarkan tabel yang menunjukkan hasil kajian sistem inovasi daerah (SIDA) di Kabupaten Mimika, analisis data dapat disimpulkan sebagai berikut. Terdapat total 43 responden yang memberikan pendapat mengenai kebutuhan pembuatan SK Tim. Dari kelompok institusi yang berpartisipasi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menunjukkan angka yang signifikan dengan 26 responden menyatakan "sangat membutuhkan" dan 2 responden "cukup membutuhkan," sehingga totalnya mencapai 29 responden. Di tingkat kecamatan, hanya 7 responden yang berpartisipasi, dengan 4 responden menganggap pembuatan SK Tim "sangat membutuhkan." Puskesmas memiliki 5 responden, semuanya menyatakan "sangat membutuhkan," sedangkan sekolah hanya memiliki 2 responden yang menyatakan "cukup membutuhkan" dan tidak ada yang menyatakan "sangat membutuhkan."

Dari data ini, terlihat bahwa OPD memerlukan pembuatan SK Tim dengan urgensi yang tinggi, diikuti oleh Puskesmas. Kebutuhan ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem inovasi di Kabupaten Mimika agar dapat mendukung implementasi program-program pembangunan yang lebih efektif dan terintegrasi.

Tabel 17. Kelompok Institusi * Insentif/Reward Crosstabulation

Count

		Insentif/Reward		
		Cukup Membutuhkan	Sangat Membutuhkan	Total
Kelompok Institusi	OPD	3	26	29
	Distrik	3	4	7
	Puskesmas	0	5	5
	Sekolah	1	1	2
Total		7	36	43



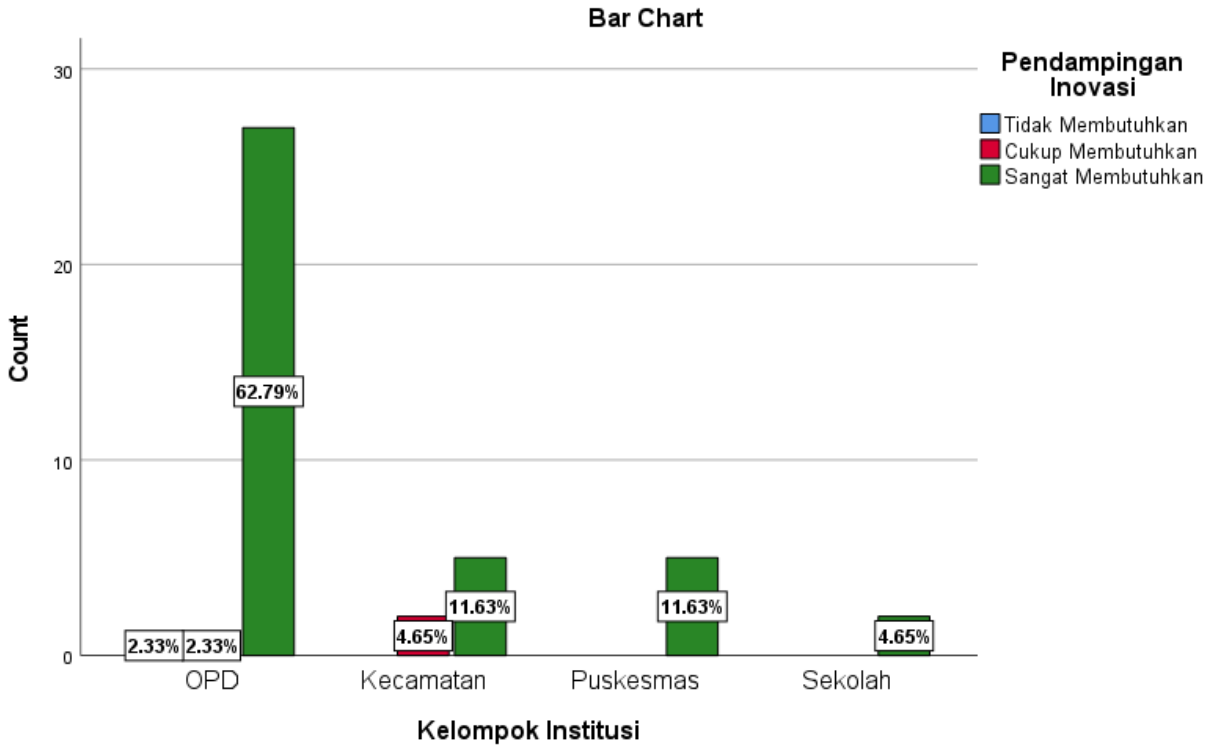
Berdasarkan analisis data dari Tabel Kajian Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kabupaten Mimika, terdapat total 43 responden yang merespons kebutuhan insentif/reward untuk inovasi daerah. Dari kelompok institusi yang terlibat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menunjukkan angka tertinggi dengan 26 responden (89,66%) menyatakan sangat membutuhkan insentif, diikuti oleh 3 responden (10,34%) yang merasa cukup membutuhkan. Kecamatan mencatatkan 4 responden (57,14%) sangat membutuhkan dan 3 responden (42,86%) cukup membutuhkan, sedangkan Puskesmas dan sekolah menunjukkan kebutuhan yang lebih rendah, masing-masing dengan 5 responden (100%) dari Puskesmas yang sangat membutuhkan dan 1 responden (50%) dari sekolah yang sangat membutuhkan. Secara keseluruhan, mayoritas responden (83,72%) menyatakan kebutuhan akan insentif/reward sangat mendesak, menunjukkan pentingnya dukungan untuk mendorong inovasi dalam sistem pelayanan publik di

Kabupaten Mimika.

Tabel 18. Kelompok Institusi * Pendampingan Inovasi Crosstabulation

Count

		Pendampingan Inovasi			
		Tidak Membutuhkan	Cukup Membutuhkan	Sangat Membutuhkan	Total
Kelompok Institusi	OPD	1	1	27	29
	Distrik	0	2	5	7
	Puskesmas	0	0	5	5
	Sekolah	0	0	2	2
Total		1	3	39	43



Dalam analisis data dari tabel Kajian Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kabupaten Mimika, terlihat bahwa kebutuhan pendampingan inovasi bervariasi di antara kelompok institusi. Dari total 43 responden, 39 di antaranya merasa "sangat membutuhkan" pendampingan inovasi. Khususnya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mencatatkan angka tertinggi, dengan 27 responden (93% dari total OPD) menyatakan kebutuhan yang tinggi akan pendampingan. Sementara itu, Kecamatan, Puskesmas, dan Sekolah menunjukkan angka kebutuhan yang lebih rendah. Kecamatan hanya memiliki 5 responden yang "sangat membutuhkan" dan 2 responden yang "cukup membutuhkan," sedangkan Puskesmas dan Sekolah masing-masing memiliki 5 dan 2 responden yang

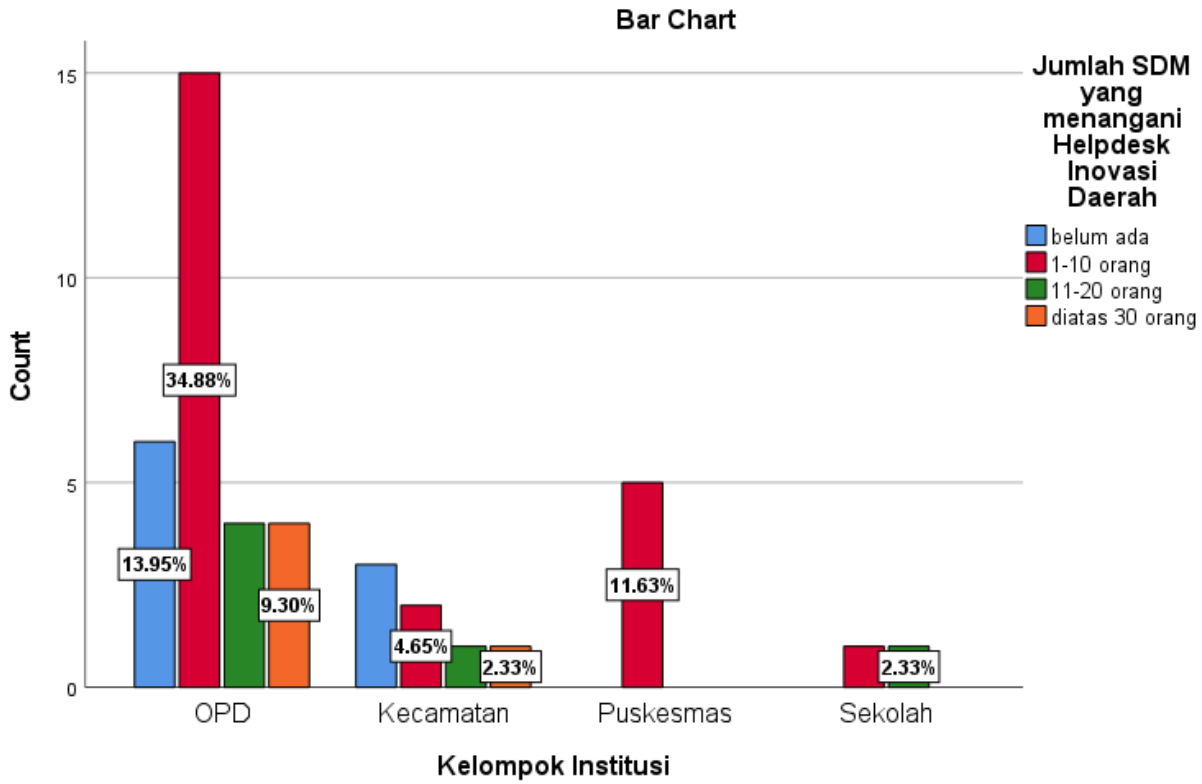
"sangat membutuhkan."

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa OPD merupakan lembaga yang paling membutuhkan pendampingan inovasi, sementara institusi lain, meskipun memiliki kebutuhan, tidak setinggi OPD. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi pendampingan yang lebih fokus dan terarah pada OPD untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas inovasi daerah di Kabupaten Mimika.

Tabel 19. Kelompok Institusi * Jumlah SDM yang menangani Helpdesk Inovasi Daerah Crosstabulation

Count

		Jumlah SDM yang menangani Helpdesk Inovasi Daerah				
		belum ada	1-10 orang	11-20 orang	diatas 30 orang	Total
Kelompok Institusi	OPD	6	15	4	4	29
	Distrik	3	2	1	1	7
	Puskesmas	0	5	0	0	5
	Sekolah	0	1	1	0	2
Total		9	23	6	5	43



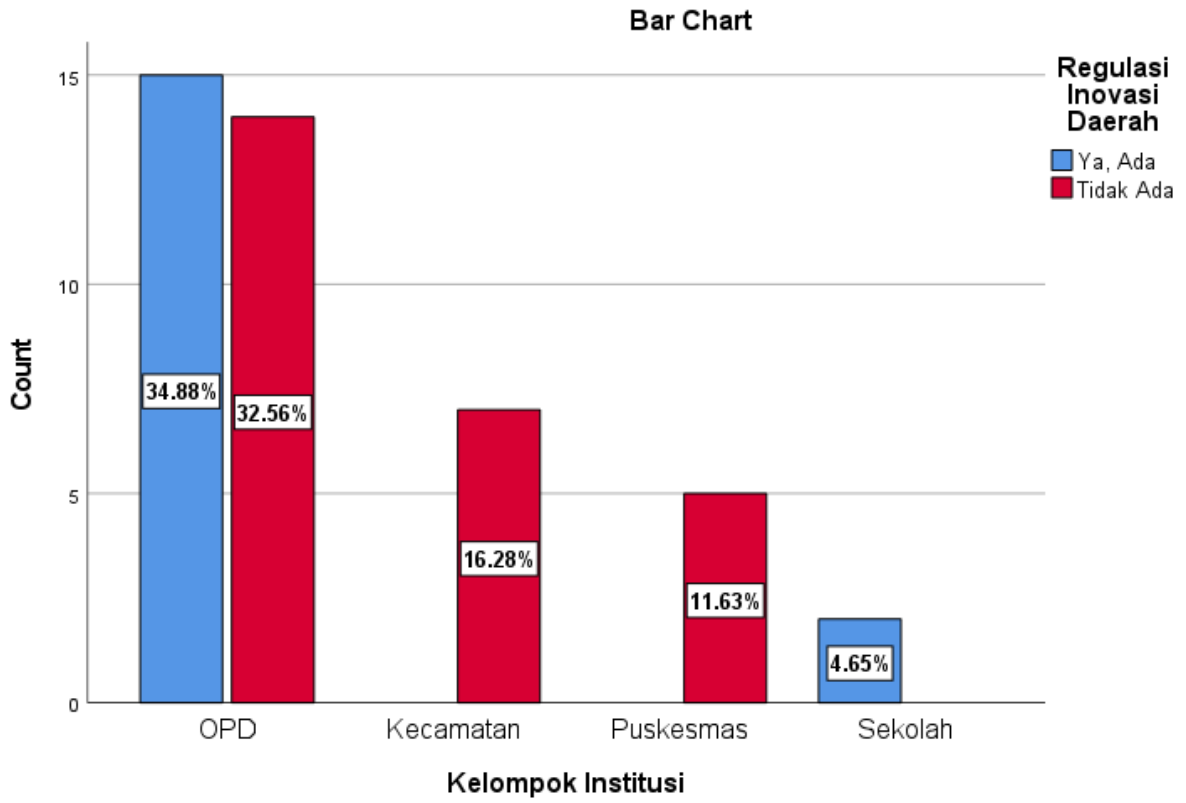
Berdasarkan tabel analisis data Kajian Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kabupaten Mimika, terdapat total 43 Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani Helpdesk Inovasi Daerah. Dari jumlah tersebut, kelompok Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki

kontribusi terbesar dengan 29 orang, yang terbagi menjadi 6 orang yang belum ada, 15 orang dalam kategori 1-10, 4 orang pada 11-20, dan 4 orang di atas 30 orang. Sementara itu, Kecamatan menyumbang 7 orang, dengan rincian 3 orang belum ada, 2 orang dalam kategori 1-10, 1 orang pada 11-20, dan 1 orang di atas 30 orang. Pada level Puskesmas terdapat 5 orang, semua berada pada kategori 1-10 orang. Sedangkan Sekolah hanya berkontribusi 2 orang, terdiri dari 1 orang pada kategori 1-10 dan 1 orang pada 11-20. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan dukungan SDM dalam inovasi daerah di Kabupaten Mimika masih perlu ditingkatkan, terutama dalam kelompok Puskesmas dan Sekolah, untuk mencapai efektivitas yang lebih tinggi dalam implementasi inovasi.

Tabel 20. Kelompok Institusi * Regulasi Inovasi Daerah Crosstabulation

Count

		Regulasi Inovasi Daerah		
		Ya, Ada	Tidak Ada	Total
Kelompok Institusi	OPD	15	14	29
	Distrik	0	7	7
	Puskesmas	0	5	5
	Sekolah	2	0	2
Total		17	26	43



Berdasarkan data dari tabel kajian sistem inovasi daerah (SIDA) di Kabupaten

Mimika, terdapat total 43 entitas yang diperiksa, terdiri dari berbagai kelompok institusi. Dari hasil analisis, 17 institusi (sekitar 39,5%) telah mengimplementasikan regulasi inovasi daerah, sedangkan 26 institusi (sekitar 60,5%) belum melakukannya.

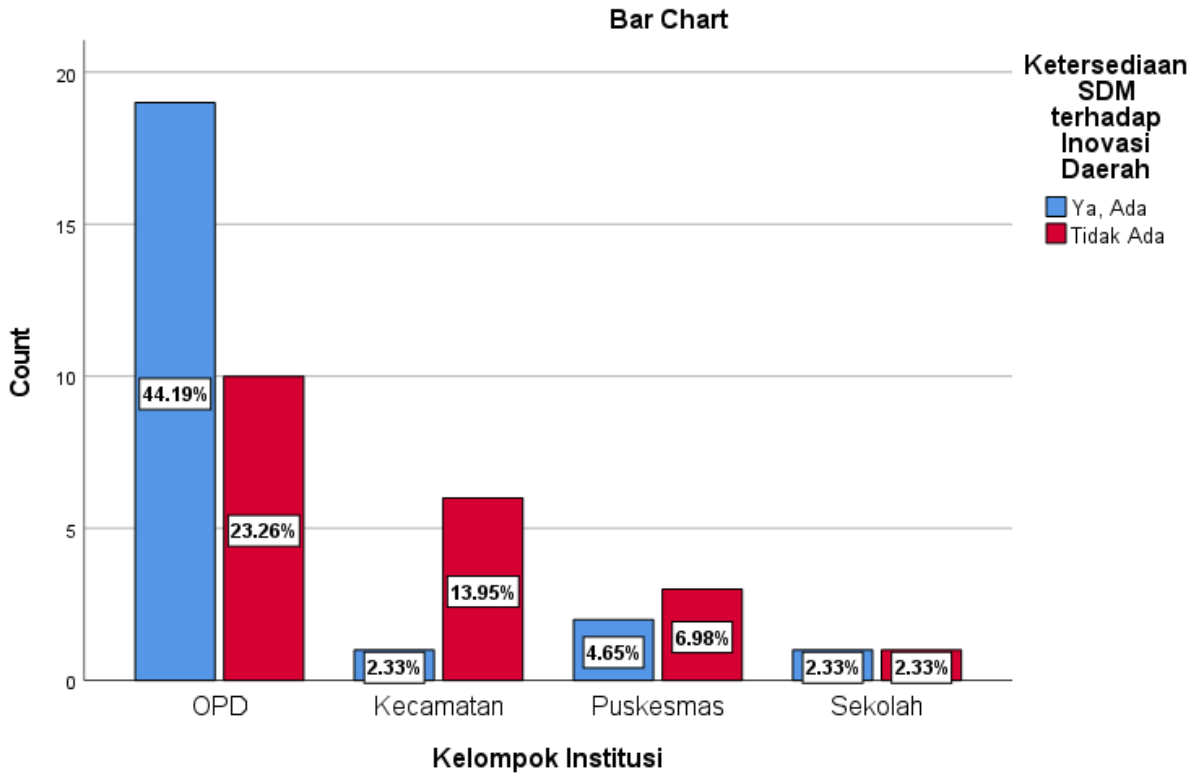
Analisis berdasarkan kelompok institusi menunjukkan bahwa dari Organisasi Perangkat Daerah (yang menerapkan regulasi, sementara 5 lainnya tidak melakukannya. Dalam konteks pendidikan, dua sekolah telah menerapkan regulasi, sementara tidak ada sekolah lain yang mencatatkan implementasi.

Temuan ini menyoroti pentingnya penguatan regulasi inovasi di seluruh institusi di Kabupaten Mimika, terutama di tingkat kecamatan dan Puskesmas, agar dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan regulasi inovasi di institusi yang belum menerapkannya juga perlu menjadi prioritas dalam pengembangan sistem inovasi daerah di wilayah ini.

Tabel 21. Kelompok Institusi * Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah Crosstabulation

Count

		Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah		
		Ya, Ada	Tidak Ada	Total
Kelompok Institusi	OPD	19	10	29
	Distrik	1	6	7
	Puskesmas	2	3	5
	Sekolah	1	1	2
Total		23	20	43

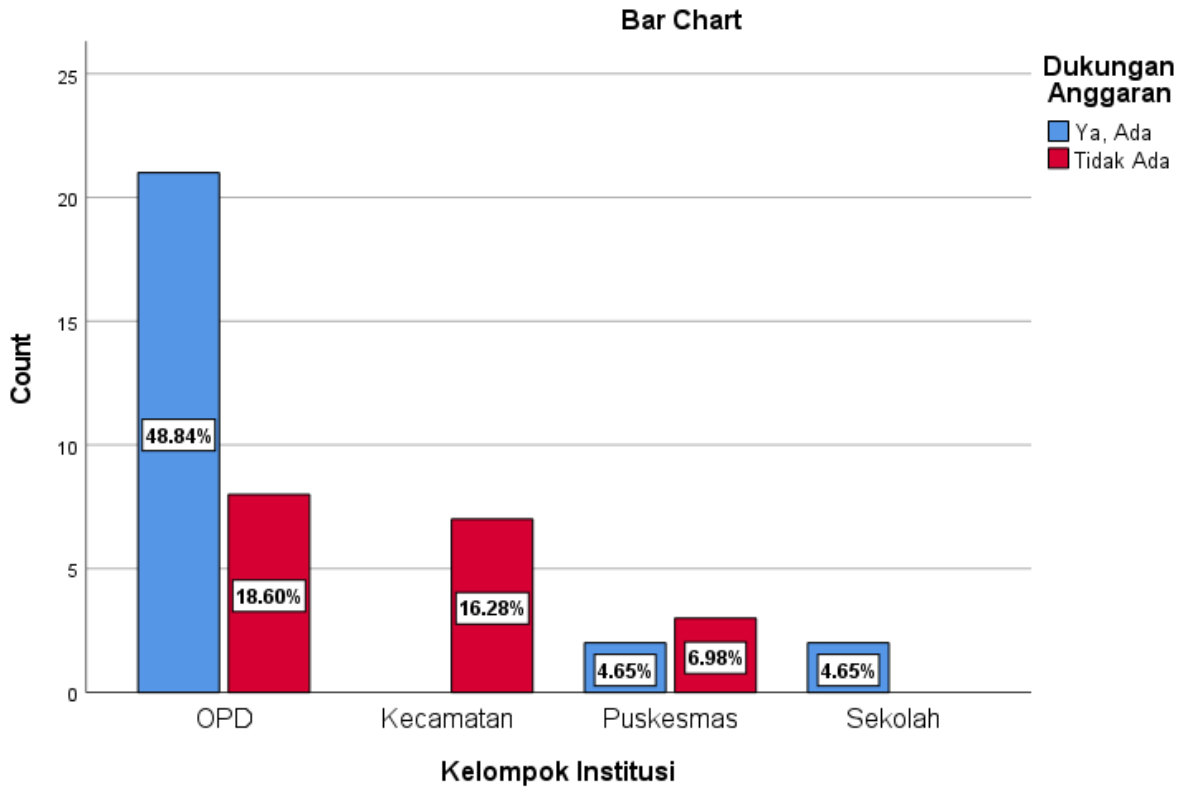


Berdasarkan analisis data pada tabel Kajian Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kabupaten Mimika, terlihat bahwa dari total 43 institusi yang terlibat, 23 institusi (53,49%) menyatakan memiliki ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung inovasi daerah, sementara 20 institusi (46,51%) tidak memiliki ketersediaan SDM tersebut. Analisis per kelompok institusi menunjukkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki jumlah SDM yang tersedia paling tinggi, dengan 19 institusi, diikuti oleh Kecamatan (1), Puskesmas (2), dan Sekolah (1). Di sisi lain, Kecamatan menunjukkan angka ketidakadaan SDM tertinggi, yaitu 6 institusi, yang menunjukkan adanya tantangan dalam penyediaan SDM di tingkat kecamatan. Secara keseluruhan, hasil ini mencerminkan pentingnya penguatan kapasitas SDM untuk mendukung inovasi di Kabupaten Mimika.

Tabel 22. Kelompok Institusi * Dukungan Anggaran Crosstabulation

Count

		Dukungan Anggaran		Total
		Ya, Ada	Tidak Ada	
Kelompok Institusi	OPD	21	8	29
	Distrik	0	7	7
	Puskesmas	2	3	5
	Sekolah	2	0	2
Total		25	18	43



Analisis data dari tabel Kajian Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kabupaten Mimika menunjukkan bahwa terdapat 43 entitas yang terlibat dalam kajian ini, dengan rincian dukungan anggaran yang tersedia. Dari total tersebut, 25 institusi (58,14%) mengonfirmasi adanya dukungan anggaran, sementara 18 institusi (41,86%) tidak memiliki dukungan anggaran.

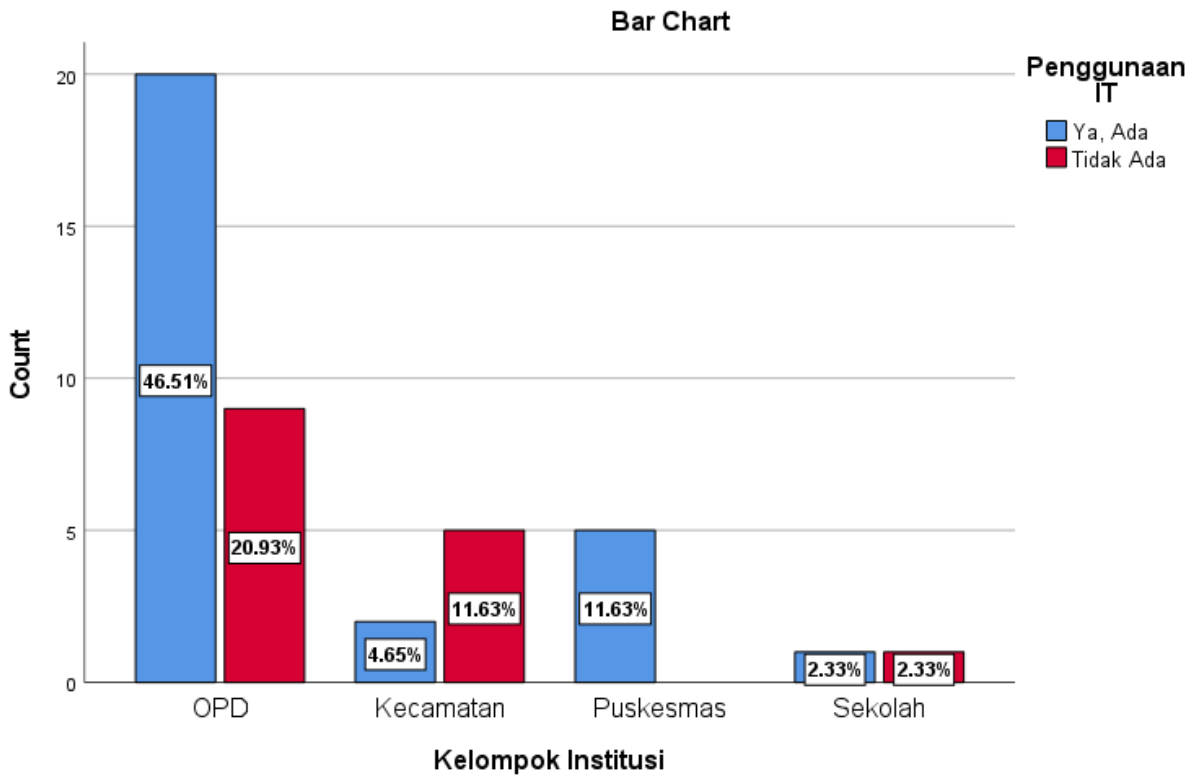
Di antara kelompok institusi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendominasi dengan 21 institusi yang memiliki dukungan anggaran, diikuti oleh Puskesmas dengan 2 institusi, dan sekolah juga dengan 2 institusi. Sementara itu, Kecamatan tidak memiliki institusi yang mendapatkan dukungan anggaran, dan tercatat ada 7 institusi yang tidak mendapatkan dukungan anggaran.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya dalam menyediakan dukungan anggaran, masih terdapat tantangan yang signifikan terutama di tingkat Kecamatan dan Puskesmas. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi ketidakberadaan dukungan anggaran pada kelompok institusi tersebut, sehingga langkah-langkah perbaikan dapat diimplementasikan untuk meningkatkan sistem inovasi daerah di Kabupaten Mimika.

Tabel 23. Kelompok Institusi * Penggunaan IT Crosstabulation

Count

		Penggunaan IT		
		Ya, Ada	Tidak Ada	Total
Kelompok Institusi	OPD	20	9	29
	Distrik	2	5	7
	Puskesmas	5	0	5
	Sekolah	1	1	2
Total		28	15	43

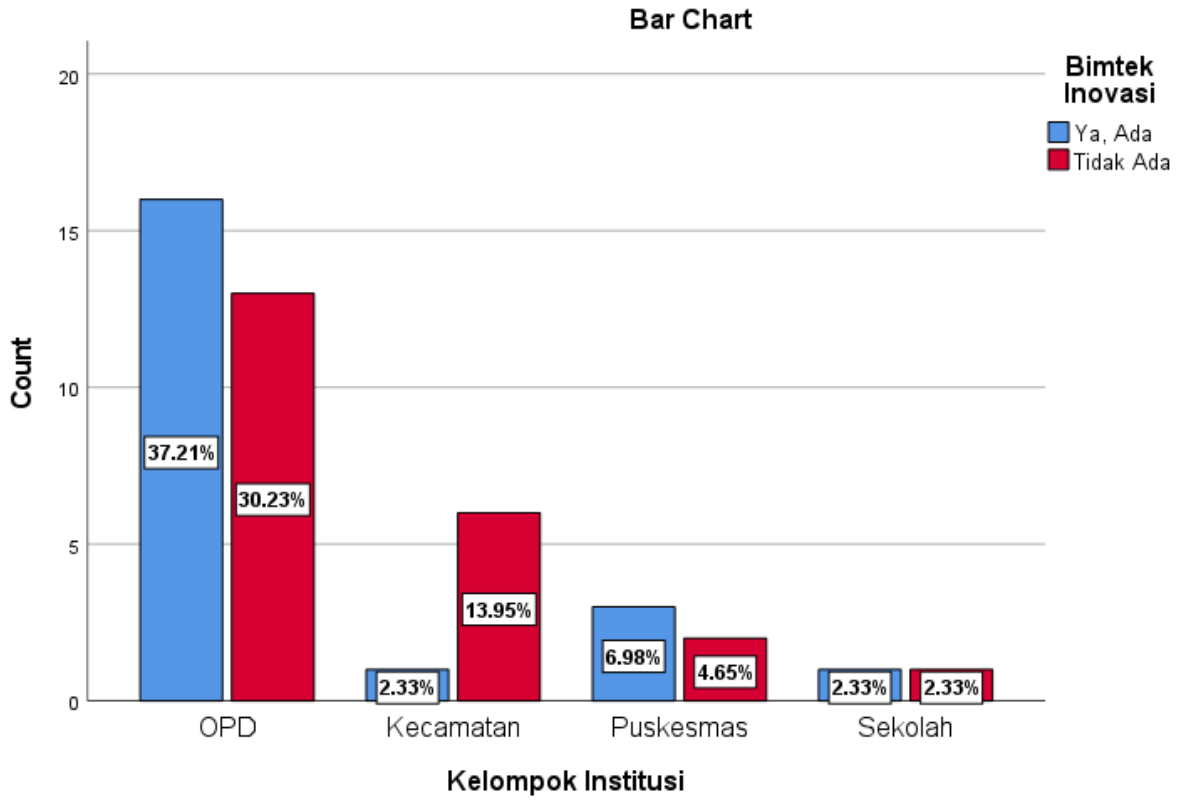


Berdasarkan analisis data dari tabel Kajian Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kabupaten Mimika, penggunaan teknologi informasi (IT) menunjukkan bahwa dari total 43 institusi yang disurvey, sebanyak 28 institusi (65%) mengonfirmasi adanya penggunaan IT, sementara 15 institusi (35%) tidak memanfaatkannya. Rincian penggunaannya berdasarkan kelompok institusi menunjukkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki proporsi terbesar dengan 20 institusi yang menggunakan IT, diikuti oleh Puskesmas dengan 5 institusi. Kecamatan mencatat 2 institusi, sementara sekolah hanya melibatkan 2 institusi, yang mana satu di antaranya tidak menggunakan IT. Temuan ini mencerminkan perlunya peningkatan pemanfaatan IT, terutama di kecamatan dan sekolah, untuk mendukung inovasi daerah yang lebih efektif di Kabupaten Mimika.

Tabel 24. Kelompok Institusi * Bimtek Inovasi Crosstabulation

Count

		Bimtek Inovasi		
		Ya, Ada	Tidak Ada	Total
Kelompok Institusi	OPD	16	13	29
	Distrik	1	6	7
	Puskesmas	3	2	5
	Sekolah	1	1	2
Total		21	22	43



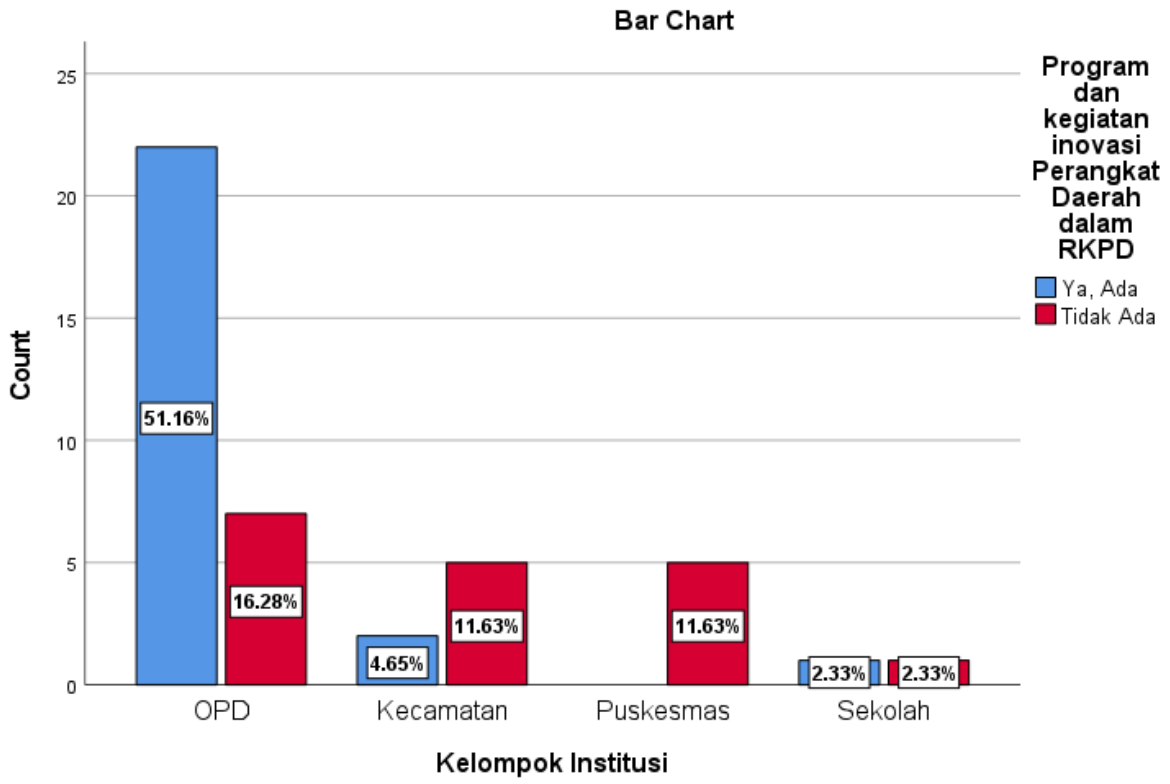
Berdasarkan data pada tabel Kajian Sistem Inovasi Daerah (SIDA) di Kabupaten Mimika, dapat dilihat bahwa terdapat total 43 institusi yang terlibat dalam inovasi, terdiri dari 21 institusi yang melaksanakan bimtek inovasi dan 22 institusi yang tidak melaksanakan bimtek tersebut. Dari kelompok institusi yang dilihat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mencatat angka tertinggi dengan 16 institusi melaksanakan bimtek dan 13 tidak melaksanakan, total 29 institusi. Kecamatan memiliki partisipasi yang lebih rendah, hanya 1 institusi yang melaksanakan bimtek, sementara 6 institusi tidak melaksanakannya. Puskesmas menunjukkan partisipasi dengan 3 institusi melaksanakan bimtek dan 2 tidak. Sekolah mencatat angka yang paling rendah, dengan 1 institusi melaksanakan bimtek dan 1 tidak melaksanakannya. Temuan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan partisipasi dalam bimtek inovasi, khususnya di tingkat

kecamatan dan sekolah, guna mendukung pengembangan inovasi daerah di Kabupaten Mimika.

Tabel 25. Kelompok Institusi * Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD Crosstabulation

Count

		Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD		
		Ya, Ada	Tidak Ada	Total
Kelompok Institusi	OPD	22	7	29
	Distrik	2	5	7
	Puskesmas	0	5	5
	Sekolah	1	1	2
Total		25	18	43



Berdasarkan analisis data pada tabel Kajian Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kabupaten Mimika, terdapat total 43 program dan kegiatan inovasi yang dinilai berdasarkan keterlibatan Perangkat Daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dari jumlah tersebut, 25 program (58,14%) dinyatakan ada, sementara 18 program (41,86%) dinyatakan tidak ada.

Rincian berdasarkan kelompok institusi menunjukkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki kontribusi terbesar dengan 22 program inovasi yang

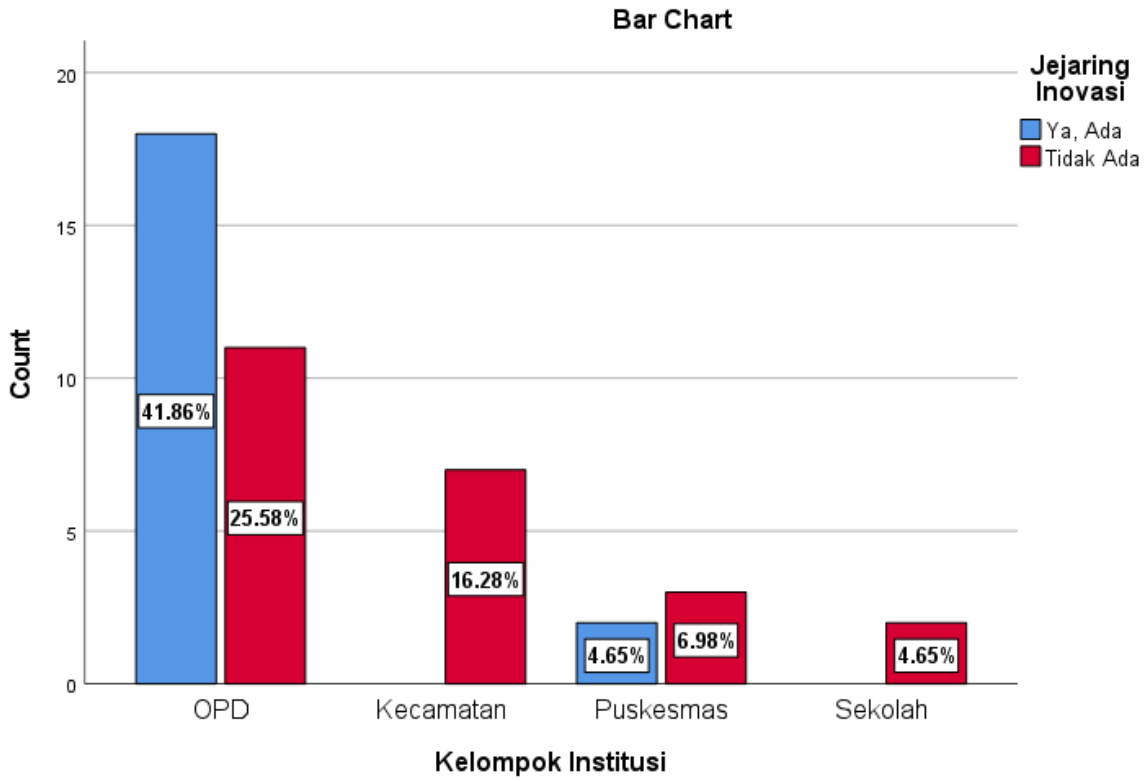
ada dan 7 yang tidak ada. Di tingkat kecamatan, terdapat 2 program yang ada dan 5 yang tidak ada, sementara Puskesmas hanya memiliki program inovasi yang tidak ada sama sekali (5). Di sisi lain, sekolah menunjukkan partisipasi minimal dengan 1 program yang ada dan 1 yang tidak ada.

Temuan ini mencerminkan bahwa meskipun terdapat sejumlah program inovasi yang diterapkan, masih terdapat ruang yang signifikan untuk peningkatan partisipasi dan pengembangan inovasi, terutama di kecamatan, Puskesmas, dan sekolah. Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih efektif dalam mendorong inovasi di berbagai sektor untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang lebih baik.

Tabel 26. Kelompok Institusi * Jejaring Inovasi Crosstabulation

Count

		Jejaring Inovasi		
		Ya, Ada	Tidak Ada	Total
Kelompok Institusi	OPD	18	11	29
	Distrik	0	7	7
	Puskesmas	2	3	5
	Sekolah	0	2	2
Total		20	23	43



Berdasarkan analisis data dari tabel Kajian Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kabupaten Mimika, terlihat bahwa total responden yang terlibat dalam jejaring inovasi

berjumlah 43, dengan 20 di antaranya menyatakan bahwa jejaring inovasi ada, sedangkan 23 lainnya menyatakan tidak ada.

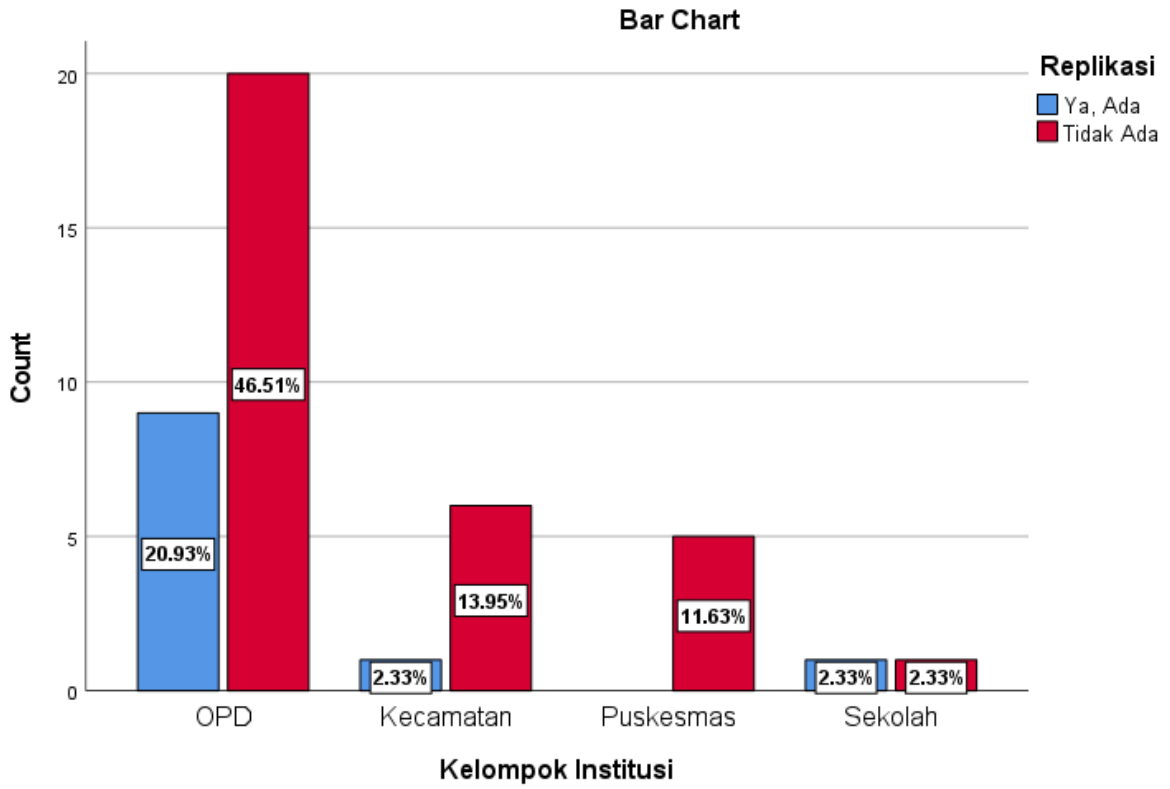
Dari kelompok institusi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menunjukkan partisipasi tertinggi dengan 18 responden yang mengkonfirmasi keberadaan jejaring inovasi. Diikuti oleh Puskesmas dengan 2 responden, yang juga melaporkan adanya jejaring inovasi. Namun, tidak ada responden dari kelompok Kecamatan dan Sekolah yang melaporkan keberadaan jejaring inovasi.

Data ini menunjukkan bahwa OPD menjadi pendorong utama dalam pengembangan jejaring inovasi di Kabupaten Mimika, sementara sektor lainnya, seperti Kecamatan dan Sekolah, perlu lebih dioptimalkan untuk meningkatkan partisipasi dalam inovasi daerah. Hal ini menandakan pentingnya penguatan kolaborasi antar sektor dalam menciptakan sistem inovasi yang lebih inklusif dan efektif.

Tabel 27. Kelompok Institusi * Replikasi Crosstabulation

Count

		Replikasi		
		Ya, Ada	Tidak Ada	Total
Kelompok Institusi	OPD	9	20	29
	Distrik	1	6	7
	Puskesmas	0	5	5
	Sekolah	1	1	2
Total		11	32	43



Analisis data pada Tabel Kajian Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kabupaten Mimika menunjukkan distribusi replikasi inovasi yang teridentifikasi dalam berbagai kelompok institusi. Dari total 43 institusi yang diteliti, 11 institusi (25,6%) melaporkan adanya replikasi inovasi, sedangkan 32 institusi (74,4%) tidak memiliki replikasi. Pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terdapat 9 institusi yang menerapkan replikasi, sedangkan 20 institusi tidak melakukannya. Di tingkat kecamatan, hanya 1 institusi yang melakukan replikasi, sedangkan 6 institusi tidak. Pada puskesmas, tidak ada yang melakukan replikasi, dengan 5 institusi melaporkan tidak adanya replikasi. Di sektor pendidikan, hanya 1 dari 2 sekolah yang melaporkan replikasi inovasi. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa inovasi yang berhasil direplikasi, proporsi institusi yang tidak melakukan replikasi masih cukup tinggi, yang mengindikasikan perlunya penguatan dalam sistem inovasi daerah di Kabupaten Mimika.

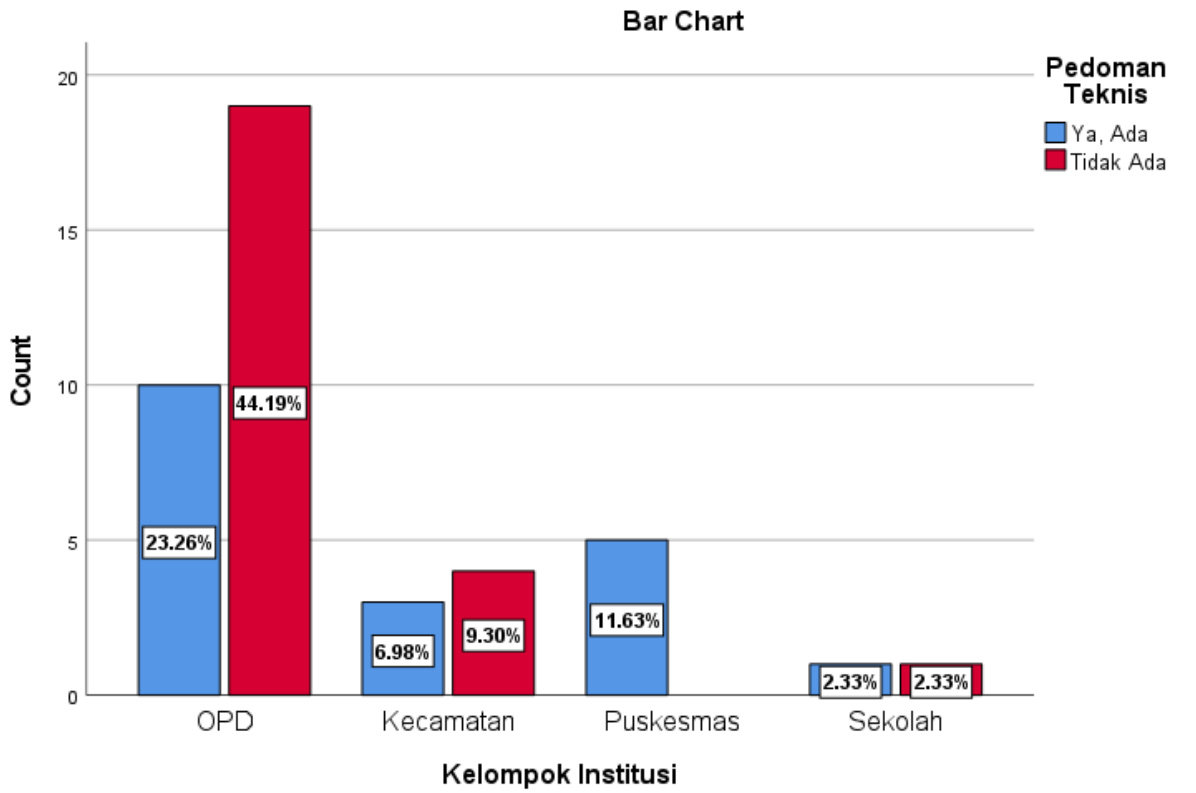
Tabel 28. Kelompok Institusi * Pedoman Teknis Crosstabulation

Count

		Pedoman Teknis		Total
		Ya, Ada	Tidak Ada	
Kelompok Institusi	OPD	10	19	29
	Distrik	3	4	7
	Puskesmas	5	0	5

Count

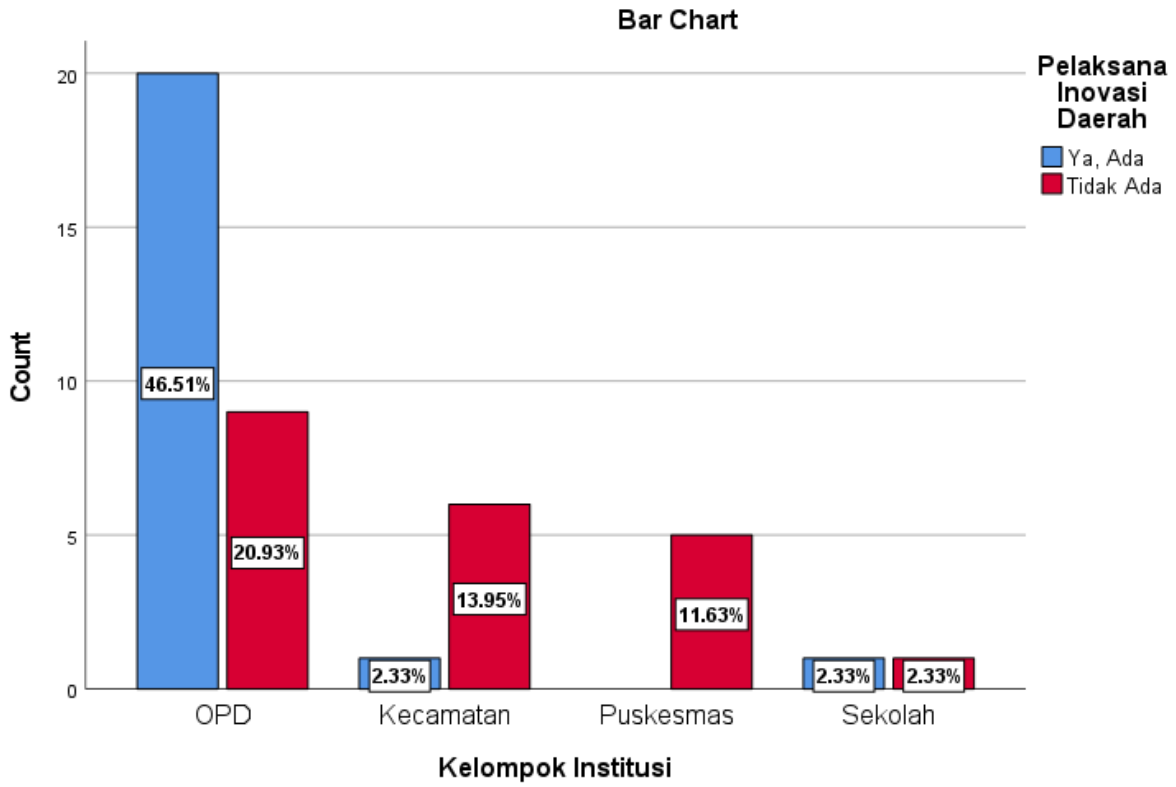
		Pedoman Teknis		
		Ya, Ada	Tidak Ada	Total
	Sekolah	1	1	2
Total		19	24	43



Tabel 29. Kelompok Institusi * Pelaksana Inovasi Daerah Crosstabulation

Count

		Pelaksana Inovasi Daerah		
		Ya, Ada	Tidak Ada	Total
Kelompok Institusi	OPD	20	9	29
	Distrik	1	6	7
	Puskesmas	0	5	5
	Sekolah	1	1	2
Total		22	21	43



Berdasarkan analisis data dari tabel Kajian Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kabupaten Mimika, terlihat bahwa total respons yang dikumpulkan adalah 43, dengan rincian 19 institusi menyatakan adanya pedoman teknis dan 24 institusi tidak memilikinya.

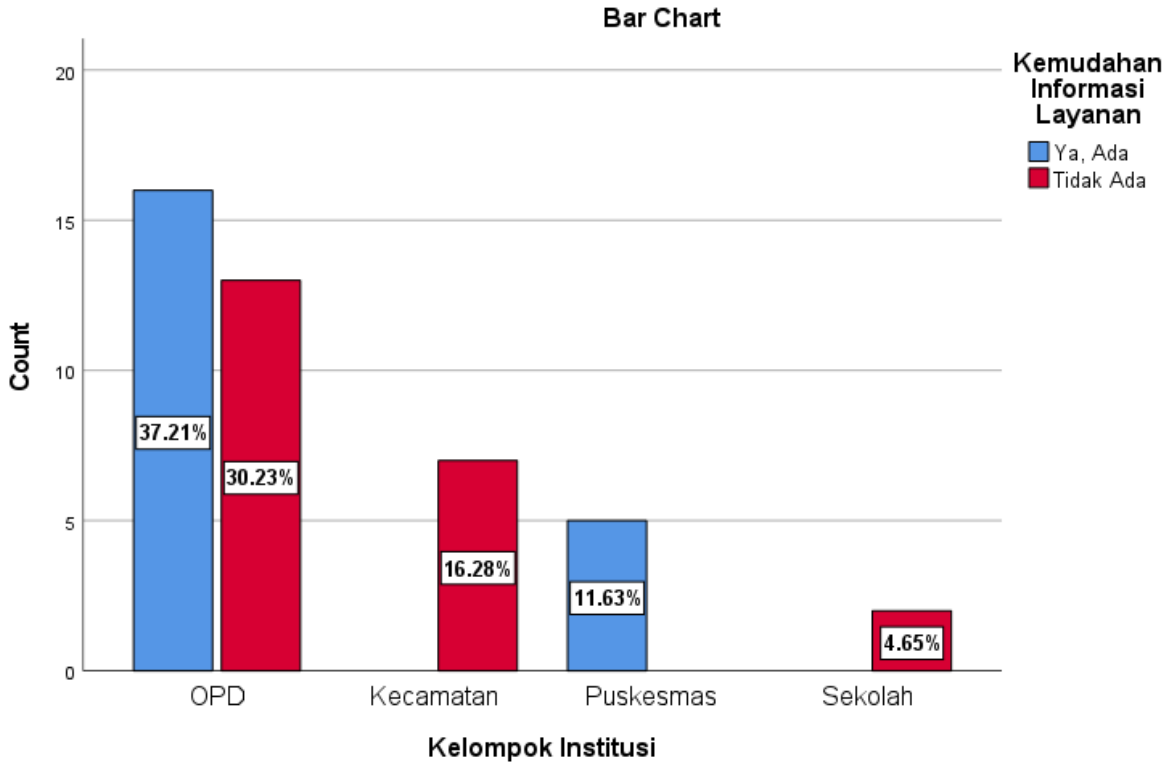
Dalam kelompok Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terdapat 10 institusi yang memiliki pedoman teknis dari total 29 institusi, menunjukkan tingkat ketersediaan yang cukup signifikan namun masih banyak yang belum memilikinya. Pada tingkat kecamatan, dari 7 institusi, 3 institusi memiliki pedoman teknis, menandakan adanya ruang untuk peningkatan. Sementara itu, Puskesmas menunjukkan hasil yang baik dengan 5 institusi memiliki pedoman teknis, dan pada kelompok sekolah, satu institusi memiliki pedoman teknis sementara satu lainnya tidak.

Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat institusi yang sudah mengadopsi pedoman teknis, masih banyak institusi lainnya yang perlu didorong untuk mengimplementasikan pedoman tersebut demi mendukung pengembangan inovasi di Kabupaten Mimika. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat program pelatihan dan sosialisasi tentang pentingnya pedoman teknis dalam mendukung sistem inovasi daerah.

Tabel 30. Kelompok Institusi * Kemudahan Informasi Layanan Crosstabulation

Count

		Kemudahan Informasi Layanan		
		Ya, Ada	Tidak Ada	Total
Kelompok Institusi	OPD	16	13	29
	Distrik	0	7	7
	Puskesmas	5	0	5
	Sekolah	0	2	2
Total		21	22	43



Analisis data tabel mengenai Kajian Sistem Inovasi Daerah (SIDA) di Kabupaten Mimika menunjukkan bahwa terdapat 43 entitas yang terlibat dalam survei ini. Dari total tersebut, 21 institusi (48,8%) melaporkan bahwa kemudahan informasi layanan tersedia, sedangkan 22 institusi (51,2%) menyatakan tidak ada kemudahan informasi layanan.

Dalam analisis berdasarkan kelompok institusi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mencatatkan jumlah tertinggi dengan 16 institusi menyatakan adanya kemudahan informasi, diikuti oleh Puskesmas dengan 5 institusi. Sementara itu, Kecamatan dan Sekolah menunjukkan hasil yang kurang baik, di mana Kecamatan tidak memiliki kemudahan informasi sama sekali dan hanya 2 sekolah yang melaporkan tidak adanya kemudahan informasi layanan.

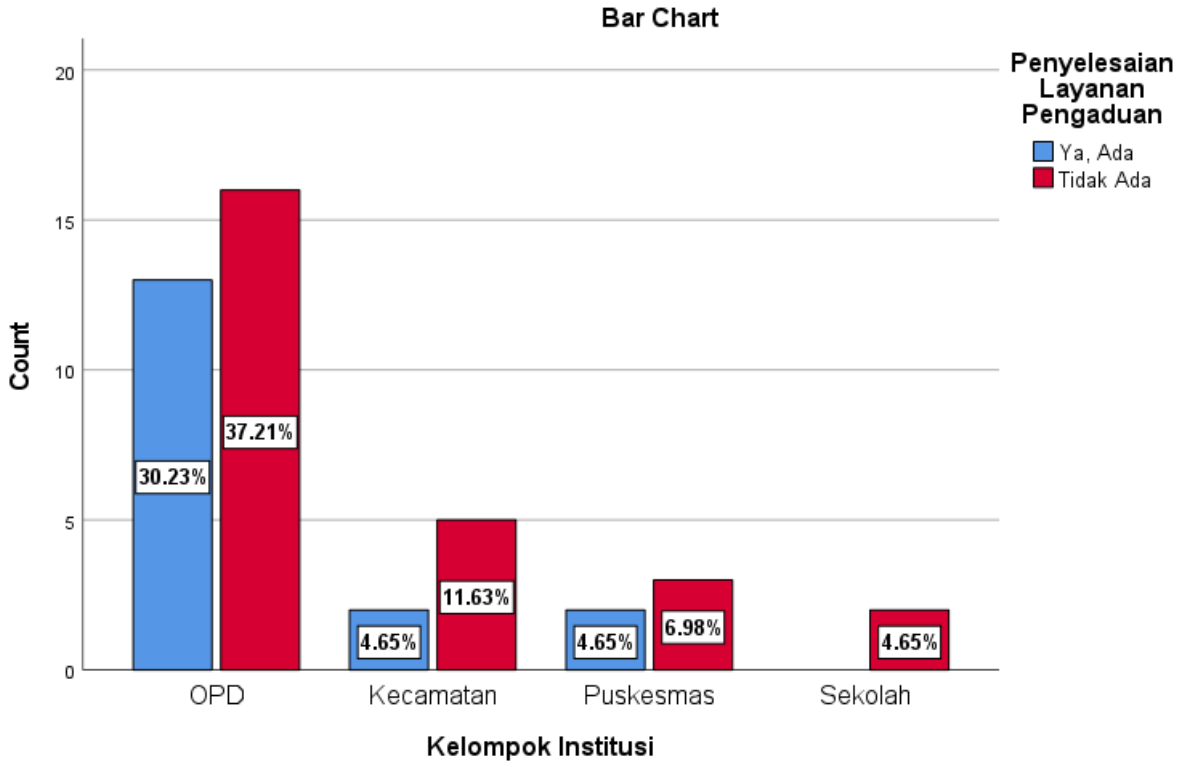
Hasil ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam akses informasi layanan di berbagai institusi, khususnya di tingkat Kecamatan dan Sekolah. Penanganan terhadap

masalah ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas sistem inovasi daerah di Kabupaten Mimika.

Tabel 31. Kelompok Institusi * Penyelesaian Layanan Pengaduan Crosstabulation

Count

		Penyelesaian Layanan Pengaduan		
		Ya, Ada	Tidak Ada	Total
Kelompok Institusi	OPD	13	16	29
	Distrik	2	5	7
	Puskesmas	2	3	5
	Sekolah	0	2	2
Total		17	26	43



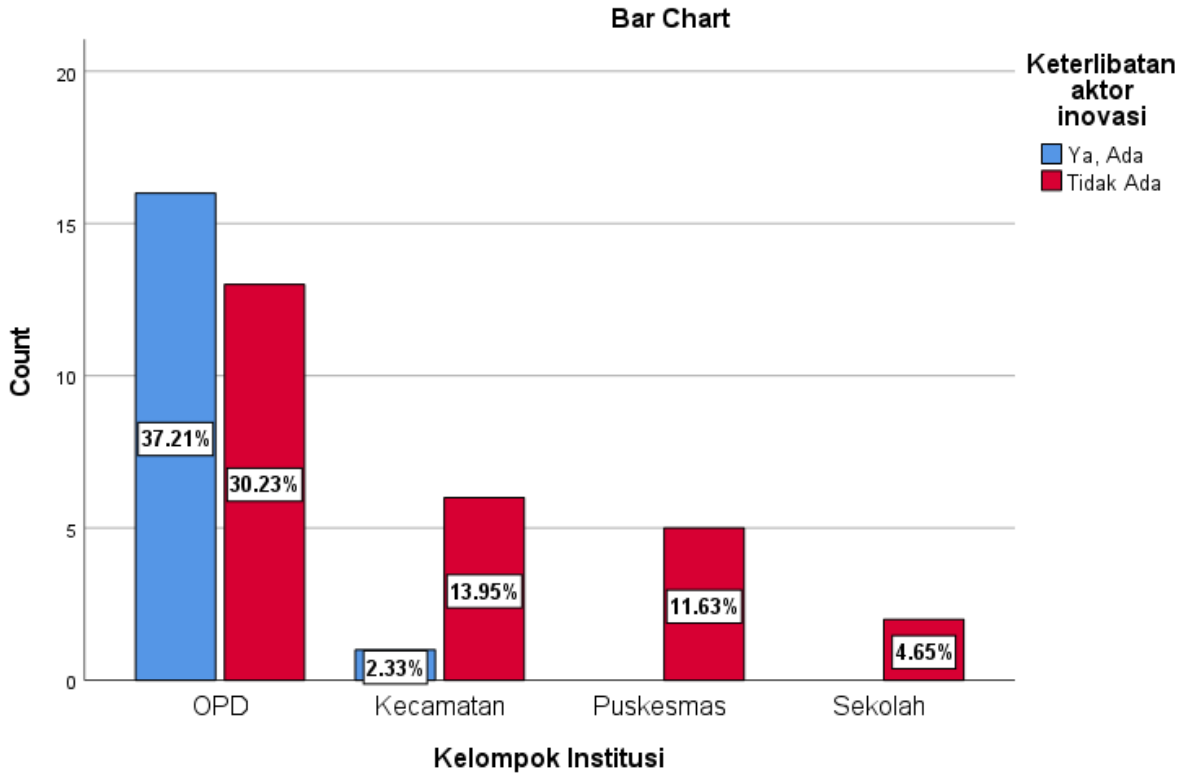
Berdasarkan data pada tabel Kajian Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kabupaten Mimika mengenai penyelesaian layanan pengaduan, terlihat bahwa total pengaduan yang ditangani berjumlah 43, di mana 17 di antaranya berhasil diselesaikan (Ya, Ada), dan 26 tidak diselesaikan (Tidak Ada). Jika dilihat berdasarkan kelompok institusi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki jumlah penyelesaian pengaduan tertinggi dengan 13 pengaduan berhasil diselesaikan dari total 29 pengaduan yang dilaporkan. Sementara itu, Kecamatan menyelesaikan 2 dari 7 pengaduan, dan Puskesmas berhasil menyelesaikan 2 dari 5 pengaduan. Sekolah mencatat tidak ada pengaduan yang berhasil diselesaikan, dengan 2 pengaduan tidak terjawab dari total 2. Data ini menunjukkan adanya tantangan

dalam penyelesaian layanan pengaduan, terutama pada institusi sekolah dan Puskesmas, yang dapat menjadi fokus perbaikan dalam sistem layanan publik di Kabupaten Mimika.

Tabel 32. Kelompok Institusi * Keterlibatan aktor inovasi Crosstabulation

Count

		Keterlibatan aktor inovasi		
		Ya, Ada	Tidak Ada	Total
Kelompok Institusi	OPD	16	13	29
	Distrik	1	6	7
	Puskesmas	0	5	5
	Sekolah	0	2	2
Total		17	26	43



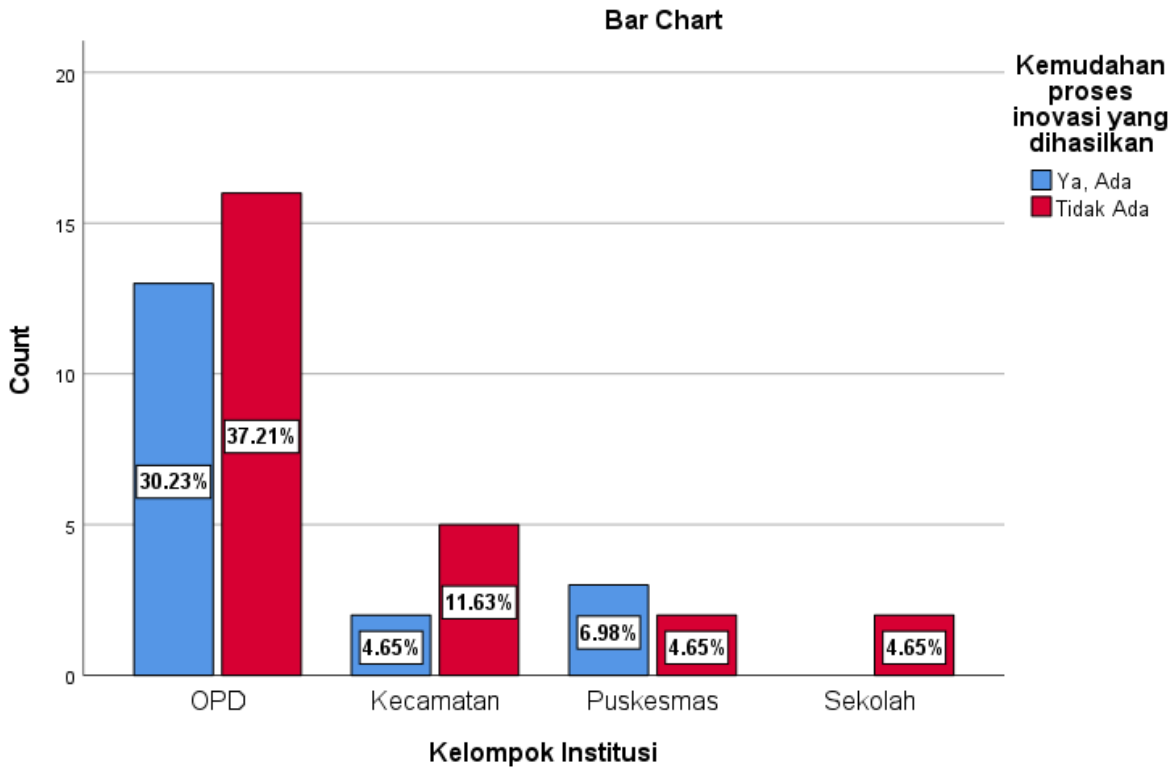
Berdasarkan analisis data tabel Kajian Sistem Inovasi Daerah (SIDA) di Kabupaten Mimika, terdapat keterlibatan aktor inovasi yang bervariasi di antara kelompok institusi. Dari total 43 aktor yang terlibat, 17 di antaranya menyatakan "Ya, Ada" keterlibatan dalam inovasi, sedangkan 26 aktor lainnya "Tidak Ada" keterlibatan. Secara spesifik, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menunjukkan keterlibatan tertinggi dengan 16 aktor terlibat dan 13 tidak terlibat, diikuti oleh Kecamatan (1 terlibat dan 6 tidak terlibat), Puskesmas (0 terlibat dan 5 tidak terlibat), dan Sekolah (0 terlibat dan 2 tidak terlibat). Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun OPD berperan aktif dalam inovasi, masih ada tantangan signifikan dalam meningkatkan keterlibatan institusi lain seperti Puskesmas dan Sekolah

dalam sistem inovasi daerah.

Tabel 33. Kelompok Institusi * Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan Crosstabulation

Count

		Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan		
		Ya, Ada	Tidak Ada	Total
Kelompok Institusi	OPD	13	16	29
	Distrik	2	5	7
	Puskesmas	3	2	5
	Sekolah	0	2	2
Total		18	25	43



Berdasarkan analisis data dari tabel kajian sistem inovasi daerah (SIDA) Kabupaten Mimika, terdapat total 43 entitas yang disurvey mengenai kemudahan proses inovasi yang dihasilkan. Dari jumlah tersebut, 18 institusi menyatakan bahwa mereka mengalami kemudahan dalam proses inovasi, sedangkan 25 institusi menyatakan sebaliknya.

Jika kita lihat berdasarkan kelompok institusi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki jumlah terbesar, yaitu 29 entitas, di mana 13 di antaranya mengakui adanya kemudahan dalam proses inovasi, sementara 16 menyatakan tidak ada kemudahan. Pada tingkat kecamatan, dari 7 entitas, hanya 2 yang merasakan kemudahan. Di Puskesmas,

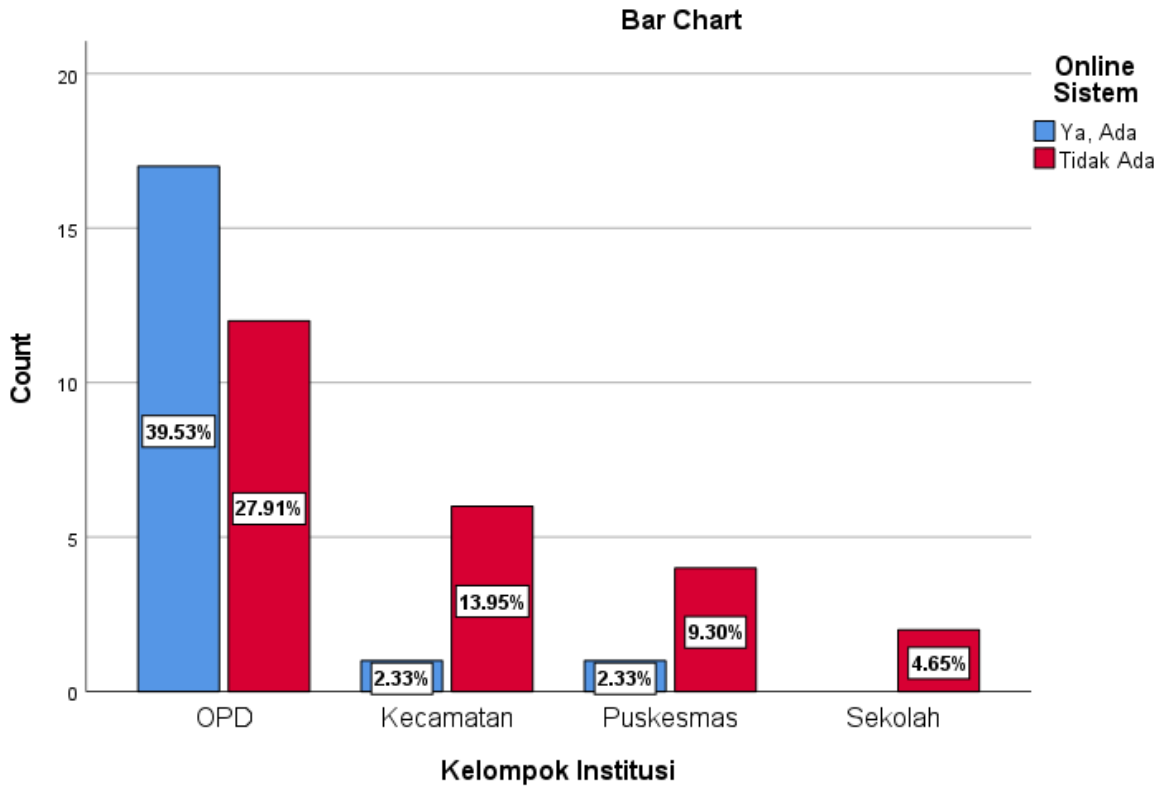
dari 5 entitas, 3 merasakan kemudahan, sedangkan 2 tidak. Untuk institusi sekolah, dari 2 entitas, tidak ada yang merasakan kemudahan dalam proses inovasi, yang menunjukkan tantangan di sektor pendidikan.

Temuan ini menggambarkan perlunya perhatian lebih dalam meningkatkan kemudahan proses inovasi, terutama di sektor kecamatan dan sekolah, yang memiliki rasio kemudahan yang lebih rendah dibandingkan dengan OPD dan Puskesmas. Meningkatkan dukungan dan sumber daya untuk institusi-institusi tersebut dapat menjadi langkah strategis untuk mempercepat proses inovasi di Kabupaten Mimika.

Tabel 34. Kelompok Institusi * Online Sistem Crosstabulation

Count

		Online Sistem		
		Ya, Ada	Tidak Ada	Total
Kelompok Institusi	OPD	17	12	29
	Distrik	1	6	7
	Puskesmas	1	4	5
	Sekolah	0	2	2
Total		19	24	43



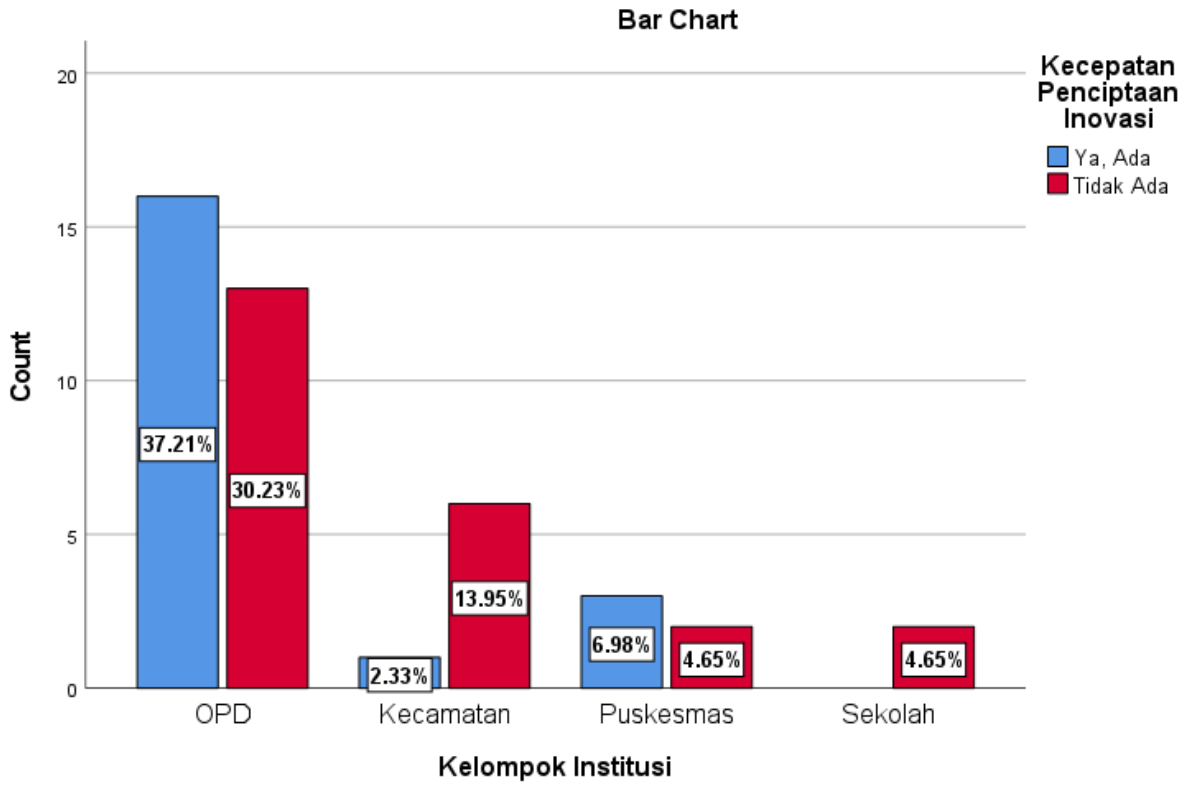
Berdasarkan data dari Tabel Kajian Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kabupaten Mimika, terdapat 43 institusi yang dianalisis, dengan rincian 19 institusi memiliki sistem

online (Ya, Ada) dan 24 institusi tidak memiliki sistem online (Tidak Ada). Dari kelompok Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terdapat 17 institusi yang memiliki sistem online, sementara 12 tidak memilikinya, menunjukkan bahwa OPD memiliki tingkat adopsi yang lebih tinggi terhadap sistem online. Pada level kecamatan, hanya 1 institusi yang memiliki sistem online dari 7 institusi yang diteliti, sedangkan di Puskesmas terdapat 1 institusi yang memiliki sistem online dari total 5. Di sisi lain, sekolah tidak memiliki institusi yang menerapkan sistem online, dengan 2 institusi tidak memilikinya. Data ini mencerminkan perlunya peningkatan pengembangan dan implementasi sistem online di berbagai institusi di Kabupaten Mimika untuk mendukung inovasi daerah.

Tabel 35. Kelompok Institusi * Kecepatan Penciptaan Inovasi Crosstabulation

Count

		Kecepatan Penciptaan Inovasi		
		Ya, Ada	Tidak Ada	Total
Kelompok Institusi	OPD	16	13	29
	Distrik	1	6	7
	Puskesmas	3	2	5
	Sekolah	0	2	2
Total		20	23	43



Berdasarkan analisis data dari Tabel Kajian Sistem Inovasi Daerah (SIDA)

Kabupaten Mimika, terlihat bahwa kecepatan penciptaan inovasi di berbagai kelompok institusi menunjukkan hasil yang beragam. Dari total 43 responden, 20 di antaranya menyatakan bahwa terdapat penciptaan inovasi, sementara 23 lainnya tidak menemui adanya inovasi. Di kelompok Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sebanyak 16 responden melaporkan adanya inovasi, sedangkan 13 tidak menemui hal yang sama, menunjukkan bahwa OPD memiliki peran yang signifikan dalam menciptakan inovasi daerah.

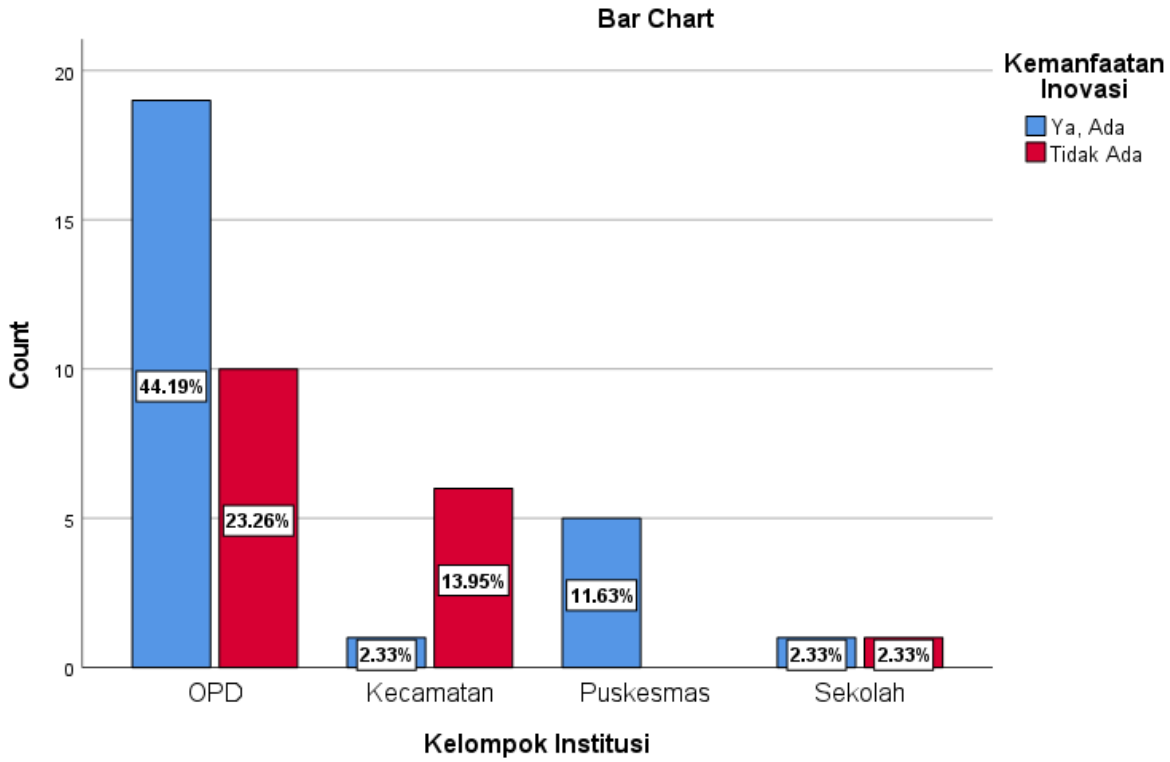
Di tingkat kecamatan, hanya 1 responden yang mengindikasikan adanya inovasi, sementara 6 responden menyatakan sebaliknya, menunjukkan potensi yang belum dimanfaatkan dalam pengembangan inovasi di tingkat ini. Untuk Puskesmas, terdapat 3 responden yang melaporkan adanya inovasi, sedangkan 2 lainnya tidak menemui inovasi.

Sebaliknya, di lingkungan sekolah, tidak ada responden yang melaporkan adanya inovasi, dan 2 responden mencatat tidak adanya inovasi sama sekali. Hal ini menandakan perlunya perhatian lebih terhadap pengembangan inovasi di sektor pendidikan. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan tantangan dalam menciptakan inovasi di Kabupaten Mimika, dengan indikasi bahwa OPD menjadi penggerak utama dalam proses inovasi dibandingkan dengan institusi lainnya.

Tabel 36. Kelompok Institusi * Kemanfaatan Inovasi Crosstabulation

Count

		Kemanfaatan Inovasi		
		Ya, Ada	Tidak Ada	Total
Kelompok Institusi	OPD	19	10	29
	Distrik	1	6	7
	Puskesmas	5	0	5
	Sekolah	1	1	2
Total		26	17	43



Berdasarkan analisis data dari tabel Kajian Sistem Inovasi Daerah (SIDA) di Kabupaten Mimika, terlihat bahwa terdapat 43 responden yang terlibat dalam evaluasi kemanfaatan inovasi. Dari jumlah tersebut, 26 responden (60,47%) menyatakan bahwa inovasi yang ada memberikan manfaat (Ya, Ada), sementara 17 responden (39,53%) merasa sebaliknya (Tidak Ada).

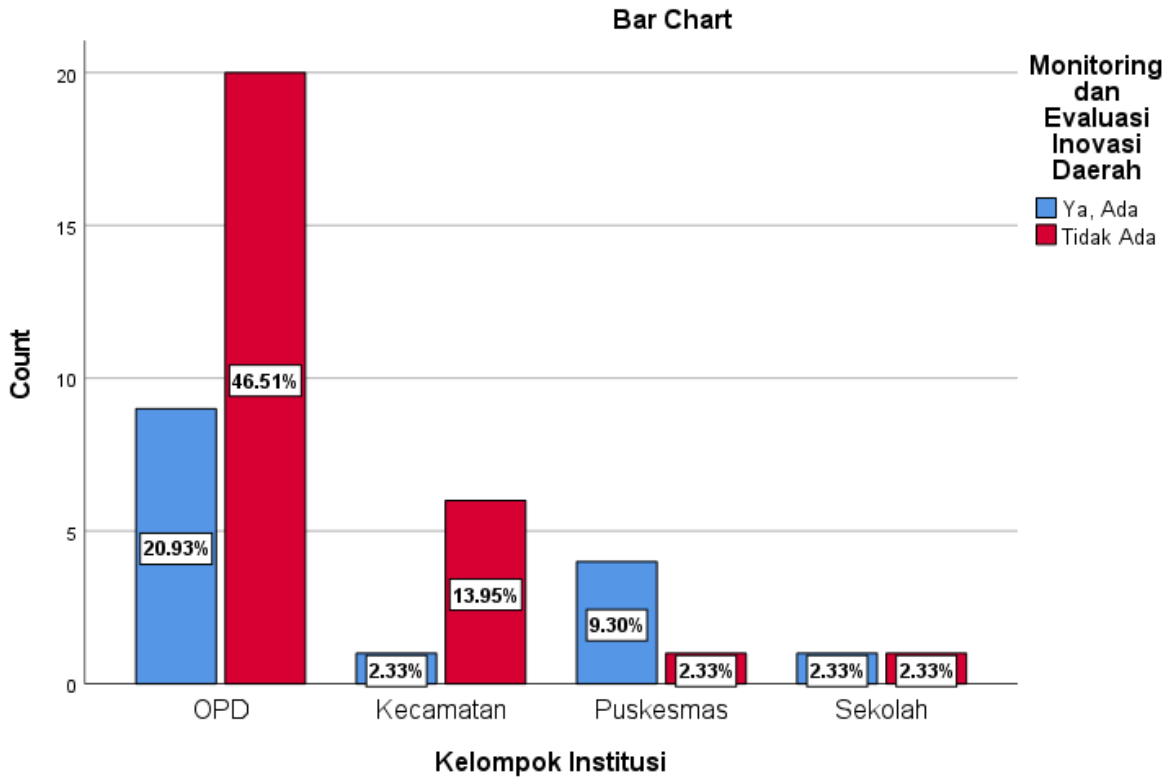
Pada kelompok institusi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mencatatkan jumlah responden terbanyak dengan 19 dari 29 yang merasakan manfaat inovasi. Di tingkat kecamatan, hanya 1 responden yang merasakan manfaat dibandingkan dengan 6 responden yang tidak merasakannya. Puskesmas menunjukkan hasil positif dengan 5 responden menyatakan ada manfaat, sedangkan sekolah menunjukkan keseimbangan dengan 1 responden mengonfirmasi adanya manfaat dan 1 responden tidak.

Hasil ini menunjukkan adanya potensi yang signifikan dalam kemanfaatan inovasi di Kabupaten Mimika, terutama pada OPD, namun juga menyoroti perlunya peningkatan komunikasi dan implementasi inovasi di tingkat kecamatan dan sekolah untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Tabel 37. Kelompok Institusi * Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah Crosstabulation

Count

		Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah		
		Ya, Ada	Tidak Ada	Total
Kelompok Institusi	OPD	9	20	29
	Distrik	1	6	7
	Puskesmas	4	1	5
	Sekolah	1	1	2
Total		15	28	43



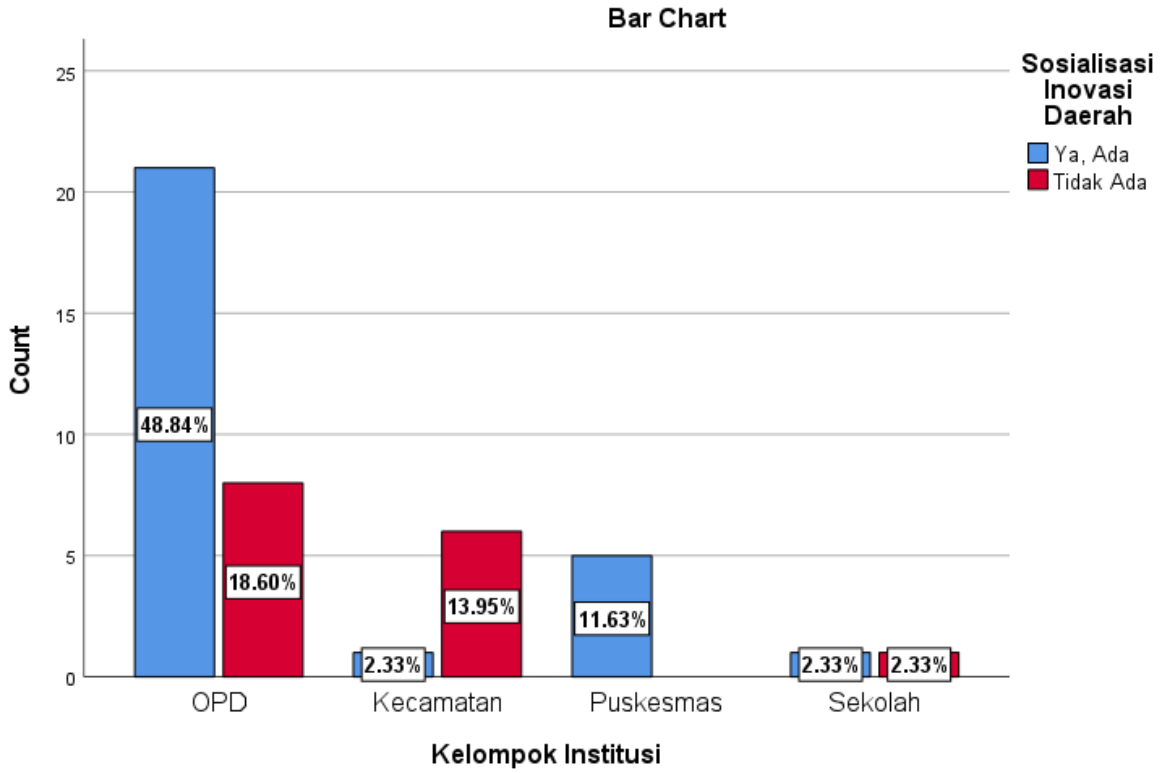
Berdasarkan analisis data pada tabel Kajian Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kabupaten Mimika, dapat dilihat bahwa dari total 43 institusi yang terlibat, 15 institusi (35%) melaporkan adanya sistem monitoring dan evaluasi inovasi daerah, sementara 28 institusi (65%) tidak memiliki sistem tersebut. Di antara kelompok institusi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menunjukkan jumlah tertinggi dengan 9 institusi yang memiliki sistem monitoring dan evaluasi, diikuti oleh Puskesmas dengan 4 institusi. Sementara itu, hanya 1 institusi dari masing-masing Kecamatan dan Sekolah yang memiliki sistem ini. Temuan ini menandakan bahwa meskipun ada beberapa institusi yang telah menerapkan sistem monitoring dan evaluasi, masih terdapat sejumlah besar institusi yang belum mengimplementasikannya, yang dapat berdampak negatif pada efektivitas dan keberlanjutan inovasi daerah di Kabupaten Mimika. Ketiadaan sistem ini pada mayoritas institusi menandakan perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran dan

penerapan sistem monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari pengembangan inovasi daerah.

Tabel 38. Kelompok Institusi * Sosialisasi Inovasi Daerah Crosstabulation

Count

		Sosialisasi Inovasi Daerah		
		Ya, Ada	Tidak Ada	Total
Kelompok Institusi	OPD	21	8	29
	Distrik	1	6	7
	Puskesmas	5	0	5
	Sekolah	1	1	2
Total		28	15	43



Analisis data dari tabel Kajian Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kabupaten Mimika menunjukkan hasil sosialisasi inovasi daerah yang mencakup berbagai kelompok institusi. Dari total 43 institusi yang diteliti, 28 institusi (65%) melaporkan telah melakukan sosialisasi inovasi daerah, sedangkan 15 institusi (35%) menyatakan tidak ada sosialisasi.

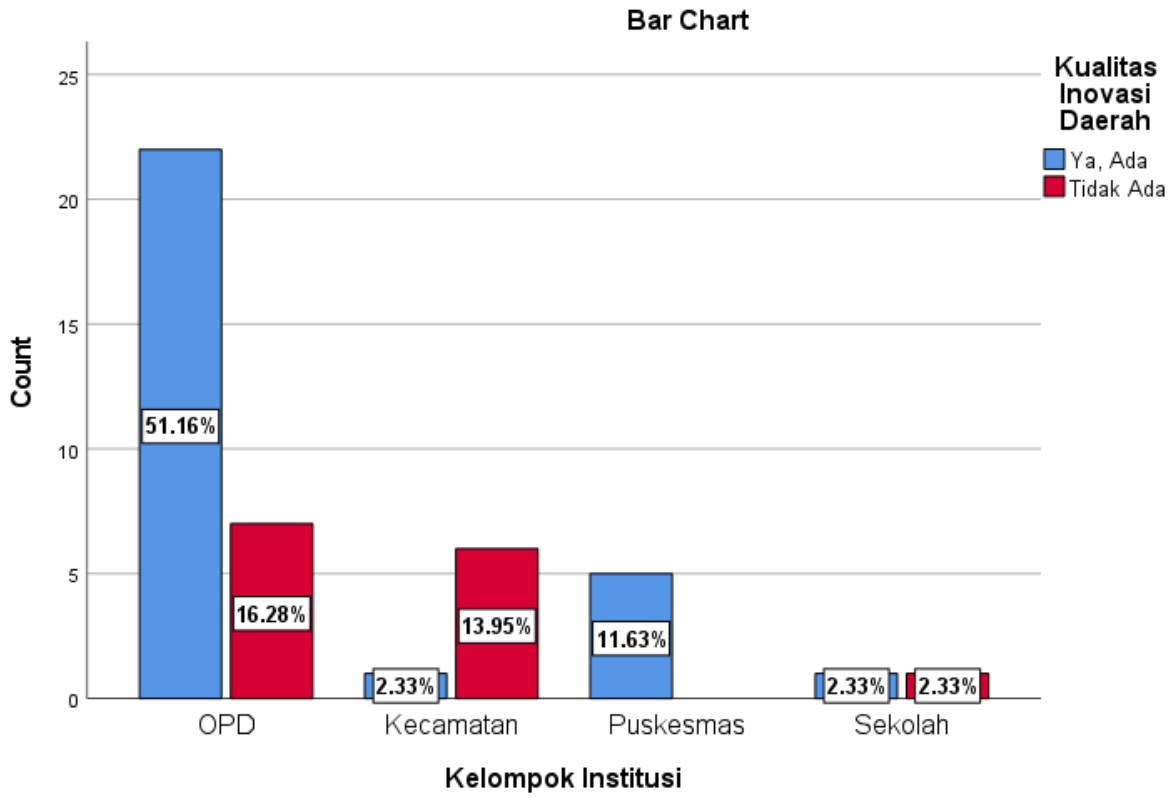
Rincian lebih lanjut menunjukkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki jumlah tertinggi dengan 21 institusi yang sudah melakukan sosialisasi, diikuti oleh Puskesmas dengan 5 institusi. Kecamatan hanya memiliki 1 institusi yang melaporkan sosialisasi, sementara di sekolah terdapat 1 institusi yang melakukannya dan 1 institusi lainnya tidak melakukan sosialisasi. Hasil ini mengindikasikan bahwa

sosialisasi inovasi daerah di Kabupaten Mimika sudah cukup baik, terutama di tingkat OPD, namun masih perlu meningkatkan keterlibatan dari kelompok institusi lain untuk mencapai pemahaman dan penerapan inovasi secara menyeluruh.

Tabel 39. Kelompok Institusi * Kualitas Inovasi Daerah Crosstabulation

Count

		Kualitas Inovasi Daerah		
		Ya, Ada	Tidak Ada	Total
Kelompok Institusi	OPD	22	7	29
	Distrik	1	6	7
	Puskesmas	5	0	5
	Sekolah	1	1	2
Total		29	14	43



Berdasarkan tabel yang menunjukkan kajian Sistem Inovasi Daerah (SIDA) di Kabupaten Mimika, terdapat total 43 institusi yang dianalisis. Dari jumlah tersebut, sebanyak 29 institusi (67,44%) telah memiliki kualitas inovasi yang baik (Ya, Ada), sementara 14 institusi (32,56%) tidak memiliki inovasi yang teridentifikasi (Tidak Ada). Jika dirincikan menurut kelompok institusi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi kelompok terbanyak yang berkontribusi terhadap inovasi, dengan 22 dari 29 institusi yang memiliki kualitas inovasi. Diikuti oleh Puskesmas yang mencatat 5 institusi dengan

inovasi, sedangkan Kecamatan, Sekolah, dan kelompok lainnya menunjukkan angka yang lebih rendah. Khususnya, Kecamatan mencatat hanya 1 institusi yang memiliki inovasi, dengan 6 institusi tidak berinovasi. Temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan perhatian terhadap pengembangan inovasi di tingkat Kecamatan dan Sekolah, serta mendorong kolaborasi lebih lanjut antara institusi untuk memperkuat sistem inovasi daerah di Kabupaten Mimika.

BAB 3
TANTANGAN DAN PELUANG PENGUATAN SIDA



Bab.3

TANTANGAN DAN PELUANG PENGUATAN SIDA

Penguatan sistem inovasi merupakan pilar penting dalam membawa Indonesia ke era ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-basedeconomy) dan masyarakat berpengetahuan (knowledge-based society). Karena itu, pembangunan Indonesia yang progresif perlu menjadikan penguatan sistem inovasi. Penguatan sistem inovasi dapat memainkan peranan penting dalam meningkatkan daya saing, pertumbuhan dan kesejahteraan, peningkatan produktivitas dan penghematan sumber daya, baik pada skala nasional maupun daerah.

Berdasarkan tinjauan pada bab 2 terkait gambaran umum daerah, dan telaah-telaah serta analisis permasalahan maka diperoleh isu strategis dalam pembangunan di Kabupaten Mimika. Adapun isu strategis tersebut terdiri atas kekuatan (S), kelemahan (W), peluang (O), dan ancaman/tantangan (T) dengan memperhatikan 6 poin urgenitas isu strategis tersebut antara lain:

1) Masuk dalam Program Prioritas dan Mendukung visi-misi Kepala Daerah Terpilih,
2) Berdampak Besar Terhadap Pembangunan Daerah,
3) Masuk dalam prioritas pembangunan Provinsi,
4) Masuk dalam prioritas pembangunan Nasional,
5) Masuk Dalam Standart Pelayanan Minimal (SPM) nasional,
6) Masuk Dalam indikator SDG's

Adapun isu strategis dalam pembangunan Kabupaten Mimika antara lain:

1) Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan:
    a. Meningkatkan akses pendidikan di daerah terpencil.
    b. Memperbaiki kualitas pendidikan untuk meratakan tingkat pendidikan antar wilayah.
2) Pengembangan Infrastruktur Pendidikan:
    a. Meningkatkan infrastruktur dan fasilitas pendidikan di seluruh kabupaten.

b. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran.

3) Peningkatan Kesehatan Masyarakat:
   a. Menyediakan fasilitas dan layanan kesehatan yang memadai.
   b. Mencegah dan mengurangi masalah stunting serta penyakit menular dan tidak menular.
4) Pengembangan Ekonomi Lokal:
   a. Mendorong diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu.
   b. Meningkatkan promosi dan pemasaran produk lokal.
5) Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi:
   a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.
   b. Memperkuat program pemberdayaan masyarakat berbasis geografis dan ekologi distrik.
6) Peningkatan Kualitas Infrastruktur:
   a. Memperbaiki infrastruktur dasar di wilayah terpencil.
   b. Meningkatkan akses transportasi dan komunikasi di seluruh kabupaten.
7) Kesejahteraan Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan:
   a. Meningkatkan program kesejahteraan keluarga.
   b. Memperkuat peran Perempuan dalam pembangunan melalui pemberdayaan ekonomi dan sosial.
8) Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan:
   a. Mencegah eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam.
   b. Mengembangkan praktik pertanian, perikanan, dan perkebunan yang berkelanjutan.
9) Penanggulangan Konflik Sosial dan Peningkatan Ketertiban Masyarakat:
   a. Mengurangi Tingkat konflik sosial melalui dialog dan pemberdayaan masyarakat.
   b. Meningkatkan kesadaran hukum dan ketertiban masyarakat.
10) Peningkatan Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN):
   a. Meningkatkan profesionalitas dan kompetensi ASN.
   b. Optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah daerah.
11) Promosi dan Pengembangan Pariwisata:
   a. Meningkatkan promosi pariwisata dan pengembangan destinasi wisata yang berkualitas.

b. Memperbaiki infrastruktur pariwisata.

12) Pengembangan Teknologi dan Inovasi:
    a. Mendorong penggunaan teknologi pertanian modern.
    b. Mengoptimalkan pengelolaan perpustakaan dan arsip daerah dengan teknologi informasi.
13) Peningkatan Literasi dan Keterampilan Masyarakat:
    a. Meningkatkan literasi masyarakat melalui program pendidikan dan pelatihan.
    b. Memperbaiki keterampilan dan keahlian Masyarakat untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.
14) Pengelolaan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan:
    a. Melindungi dan mempromosikan budaya lokal.
    b. Menerapkan kebijakan untuk pelestarian ekosistem lokal dan pengelolaan limbah yang optimal.
15) Peningkatan Keseimbangan Ekonomi dan Pembangunan Berdasarkan Topografi dan Budaya Masyarakat:
    a. Memastikan pembangunan didasarkan pada topografi dan budaya masyarakat setempat.
    b. b. Mengevaluasi kebijakan pembangunan untuk mencapai keseimbangan ekonomi.

3.1. Tantangan

3.1.1. Tantangan Isu Strategis

Menarik disimak lebih lanjut mengenai perkembangan issu-issu mutakhir di Kabupaten Mimika sebagai bagian dari dimensi penting perubahan tata pemerintahan. Sebagai bagian dari agenda pemerintahan Kabupaten Mimika, reformasi birokrasi telah digaungkan ke seluruh pelosok. Tetapi selama 5 tahun terakhir ini, dampak yang ditimbulkan belum bermakna secara signifikan. Berbagai kendala yang dihadapi, tampaknya belum dapat diatasi dengan baik. Bahkan, belum diposisikan sebagai acuan strategis yang optimal di dalam analisis SWOT. Issu-issu menonjol terkait dengan hal ini adalah :

A. Belum memadainya Kapasitas Kelembagaan

Aspek kelembagaan pemerintahan Kabupaten Mimika sedang diperha-dapkan pada permasalahans serius. Selain, restruktruisasi organisasi belum dapat

dituntaskan, juga disebabkan oleh sistem rekruitmen dan promosi jabatan yang masih cenderung belum mengarah pada pentingnya kompetensi dan kapasitas profesionalitasnya. Komparasi kinerja atas penyesuaian tersebut dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, ternyata tidak cukup mencerminkan adanya perubahan signifikan terhadap perbaikan budaya organisasi pro aktif dalam memaknai semangat otsus. Issu reformasi birokrasi berhubungan erat dengan dualisme sistem pemerintahan yang karena adanya konflik kewengan antara provinsi dan kabupaten. Refromasi birokrasi, merujuk pada kehendak membangun pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta menerapkan Tata Pemerintahan yang baik pada semua jajaran dan tingkatan. Sejalan dengan itu akan dilakukan pula penataan terhadap kehidupan politik dan kemasya-rakatan yang demokratis, dewasa dan bermutu, berdasarkan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Oleh karena itu, unsur-unsur negatif yang mengandung sikap dan perilaku KKN hendaknya dapat dicegah seoptimal mungkin, seiring dengan penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan mitra kerjanya.

B. Keterbatasan Akses Pelayanan Publik Bagi Penduduk Asli Mimika

Issu ini ditandai dengan adanya keterbatasan (marginal) bagi Penduduk Asli Mimika dalam hal mengakses pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi kerakyatan. Biaya pengobatan dan biaya pendidikan yang relative tidak terjangkau menjadi salah satu sasaran keluhan bagi mereka. Demikian halnya dengan keterbatasan penyediaan tenaga medis, prasarana dan sarana medis hingga ke daerah terpencil yang masih sangat minim. Di bidang pendidikan, tercatat adanya pendidikan dasar yang tidak memiliki tenaga guru yang cukup. Pungutan biaya pendidikan di luar tarif resmi seringkali dikeluhkan oleh masyarakat Mimika. Di bidang ekonomi, tampaknya pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah masih setengah hati. Di mana, hampir semua program pember-dayaan tidak berkelanjutan, hanya bersifat temporer saja. Pengawalan, monitoring, dan evaluasi kegiatan pengembangan ekonomi kerakyatan tidak dijalankan dengan baik. Kebanyakan data hasil monitoring dan evaluasi tidak dapat dijadikan acuan yang terpercaya, karena hanya bersifat lipstick belaka. Dengan kondisi yang demikian, praktis pelayanan publik hanya dapat dinikmati oleh segelintir Penduduk Kabupaten Mimika yang mampu saja, yang berduit, yang berdomisili di perkotaan saja.. Tampaknya sulit disentuh oleh program pembangunan dalam rangka terapi jangka panjangnya. Demi-kian halnya, dengan penduduk Mimika yang buta aksara,

bertebaran di berbagai kampung.

C. Pemerataan Pembangunan hingga ke wilayah terpencil

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, perlu digalakkan program Pembangunan Kampung yang dikemas dalam berbagai bentuk bentuknya. Idenya adalah menciptakan pusat-pusat pertumbuhan hingga ke wilayah terpencil. Pengalaman menunjukkan bahwa selama ini, pembangiunan itu hanya terjadi di kawasan perkotaan sehingga sebagian besar penduduk Kabupaten Mimika yang berdiam dipedesaan tak dapat mengakses dampak dan manfaatnya. Hal ini telah menimbulkan disparitas atau kesenjangan antar perkotaan dan perdesaan. Walaupun telah dijalankan berbagai program perbedayaan, tetapi belum mencapai hasil yang maksimal.

D. Manajemen Pembangunan Penajaman

Issu marginalisasi Penduduk Asli Papua di berbagai bidang dan sektor pembangunan. yang perlu mendapatkan sentuhan perencanaan dan pengelolaan pembangunan secara tepat guna dapat menolong Penduduk Asli Papua di Kabupaten Mimika keluar dari keterpurukan dan kemiskinan, dikaitkan dengan standar pelayanan publik dan kemampuan penduduk asli mengakses pelayanan tersebut. Dipastikan bahwa hal ini sangat membutuhkan kapasitas perencanaan dan monev pembangunan yang secara tepat dan memadai. Dalam kerangka pembangunan, prinsip-prinsip manajemen tidak diterapkan secara konsisten. Akibatnya, mekanisme perencanaan pembangunan masih bersifat instan, tidak mengakomodasi kebutuhan nyata masyarakat, tetapi lebih cenderung berorientasi pada kepentingan perencana atau pelaksana pembangunan di jajaran pemerintahan. Di dalam manajemen pembangunan terdapat 3-pilar utama yang seyogyanya saling bersinergi, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ketiganya, diimplemen-tasikan hanya secara simultan bukan dalam kerangka umum yang tertata dengan baik

E. Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup tampang belum optimal termanfaatkan sebesar-besar kemakmuran masyarakat mimika. Masih menjamurnya pengusaha illegal menjadi factor krusial yang merugikan Di lain pihak kewenangan pemerintah Kabupaten Mimika belum juga dapat dioptimalkan karena masih terbatasnya penguasaan iptek yang dapat digunakan untuk mengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Sementara itu, dalam banyak hal potensi pengelolaan sumberdaya alam justru memperoleh konsesi dari pemerintah atasan.

F. Issu Penuntasan Pelanggaran HAM

Penanganan kasus pelanggaran HAM, tampak sangat lamban. Hal ini dapat dipahami oleh karena masih adanya keterbatasan kapasitas perangkat hukum yang dimiliki. Sementara itu, adanya politisasi pelanggaran HAM justru dapat memperburuk situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarat, sehingga mengurangi konsentrasi membangun.

3.1.2. Tantangan Internasional

Beberapa tantangan besar di kancah internasional yang akan mempengaruhi perekonomian antara lain:

A. Transformasi Iptek dalam Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0

Tranformasi teknologi dalam revolusi industri 4.0 dan telah meningkatkan kecepatan perubahan Iptek, pemanfaatan kecerdasan buatan, pemanfaatan "bigdata", pemanfaatan internet yang luas serta cetak tiga dimensi semakin meluas dalam berbagai bidang industri, perdagangan dan jasa (terutama riset dan ekonomi digital). Demikian pula dalam tata kehidupan masyarakat diyakini dengan bantuan Iptek akan meningkatkan produktivitas, meningkatnya pemanfaatan telekomunikasi dan efisien dalam proses produksi serta pemanfaatan internet telah mendukung perkembangan sistem kemasyarakatan, sistem kesehatan dan pelayanan publik secara luas. Namun disisi lain, perubahan ini telah mengakibatkan terpangkasnya 60% pekerjaan di seluruh dunia yang digantikan oleh otomatisasi dan pemanfaatan robot/kecerdasan buatan (artificial intelligent/AI). Disisi lain, yang perlu mendapat perhatian adalah pemanfaatan Iptek, penggunaan robot, kecerdasan buatan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan pangan, pemanfaatan energi yang lebih efisien dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Hal ini memerlukan dukungan dari pemerintah, kalangan dunia usaha, perguruan tinggi dan inovasi dalam masyarakat secara luas.

B. Pergeseran Peran Ekonomi Kawasan Asia – Pasifik Dalam Perekonomian Global

Prospek perekonomian Kawasan Asia – Pasifik sejak sebelum pandemi Covid 19 semakin menguat dan menggeser peran negaranegara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Hal ini diketahui potensi perekonomian Asia- Pasifik dengan 50% transaksi perdagangan dunia dan jumlah penduduk sebanyak 41% penduduk dunia.

Pengembangan perekonomian kawsan ini ditandai dengan meningkatnya permintaan pasar domestik, meningkatnya ekspor, kemajuan teknologi dan pemanfaatan internet yang massif dan investasi swasta yang meningkat pesat. Berbagai kerjasama lintas negara di Asia Pasifik telah menjadikan perekonomian dan perdagangan semakin meningkat dari tahun ke tahun, antara lain melalui Trans Pacific Partenership, ASEAN Regional Forum (ARF) dimotori Tiongkok, East Asia Summit (EAS) dan Expand ASEAN Maritime Forum serta Kepemimpinan Indonesia dalam Forum G-20 menjadikan peran negara kita, semakin diperhitungkan dalam kancah internasional.

C. Pasar Terbuka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Pasar Bebas ASEAN (Asean Free Trade Association/AFTA) merupakan komitmen bersama 10 negara anggota ASEAN menetapkan pasar tunggal sebagai pasar potensial dengan jumlah penduduk lebih kurang sebanyak 550 juta jiwa (2021) dan terbesar adalah penduduk Indonesia (tahun 2021) dengan jumlah sebanyak 270 juta jiwa. Terdapat lima kebijakan yang tidak dapat dibatasi yaitu : arus barang, arus jasa, modal dan investasi serta tenaga kerja terampil. Perluasan pasar Indonesia khusunys perdagangan antar negara ASEAN, transfer Iptek dan ekonomi digital menjadi dampak positif berlakunya pasar bebas. Oleh karena itu, kebutuhan tenaga kerja terampil dan kompetensi keahlian tenaga kerja perlu ditingkatkan agar kita dapat mendapatkan keuntungan pasar bebas ASEAN. Hal ini mengingat lebih dari 50% penduduk ASEAN adalah penduduk negara kita yang sebagian besar (64,7%) kelompok usia produktif.

D. Kemitraan Global Untuk Mencapai Sustainable Development Goal`s/ SDG`s (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB) Tahun 2016 – 2030

Stabilitas politik internasional telah mendorong kemitraan global dalam mewujudkan pencapaian SDG`s sebagai agenda global dirumuskan dalam 17 tujuan dan 169 target pembangunan. Pelaksanaannya mendapatkan dukungan sebanyak 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menegaskan komitmentnya dalam menanggulangi kelaparan dan kemiskinan, peningkatan pendidikan dan kesetaraan gender, pelestarian lingkungan serta tata kelola perekonomian dunia yang lebih adil.

E. Belt and Road Initiative Forum (BRIF)

BRIF bertujuan untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan BRIF. Forum ini menjadi platform bagi para pemimpin

dan pejabat dari berbagai negara untuk bertukar pandangan, berbagi pengalaman, dan menjalin kerja sama. Sebagai isu internasional, BRIF memiliki beberapa dimensi penting:

Dimensi ekonomi: BRIF memiliki potensi untuk meningkatkan perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia, Eropa, dan Afrika.

1) Dimensi politik: BRI dapat memperkuat hubungan bilateral dan multilateral antara China dengan negara-negara mitra.
2) Dimensi keamanan: BRI dapat meningkatkan stabilitas dan keamanan di kawasan Asia, Eropa, dan Afrika.

BRIF telah menjadi salah satu forum internasional terpenting dalam beberapa tahun terakhir. Forum ini telah menarik perhatian dari berbagai negara di dunia. BRIF dipandang sebagai inisiatif yang dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. BRIF dapat membantu negara- negara mitra untuk meningkatkan infrastruktur, perdagangan, dan investasi. BRIF juga dapat membantu untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia, Eropa, dan Afrika.

3.2. Peluang

Modal dasar pembangunan Kabupaten Mimika adalah keseluruhan kekuatan dan peluang daerah yang dimiliki dan dapat digunakan untuk mendukung pembangunan Kabupaten Mimika yang dicita-citakan, yakni:

3.2.1. Letak Strategis;

Letak Kabupaten Mimika yang strategis merupakan gerbang Kawasan Pegunungan Tengah dan Kawasan Selatan Papua (PTSP) serta berada dalam konstelasi regional dan internasional, sehingga sangat memungkinkan untuk dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan dan kawasan tumbuh cepat baik di tingkat regional, nasional dan internasional. Dengan luas wilayah 21.522 Km^2, dan jumlah penduduk sebesar 150.753 jiwa, maka Kabupaten Mimika masih memiliki berbagai peluang pembangunan dan pertumbuhan di masa mendatang.

3.2.2. Sumberdaya Alam;

Sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati terdapat di darat dan laut

merupakan kekayaan yang dapat dikelola sepanjang masa, dalam upaya pemenuhan kebutuhan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah. Ketersediaan sumberdaya alam (pertambangan) yang mampu berkembang dengan pengelolaan penambangan tembaga, emas, dan perak, dalam mengembangkan investasi berskala internasional, dengan prinsip-prinsip kemitraan yang saling menguntungkan.

3.2.3. Investasi berskala Internasional;

Kehadiran kegiatan penambangan PT. Freeport Indonesia memberikan kontribusi yang sangat besar dari sektor pertambangan terhadap pertumbuhan dan pembangunan di Kabupaten Mimika. Investasi ber-skala Internasional ini tumbuh sebagai suatu primadona yang berkem-bang dengan pesat dan memberikan lapangan kerja dan peluang usaha bagi seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Mimika.

3.2.4. Pertumbuhan Penduduk yang Tinggi;

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa dengan adanya kegiatan penambangan tersebut, maka tingkat pertumbuhan penduduk di Kabupaten Mimika sangat pesat dengan jumlah penduduk pada Tahun 2005 sebanyak 150.753 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 10,54% pertahun dan kepadatan penduduk sebesar 7,52 jiwa per km^2. Hal ini tentunya memberikan peluang bagi perkembangan Kabupaten Mimika, namun tentunya harus di tata dalam suatu sistem kependudukan yang baik. 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua, sebagai bentuk pengakuan terhadap hak-hak dasar orang asli Papua dan pemberian Kewenangan yang lebih besar kepada daerah, serta menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Mimika untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

BAB 4
KONDISI SIDA YANG AKAN DICAPAI



Bab.4

KONDISI SIDA YANG AKAN DICAPAI

Kondisi Sistem Inovasi Daerah (SIDA) **Kabupaten Mimika** yang akan dicapai secara umum menggambarkan bagaimana kondisi SIDA **Kabupaten Mimika** yang diharapkan (target) terjadi pada akhir periode, yakni Tahun 2029. Capaian-capaian tersebut diharapkan menjadi pendukung utama keberhasilan pencapaian Visi pembangunan **Kabupaten Mimika**. Isi dari Bab IV ini merupakan rencana capaian (target) dari kondisi yang saat ini ada, sebagaimana dicantumkan di dalam Bab I. Rencana capaian (target) Tahun 2029 adalah dijelaskan pada table 4.1.

Analisis Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kabupaten Mimika menunjukkan bahwa inovasi telah mulai berkembang di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan kontribusi signifikan terhadap berbagai program inovasi. Tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya dukungan regulasi, keterbatasan kapasitas SDM, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi (IT). Selain itu, inovasi dari institusi lain seperti kecamatan, puskesmas, dan sekolah masih belum maksimal. Dalam upaya mendukung institusi yang belum memiliki inovasi, replika program dari daerah lain juga dapat menjadi solusi efektif.

Strategi 1: Penguatan Kapasitas Institusi dan SDM

Meningkatkan kapasitas SDM di semua institusi dengan pelatihan pembuatan proposal, indikator inovasi, dan pengelolaan berbasis teknologi informasi menjadi prioritas. Institusi yang belum memiliki inovasi perlu diarahkan untuk mereplikasi praktik baik dari daerah lain yang telah sukses. Pendampingan langsung dapat diberikan untuk memastikan adaptasi berjalan efektif. Untuk institusi yang telah memiliki inovasi, pembaruan strategi, peningkatan cakupan dampak, dan diversifikasi program harus menjadi fokus utama.

Strategi 2: Penyelarasan Regulasi dan Dukungan Anggaran

Regulasi inovasi harus diperkuat untuk memastikan partisipasi yang merata di seluruh institusi. Alokasi anggaran khusus untuk program inovasi, termasuk inovasi hasil

replikasi, perlu dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kebijakan ini akan memfasilitasi pelaksanaan dan keberlanjutan program inovasi, baik yang baru maupun yang sudah berjalan.

Strategi 3: Replikasi dan Kolaborasi Antar Daerah

Untuk institusi yang belum memiliki inovasi, program replikasi dari daerah lain yang sudah terbukti berhasil dapat menjadi langkah awal. Hal ini memerlukan jejaring kolaborasi yang kuat, studi banding, dan penyesuaian program agar relevan dengan konteks Kabupaten Mimika. Pengembangan inovasi yang sudah ada juga dapat didorong melalui kolaborasi dengan institusi lokal dan nasional.

Strategi 4: Monitoring, Evaluasi, dan Penghargaan

Pemantauan berkala terhadap inovasi perlu dilakukan untuk memastikan keberhasilan implementasi dan memitigasi hambatan. Saran dan masukan untuk pengembangan inovasi yang sudah ada harus diberikan secara terstruktur agar terus relevan dan berdampak luas. Selain itu, pemberian penghargaan bagi institusi yang berhasil menciptakan dan mengembangkan inovasi berkualitas dapat menjadi motivasi bagi semua pihak untuk terlibat lebih aktif.

Strategi 5: Peningkatan Budaya Inovasi dan Partisipasi Publik

Untuk memastikan keberlanjutan pengembangan inovasi di Kabupaten Mimika, perlu dibangun budaya inovasi yang kuat di seluruh elemen masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye kesadaran inovasi, lomba inovasi antar institusi, serta program pelibatan masyarakat, seperti co-creation atau forum diskusi publik. Dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari proses inovasi, ide-ide baru yang relevan dengan kebutuhan lokal dapat lebih mudah muncul dan diimplementasikan. Selain itu, mendukung inisiatif inovasi berbasis komunitas akan meningkatkan partisipasi aktif dari sektor non-pemerintah, memperkuat kolaborasi, dan memperluas dampak inovasi.

Adapun di tampilkan dalam table berikut, Inovasi-inovasi yang tercantum dalam dokumen ini diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi pengembangan potensi daerah ke depan, khususnya dalam meningkatkan pelayanan publik, mendukung kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat daya saing lokal.

Tabel 4. 1. Martrik Inovasi Utama Kabupaten Mimika

Judul Inovasi	OPD	Permasalahan/ Tantangan	Tujuan	Manfaat	2025	2026	2027	2028	2029
Tanya Pak Distrik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rendahnya akses informasi dan komunikasi dengan pemerintah distrik.	Meningkatkan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah distrik melalui teknologi.	Pelayanan publik lebih transparan dan efisien.	Implementasi sistem di 5 distrik.	Perluasan ke 10 distrik.	Evaluasi sistem dan optimalisasi.	Pengintegrasian data lintas OPD.	Seluruh distrik terintegrasi.
PERMATA MIMIKA	Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika	Anak-anak mengalami gizi buruk dan stunting.	Menurunkan angka stunting melalui pemberian makanan tambahan.	Peningkatan kesehatan anak dan penguranga n stunting.	Pemberian makanan tambahan di 10 kampung.	Perluasan cakupan ke 20 kampung.	Penguranga n stunting sebesar 10%.	Penguranga n stunting sebesar 15%.	Pengurangan stunting sebesar 20%.

LINDA	BLUD Puskesmas Timika	Kurangnya layanan kesehatan berbasis keluarga.	Memberikan layanan kesehatan dengan pendekatan berbasis keluarga.	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan keluarga secara menyeluruh.	Pilot di 5 kampung.	Implementasi kabupaten.	Digitalisasi data kesehatan.	Pelayanan mencapai 80% keluarga.	Cakupan 100% keluarga.
SIDORA	BLUD Puskesmas Timika	Kurangnya teknologi digital dalam pengelolaan layanan kesehatan.	Mengintegrasikan teknologi dalam layanan kesehatan.	Pelayanan kesehatan lebih cepat, akurat, dan efisien.	Penerapan teknologi di puskesmas besar.	Pelatihan SDM kesehatan.	Digitalisasi layanan kesehatan.	Integrasi layanan antar puskesmas.	Sistem beroperasi penuh.
Amuro Kopi	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Mimika	Pemasaran produk kopi lokal masih terbatas.	Meningkatkan pemasaran dan nilai tambah kopi lokal.	Meningkatkan pendapatan petani kopi lokal.	Promosi kopi di tingkat lokal.	Perluasan pemasaran regional.	Pemasaran digital dimulai.	Diversifikasi produk kopi lokal.	Peningkatan pendapatan 20%.

KELABU CINTA	BLUD Puskesmas Wania	Angka kematian ibu dan anak masih tinggi.	Mengurangi kematian ibu dan anak melalui edukasi digital berbasis WhatsApp Bisnis.	Menurunkan risiko kesehatan ibu hamil dan bayi.	Peluncuran program di 10 kampung.	Peningkatan cakupan layanan ke 20 kampung.	Evaluasi dampak layanan.	Penurunan kematian sebesar 15%.	Penurunan kematian sebesar 25%.
Emergency Ambulance Service (EMAS)	Dinas Kesehatan	Respon ambulans lambat dalam keadaan darurat.	Mempercepat respon layanan ambulans darurat.	Menyelamatkan nyawa dalam situasi darurat.	Tambahan 2 unit ambulans.	Penambahan cakupan ke 50% wilayah.	Rekrutmen SDM baru untuk layanan ambulans.	Implementasi sistem respon otomatis.	Layanan tersedia di seluruh distrik.
P-KPULD	Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	Kurangnya promosi produk unggulan lokal.	Meningkatkan jangkauan pemasaran produk unggulan lokal daerah.	Meningkatkan pendapatan UMKM dan pengenalan produk lokal.	Pameran produk lokal.	Promosi di tingkat nasional.	Pengembangan platform digital.	Perluasan pemasaran ke luar daerah.	Peningkatan penjualan 30%.

SIMAK	Badan Kepegawaian Daerah	Rendahnya monitoring dan evaluasi kinerja ASN.	Mengoptimalkan tata kelola ASN melalui teknologi digital.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja ASN.	Sistem diterapkan di 30% OPD.	Penambahan fitur evaluasi.	Integrasi data ASN berbasis digital.	Evaluasi hasil implementasi.	Sistem operasional 100%.
DUKCAPIL SIAGA	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan administrasi kependudukan belum responsif terhadap kebutuhan darurat.	Menyediakan layanan kependudukan cepat dan responsif.	Mempermudah akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan.	Peluncuran sistem di 5 kecamatan.	Penambahan cakupan ke 50% wilayah.	Layanan 24 jam di kecamatan besar.	Penambahan fitur berbasis mobile app.	Sistem penuh di semua kecamatan.
MEGAMUNAK (Mewarnai Gambar untuk Anak)	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rendahnya minat baca dan literasi pada anak-anak usia dini.	Meningkatkan literasi melalui kegiatan kreatif mewarnai gambar.	Membantu perkembangan kognitif dan kreativitas anak-anak.	Pilot program di 10 perpustakaan desa.	Implementasi di 20 desa.	Evaluasi dan peningkatan konten.	Integrasi dengan aplikasi digital.	Cakupan seluruh desa.

SARAPAN TELUR IN-CAFE	Dinas Ketahanan Pangan	Kekurangan protein dalam pola makan masyarakat.	Meningkatkan asupan protein melalui kampanye sarapan sehat berbasis telur.	Menurunkan angka kekurangan gizi di masyarakat.	Peluncuran di 5 lokasi strategis.	Penambahan lokasi di seluruh kecamatan.	Peningkatan konsumsi protein 10%.	Evaluasi dan integrasi dengan UMKM lokal.	Cakupan kabupaten.
E-Office	Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika	Proses administrasi manual yang lambat dan kurang efisien.	Digitalisasi proses administrasi perkantoran.	Meningkatkan efisiensi dan akurasi administrasi pemerintahan.	Sistem diterapkan di 50% OPD.	Integrasi antar-OPD.	Fitur tambahan berbasis AI.	Digitalisasi penuh di semua OPD.	Sistem stabil dan berjalan optimal.
WebGIS Kabupaten Mimika	Bappeda Mimika	Kurangnya data spasial terintegrasi untuk perencanaan wilayah.	Mengembangkan WebGIS untuk mendukung perencanaan pembangunan.	Mempermudah akses informasi spasial bagi pemerintah dan masyarakat.	Platform diluncurkan.	Penambahan data tematik.	Integrasi dengan OPD terkait.	Peningkatan fitur analitik.	Sistem stabil digunakan masyarakat.

BISA KA	Dinas Pendidikan	Rendahnya akses beasiswa bagi masyarakat miskin.	Memberikan beasiswa pendidikan untuk anak-anak Amungme dan Kamoro.	Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat kurang mampu.	Beasiswa diberikan kepada 200 siswa.	Perluasan penerima hingga 500 siswa.	Evaluasi dampak program.	Optimalisasi anggaran dan pengelolaan.	Program berjalan berkelanjutan.
BOS DAMI	Dinas Pendidikan	Minimnya dukungan operasional untuk sekolah-sekolah di daerah terpencil.	Menyediakan dana operasional untuk sekolah di daerah terpencil.	Mendukung keberlangsungan kegiatan belajar mengajar.	Pemberian dana ke 50% sekolah.	Peningkatan dana sebesar 20%.	Evaluasi dampak bantuan.	Cakupan 100% sekolah terpencil.	Pengelolaan dana lebih transparan.
JDIH Kabupaten Mimika	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Kurangnya akses terhadap produk hukum daerah.	Menyediakan sistem informasi hukum berbasis digital.	Mempermudah masyarakat dan pemerintah mengakses dokumen hukum.	Sistem diluncurkan.	Penambahan fitur pencarian lanjutan.	Pengintegrasian dengan WebGIS.	Optimalisasi sistem berbasis cloud.	Sistem berjalan optimal.

DUKCAPIL SIAGA	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan kependudukan belum responsif terhadap kebutuhan masyarakat.	Menyediakan layanan kependudukan cepat dan responsif.	Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi.	Pilot di 5 kecamatan.	Implementasi di seluruh kecamatan.	Evaluasi dan perbaikan sistem.	Penambahan layanan berbasis mobile.	Sistem terintegrasi penuh.
PATEN GUNUNG MESIR	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kesulitan pengurusan administrasi kependudukan di wilayah terpencil.	Memberikan pelayanan administrasi di daerah pegunungan.	Mempermudah pengurusan dokumen kependudukan masyarakat di daerah terpencil.	Pelayanan di 10 wilayah pegunungan.	Perluasan ke 20 wilayah pegunungan.	Penambahan fitur jemput bola.	Peningkatan layanan digital.	Cakupan penuh wilayah terpencil.
JOK MARRIED	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kompleksitas proses pencatatan pernikahan di masyarakat.	Mempermudah proses pencatatan pernikahan berbasis digital.	Meningkatkan kepastian hukum pernikahan masyarakat.	Peluncuran aplikasi.	Pelatihan pengguna di kecamatan.	Integrasi data kependudukan.	Evaluasi dan penambahan fitur.	Sistem stabil dan digunakan luas.

AMBISI (E-Retribusi Pasar)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rendahnya transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan retribusi pasar.	Digitalisasi pengelolaan retribusi pasar.	Meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan pasar.	Sistem diterapkan di 5 pasar utama.	Perluasan ke seluruh pasar kabupaten.	Penambahan fitur monitoring.	Evaluasi dan optimalisasi sistem.	Sistem berjalan stabil.
PERKEDELE	Dinas Pendidikan	Rendahnya akses literasi di daerah terpencil.	Meningkatkan literasi masyarakat melalui perpustakaan keliling.	Menumbuhkan minat baca di daerah terpencil.	Program dimulai di 10 kampung.	Perluasan ke 20 kampung.	Evaluasi dan peningkatan koleksi buku.	Digitalisasi layanan perpustakaan.	Cakupan penuh seluruh kampung.
SIMONEV	Bappeda Mimika	Kurangnya monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Menyediakan sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi.	Meningkatkan akurasi data dan evaluasi pembangunan.	Peluncuran sistem awal.	Penambahan fitur analitik.	Integrasi data OPD.	Evaluasi dampak program.	Sistem stabil dan berjalan optimal.

DASHAT (Dapur Sehat)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tingginya angka stunting di kampung KB.	Menurunkan angka stunting melalui dapur sehat di kampung KB.	Peningkatan gizi masyarakat kampung KB.	Pilot di 10 kampung KB.	Perluasan cakupan ke 20 kampung KB.	Evaluasi dampak program.	Penguranga n angka stunting 15%.	Pengurang an angka stunting 25%.
MAITUA (Mimika Integrasi Satu Data)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kurangnya integrasi data antar-OPD di Kabupaten Mimika.	Mengintegrasikan data pemerintah daerah menjadi satu platform.	Mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis data.	Platform awal diluncurkan.	Integrasi data 50% OPD.	100% OPD terintegrasi.	Penambahan data sektoral baru.	Sistem berjalan stabil.
Fisherman 90	Dinas Perikanan	Rendahnya produktivitas nelayan lokal karena kurangnya informasi dan teknologi.	Memberikan akses informasi berbasis teknologi kepada nelayan lokal.	Meningkatkan efisiensi dan hasil tangkapan nelayan.	Sistem diuji coba di 5 lokasi.	Implementasi di seluruh wilayah pesisir.	Penambahan fitur real-time.	Evaluasi dampak pada produktivitas.	Sistem berjalan secara mandiri.

POJOK NONGKRONG SIPINTER	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Kompleksitas proses perizinan untuk investasi di daerah.	Menyediakan layanan terpadu untuk kemudahan perizinan investasi.	Meningkatkan minat investasi melalui kemudahan proses perizinan.	Sistem berjalan di 5 lokasi.	Perluasan ke seluruh kecamatan.	Penambahan fitur digital.	Optimalisasi layanan.	Sistem terintegrasi secara penuh.
Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tingginya angka stunting pada anak di Kampung KB.	Memberikan edukasi gizi dan akses makanan sehat melalui dapur sehat di Kampung KB.	Mengurangi angka stunting di Kampung KB hingga 30%.	Dijalankan di 10 kampung percontohan.	Cakupan 50% kampung KB.	Evaluasi dampak program.	Pengurangan angka stunting sebesar 20%.	Kampung KB bebas stunting.
E-Rekom Jamkesda 15 menit	Dinas Sosial	Lamanya proses pemberian rekomendasi Jamkesda untuk masyarakat.	Mempercepat proses pemberian rekomendasi Jamkesda berbasis digital.	Meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.	Sistem diterapkan di 50% kecamatan.	Perluasan cakupan ke seluruh kabupaten.	Evaluasi dan optimalisasi.	Penambahan fitur mobile.	Sistem berjalan lancar.

Tabel 4. 2. Inovasi Pendukung Kabupaten Mimika

No	Prioritas Penguatan SIDA	Focus Kebijakan Inovasi	Kondisi SIDA yang akan dicapai tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sumber Daya Manusia	Menyediakan fasilitas dan layanan kesehatan yang memadai. Mencegah dan mengurangi masalah stunting serta penyakit menular dan tidak menular.	Meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat;
			Memberikan Bantuan Beasiswa Pendidikan Perguruan Tinggi;
			Meningkatkan Kompetensi dan Pemerataan Tenaga Pendidik;
			Meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan formal;
			Menyediakan Perlengkapan Pendukung Pendidikan/ Pembelajaran Siswa;
			Menyediakan sekolah terpadu di setiap kecamatan;
			Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada ASN;
			Membangun Islamic Center;
			Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Tenaga Kesehatan;
			Menjadikan RSUD Kabupaten Mimika sebagai rumah sakit rujukan;
			Memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
2	Infrastruktur Dasar dan Infrasutruktur Konektifitas Wilayah	Meningkatkan infrastruktur dan fasilitas pendidikan di seluruh kabupaten. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran.	Membangun dan memilihara Jalan dan Jembatan desa, kecamatan dan kabupaten;
			Membangun dan memelihara sarana dan prasarana perhubungan;
			Meningkatkan Ketersediaan air baku;
			Meningkatkan sanitasi yang layak;
			Optimalisasi pengelolaan dan pendayagunaan SPAM/PDAM;
			Mengupayakan pemenuhan kebutuhan elektrifikasi;
			Membangun infrastruktur pengendali banjir;
			Meningkatkan pengelolaan persampahan.
3	Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan:	Mencegah eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam. Mengembangkan praktik pertanian, perikanan, dan perkebunan yang	Memberikan bantuan bibit unggul pertanian, perkebunan, perternakan dan perikanan;
			Memberikan bantuan sarana dan prasarana pertanian, perkebunan, perternakan dan perikanan;
			Memberikan pelatihan kerja kepada petani, nelayan dan peternak untuk

No	Prioritas Penguatan SIDA	Focus Kebijakan Inovasi	Kondisi SIDA yang akan dicapai tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
		berkelanjutan.	peningkatan produksi pertanian, perkebunan, perternakan dan perikanan;
			Meningkatkan kapasitas penyuluh/pendamping pertanian dan perikanan;
			Mengendalikan kesehatan komoditas pertanian, peternakan dan perikanan
4	Pengembangan Ekonomi Lokal	Mendorong diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu. Meningkatkan promosi dan pemasaran produk lokal.	menyediakan pelayanan pendidikan vokasi;
			mengoptimalkan fungsi BLK;
			Hilirisasi komoditas unggulan lokal;
			Optimalisasi pengelolaan BUMDes;
			Penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), koperasi dan industri kreatif;
			Menciptakan regulasi yang mendorong investasi daerah.
5	Jaminan Perlindungan Sossial	Perlindungan dan jaminan sosial.	Memberikan jaminan sosial bagi masyarakat tidak mampu
			Memberikan perlindungan bagi PMKS
6	Pengembangan Teknologi dan Inovasi	Peningkatan kulitas tata kelola yang efektif dan efisien; Peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien	Mengoptimalkan teknologi informasi (e-goverment);
			Menyediakan pelayanan smart city;
			Menyediakan data dan informasi terpadu kabupaten;
			Peningkatan manajamen aparatur.

BAB 5
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGUATAN SIDA



Bab.5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGUATAN SIDA

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Mimika dalam Rencana Pemba- ngunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mimika Tahun 2005–2025, dilaksanakan untuk mewujudkan Masyarakat Mimika yang Madani, serta Mimika Menjadi Pusat Pelayanan Jasa dan Industri Global Berwawasan Lingkungan. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka dilaksanakan misi pembangunan daerah yang selanjutnya dijabarkan ke dalam hal-hal sebagai berikut:

5.1. Strategi Penguatan Sistem Inovasi di Kabupaten Mimika

1) Pendekatan Mikro Spasial;

   Pendekatan mikro spasial lebih diarahkan pada peningkatan dan pengembangan pelayanan dasar masyarakat yaitu, pendidikan dan kesehatan. Pendekatan mikro spasial dilaksanakan untuk pem- berdayaan kampung dan distrik yang diarahkan pada sasaran utama yaitu manusia, dimana pelayanan mikro spasial memiliki ruang pelayanan yang sangat terbatas (man to man), sehingga diharapkan pelayanan tersebut mampu meningkatkan pendapatan kesejahteraan masyarakat di tingkat kampung dan distrik.

2) Pendekatan Makro Sektoral;

   Pendekatan makro sektoral lebih diarahkan pada kegiatan- kegiatan sektor yang berskala besar dengan mengembangkan dan memanfaatkan potensi sumberdaya yang tersedia. Hal ini dilakukan untuk percepatan pembangunan daerah dalam mengejar keterting- galan, sehingga terciptanya efek multiplier bagi peningkatan penda- patan kesejahteraan masyarakat secara besar (Big push).

3) Pendekatan sinkronisasi sistem sumberdaya manusia

   lebih diarahkan pada peningkatan pembangunan sistem infrastruktur dan sistem produksi artinya, pembangunan sistem infrastruktur harus dapat mendukung terciptanya sistem produksi. Hal ini dimaksudkan bahwa kesiapan sumberdaya manusia harus disiapkan dan menjadi peranan penting dalam mendukung

pembangunan sistem infra-struktur dan sistem produksi. Kesiapan sumberdaya manusia lebih diutamakan bagi masyarakat asli Papua yang memiliki kemampuan untuk dipersiapkan dalam menangani sistem produksi dan sistem infrastruktur sesuai kebutuhan pasar.

5.2. Arah Kebijakan Penguatan Sistem Inovasi di Kabupaten Mimika

5.2.1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumberdaya manusia merupakan investasi jangka panjang yang harus dilakukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka pembangunan upaya-upaya pengembangan sumberdaya manusia bersifat intengible sehingga sering kurang mendapat perhatian dibandingkan dengan pembangunan fisik lainnya. Oleh karena itu, dari masa ke masa persoalan pengembangan sumberdaya manusia tidak pernah terselesaikan.

A. Permasalahan

Dalam konteks pembangunan jangka panjang Kabupaten Mimika, maka yang dimaksudkan dengan pengembangan sumberdaya manusia adalah berkaitan dengan masalah-masalah mental spiritual, derajat kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta rendahnya profesionalisme aparat. Permasalahan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Rendahnya kualitas iman dan taqwa masyarakat;
2) Tingginya angka kematian ibu hamil dan balita;
3) Tingginya angka penderita HIV/AIDS;
4) Rendahnya derajat kesehatan masyarakat;
5) Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat;
6) Rendahnya pendapatan masyarakat;
7) Rendahnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
8) Rendahnya motivasi dan kesadaran masyarakat terhadap nilai
9) budaya dan kearifan lokal;
10) Tingginya penyakit sosial masyarakat (miras dan narkoba);
11) Terbatasnya peluang lapangan kerja produktif;
12) Tingginya resiko rawan pangan;
13) Tingginya angka migrasi Unskill ke Timika.

B. Sasaran

Sehubungan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi sebagaimana diuraikan di atas, maka sasaran pembangunan jangka panjang peningkatan kualitas sumberdaya manusia adalah:

1) Meningkatnya kualitas iman dan taqwa;
2) Menurunnya angka kematian ibu hamil dan balita;
3) Menekan lajunya angka penderita HIV/AIDS;
4) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
5) Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
6) Meningkatnya pendapatan masyarakat;
7) Meningkatnya pemahaman dan penguasaan iptek;
8) Meningkatnya motivasi dan kesadaran masyarakat terhadap nilai budaya dan kearifan lokal;
9) Menurunnya angka penyakit sosial masyarakat;
10) Meningkatnya peluang lapangan kerja produktif;
11) Menurunnya resiko rawan pangan;
12) Menurunnya angka migrasi unskiill (tidak trampil)

C. Arah kebijakan

Sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi dan sasaran pembangunan jangka panjang Kabupaten Mimika dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang akan dicapai, maka ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1) Sektor Agama;
    a. Mengembangkan kesadaran umat beragama dalam rangka pembangunan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    b. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan umat beragama;
    c. Meningkatkan dan mengembangkan toleransi antar umat ber- agama;
    d. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana peribadatan;
    e. Mengembangkan dan mendukung aktifitas organisasi keagamaan yang bekerja pada masyarakat;

2) Sektor Kesehatan;
    a. Meningkatkan pemahaman terhadap kesadaran pemeliharaan kehamilan dan persalinan;

b. Meningkatkan gizi ibu hamil dan balita;
c. Meningkatkan dan mengembangkan pos pelayanan terpadu;
d. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat;
e. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
f. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat;
g. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;
h. Meningkatkan dan mengembangkan serta menempatkan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan;
i. Meningkatkan dan mengembangkan sumber-sumber pangan dan gizi masyarakat;
j. Meningkatkan upaya-upaya terhadap pemberantasan penyakit menular (HIV/AIDS) dan penyakit endemik;
k. Pencegahan pengaruh miras dan narkoba dalam masyarakat Mimika;

3) Sektor Pendidikan;
   a. Mengembangkan pendidikan anak usia dini;
   b. Meningkatkan angka partisipasi belajar anak usia sekolah;
   c. Mengembangkan sistem pendidikan untuk mengatasi angka putus sekolah dan menuntaskan buta aksara hingga ke daerah terpencil;
   d. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai;
4) Sektor Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja;
   a. Mengembangkan dan menciptakan kesempatan kerja;
5) Sektor Pengembangan Investasi;
   a. Mengembangkan dan menciptakan iklim yang kondusif dalam pengembangan peluang usaha dan investasi;
   b. Mengembangkan akses masyarakat terhadap sumber-sumber keuangan;
   c. Mengembangkan regulasi proteksi terhadap sumber-sumber pendapatan masyarakat lokal;
   d. Mengembangkan sumber-sumber pendapatan masyarakat melalui peningkatan nilai tambah sumberdaya yang dikuasai;
6) Sektor Hukum;
   a. Meningkatkan kesadaran hukum dan kehidupan demokrasi masyarakat;

b. Mencegah terjadinya konflik horizontal dan meningkatkan rasa keamanan dan ketertiban masyarakat.

7) Sektor Iptek dan Statistik;
   a. Mengembangkan dan memperkenalkan ilmu pengetahuan dan teknologi sejak dini;
   b. Meningkatkan dan mengembangkan teknologi informatika dalam berbagai aktifitas masyarakat;
   c. Mengembangkan sumber data informasi berbasis teknologi;
   d. Mengembangkan inovasi iptek pada masyarakat;
8) Sektor Budaya, Seni dan Olahraga;
   a. Meningkatkan dan mengembangkan karakter masyarakat (caracter building);
   b. Peningkatan pembinaan organisasi, seni dan olahraga.

5.2.2. Mewujudkan Kualitas Sistem Pelayanan Prima

Sebagaimana dikemukakan dalam modal dasar pembangunan jangka panjang Kabupaten Mimika adalah letak strategis daerah yang merupakan pintu gerbang Kawasan Pegunungan Tengah dan Selatan Papua serta berada pada suatu konstalasi strategis secara regional, nasional maupun internasional, maka ke depan Kabupaten Mimika dapat memposisikan diri sebagai pusat pelayanan jasa dan industri global terdepan di Tanah Papua.

Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah nyata yang sistematis dan strategis sehingga Kabupaten Mimika dapat berperan sebagai pusat pelayanan jasa dan industri global.

a. Permasalahan

Sehubungan dengan upaya-upaya pencapaian misi tersebut diatas, maka beberapa permasalahan umum yang dihadapi adalah terbatas dan belum berkembangnya suatu sistem pelayanan prima, dan iklim investasi yang kondusif, terbatasnya fasilitas, dan regulasi maupun minimnya ketersediaan sumberdaya manusia. Secara rinci permasalahan-permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Belum berkembangnya sistem pelayanan prima publik yang memiliki standar pelayanan minimum;
2) Iklim investasi yang tidak kondusif;

3) Terbatasnya sarana dan prasarana kewilayahan;

4) Belum jelasnya pemetaan Hak ulayat masyarakat.

b. Sasaran

Guna menyelesaikan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka sasaran pembangunan jangka panjang dalam mewujudkan sistem pelayanan prima di Kabupaten Mimika adalah sebagai berikut:

1) Terlaksananya sistem pelayanan prima;

2) Terciptanya iklim investasi yang kondusif;

3) Tersedianya sarana dan prasarana kewilayahan;

4) Terciptanya pemetaan hak ulayat masyarakat.

c. Arah Kebijakan

Dalam rangka penyelesaian permasalahan dan upaya-upaya pencapaian sasaran dalam mewujudkan sistem pelayanan prima di Kabupaten Mimika, maka ditetapkan arah pembangunan jangka panjang sebagai berikut:

1) Sektor Aparatur Pemerintahan;

a. Mengembangkan regulasi yang mendukung penerapan sistem pelayanan prima;

b. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan prima;

2) Sektor Pengembangan Investasi;

a. Meningkatkan upaya-upaya jaminan keamanan bagi pengembangan investasi;

b. Mengembangkan kepastian penggunaan ruang dan sumberdaya dalam berinvestasi;

c. Meningkatkan perilaku aparat pemerintah daerah yang mendukung upaya-upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif;

d. Mengembangkan industri yang berbasis pada pengelolaan sumberdaya alam yang tersedia;

3) Sektor Kewilayahan dan Kekuatan Rakyat;

a. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan pra- sarana transportasi untuk membuka akses kewilayahan;

4) Sektor Pelayanan Infrastruktur Dasar;

a. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasa- rana energi listrik;

b. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasa- rana air bersih;

c. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasa- rana kebersihan dan sanitasi lingkungan permukiman;

d. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasa- rana telekomunikasi.

5.2.3. Mewujudkan Tata Kepemerintahan yang Baik

Salah satu fungsi pemerintahan adalah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Sejak era reformasi paradigma kepemerintahan lebih menekankan pada melayani masyarakat ketimbang dilayani oleh masyarakat. Dalam kaitan itu, maka penerapan tata kepemerintahan yang baik merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Mimika dalam mengembangkan paradigma baru pemerintahan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya nyata dan konsisten dalam perubahan perilaku birokrat, kelembagaan dan struktur pemerintahan serta alokasi anggaran pembangunan daerah yang lebih berpihak kepada masyarakat.

a. Permasalahan

Berkenaan dengan upaya-upaya penciptaan tata kepemerintahan yang baik di Kabupaten Mimika, ditemukan beberapa permasalahan pokok yang dihadapi antara lain masih adanya perilaku aparat yang masih mempertahankan paradigma lama, struktur dan kelembagaan pemerintahan yang tidak proporsional dan terjadi inefisiensi anggaran sehingga tidak memperlihatkan keberpihakan kepada masyarakat. Permasalahan pokok dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia aparatur pemerintahan;
2) Rendahnya sarana dan prasarana pemerintahan;
3) Rendahnya kinerja birokrasi dalam pelayanan publik;
4) Kelembagaan pemerintahan yang kaya struktur dan miskin fungsi;
5) Belum adanya konsep strategi implementasi pembangunan;
6) Alokasi anggaran pembangunan daerah yang cenderung kurang berpihak kepada masyarakat;
7) Belum terlaksananya sistem manajemen kependudukan;
8) Belum terciptanya sistem carrier planning aparatur pemerintahan;
9) Rendahnya tingkat kesejahteraan aparatur pemerintahan.

b. Sasaran

Dalam rangka penyelesaian permasalahan tata kepemerintahan sebagaimana diuraikan di atas, maka sasaran pembangunan jangka panjang Kabupaten Mimika adalah:

1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia aparatur pemerintahan;
2) Meningkatnya sarana dan prasarana pemerintahan;
3) Meningkatnya kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik;
4) Terbentuknya kelembagaan pemerintahan daerah yang miskin struktur dan kaya fungsi;
5) Adanya strategi implementasi pembangunan;
6) Meningkatnya alokasi anggaran pembangunan daerah yang lebih berpihak kepada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat;
7) Terciptanya sistem manajemen kependudukan;
8) Terciptanya sistem carrier planning aparatur pemerintahan;
9) Meningkatnya kesejahteraan aparatur pemerintahan.

c. Arah Kebijakan

Dalam rangka pencapaian misi mewujudkan tata kepemerin- tahan yang baik, maka dilakukan upaya-upaya penyelesaian ma- salah dan pencapaian sasaran yang dirumuskan dalam arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Mimika sebagai berikut:

1) Sektor Aparatur Pemerintahan;

1. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia aparatur pemerintahan;
2. Mengembangkan sistem tata kepemerintahan sesuai prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance);
3. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pemerintahan;
4. Meningkatkan kemitraan dalam mendukung pelayanan publik;
5. Restrukturisasi kelembagaan pemerintahan daerah pada semua tingkatan Pemerintahan;
6. Mengembangkan analisa jabatan sehingga sesuai dengan kebutuhan kelembagaan pemerintah pada semua tingkatan pemerintahan;
7. Mengembangkan unit-unit pelaksanaan fungsional untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik;

8. Meningkatkan dan mengembangkan sistem mikro spasial;
9. Meningkatkan dan mengembangkan sistem makro sektoral;
10. Meningkatkan dan mengembangkan sinkronisasi sistem sumberdaya manusia;
11. Mengembangkan sistem penganggaran yang berbasis kinerja dengan memperhatikan standar pelayanan minimum;
12. Meningkatkan proporsi alokasi anggaran yang lebih berpihak pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat;
13. Mengembangkan sistem hibah secara penuh untuk alokasi dana ke distrik dan kampung sesuai dengan variabel anggaran.
14. Meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintahan.

5.2.4. Mewujudkan Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam Secara Selektif, Kompetitif dan Berkesinambungan

Tanah Papua pada umumnya dan Kabupaten Mimika khususnya memiliki sumberdaya alam yang berlimpah. Kekayaan tersebut seharusnya dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mimika. Oleh karena itu perlu adanya cara-cara pemanfaatan sumberdaya alam secara selektif, kompetitif dan berkesinambungan.

a. Permasalahan

Secara umum permasalahan pembangunan yang dihadapi adalah rendahnya kemampuan pengelolaan sumberdaya alam sehingga mengakibatkan degradasi lingkungan, punahnya flora dan fauna endemik serta hilangnya plasma nutfah. Oleh karena itu, upaya-upaya pengelolaan sumberdaya alam adalah salah satu upaya dalam mengembangkan potensi yang tersedia. Beberapa permasalahan pengelolaan sumberdaya alam di Kabupaten Mimika dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Rendahnya ketahanan pangan masyarakat;
2. Rendahnya kualitas pengelolaan sumberdaya alam;
3. Tingginya ancaman terhadap kepunahan sumberdaya hayati;
4. Rendahnya efek multiplier terhadap perekonomian daerah;
5. Rendahnya investasi pemanfaatan potensi sumberdaya alam;
6. Belum terciptanya konsep One District One Product;
7. Rendahnya pemanfaatan sumberdaya alam yang memberikan Nilai tambah tinggi.

2. Sasaran

Sehubungan dengan permasalahan-permasalahan diatas dan dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tentang pengembangan potensi sumberdaya alam di Kabupaten Mimika, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat;
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya alam;
3. Terlindunginya sumberdaya hayati;
4. Meningkatnya efek multiplier terhadap peningkatan perekonomian daerah;
5. Meningkatnya investasi pemanfaatan potensi sumberdaya alam;
6. Terlaksananya penerapan konsep One District One Product;
7. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya alam yang memberikan Nilai Tambah Tinggi.

3. Arah Kebijakan

Untuk mengembangkan potensi sumberdaya alam di Kabu- paten Mimika dan juga dalam rangka penyelesaian permasalahan- permasalahan yang dihadapi serta pencapaian sasaran yang d- iharapkan, maka ditetapkan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Mimika sebagai berikut:

1) Sektor Tenaga Kerja;

a. Meningkatkan pemahaman terhadap pengelolaan SDA;

2) Sektor Tata Ruang:

a. Mengembangkan pemetaan sumberdaya alam dalam rangka mendukung pelaksanaan obligasi daerah;

3) Sektor Ketahanan Pangan;

a. Meningkatkan sumber-sumber lokal ketahanan pangan masyarakat;

b. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sumber- daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbaharui;

c. Mengembangkan sistem pengawasan berbasis masya- rakat secara berkesinambungan;

d. Meningkatkan dan mengembangkan sistem informasi k- kayaan sumberdaya hayati;

e. Mengembangkan kawasan-kawasan konservasi dalam rangka pelestarian sumberdaya hayati (plasma nutfah);

f. Meningkatkan dan mengembangkan konsep One Distrik One Product.

g. Peningkatan pengelolaan SDA yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi.

5.2.5. Mewujudkan Penegakan Hukum, Peradilan dan HAM

Pengembangan bidang hukum, peradilan dan Hak Azasi Manusia (HAM) di Kabupaten Mimika merupakan bagian penting dalam pemba- ngunan jangka panjang untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban serta menciptakaan rasa keadilan dan kepastian hukum di masyarakat. Berkaitan dengan penegakan hukum, peradilan dan HAM, maka perlu adanya suatu persepsi dan platform yang sama diantara pelaku pembangunan (stakeholders). Oleh karena itu, penegakan hukum, peradilan dan HAM harus dijadikan sebagai landasan utama pembangunan Kabupaten Mimika ke depan.

a. Permasalahan

Berkaitan dengan upaya-upaya penegakan hukum, peradilan dan HAM, maka beberapa permasalahan pokok yang dihadapi antara lain:

1. Tingginya tingkat kesenjangan dalam masyarakat;
2. Rendahnya rasa keadilan di dalam masyarakat;
3. Tingginya pelanggaran Hak Azasi Manusia;
4. Rendahnya rasa kebersamaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Sasaran

   Untuk mewujudkan misi penegakan hukum, peradilan dan HAM dalam pembangunan jangka panjang di Kabupaten Mimika, maka sasaran yang akan dicapai adalah:

   1. Menurunnya tingkat kesenjangan dalam masyarakat;
   2. Meningkatnya rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat;
   3. Menurunnya pelanggaran Hak Azasi Manusia;
   4. Meningkatnya rasa kebersamaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

3. Arah Kebijakan

   Dalam rangka pencapaian misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Mimika untuk mewujudkan penegakan hukum, peradilan dan HAM, maka ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

   a. Sektor Hukum;

1. Mengembangkan sistem peradilan yang memberikan kepastian hukum;

2. Mengembangkan sistem peradilan yang mampu mengadopsi sistem peradilan adat;
3. Meningkatkan dan mengembangkan pemahaman ter- hadap HAM;
4. Mengembangkan organisasi sosial kemasyarakatan yang berperan dalam penegakan HAM;
5. Menciptakan dan mengembangkan rasa kebersamaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat;

Untuk memperkuat inovasi daerah di Kabupaten Mimika ke depan, strategi yang diterapkan harus berlandaskan visi dan mewujudkan Mimika sebagai pusat pelayanan jasa dan industri global yang berwawasan lingkungan. Strategi penguatan inovasi dapat dimulai dengan pendekatan mikro spasial yang fokus pada pemberdayaan kampung dan distrik melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat lokal secara langsung. Pada skala yang lebih besar, pendekatan makro sektoral harus mengoptimalkan potensi sumber daya alam melalui pengelolaan yang kompetitif dan berkelanjutan, menciptakan efek multiplier yang mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara luas.

Selanjutnya, pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi fondasi penting dalam mendukung infrastruktur dan sistem produksi yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan pasar, khususnya bagi masyarakat asli Papua. Inovasi teknologi juga harus diperkuat dengan memperkenalkan teknologi sejak dini, membangun sistem data berbasis teknologi, dan mendorong terciptanya iklim inovasi dalam berbagai sektor. Dalam mendukung tata kelola yang baik, penguatan regulasi, efisiensi birokrasi, serta pengembangan kapasitas aparatur menjadi prioritas agar tercipta sistem pelayanan prima yang kondusif untuk investasi dan pengelolaan potensi lokal. Semua ini harus dilakukan dengan prinsip keberlanjutan, menghormati hak ulayat, dan menjaga keseimbangan ekosistem untuk mewujudkan Mimika sebagai daerah yang maju, adil, dan sejahtera.

BAB 6
INDIKATOR DAN PROGRAM



Bab.6

INDIKATOR DAN PROGRAM

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD yaitu tahun 2029 dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah Kabupaten Balangan secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Indikator kinerja daerah ini dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Dalam melihat kinerja pembangunan suatu daerah, pada dasarnya digambarkan melalui tingkat capaian sasaran dan tingkat efisiensi serta efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan RPJMD. Dengan demikian, penetapan indikator kinerja ini diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah sehingga harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

Tabel 6. 1. Sasaran Dan Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Mimika

No	Prioritas Pembangunan	Indikator Sasaran Prioritas	Hasil Program (outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)	Program	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	persentase pelayanan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah sarana, Prasarana dan Utilitas sekolah yang dibangun Jumlah Siswa yang menerima perlengkapan Jumlah Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan umlah perlengkapan Siswa jumlah siswa mengikuti ujian Jumlah guru yang mengikuti Pelatihan	Program pengelolaan pendidikan	pendidikan	Dinas Pendidikan
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	persentase pelayanan pendidikan	Jumlah orang yang terampil tentang kurikulum muatan lokal pendidikan dasar Jumlah orang yang terampil tentang kurikulum muatan lokal pendidikan dasar	Program Pengembangan kurikulum	Pendidikan	Dinas Pendidikan
2	Pengembangan Infrastruktur Pendidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase mutu pendidik dan tenaga pendidik	Jumlah orang yang terampil tentang kurikulum muatan lokal pendidikan dasar	Program pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidikan	Dinas pendidikan

No	Prioritas Pembangunan	Indikator Sasaran Prioritas	Hasil Program (outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)	Program	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase tersedia fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standard Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Sistem Informasi Kesehatan	Persentase Jumlah Puskesmas yang akan di rehabilitasi dalam 1 tahun Persentase ketersediaan Alkes sesuai standard di fasilitas pelayanan Kesehatan Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase jasa pelayanan Umum yang dibayarkan kepada petugas kesehatan di Puskesmas dan jaringannya Cakupan penemuan dan pengobatan kasus TB(case detection rate/cdr) Persentas Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Jumlah Dokumen Data Informasi Kesehatan	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Kesehatan	Dinas kesehatan RSUD
		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberian Izin, Pengendalian Perizinan Dan Pembinaan	Jumlah tenaga medis dan non medis yang akan dibayarkan jasanya	Program peningkatan kapasitas sumberdaya	Kesehatan	RSUD Dinas Kesehatan

No	Prioritas Pembangunan	Indikator Sasaran Prioritas	Hasil Program (outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)	Program	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan dan Pendayagunaan SDM Upaya Unutuk Meningkat kan Mutu Dan Kompetisi Teknis SDM Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan Yang memiliki izin Praktik dan tenaga kesehatan yang akan diberikan izin praktik	manusia kesehatan		
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa/ Kelurahan Siaga Aktif Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat Persentase Posyandu Aktif	Persentase Desa/ Kelurahan Siaga Aktif Jumlah Kecamatan yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat Persentase Posyandu Akti	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	kesehatan	RSUD Dinas Kesehatan
4	Peningkatan Kualitas Infrastruktur	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air yang dbangun dalam kondisi baik	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sumber Daya Air yang di implementasikan	Program pengelolaan sumberdaya air (SDA)	Pelayanaan umum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dinas PUPR

No	Prioritas Pembangunan	Indikator Sasaran Prioritas	Hasil Program (outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)	Program	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air yang di bangun dalam kondisi baik	Jumlah embung yang dibangun dalam kondisi baik Panjang Kanal Banjir yang dipelihara dalam kondisi baik Luas Daerah Irigasi Rawa yang dipelihara			
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang dilayani Air Minum	Dokumen Perencanaan Teknis Cipta Karya dan Jasa Konstruksi yang di implementasikan Jumlah Sambungan Rumah (SR) yang dibangun dalam kondisi baik Jumlah unit SPAM yang dipelihara dengan baik Jumlah unit SPAM yang dikelola dengan baik	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Pekerjaan umum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Persampahan yang terbangun	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman yang di implementasikan	Program pengembangan dan pengelolaan sistem persampahan regional	Pekerjaan umum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Layak dan Aman	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman yang di implementasikan	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Pekerjaan umum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

No	Prioritas Pembangunan	Indikator Sasaran Prioritas	Hasil Program (outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)	Program	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jaringan Drainase yang dibangun dalam kondisi baik	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sumber Daya Air yang di implementasikan Panjang Sistem Drainase Perkotaan yang dipelihara	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Pekerjaan umum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten	Jumlah dokumen perencanaan teknis Binamarga yang di implementasikan Luas lahan/tanah yang dibebaskan Jumlah dokumen perencanaan teknis Binamarga yang di implementasikan Panjang jalan yang ditingkatkan	Program penyelenggaraan jalan	Pekerjaan umum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
5	Kesejahteraan Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil yang mengikuti pelatihan	Jumlah tenaga terampil yang mengikuti pelatihan	Program pengembangan jasa kontruksi	Pekerjaan umum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase PSU Perumahan yang layak	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman yang di implementasikan Panjang PSU Perumahan terbangun	Program peningkatan prasarana, sarana dan rutinitas umum (PSU)	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

No	Prioritas Pembangunan	Indikator Sasaran Prioritas	Hasil Program (outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)	Program	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten yang dilaksanakan Terlaksananya penyediaan dan pengawasan angkutan umum dalam kabupaten	Jumlah CCTV yang diadakan, dipasang dan dipelihara Jumlah pengamanan dan pengawasan yang dilaksanakan	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Transportasi	Dinas Perhubungan
		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan lokal	Persentase Pelabuhan Pengumpan Lokal yang dibangun Persentase Pelabuhan Pengumpan Pengumpan Lokal yang dipelihara	Program pengelolaan pelayaran	Transportasi	Dinas Perhubungan
6	Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Gapoktan/Poktan Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan/Pakan Ternak Jumlah Produksi Perkebunan dan Hortikultura	Jumlah Alat-alat Pertanian yang diadakan Peningkatan Kapasitas SDM Usaha Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian Jumlah Pelayanan Ternak (Inseminasi Buatan, Sapi Bunting, Sapi Lahir) Jumlah Pengadaan Benih/Bibit Ternak	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura

No	Prioritas Pembangunan	Indikator Sasaran Prioritas	Hasil Program (outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)	Program	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	jumlah Sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan Buah Lokal	Jumlah Pengadaan Hijauan/Pakan Ternak Jumlah Bibit Tanaman Hortikultura dan Perkebunan Luas Areal Pengembangan Terlaksananya Pelepasan Varietas Tanaman Buah Unggul Lokal			
		Pengembangan Prasarana Pertanian Pembangunan Prasarana Pertanian	jumlah prasarana dalam perawatan jumlah prasarana yang terbangun	Jumlah dokumen yang dihasilkan Luas Areal Kebun Induk	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Perkebunan	Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Ternak yang Dilayani Tersedianya Tenaga Medik dan Paramedik Veteriner Jumlah Dokumen Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Laporan Pegendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis Jumlah Laporan Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular Jumlah Pelayanan Medik dan Paramedik Veteriner Jumlah Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan Jumlah Laporan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Peternakan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Prioritas Pembangunan	Indikator Sasaran Prioritas	Hasil Program (outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)	Program	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	luasan Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	luas lahan yang tertangani	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan/BPP Jumlah Kelompok Tani Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Jumlah Kelompok Tani	Program penyuluhan pertanian	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap yang di bangun Jumlah Kelompok Nelayan yang di Bina dan dikukuhkan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perikanan Tangkap yang tersedia Jumlah Kelompok Nelayan yang menerima bantuan hibah Jumlah Kelompok Nelayan yang mendapatkan Pembinaan	Program pengelolaan perikanan tangkap	Perikanan	Dinas Perikanan
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang dibina dan bersetifikat Jumlah Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan yang dibangun	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang dibina dan bersetifikat Jumlah Dokumen data dan Informasi Budidaya yang tersedia Jumlah Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan yang dibangun	Program pengelolaan perikanan budidaya	Perikanan	Dinas Perikanan

No	Prioritas Pembangunan	Indikator Sasaran Prioritas	Hasil Program (outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)	Program	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan yang dibangun			
7	Kewirausahaan dan Lapangan Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi yang Terlaksana	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan berdasarkan Klaster Kompetensi	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Pelayanan terpadu	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas PM dan PTSP
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Mediasi yang dilaksankan	Jumlah Mediasi yang dilaksanakan	Program hubungan industrial	Pelayanan terpadu	Dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu Dinas PM dan PTSP
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah terlaksananya pembinaan dan pengendalian sarana distribusi perdagangan jumlah terlaksananya pembinaan dan pengendalian sarana distribusi perdagangan	jumlah fasilitas sarana ditribusi perdagangan jumlah pembinaan dan pengedalian pengelola sarana Distribusi perdagangan	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Perdagangan	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	jumlah terlaksannya promosi penggunaan produk dalam negeri tingkat kabupaten	jumlah peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Perdagangan	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	jumlah dokumen rencana pembangunan industri	jumlah sarana prasarana industri yang di bangun peningkatan Jumlah SDM Industri	Program perencanaan dan pembangunan industri	Perindustrian	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Prioritas Pembangunan	Indikator Sasaran Prioritas	Hasil Program (outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)	Program	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	Jaminan Perlindungan Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang menerima pelayanan	Jumlah Penyandang Masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapat bantuan layanan Rujukan	Program rehabilitasi sosial	Social	Dinas Sosial
		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Terlantar yang Dipelihara Jumlah Fakir Miskin Yang Menerima Bantuan	Jumlah Anak Terlantar yang di Rujuk Jumlah PKH Jumlah Fakir Miskin Yang Menerima Bantuan	Program perlindungan dan jaminan sosial	Social	Dinas Sosial
9	Tata Kelola Pemerintahan	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah peningkatan keamaan digital yang dibentuk di sektor pemerintah daerah	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Jumlah laporan	Pembuatan dokumen Jumlah Buku Jumlah aplikasi Jumlah buku Jumlah laporan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Perencanaan	Badan perencanaan dan pembangunan daerah

No	Prioritas Pembangunan	Indikator Sasaran Prioritas	Hasil Program (outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)	Program	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah laporan Persentase Capaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Persentase Capaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen Jumlah OPD Jumlah dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang di Asistensi Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA yang di Asistensi Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Program Koordinasi dan Sinkronissi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan	Badan perencanaan dan pembangunan daerah

No	Prioritas Pembangunan	Indikator Sasaran Prioritas	Hasil Program (outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)	Program	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun Jumlah Dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun Jumlah Dokumen RANPERDA APBD Dan Penyusunan RANPERDA KDH Tentang Penjabaran APBD yang telah disusun Jumlah Dokumen RANPERDA Perubahan APBD Dan Penyusunan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan	Badan pengelolaan Keuangan dan aset daerah

No	Prioritas Pembangunan	Indikator Sasaran Prioritas	Hasil Program (outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)	Program	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Penunjang Urusan kewenagan pengelola keuangan daerah Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disusun Jumlah Tenaga Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengelolaan dana Bagi hasil kabupaten/kota Jumlah Laporan Pengelolaan dana darurat dan mendesak Jumlah Dokumen RANPERDA Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang disusun Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan yangdisusun			

No	Prioritas Pembangunan	Indikator Sasaran Prioritas	Hasil Program (outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)	Program	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Standar Harga yang disusun Jumlah Dokumen inventarisasi barang milik daerah yang disusun Jumlah Sertifikat Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang disusun Jumlah Dokumen Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindah tanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah yang disusun	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Keuangan	Badan pengelola keuangan dan asset daerah
		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Analisa dan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Orang yang Paham Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Objek Pajak yang Terdata dan Terdaftar Persentase Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Persentase Penetapan Wajib Pajak Daerah Persentase Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pajak dan Retribusi daerah	Badan Pendapatan Daerah

No	Prioritas Pembangunan	Indikator Sasaran Prioritas	Hasil Program (outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)	Program	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Persentase Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Mutasi dan Promosi ASN Pengembangan Kompetensi ASN Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tercapainya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Terlaksananya Mutasi, Pangkat dan Promosi ASN Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Formasi Yang Disusun Sesuai Kebutuhan Jumlah Peserta Yang Lulus Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Jumlah PNS Yang Pensiun dan Diberhentikan Jumlah Pelaksanaan Kegiatan HUT Korpri, PORNAS dan Korpri Jumlah ASN Yang Menerima SK Kenaikan Pangkat, SK Pencantuman Gelar dan SK Peninjauan Masa Kerja Jumlah ASN Yang Mengikuti Seleksi Terbuka dan Uji Kompetensi Jumlah ASN Yang Menerima Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Jumlah Pelaksanaan Teknis Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai Secara Online/Aplikasi	Program Kepegawaian Daerah	Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

No	Prioritas Pembangunan	Indikator Sasaran Prioritas	Hasil Program (outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)	Program	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah PNS Yang Menerima Satya Lencana Karya Satya X, XX dan XXX Tahun Jumlah ASN Yang Mengikuti Sumpah Janji Serta Penyelesaian Pengurusan Karpeg, Karis/Karsu Dan Taspen Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS			

BAB 7
PROGRAM DAN RENCANA AKSI



Bab.7

PROGRAM DAN RENCANA AKSI

Rencana aksi (*action plan*) penguatan sistem inovasi daerah Kabupaten Mimika tahun 2024-2029 adalah sehimpunan rencana kegiatan yang lebih terperinci untuk menerjemahkan sasaran, strategi dan arah kebijakan penguatan sistem inovasi daerah Kabupaten Mimika tahun 2024-2029 (Bab V) yang telah diindikasikan dalam fokus dan program prioritas penguatan sistem inovasi daerah Kabupaten Mimika tahun 2024-2029 (Bab VI).

Sasaran, strategi dan arah kebijakan penguatan sistem inovasi daerah Kabupaten Mimika tahun 2024-2029 itu sendiri dirumuskan berdasarkan kondisi saat ini penguatan sistem inovasi daerah (Bab II) yang dilengkapi oleh tantangan dan peluang penguatan sistem inovasi daerah (Bab III), dan kemudian dilanjutkan dengan penyusunan kondisi penguatan sistem inovasi daerah yang diinginkan hingga tahun 2029 (Bab IV).

Di dalam ini, rencana aksi penguatan sistem inovasi daerah Kabupaten Mimika tahun 2024-2029 disajikan dalam bentuk tabulasi yang terdiri dari komponen-komponen berikut:

1. Sasaran.
2. Arah Kebijakan.
3. Indikator Kinerja (Output).
4. Capaian Kinerja.
5. Program dan Kegiatan.
6. Institusi Penanggung Jawab.

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 7.1.

Tabel 7. 1. Rencana Aksi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Mimika 2024-2029

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	RENCANA AKSI	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah	Pengembangan infrastruktur inovasi daerah	Terbentuknya pusat inovasi dan kolaborasi daerah	Pembangunan Pusat Inovasi Daerah	Jumlah pusat inovasi yang dibangun dan berfungsi	- Penyusunan desain pusat inovasi - Pembangunan fisik pusat inovasi - Penyediaan fasilitas pendukung	Badan perencanaan dan pembangunan daerah
2	Penguatan SDM Inovasi	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia inovatif	Terwujudnya SDM yang kompeten dan inovatif dalam mendukung pembangunan daerah	Pelatihan dan Pengembangan SDM Inovasi	Jumlah peserta pelatihan inovasi dan jumlah SDM dengan sertifikasi kompetensi	- Penyelenggaraan pelatihan inovasi berbasis teknologi - Kerjasama dengan lembaga pendidikan dan riset	Badan perencanaan dan pembangunan daerah
3	Kolaborasi dan Kemitraan Inovasi	Penguatan kemitraan antara pemerintah dan swasta	Meningkatnya jumlah kolaborasi pemerintah dengan swasta dan perguruan tinggi dalam inovasi	Program Kemitraan Inovasi	Jumlah kemitraan yang terjalin dan proyek inovasi hasil kemitraan	- Identifikasi mitra potensial - Penyusunan MoU dengan mitra - Implementasi program kolaborasi	Badan perencanaan dan pembangunan daerah

4	Penyelarasan Kebijakan Inovasi	Sinkronisasi kebijakan inovasi dengan prioritas nasional dan global	Terwujudnya kebijakan inovasi daerah yang sesuai dengan tren dan kebutuhan global	Program Penyusunan Kebijakan Inovasi	Jumlah kebijakan inovasi yang dihasilkan dan diadopsi	- Kajian kebijakan inovasi berbasis bukti - Sinkronisasi kebijakan daerah dengan kebijakan nasional dan global	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
5	Pemanfaatan Teknologi dan Data	Optimalisasi teknologi dalam layanan inovasi	Meningkatkan pemanfaatan teknologi dan data dalam mendukung inovasi daerah	Digitalisasi dan Integrasi Data Inovasi	Persentase penggunaan teknologi dalam proses inovasi	- Pembangunan platform digital inovasi - Integrasi data inovasi antar OPD - Pelatihan penggunaan teknologi	Dinas Komunikasi dan Informatika
6	Penguatan Penelitian dan Riset	Meningkatkan kapasitas riset dan penelitian inovasi	Tersedianya riset berkualitas tinggi yang relevan dengan pembangunan daerah	Program Penelitian dan Riset Inovasi	Jumlah riset yang dihasilkan dan diterapkan	- Peningkatan anggaran riset - Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian nasional	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
7	Pemberdayaan Masyarakat Inovatif	Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam inovasi	Masyarakat berkontribusi dalam implementasi	Program Pengembangan Inovasi Masyarakat	Jumlah inovasi berbasis masyarakat	- Pendampingan komunitas inovasi - Pemberian insentif bagi inovator lokal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

			inovasi daerah				
8	Pengembangan Produk Lokal Inovasi	Peningkatan nilai tambah produk lokal melalui inovasi	Meningkatnya daya saing produk lokal di pasar regional dan nasional	Program Pengembangan Produk Lokal Inovasi	Jumlah produk lokal inovatif yang dipasarkan	- Fasilitasi pelatihan inovasi produk lokal - Promosi produk lokal inovasi ke pasar nasional dan internasional	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
9	Penyediaan Insentif/penghargaan Inovasi	Meningkatkan dukungan untuk inovasi	Tersedianya insentif bagi pelaku inovasi dan riset	Program Insentif dan Pendanaan Inovasi	Jumlah insentif yang diberikan dan jumlah inovasi yang dibiayai	- Penyusunan regulasi insentif/ penghargaan kepada inovator - Pemberian dana hibah kepada inovator	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
10	Pemantauan dan Evaluasi Inovasi	Meningkatkan efektivitas program inovasi	Tercapainya indikator keberhasilan inovasi daerah	Program Monitoring dan Evaluasi Inovasi	Persentase program inovasi yang berhasil sesuai target	- Penyusunan indikator kinerja inovasi - Pelaksanaan evaluasi tahunan	Inspektorat dan Bappeda

PEMERINTAH DAERAH
K A B U P A T E N M I M I K A
TAHUN ANGGARAN 2024

